

Dokumen ini tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mohon gunakan bookmark untuk menuju versi Bahasa Inggris.

Penerjemahan hanya untuk referensi.

This document is available in Indonesian and English. Please use Bookmark to view English version.

Translation for reference only.

**Revisi**

# **Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)**

**Tahun 2015**



**J TRUST BANK**

**Jakarta, 30 September 2016**

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum", dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006", serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPHP tanggal 29 April 2013 perihal "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum".

Compliance & Legal Division (CPD) - 30 September 2016

## Daftar Isi

### Revisi

#### Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

	Halaman
Bab I   Pendahuluan .....	1
Bab II   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi .....	14
Bab III   Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ....	45
Bab IV   Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern...	75
Bab V   Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.....	98
Bab VI   Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya.....	113
Bab VII   Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	143
Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG Bank..	146
Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut ( <i>Action Plan</i> ) GCG.....	155

FAP

## BAB I PENDAHULUAN

### Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut "GCG") merupakan cara atau mekanisme yang diimplementasikan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya sebagai bagian utama dari "governance structure", dengan didukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*governance process*) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal ini merupakan komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam menerapkan pelaksanaan GCG dengan mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu hasil (*governance outcome*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip/asas GCG dengan menjalankan praktik bisnis perbankan yang sehat, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua hal penting dalam penerapan GCG, yaitu etika dan peraturan. Etika (*ethical driven*) merupakan kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dimana perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory driven*).

Etika dan perilaku merupakan pilar terpenting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi Perusahaan yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali. Terdapat tiga pilar yang saling berhubungan dalam penerapan GCG, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Penerapan regulasi serta prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dan juga kami senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan meliputi :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum,
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Ketentuan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan standar dan praktik *Corporate Governance* pada negara-negara ASEAN, maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlandaskan pada prinsip-prinsip/asas GCG sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan Bank yang profesional serta kemampuan Bank mengelola risiko, serta transparansi pada masyarakat.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen mengedepankan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah (*customer*), pemegang saham (*shareholder*), serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, dengan melaksanakan prinsip-prinsip/asas GCG di setiap kegiatan usaha dalam upaya membangun organisasi Bank yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis Bank yang lebih baik. Hal ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan "Visi dan Misi" sebagai langkah strategis dan fundamental Bank yang telah ditetapkan dan disosialisasikan secara rutin dan menyeluruh melalui kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sehubungan dengan perubahan kepemilikan bank berikut perubahan nama dan logo bank dari PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, maka juga telah diadakan pembaruan dan penetapan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

"Menjadi Partner Finansial yang terpercaya yang terus memberikan inovasi"

Misi :

- "Terus menciptakan lingkungan bekerja yang mendukung orang-orang bermotivasi kerja tinggi"
- "Terus memberikan pengalaman perbankan yang baik melalui solusi yang ditujukan untuk masing-masing nasabah"

Visi dan Misi Bank tersebut dipercaya dapat tercapai dengan menerapkan *corporate values* Speed - Change - Action, yang penjabarannya sebagai berikut :

Speed :

"Satu langkah lebih maju dibandingkan kompetitor dalam memberikan pelayanan tercepat"

Change :

"Menjadi game changer dalam industri perbankan"

Action :

"Berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan memberikan performa maksimal"

## CORPORATE VALUES details

	For Customer	For Company	For Community
Speed	<u>The Fastest Service</u>	<u>Accelerate The Business</u>	<u>Leading in Community Development</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick response customer service</li> <li>• Deliver the fastest banking service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliver work results on-time in any job given</li> <li>• Do your work efficiently</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Be the first in developing community</li> <li>• Plan your next activities</li> </ul>



Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Always put customer first ahead of others</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Give impact to boost company performance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• for two steps ahead</li> <li>• Be aware of changes &amp; response the first</li> </ul>
<b>Change</b>	<p><u>Customer-Centric Innovation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovate new &amp; better way of serving customer's banking needs</li> <li>• Deliver unique banking experience like no other</li> <li>• Change the paradigm in banking service</li> </ul>	<p><u>Think Better Way</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluate your work everyday &amp; learn from your mistake</li> <li>• Eager to grow and be better</li> <li>• Be creative in day-to-day problem solving</li> </ul>	<p><u>Create a New Banking Lifestyle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Show a new way to do banking to the community</li> <li>• Be passionate to create changes in the banking community</li> <li>• Set a new banking (saving &amp; investment) mindset.</li> </ul>
<b>Action</b>	<p><u>Provide The Best Solution and Experience</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliver high quality service to customers</li> <li>• Offer customers not only banking product, but banking solution &amp; experience</li> <li>• Address customer needs the best way</li> </ul>	<p><u>Challenge Something New</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always develop personal capacity in banking</li> <li>• Setting new higher standard in doing business periodically</li> <li>• Pursue excellence in work</li> </ul>	<p><u>Contribute to The Community</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Give positive contribution to the Community</li> <li>• Be a good citizen &amp; obey the law</li> <li>• Care for the community welfare</li> </ul>

Visi, Misi dan Corporate Values "Speed-Change-Action" sebagai budaya perusahaan yang membawa paradigma baru dalam industri perbankan harus membudaya dan meresap dalam diri setiap individu karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**Prinsip-Prinsip/Asas GCG**

Pelaksanaan penerapan GCG di PT Bank JTrust Indonesia Tbk mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip dasar/asas GCG yang dikenal dengan istilah "TARIF" yakni: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Independensi (Independency)*, dan *Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)*, sebagaimana ilustrasi gambar sebagai berikut :



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Sebagai lembaga intermediasi, PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa seluruh jajaran Bank di setiap aspek bisnis sudah melaksanakan prinsip-prinsip dasar/ases GCG yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun penjelasan terperinci prinsip-prinsip/ases GCG tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

## 1. Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara internal, Bank juga berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawannya, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Untuk itu Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

## 3. Pertanggungjawaban/Responsibilitas (*Responsibility*)

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkannya serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## 5. Kewajaran (*Fairness*)

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi serta pula memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingannya (*stakeholders*).

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penerapan yang baik dari 5 (lima) prinsip dasar GCG tersebut akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang yang menjadi faktor utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank rating*), yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan dan peningkatan antara lain: Penguatan Keuangan (*Capital & Earnings*), Perbaikan *Risk Profile*, dan perbaikan penerapan GCG dengan didukung pelaksanaan 5 (lima) prinsip dasar GCG dalam pengembangan infrastruktur bisnis utama, dan penguatan *corporate image*.

## 11 (Sebelas) Faktor Utama dalam Pelaksanaan GCG

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (TARIF) paling kurang harus diterapkan ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dalam pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan & non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG & pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Selanjutnya atas pelaksanaan prinsip GCG ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dimaksud dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan penilaian sendiri tersebut harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF), serta dikelompokkan ke dalam *governance system* yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance system*, yaitu: *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagai berikut :

## Governance System

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip TARIF tersebut maka dibangunlah *governance system* yang meliputi 3 (tiga) pilar, sebagaimana ilustrasi gambar sebagai berikut:



Adapun penjelasan secara singkat terkait 3 (tiga) pilar *governance system*, dapat disampaikan sebagai berikut:

### **Governance Structure**

*Governance structure* merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara *accountable* dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang (*sustainable*), dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Sebagai sistem, konsekuensi logisnya adalah GCG membutuhkan suatu perangkat pendukung yang lebih dikenal sebagai *governance structure* yang dibentuk dengan tujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dapat kami sampaikan bahwa yang termasuk dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk, antara lain adalah kebijakan dan prosedur PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang senantiasa mengacu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

### **Governance Process**

Selain membutuhkan pilar *governance structure*, implementasi GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga membutuhkan pelaksanaan dengan aturan main yang jelas dalam suatu bentuk mekanisme atau lazim disebut *governance process* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus diperlukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dapat dikatakan, *governance process* merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Hal ini demi menjamin dan/atau mengawasi berjalannya sebuah *governance system* dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Dengan demikian, diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat dan efektif sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan/atau dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, serta meminimalisir timbulnya risiko dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

### **Governance Outcome**

Terdapat 2 (dua) *outcomes* yang diharapkan dari implementasi GCG, yaitu:

- Mampu meningkatkan kinerja perusahaan (*improved performance*).
- Mampu mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*reduced conflict of interest*).

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* dalam memenuhi harapan *stakeholders* PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG dengan didukung kuantitas dan kualitas kecukupan struktur dan infrastruktur, sehingga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

### **Peningkatan Nilai Perusahaan dan Modal**

- Dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan strategi perusahaan, bank berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham (*shareholder value*) melalui kinerja keuangan maupun non keuangan. Sebagai gambaran, pada sisi non keuangan, Bank berupaya untuk memperkuat jaringan kantor dengan relokasi maupun penambahan jaringan kantor baru, serta pengembangan pembiayaan mikro, memperkuat budaya perusahaan sesuai visi misi, melanjutkan dan menyempurnakan penerapan GCG dan belanja modal dalam sistem teknologi guna menunjang bisnis.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- J Trust sebagai pemegang saham baru telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan PT Bank JTrust Indonesia Tbk kedepan terutama menuju pasar retail, dengan salah satunya adalah penambahan modal mulai pada akhir tahun 2014 dan secara bertahap untuk beberapa tahun berikutnya sesuai kebutuhan untuk mendukung ekspansi bisnis. Penyetoran modal oleh J Trust ini bertujuan untuk memelihara rasio permodalan CAR agar tetap dapat bersaing di pasar perbankan terutama sesuai dengan *peer group* di Indonesia.
- Dengan adanya penyetoran modal ini telah memperkuat modal bank sebagai dasar selain untuk pertumbuhan kredit di masa yang akan datang, tentunya juga akan mempercepat penyelesaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Disamping itu juga terus melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki *Net Non Performing Loan* (NPL), dan meningkatkan upaya *monitoring* yang ketat agar kualitas atas kolektibilitas kredit tetap terjaga dan lancar.

## Penerapan GCG dan Tingkat Kesehatan Bank

Penerapan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa dijalankan secara konsekuen dan berkelanjutan dengan didukung komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar dalam melaksanakan komitmen selama ini antara lain:

1. Memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis, sebagaimana visi dan misi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah ditetapkan dan disosialisasikan.
2. Memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam melaksanakan usaha.
3. Memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
4. Memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
5. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
7. Memiliki *whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Memiliki Kebijakan dan Prosedur sebagai acuan dalam menjalankan usaha, serta senantiasa dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip/asas GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk setiap tahunnya kepada para pihak (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pula secara berkala/semesteran menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank berikut lampiran kertas kerjanya untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG Bank diperlukan untuk melakukan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan perbaikan apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mencakup penilaian terhadap 4 (empat) faktor :

## > Profil Risiko (*Risk Profile*)

*Self Assessment* terhadap Profil Risiko adalah proses penilaian keseluruhan proses dari Identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang dihadapi bank, yang diilustrasikan sebagai berikut :

- *Inherent Risk* - Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. *Inherent Risk* dapat berupa parameter yang bersifat *ex-post* (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat *ex-ante* (belum terjadi).
- *Risk Control System (RCS)* - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 *Supervisory review* yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian *Inherent Risk* dan RCS selanjutnya menghasilkan *net risk* per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan.

## > Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan GCG mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip/asas GCG yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip/asas GCG yang diwujudkan ke dalam 11 (sebelas) faktor utama penilaian GCG antara lain :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategi Bank

## > Permodalan (*Capital*)

Dengan komitmen untuk mengembangkan PT Bank JTrust Indonesia Tbk kedepan, pemegang saham J Trust telah menambah modal pada akhir tahun 2014 yakni tahap awal sebesar Rp.300 miliar dan pada Maret 2015 sebesar Rp.300 miliar. Pada bulan September 2015, J Trust menambah modalnya lagi sebesar Rp.400 miliar. Selanjutnya di bulan Oktober 2015 J Trust memberikan pinjaman subordinasi sebesar USD 25 juta (eqv. +/- Rp.342 miliar). Pada tahun-tahun berikutnya J Trust akan menambah modal agar setara

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

dengan *peer group* yang disesuaikan dengan rencana pertumbuhan bisnis bank atau melalui *rights issue* melalui tanpa HMETD yang direncanakan pada tahun 2016.

Pada ketentuan baru PBI Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum perhitungan KPMM sudah memperhitungkan profil risiko Bank atau dikenal dengan istilah *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP), Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5, rasio KPMM ditetapkan paling rendah sebesar 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR. Pada tahun 2016 ini sudah mulai berlaku kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang dimulai dengan tambahan 0,625% secara bertahap menjadi 2,5% pada tahun 2019. Bank akan menjaga rasio CAR diatas ketentuan yang berlaku sesuai ICAAP dan tambahan terkait hal tersebut.

Permodalan bank harus mampu menyerap semua risiko yang ada di bank. Penilaian permodalan ini mencakup :

- Kecukupan permodalan :
  - Kecukupan modal yang dapat menyerap risiko,
  - Kecukupan modal untuk mendukung rencana bisnis, dan
  - Kualitas modal (komposisi tier 1)
- Pengelolaan Permodalan :
  - Efektivitas perencanaan dan penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan,
  - Pemupukan modal organik,
  - Kemampuan akses bank kepada sumber permodalan.

## ➤ Pendapatan (*Earnings*)

Untuk faktor pendapatan bank dinilai berdasarkan aspek Kinerja *Earnings*, sumber-sumber *earning*, diversifikasi pendapatan, dan *earning sustainability*.

Pendapatan (*earnings*) ini erat kaitannya dengan pencapaian rentabilitas, dimana NIM PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus membaik dari 0,2% pada tahun 2014 dan menjadi sekitar 0,96% pada tahun 2015, serta diproyeksikan untuk tahun 2016 menjadi sebesar 3,4% dan di tahun 2017 sebesar 3,67% serta di tahun 2018 menjadi 3,74%, bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor yang menghambat NIM .

Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

- a. Bank berupaya untuk meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*) melalui kerjasama dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan penghimpunan dana murah.

Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan memperhitungkan biaya dan suku bunga yang kompetitif serta melakukan efisien biaya terkait pendanaan, misalnya biaya-biaya operasional, *cash in safe*, dan lain-lain. Upaya memperbaiki *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi antara lain e-banking untuk giro dan tabungan serta pengembangan pelayanan terus dilakukan, kredit dan referall dari nasabah *existing* serta perusahaan-perusahaan untuk *payroll* karyawannya. Melalui peningkatan jumlah rekening ini diharapkan saldo dana murah akan terus bertambah. Selain itu penambahan fitur ATM diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga leluasa dalam bertransaksi di unit ATM mana saja.

- b. Melakukan *yield enhancement*

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi sebagai berikut :

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Meneruskan program-program seperti *crash* program untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- Mengembangkan dan melakukan ekspansi kredit mikro, yang menambah 5 kios
- Melaksanakan ekspansi kredit Consumer dan Small dengan cepat, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penjualan AYDA dan menempatkan di aktiva yang produktif.
- Mengontrol perkembangan deposito sebagai sumber dana mahal agar tidak terlalu cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan peningkatan kredit.
- Mengalihkan sebagian penempatan pada BI harian yang suku bunganya lebih rendah ke penempatan aset produktif lainnya dengan suku bunga yang lebih tinggi sepanjang dana tersebut masih belum dapat disalurkan kedalam bentuk kredit.
- Melakukan penghapusbukuan aktiva bermasalah yang pada tahun 2016 diprioritaskan pada surat berharga bermasalah yang telah dibentuk CKPN secara penuh 100% sebesar USD 73 juta dan sebagian dari NPL yakni Rp.150 miliar.

Selain itu, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian / *prudential banking*, maka pencapaian ratio-ratio keuangan yang penting tetap menjadi perhatian dan dijaga untuk memenuhi ketentuan regulator, antara lain pemenuhan ratio-ratio keuangan terkait dengan FPA/CKPN, CAR, NPL, PDN, BMPK, Rugi/Laba.

## Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Untuk mewujudkan visi misi perusahaan, JTrust Bank akan diarahkan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dari skala usahanya. Berbagai strategi dan program telah disiapkan oleh manajemen untuk dapat menjadikan JTrust Bank sebagai salah satu bank terpercaya di Indonesia menghasilkan produk-produk berkualitas, dengan performa terpercaya, cepat, dan menjadi *game changer* dalam industri perbankan. Untuk perencanaan 3(tiga) tahun kedepan ini JTrust Bank akan memfokuskan kepada pengembangan infrastruktur kearah bisnis retail melalui kredit mikro, kecil dan menengah sehingga dapat diharapkan memperoleh hasil yang tinggi (*high yield loan*) yang pada akhirnya akan meningkatkan Net Interest Margin (NIM).

Pengembangan jaringan usaha bank selain masih pada optimalisasi serta memaksimalkan fungsi kantor cabang yang ada serta untuk persiapan bisnis bank kedepannya juga direncanakan pembukaan 1(satu) kantor cabang pada tahun 2016 yang diharapkan akan mendukung pula percepatan perluasan *customer base* dana pihak ketiga setelah bisnis bank berjalan membaik.

J Trust Co sebagai pemegang saham baru telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan J Trust Bank kedepan terutama menuju pasar *retail*, dengan salah satunya adalah telah melakukan penambahan modal pada akhir tahun 2014 dan di bulan Maret tahun 2015 masing masing sebesar Rp.300 miliar serta di bulan September 2015 sebesar Rp.400 miliar sehingga total telah disetor sebesar Rp.1 triliun. Penambahan modal akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung ekspansi bisnis. Penyetoran modal oleh J Trust Co ini juga bertujuan untuk memelihara rasio permodalan CAR agar tetap dapat bersaing di pasar perbankan terutama sesuai dengan *peer group* di Indonesia.

Dengan adanya rencana penggantian *core banking system* pada tahun 2016, kedepannya bank akan lebih siap dalam bersaing pada pasar *retail* melalui pengembangan-pengembangan produk yang berbasis teknologi sehingga memberikan pelayanan yang lebih kepada seluruh nasabahnya.

Selain itu, monitoring kredit yang intensif terus dilaksanakan untuk menjaga NPL tetap pada tingkat yang aman dan sesuai dengan regulasi melalui pembentukan *task force* kredit dengan



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

rapat berkala mingguan sehingga dapat mengambil langkah yang sedini mungkin dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah.

## Strategi Pengembangan Bisnis

Adanya kebijakan yang baru dimana saat ini bank sedang berupaya menguatkan permodalan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali di tahun kedepan melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen mikro, kecil dan menengah, berupa *retail* dan *commercial*, serta berupaya memperbaiki komposisi pendanaan pada *CASA* yang lebih baik. Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "E-Banking" dan "M-Banking" untuk lebih memberikan kemudahan bagi nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya.

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis, JTrust Bank telah menetapkan dan terus menjalankan 4 fokus target prioritas yang dibentuk dari tahun 2014 hingga kedepan di akhir tahun 2020 sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis, sebagai berikut :

### 1. Pengembangan Bisnis :

- Evaluasi & Pengembangan bisnis *lending* dan *funding*
- Pengembangan bisnis yang berbasis teknologi untuk memperluas nasabah ritel, meraih *fee based income* dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah
- KPI & Financial model yang terukur
- MIS yang terintegrasi
- *Early Warning System* yang kuat
- *Crossborder transaction* menambah dana dan menurunkan biaya.
- *Budget Control*
- Penyelesaian NPL secara intensif.

### 2. *Business Process*

- *Mapping* potensial *customer* dan *competitor*
- Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien
- Program promosi yang terintegrasi
- *Monitoring disiplin sales process*
- Revitalisasi kantor cabang

### 3. Sumber Daya Manusia

- Pemenuhan *SDM* yang kompeten
- Program *Training* berkelanjutan
- Jenjang karir yang menarik
- Skema insentif
- Budaya perusahaan yang kuat
- *Review* dan perbaikan struktur organisasi yang mengakomodir dinamika bisnis yang cepat dan efisien

### 4. Infrastruktur

- Optimalisasi jaringan kantor
- Pengembangan IT yang mendukung bisnis dengan penggantian *core banking system*
- Membangun IT yang terintegrasi

Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang meliputi :

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:
  - Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
  - Penerapan JSOX Based Komponen
2. Pengembangan dan perbaikan 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.
3. Penyempurnaan *early warning system*.
4. Penerapan *four eye principles*.
5. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, *training* kredit & LK oleh tenaga Internal Bank).
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif.
7. Peningkatan kualitas *advis / rekomendasi* manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

1. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assessment*, dan lain-lain.
2. Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

## Tahapan Implementasi GCG

Pelaksanaan penerapan GCG diimplementasikan dalam mendukung rencana bisnis agar dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tahapan penerapan implementasi GCG tersebut mendukung Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagai berikut:

### Tahun 2014

*Consolidation, Transformation, Reorganization, Positioning, Growth*

1. Mempersiapkan proses divestasi
2. Identifikasi permasalahan
3. Evaluasi bisnis & infrastruktur
4. Penyelesaian NPL (*restruktur, collection, WO*), *Special Mention Collection*
5. Persiapan ekspansi bisnis (Bisnis Micro SME)
6. Memperbaiki kinerja keuangan
7. Konsolidasi bisnis
8. *Set up* strategi bisnis yang terarah
9. Rekrut *Sales Force*
10. Pelatihan focus pada Micro SME & Consumer
11. Evaluasi Infrastruktur IT (CBS, Reporting, MIS)
12. *Restructure Remuneration System*

### Tahun 2015

*Expand, Optimization, Growth*

1. Pengembangan bisnis Micro SME, Trade Finance, dan Treasury
2. Mengembangkan produk program Konsumer
3. Optimalisasi Infrastruktur
4. Fokus pada pertumbuhan Micro, kecil dan menengah
5. Rekrut *Sales Force*
6. Pengembangan program untuk bisnis Micro SME, Commercial, Trade Finance
7. Optimalisasi CASA

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## Tahun 2016

### *Increase (Infrastructure, Capacity, Capability) and Growth*

1. Mempersiapkan infrastruktur *implant & agency banking*
2. Menambah jaringan kantor
3. Membangun *Core Banking system* ter Integrasi
4. *Restructure Remunerasi System*
5. Fokus pada pertumbuhan *Micro, kecil dan menengah*
6. Persiapan *business banking*
7. Pengembangan *CASA* untuk kredit *Micro, kecil dan menengah, Commercial, Trade Finance & Consumer*
8. Pertumbuhan *CASA*
9. Pengembangan *internet & mobile banking*

## Tahun 2017

### *Market Share*

1. Memperbesar pangsa pasar
2. Fokus pada pertumbuhan *Micro, kecil dan menengah*
3. Pertumbuhan *Retail Banking*
4. Pertumbuhan *CASA*

## Tahun 2018

### *Market Share*

1. Percepatan pertumbuhan *Retail Banking*
2. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan
3. Meningkatkan pangsa pasar dan jaringan bisnis
4. Memasuki era *digital banking*
5. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

## Tahun 2019

### *Integrated Expansion*

1. Memperkuat posisi di pasar
2. *Integrated banking Micro SME & Commercial, Retail Consumer*
3. Meningkatkan pertumbuhan bisnis
4. Meningkatkan laba serta aset

## Tahun 2020

### *Sustainable Growth*

1. Pengembangan berbagai produk-produk yang inovatif
2. Memperluas dan memperkuat jaringan domestik dan jaringan internasional
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mempunyai pelayanan *digital banking* yang lebih baik dan luas

## BAB II

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### 2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18. RUPS berwenang untuk :

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *benefit* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik yang terdaftar di Indonesia serta yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang wajib diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat.

Selama tahun 2015, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 23 Juni 2015
- b. 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015, tanggal 29 September 2015, dan terakhir pada tanggal 28 Desember 2015

#### (1) RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 23 Juni 2015 telah diadakan RUPS Tahunan dan sekaligus RUPS Luar Biasa, yang menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (a member firm of Morison International) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2015.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et discharge*") kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, serta Dewan Komisaris (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Kedua:

Melimpahkan kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) butir d Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar" kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2015.

Agenda Ketiga:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Agenda Keempat:

1. Menyetujui atas perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyatakan dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sehubungan dengan adanya perubahan tersebut diatas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan melaporkannya perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Agenda Kelima:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Nona Adriana Mullanto selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Benny Luhur selaku Komisaris (Independen) Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat Ini terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Komisaris Utama                    | : Nobiru Adachi      |
| - Wakil Komisaris Utama (Independen) | : Sigid Moerkardjono |
| - Komisaris (Independen)             | : Koh Yong Guan *)   |
| - Komisaris (Independen)             | : Benny Luhur *)     |

\*) Efektif terhitung sejak tanggal lulus hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Agenda Keenam:

1. Menyetujui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program*).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program/MSOP*).

Agenda Ketujuh:

1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah dilaksanakannya proses pengalihan saham oleh para Pemegang Saham dalam akta notaris tersendiri dan menyampaikan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan susunan komposisi Pemegang Saham Perseroan setelah dilaksanakannya proses pengalihan saham oleh para Pemegang Saham.

(2) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

A. Pada tanggal 30 Maret 2015 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan melalui pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 30.000.000.000,00 (tiga puluh triliun) lembar saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp. 0,01 (satu sen) atau sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Koh Yong Guan dan Nona Adriana Mullianto masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru. Pengangkatan Tuan Koh Yong Guan dan Nona Adriana Mullianto, berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Komisaris Utama                   | : Nobiru Adachi *)     |
| - Wakil Komisaris Utama /Independen | : Sigid Moerkardjono   |
| - Komisaris Independen              | : Koh Yong Guan *)     |
| - Komisaris Independen              | : Adriana Mullianto *) |

Direksi

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| - Direktur Utama | : Ahmad Fajar                 |
| - Direktur       | : Felix Istyono Hartadi Tiono |
| - Direktur       | : Laksmi Mustikaningrat       |
| - Direktur       | : Yoshio Hirako *)            |
| - Direktur       | : Eihito Tamura *)            |

\*) Pengangkatan akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Agenda Ketiga:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar terkait nama Perseroan dalam akta Notaris tersendiri.

## Agenda Keempat:

1. Menyetujui perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 dan Ayat 7, Pasal 20 Ayat 2 dan Ayat 5 dan Pasal 21 Ayat 3 serta penambahan Pasal 19 Ayat 5 dan Pasal 20 Ayat 3.
  2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris tersendiri.
- B. Pada tanggal 29 September 2015 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dari Rp.12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) menjadi Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), dalam bentuk saham seri A sebanyak 300.000.000.000.000 (tiga ratus triliun) lembar saham dengan nominal Rp.0,01 (satu sen) per saham.
  2. Menyetujui penambahan Modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 40.000.000.000.000 (empat puluh triliun) lembar saham berupa saham seri A dengan nilai nominal Rp. 0,01 (satu sen) per saham atau sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah).
  3. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar dan penambahan modal Perseroan tanpa HMETD.
  4. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
- C. Pada tanggal 28 Desember 2015 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

## Agenda Pertama:

1. Menerima pengunduran diri Nyonya Laksmi Mustikaningrat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
2. Menerima pengunduran diri Tuan Yoshio Hirako sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.



3. Mengangkat Tuan Ritsuo Ando sebagai Direktur Perseroan yang baru. Pengangkatan Tuan Ritsuo Ando berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditetapkannya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Mempertahankan Tuan Sigid Moerkardjono sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga beliau tetap melanjutkan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
5. Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Nobiru Adachi
- Wakil Komisaris Utama (Independen) : Sigid Moerkardjono
- Komisaris Independen : Benny Luhur
- Komisaris Independen : Koh Yong Guan \*)

**Direksi**

- Direktur Utama : Ahmad Fajar
- Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Direktur : Eihito Tamura
- Direktur : Ritsuo Ando \*)

\*) Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri.

**Agenda Kedua:**

1. Menyetujui atas perubahan Tempat Kedudukan dan Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ke Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sehingga merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan melaporkannya perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

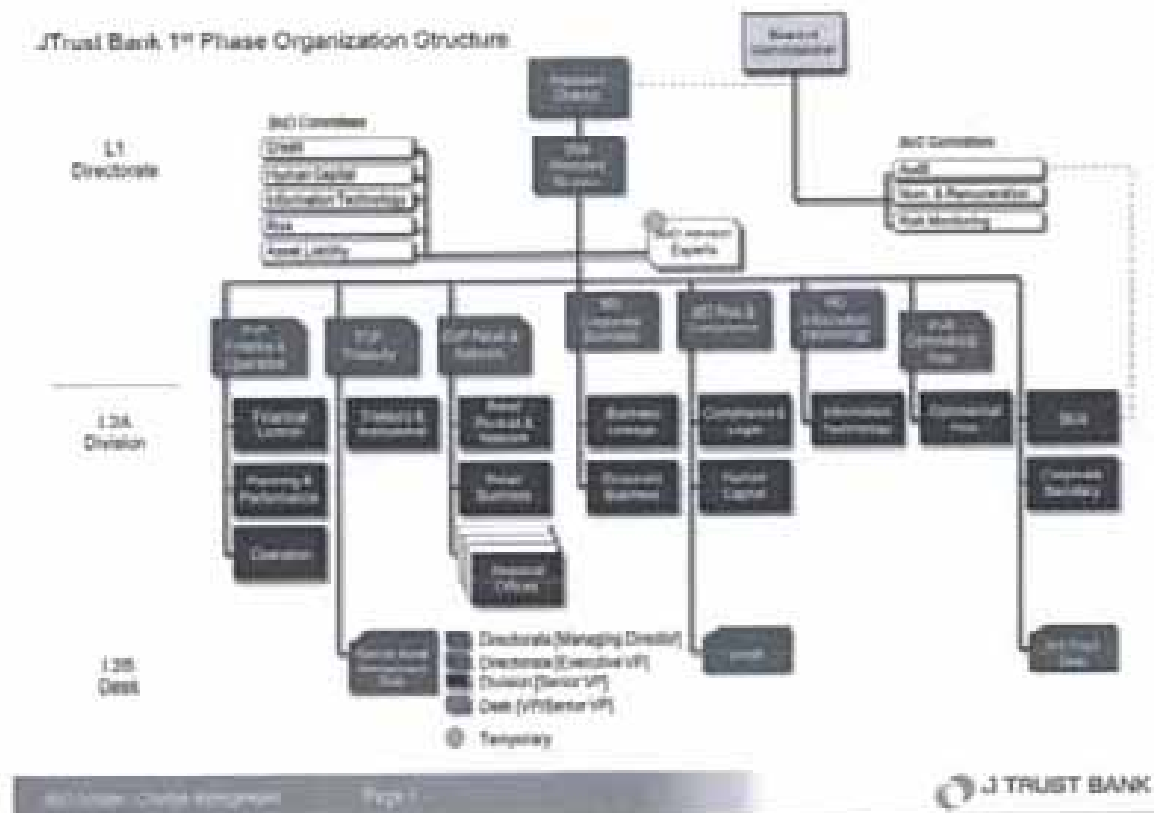
Perubahan terhadap susunan pengurus terbaru PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari keputusan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 28 Desember 2015, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila jumlah keseluruhan Komisaris Independen sudah lulus *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

maka salah satunya untuk memenuhi pengisian posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang masih terdapat kekosongan (*Vacant*).

## 2.2. Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Bank terhadap adanya perubahan peraturan yang berlaku dari regulator dan menyesuaikan kondisi bisnis bank saat ini, maka Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tahun 2015 yang terakhir berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 01.06/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut :



Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

Dewan Komisaris beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari :

Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Sigid Moerkardjono
Komisaris Independen	: Koh Yong Guan *)
Komisaris Independen	: Benny Luhur

Direksi beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari :

Direktur Utama	: Ahmad Fajar
Direktur	: Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	: Eihto Tamura **)
Direktur	: Ritsuo Ando *)

*Handwritten signature and initials.*

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

<sup>\*)</sup> Efektif setelah lulus Fit & Proper Test dari OJK

<sup>\*\*)</sup> Telah melakukan pengambaran diri sejak tanggal 4 Januari 2016, menunggu persetujuan dalam RUPS berikutnya

## 2.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki peran dan tugas sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan tugas utama adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bursa dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

### (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
  - b. Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
5. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
    - a. Komite Audit;
    - b. Komite Pemantau Risiko;
    - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
  12. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
  14. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
  15. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  16. Menetapkan sistem Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
  17. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen.

## (2) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode tahun 2015, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut :

- Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris per 01 Januari 2015 s/d 29 Maret 2015 belum sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:

✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang termasuk 1 orang Komisaris Independen, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan yang sesuai kriteria, sebagai berikut:

✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 1 (satu) orang, dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang.

✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jobatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	Persetujuan BI/OJK
1.	Noboru Aichi	Komisaris Utama	Jepang	-RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Bagd Mursudjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	-RUPST tgl. 21 Juni 2012 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 30 Maret 2015 s/d 22 Juni 2015 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
  - ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang.
  - ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang.
  - ✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 75% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	-RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	-RUPST tgl. 21 Juni 2012 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012
3.	Koh Yong Guan	Komisaris Independen	Singapura	RUPSLB tgl. 30 Maret 2015	*)
4.	Adriana Mulianto	Komisaris Independen	Indonesia	RUPSLB tgl. 30 Maret 2015	*)

\*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 23 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
  - ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang (s/d 27 Desember 2015), yang lalu menjadi 4 (empat) orang (28 Desember s/d 31 Desember 2015).
  - ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang.
  - ✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 75% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	-RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	-RUPST tgl. 21 Juni 2012 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012
3.	Koh Yong Guan	Komisaris Independen	Singapura	RUPSLB tgl. 30 Maret 2015	*)
4.	Benny Lufur	Komisaris Independen	Indonesia	RUPST tgl. 23 Juni 2015	24 Agustus 2015

\*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris, mekanisme adalah melalui RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada periode tahun 2015, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	<i>Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.</i>
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/Independen	Tidak ada
3.	Koh Yong Guan	Komisaris Independen *)	-
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Komisaris Utama PT ADEI Crumb Rubber Industry

\*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ringkasan profil anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

## 1. Komisaris Utama : Nobiru Adachi

Warga Negara Jepang, tanggal lahir : 21 Maret 1958. Lulusan Universitas Tokyo Fakultas Hukum tahun 1980, Lulusan Fakultas Ekonomi dari Case Western University tahun 1983, serta Lulusan Fakultas Administrasi Umum dari Kennedy School of Government, Harvard University. Pada April 1980 bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang, dimana menjabat sebagai Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi di Juli 1986. Kemudian diangkat sebagai Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri di Juni 1997. Pada bulan Juni 1999, adalah Pemeriksa Anggaran di Biro Anggaran. Kemudian menjabat sebagai Direktur di Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002. Kemudian menjadi Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan sejak Juni 2004. Setelah itu menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate sejak Juni 2005. Pada bulan April 2006 ditunjuk sebagai Officer di Jsdq Securities Exchange, Inc lalu dipromosikan ke Executive Officer di Juni 2006. Pada Oktober 2008 menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd. Kemudian menjabat Direktur Perwakilan di M & A Solusi Japan Co. Ltd pada Oktober 2011. April 2013 masuk sebagai Advisor bagi J Trust Co., Ltd, kemudian menjabat sebagai Managing Director J Trust Co., Ltd pada Juni 2013. Kemudian menjadi Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggung jawab atas Corporate Management Dept. di J Trust Co., Ltd, dan pada tanggal 20 November 2014 ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Mutiara Tbk, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2014 ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk., dan sekarang PT Bank Mutiara Tbk sudah mengganti nama dan logo menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 2. Wakil Komisaris Utama/Independen : Sigid Moerkardjono

Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Surakarta/10 September 1952. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Mengawali karier di PT Bank Niaga Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Credit Analyst (1976-1978), sebagai Kepala Bagian Operasi (1979-1981), selanjutnya di PT Bank Niaga Tbk Cabang Jakarta sebagai Kepala Divisi Operasi (1981-1983), di PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Inspector (SPI) (1983-1988), kemudian menjadi Pimpinan Cabang PT Bank Niaga Cabang Semarang (1988-1990), sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Niaga Tbk Cabang Medan (1990-1993), PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Kepala Urusan Kredit dan Administrasi (1994), sebagai Kepala Wilayah Indonesia Timur PT Bank Niaga Tbk di Surabaya (1994-1998), PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Controller / Kepala SKAI (1999), selanjutnya sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Niaga Tbk (1999), dan sebagai Tim Pengelola di PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat (1999-2000), kemudian sebagai Komisaris/Ketua Komite Audit/Ketua Komite Pemantau Risiko & Anggota Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Niaga Tbk (2000-2007), sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Anggota komite-komite PT Bank Niaga Tbk (2007-2008), disamping itu sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank BTPN (2007-2011). Berdasarkan RUPSLB PT Bank Mutiara Tbk tanggal 21 Juni 2011 ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dan selanjutnya berdasarkan RUPS tanggal 21 Juni 2012 diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Mutiara Tbk. Pada RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2014 diangkat sebagai Komisaris Utama Independen, dan berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan sekarang kembali merubah jabatannya menjadi Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Mutiara Tbk. serta mendapat tugas sebagai Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk (antara lain berdasarkan: SK Direksi No.03.12/S.Kep-Dir-HRD/Mutiara/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SK Direksi No.31.25/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, SK Direksi No.01.12/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, SK Direksi No.08.08/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014, SK Direksi No.12.05/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, dan SK Direksi No.30.17/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015), dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mutiara Tbk (antara lain berdasarkan: SK Direksi No.31.27/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, SK Direksi No.01.13/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, SK Direksi No.08.09/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014, SK Direksi No.12.06/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, dan SK Direksi No.30.15/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015). Sekarang PT Bank Mutiara Tbk sudah mengganti nama dan logo menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### 3. Komisaris Independen : Koh Yong Guan \*)

Warga Negara Singapura, usia 68 tahun. Komisaris Independen Bank Mutiara yang ditunjuk sesuai RUPSLB tanggal 30 Maret 2015 yang berubah nama menjadi JTrust Bank sejak 29 Mei 2015. Koh Yong Guan memulai karir sebagai pegawai negeri pada tahun 1972 di Kementerian Kesehatan, Karirnya sebagai pegawai negeri Singapura termasuk penunjukkan sebagai Permanent Secretary di Kementerian Pertahanan, Keuangan, Kesehatan, dan Pembangunan Nasional. Koh Yong Guan juga menjabat sebagai komisioner dari Inland Revenue Authority of Singapore dan sebagai Managing Director dari Monetary Authority of Singapore. Beliau juga pernah menjabat sebagai High Commissioner bagi Singapura ke Kanada dan sebagai Duta Besar ke Hellenic Republic (Yunani). Kini, selain menjabat di SMART Corporation Ltd., beliau juga menjabat sebagai Chairman di

Singapore Deposit Insurance Corporation. Beliau menyelesaikan pendidikan Mechanical Engineering dengan gelar Bachelor of Applied Science pada tahun 1970, lalu melanjutkan hingga mendapatkan gelar Master of Applied Science bidang Mechanical Engineering dan Biomedical Engineering pada tahun 1972 di University of Toronto, Ontario-Kanada melalui beasiswa Colombo Plan. Pada tahun 1981, beliau mendapatkan gelar Master in Business Administration (With Distinction) dari University of Leuven, Flanders-Belgia dan dianugerahkan Honorary Doctorate dari University of Toronto pada tahun 2011 dan diangkat menjadi Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak bulan Maret 2015.

*\*): Efektif setelah lulus fit and proper test dari OJK*

#### 4. Komisaris Independen : Benny Luhur

Warga Negara Indonesia, usia 55 Tahun. Pendidikan terakhir adalah Chemical Engineering dengan gelar Bachelor of Science pada tahun 1981 di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Benny Luhur memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd. pada tahun 1982-1988, menjabat sebagai Direktur PT ADEI Plantation & Industry pada tahun 1989-1995. Pada tahun 1991-1999 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Adindo Foresta Indonesia, dan kemudian pada tahun 1999-2005 diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Adindo Foresta Indonesia. Bersamaan dengan itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adindo Hutani Lestari pada tahun 1995-2005, dan juga menjabat sebagai Direktur PT ADEI Crumb Rubber Industry pada tahun 1995-2013. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT ADEI Crumb Rubber Industry pada tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2015 ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### (3) Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### (4) Status Independensi Dewan Komisaris

- Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen dengan mengetahui Direktur Utama telah membuat Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama .....  
 Tempat/Tanggal Lahir .....  
 Alamat .....  
 Nomor Identitas .....  
 Nama perusahaan .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak secara independen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

**(5) Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai ≥5% (lima perseratus) dari modal disetor pada JTrust Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
- Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

- **Transparansi Hubungan Keluarga**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√
3.	Koh Yong Guan		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√

- **Transparansi Hubungan Keuangan**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√
3.	Koh Yong Guan		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√

- **Transparansi Kepemilikan Saham**

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Nobiru Adachi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
2.	Sigid Moerkardjono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3.	Koh Yong Guan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
4.	Benny Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Mega Indo Pacific Sejahtera</li> <li>• PT Suryayudha Investindo Cipta</li> </ul>			21,00% 42,57%

(6) Rapat Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan berbagai rapat berdasarkan jenisnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 sebanyak 15 (lima belas) kali, dimana diantaranya jumlah kehadiran rapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi</b>			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) <sup>1)</sup>	1 Januari s/d 31 Desember 2015	12	100%
Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama-Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	14	93%
Benny Luhur (Komisaris Independen) <sup>2)</sup>	23 Juni s/d 31 Desember 2015	6	86%
Koh Yong Guan (Komisaris Independen) <sup>3)</sup>	30 Maret s/d 31 Desember 2015	-	-

1) Efektif tanggal 14 April 2015 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK, sebelum efektif sebagai Komisaris Utama telah mengorganisir 2 kali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selaku pengantar.  
 2) Efektif tanggal 24 Agustus 2015 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK  
 3) Masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	18/01	25/01	01/02
Nobiru Adachi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sigid Moerkardjono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benny Luhur	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Koh Yong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan:  
 ✓ : Hadir  
 ✗ : Absen  
 - : Masih sebagai pengantar sebelum efektif lulus *fit and proper test* oleh OJK  
 - : Masih dalam proses lulus *fit and proper test* oleh OJK.

Nama Komisaris	14	15	Σ
	10/11	11/12/15	
Nobiru Adachi	✓	✓	12
Sigid Moerkardjono	✓	✓	14
Benny Luhur	✓	✓	6

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Koh Yong Guan	-	-	0
Keterangan: ✓ Hadir ✗ Absen - Hadir sebagai pengamat/belum efektif lulus fit and proper test oleh OJK - Belum menjabat atau belum efektif lulus fit and proper test oleh OJK			

2. Rapat Khusus Dewan Komisaris selama tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dimana jumlah kehadiran rapat sebagian besar dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

Nama	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Rapat Khusus Dewan Komisaris</b>			
Hobinu Adachi (Komisaris Utama) <sup>1)</sup>	1 Januari s/d 31 Desember 2015	17	89%
Stigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama-Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	26	96%
Benny Luhur (Komisaris Independen) <sup>2)</sup>	23 Juni s/d 31 Desember 2015	4	80%
Koh Yong Guan (Komisaris Independen) <sup>3)</sup>	30 Maret s/d 31 Desember 2015	-	-
1) Efektif tanggal 14 April 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK. Sebelum efektif sebagai Komisaris Utama telah menghadiri 1 kali rapat Khusus Dewan Komisaris selaku pengamat. 2) Efektif tanggal 24 Agustus 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK. 3) Masih dalam proses <i>fit and proper test</i> oleh OJK.			

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Hobinu Adachi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stigid Moerkardjono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benny Luhur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koh Yong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: ✓ Hadir ✗ Absen - Hadir sebagai pengamat/belum efektif lulus fit and proper test oleh OJK - Belum menjabat atau belum efektif lulus fit and proper test oleh OJK													

Nama Komisaris	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Hobinu Adachi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stigid Moerkardjono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benny Luhur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Koh Yong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: ✓ Hadir ✗ Absen													

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Nama Komisaris	27	E
	11/2015	
Noburu Adachi	√	17
Sigit Bhaskardjaja	√	28
Benny Lohar	√	4
Koh Young Guan	-	0

Keterangan:  
 √ Hadir  
 - Absen  
 - Hadir sebagai pengamat/ahli tidak hadir dan pengamat tidak hadir  
 - Belum berangkat atau belum ahli tidak hadir dan pengamat tidak hadir

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat/notulen dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

Dengan demikian penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tahun 2015 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

## (7) Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (*shareholder*):

### - Proses Assessment Kinerja

Tahapan proses untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd.

### - Kriteria (Indikator) Kinerja

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun dan dinilai langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, dalam hal ini adalah J Trust Co., Ltd. Indikator yang dipergunakan menjadi diskresi pemegang saham mayoritas.

## (8) Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama tahun 2015 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
Noburu Adachi (Komisaris Utama)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Manajemen Risiko Kelola Kinerja Bank</li> <li>Business Continuity Management (BCM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BARA</li> <li>BSMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung IFC Jakarta</li> <li>Grand Hyatt Tower Jakarta</li> </ul>

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama-Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembekalan SMR</li> <li>• Uji SMR Level 1 Komisaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPP</li> <li>• LSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung IFC Jakarta</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>
Adriana Mullanto (Komisaris Independen)	30 Maret s/d 23 Juni 2015	Uji SMR Level 2 Komisaris	LSPP	Gedung IFC Jakarta

### (9) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Berikut ringkasan hasil rekomendasi serta masukan penting Dewan Komisaris selama tahun 2015 diantaranya :

1. Lebih mengaktifkan *Retail Fund Raiser* dan mendapatkan fasilitas dari Bank untuk melepaskan ketergantungan *Jumbo Deposit* dan menekan COF.
2. Memperkecil *Safety Level* agar tidak *Over Liquidity* namun dengan tetap memperhatikan *Safety Level* yang aman.
3. Memberikan *Deposit Limit* maksimum antara 20% sampai 25% dari total DPK kepada satu group Depositor.
4. *Close monitoring* terhadap aktivitas debitur dan kewajiban, khususnya bila ada tunggakan kewajiban terutama yang sudah kolektibilitas 2 (*special mention*).
5. Memperbaiki *Credit Process* dan *Competency Processor* hingga sampai ke Back Office.
6. Melakukan *Loan Restructuring* sepanjang memenuhi ketentuan.
7. Potensi debitur NPL sampai akhir tahun 2015 sangat besar, hal ini perlu strategi yang jelas dan realistis serta agresif untuk menghindarkan debitur tersebut menjadi NPL.
8. Hasil *Collection* dalam *assets recovery* masih sangat tidak signifikan dibandingkan jumlah O/S NPL yang ada, bahkan penjualan *foreclosed asset* tidak terjadi. Untuk itu perlu peningkatan kualitas dan kuantitas *collection* serta terobosan yang dapat mempercepat penyelesaian NPL yang sementara ini menjadi penyangga Bank.
9. Perbanyak kunjungan ke lokasi usaha debitur dan pemeriksaan fisik jaminan non *fixed asset* terutama stock barang bila merupakan jaminan dan nilainya signifikan.
10. Perubahan yang frontal terhadap sistem penagihan dan penjualan jaminan agar diperoleh *recovery* yang optimal.
11. *Task force* untuk menahan penurunan kualitas kredit dari kol. 1 (lancar) dan kol. 2 (*special mention*) menjadi NPL terus ditingkatkan aktifitasnya dengan memonitor kewajiban debitur sebelum jatuh tempo kewajibannya.
12. Diupayakan mencari potensial pembeli *foreclosed asset* dan bilamana perlu dilakukan *haircut* sesuai prosedur yang berlaku.

13. Mengingatkan agar tidak masuk dalam pemberian kredit berskala besar dan berisiko tinggi apabila jaminan *real estate* sangat tidak memadai. Pengalaman yang lalu sudah menunjukkan kerugian yang sangat signifikan akibat pembiayaan ke *Medium Loan*.
14. Petakan *Industry* yang memiliki prospek yang bagus dan *feasible* untuk dibiayai.
15. Ikut serta dalam sindikasi loan dengan bank-bank Jepang untuk proyek yang *feasible* dengan tetap memperhatikan *Legal Lending Limit*.
16. Perlu *role model* dalam pelaksanaan program *cost efficiency* dan melakukan *business process engineering* serta *streaming organization*.
17. Lebih intensif dalam membina hubungan dengan perusahaan dan bank-bank Jepang di Indonesia agar diperoleh dana murah dan fasilitas pinjaman bank untuk menekan *safety level* sehingga tidak terjadi *negative spread*.
18. Perlu hati-hati dan waspada terhadap lonjakan permintaan *likuiditas* sedangkan di pasar kondisinya sangat ketat.
19. Bilamana Bank Indonesia merealisasikan perubahan struktur *likuiditas*, maka JTrust Bank dapat menurunkan *safety level*-nya dengan mengurangi *exposure Jumbo Deposit* bunga tinggi.
20. Membuat dan melakukan *stress test* dengan kondisi yang terburuk (*worst scenario*), dengan melakukan mitigasi risiko khusus dalam mengantisipasi meningkatnya *NPL*.
21. Memperbaiki kualitas proses pemberian kredit khususnya :
  - Struktur Organisasi Perkreditan
  - Menyempurnakan SOP Perkreditan
  - Meningkatkan *Account Manaqement*
22. Agar lebih di-expose mengenai tambahan modal dari Januari s/d September 2015 yang mengakibatkan kenaikan modal menjadi Rp.1,4 Triliun sehingga *CAR* menjadi 16,27%.
23. Meyakinkan kepada deposan besar & *retail* bahwa *shareholder* berkomitmen menjadikan JTrust Bank sebagai Bank yang sehat dan kompetitif.

#### 2.4. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan *shareholders value* serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia), dan/atau otoritas lainnya yang berwenang.

##### (1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada periode per 31 Desember 2015 jumlah anggota Direksi terdiri dari 4 (empat) orang yang diantara salah satunya sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank untuk :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

2. Direksi berkewajiban memiliki tkad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip/asas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi berkewajiban menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas GCG, Direksi wajib membentuk komite dibawahnya seperti ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Human Resources;
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan;
7. Direksi berkewajiban mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawalan;
8. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi berkewajiban memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi berkewajiban menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampalan rencana korporasi dan penyusunan/penyampalan rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Direksi harus menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi berkewajiban membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
13. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
14. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut harus diberikan kepada Komisaris dan Pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai Bank;

## (2) Jumlah dan Komposisi Direksi

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia:

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

Pada periode tahun 2015, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut :

- Jumlah dan komposisi Direksi per 01 Januari 2015 s/d 27 Desember 2015 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
  - ✓ Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur

# Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 3 (tiga) orang Direktur.

- ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dari 5 (lima) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB tgl. 30 Des 2014 *)	12 Maret 2009 3 Maret 2015
2.	Felix Ietyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Lakmi Muskaningrat	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 4 Juni 2014	29 September 2014
4.	Yoshio Hirako	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	7 Mei 2015
5.	Ehito Tamara	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	19 Juni 2015

\*) RDK (Rapat Dewan Komisiner) dianggap sebagai RUPS dalam pengangkatan sebagai Direktur  
\*\*) RUPSLB untuk pengangkatan sebagai Direktur Utama

- Jumlah dan komposisi Direksi per 28 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:

- ✓ Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur, dan terakhir 1 (satu) orang Direktur (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK).
- ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB tgl. 30 Des 2014 *)	12 Maret 2009 3 Maret 2015
2.	Felix Ietyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Ehito Tamara	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	19 Juni 2015
4.	Ritauo Ando	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Des 2015 (**)	

\*) RDK (Rapat Dewan Komisiner) dianggap sebagai RUPS dalam pengangkatan sebagai Direktur  
\*\*) RUPSLB untuk pengangkatan sebagai Direktur Utama  
\*\*\*) Efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK. Telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan surat No.SR-450-03/2015 tanggal 26 Februari 2015

Pada periode tahun 2015, anggota Direksi tidak ada yang memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun ringkasan profil anggota Direksi sebagai berikut :

## a. Direktur Utama : Ahmad Fajar

Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Surakarta, 22 Januari 1966. Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1988, dan



gelar Magister Manajemen tahun 2000 di Universitas Padjajaran. Memulai karir di Perbankan pada tahun 1990 sebagai Tata Usaha Kantor Pusat, dan pada tahun 2000 sebagai *Manager Senior Officer - Treasury Liquidity Management Funding* di Bank Bumi Daya. Tahun 2000-2001 sebagai *Manager Senior Officer - Treasury & Capital Market Portfolio Investment* di Bank Mandiri. Tahun 2001-2003 sebagai *Manager Profesional Staff - Treasury Management, Treasury Product/Sales Management* di Bank Mandiri. Tahun 2003-2004 Srm : TL - *Portfolio Investment Mgr - Treasury Bank Mandiri*, tahun 2004-2008 VP : *DM-Debt & Capital Market - Treasury Debt & Capital Market* di Bank Mandiri. Pada bulan Nopember 2008 dipercaya sebagai Direktur PT Bank Mutiara Tbk. dan sejak tanggal 30 Desember 2014 dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara Tbk yang sekarang sudah mengganti nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**b. Direktur Kepatuhan : Felix Istyono Hartadi Tiono**

Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Surakarta, 08 Februari 1959. Lulus Universitas Katholik Parahyangan, Bandung tahun 1985 jurusan Fakultas Hukum, dan tahun 2006 lulus dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta dengan gelar MM/MBA. Memulai karir pada tahun 1986-1990 di PT Wellwood Sejahtera Ekapratama sebagai Legal Officer; tahun 1990 bertugas di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Legal Officer; selanjutnya tahun 1992 bertugas di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Manager Legal Affairs; tahun 1994 menjabat di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Manager Credit Control & Support; tahun 1998 di PT Bank Rabobank International sebagai Manager Credit Risk Control; selanjutnya tahun 2000 masih di PT Bank Rabobank International Indonesia menjabat Direktur Kepatuhan; tahun 2006 berkarir di PT Bank DBS Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan; tahun 2009 bertugas di Bank HSBC Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan; dari tahun 2014 sampai dengan sekarang bertugas di PT Bank Mutiara Tbk sebagai Direktur Kepatuhan dan Legal yang sekarang sudah mengganti nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**c. Direktur : Eihto Tamura**

Warga Negara Jepang, lahir tanggal 24 Juni 1971. Lulusan University of Tokyo, Faculty of Engineering, Department of Systems Innovation tahun 1996 ini tidak asing dengan berbagai solusi pembayaran dan jaringan di dunia. Memiliki pengalaman tiga tahun di bidang konsultansi marketing dan strategi, selain berpengalaman lebih dari tujuh tahun pada bisnis perbankan dan sekuritas, serta setahun mendirikan Bank dari awal. Memulai karir di Sanwa Bank, Limited., Tokyo sebagai Associate pada tahun 1996 hingga pertama kali menduduki posisi Eksekutif sebagai Direktur Eksekutif di Cecile Co., Ltd. pada tahun 2006. Kemudian menjabat CEO pada Bitcash Inc., Tokyo sebelum menduduki posisi CEO dan President di Wakatam Inc., Tokyo pada tahun 2011. Sejak tanggal 30 Desember 2014 dipercaya menjadi Direktur PT Bank Mutiara Tbk yang sekarang sudah mengganti nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**d. Direktur : Ritsuo Ando \*)**

Warga Negara Jepang, Lelaki usia 59 tahun. Ditunjuk sebagai Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam RUPSLB Perseroan tanggal 28 Desember 2015. Beliau memiliki pengalaman 36 (tiga puluh enam) tahun di bidang perbankan dan

finansial. Memulai karir di The Daiwa Bank, Limited., Osaka sebagai Banking Officer pada tahun 1979 hingga pertama kali menduduki posisi Eksekutif sebagai Presiden Direktur di PT Daiwa Lippo Finance pada tahun 2001. Setelahnya, beliau menjabat Presiden Direktur di Resona Indonesia Finance pada tahun 2003, Penasihat di Resona Bank, Ltd. pada tahun 2005, General Manager di ACOM Co., Ltd. pada tahun 2007, Wakil Presiden Direktur di PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. (BNP) pada tahun 2008, dan terakhir sebagai Presiden Direktur BNP sejak tahun 2009 sebelum menjadi Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Beliau adalah lulusan Osaka University of Foreign Language, Faculty of Language, Indonesia Literature tahun 1975.

<sup>\*)</sup> Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK. Telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan SURAC No. 541-43/D-03/2016 tanggal 26 Februari 2016.

### (3) Kriteria Direksi

- Dalam rangka mendapatkan hasil yang objektif serta independen maka seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Direksi harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS, dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2015 belum seluruh anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengangkatan seorang Direktur harus berdasarkan/memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Mayoritas Anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

### (4) Status Independensi Direksi

- Seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Direksi Independen, artinya tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

### (5) Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Direksi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

1. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai  $\geq 5\%$  (lima persen) dari modal disetor pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dibetor pada suatu perusahaan lain.
3. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali.

### - Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Eihito Tamura		√		√		√
4.	Ritsuo Ando		√		√		√

### - Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Eihito Tamura		√		√		√
4.	Ritsuo Ando		√		√		√

### - Transparansi Kepemilikan Saham

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Ahmad Fajar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2.	Felix I. Hartadi Tiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3.	Eihito Tamura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4.	Ritsuo Ando	J-Net Travel	Tidak ada	Tidak ada	6,00%

## (6) Rapat Direksi

Selama tahun 2015 telah diselenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat yang dilaksanakan oleh anggota Direksi, baik rapat Dewan Direksi maupun rapat Dewan Direksi dengan Kepala Divisi, dan unit kerja lainnya, dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2015 berdasarkan 'periode menjabat' adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Ahmad Fajar (Direktur Utama) <sup>(1)</sup>	1 Januari s/d 31 Desember 2015	35	97%
2	Felix I. Hartadi Tiono (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	32	89%
3	Laksmi Mustikaningrat (Direktur)	1 Januari s/d 28 Desember 2015	18	82%
4	Yoshio Hirako (Direktur) <sup>(2)</sup>	1 Januari s/d 28 Desember 2015	17	47%

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5	Eihito Tamura (Direktur) <sup>1)</sup>	1 Januari s/d 31 Desember 2015	18	50%
6	Ritsuo Ando (Direktur) <sup>2)</sup>	28 Desember s/d 31 Desember 2015	-	-

1) Efektif tanggal 3 Maret 2015 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK.  
2) Efektif tanggal 7 Mei 2015 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK.  
3) Efektif tanggal 19 Juni 2015 sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK.  
4) Diangkat sesuai RUPS/8 Perseroan tanggal 28 Desember 2015 dan efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK. Telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan surat No. SR-45/D-01/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat/notulen dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

## (7) Penilaian (Assessment) Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*).

### Proses *Assessment* Kinerja

Tahapan proses untuk menilai kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tahap 1  
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
- Tahap 2  
Menyusun *Draft Key Performance Indicator* (KPI)
- Tahap 3  
KPI di-review oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Tahap 4  
*Draft KPI* diusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (J Trust Co., Ltd.)
- Tahap 5  
Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan Tim Teknis Pemegang Saham
- Tahap 6  
Penandatanganan bersama KPI antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan Pemegang Saham

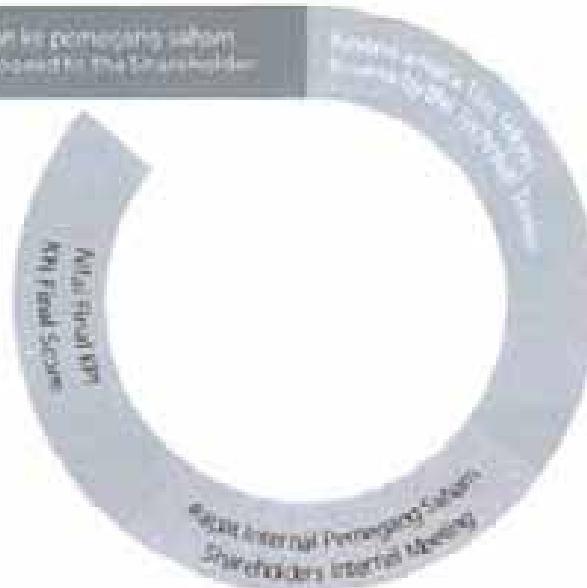
### - Kriteria (Indikator) Kinerja

- Proses penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif, yaitu: Keuangan, Internal Bisnis, *Customer*, *Learning & Growth*.
- Dengan menerapkan metode BSC ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank JTrust Indonesia Tbk meyakini bahwa dengan metode BSC dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
- Setelah KPI secara *bankwide*/direktorat ditandatangani, setiap bulannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
- Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang Saham untuk mengukur kinerja Direksi. Adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Kelua Self Assessment dilakukan ke pemegang saham  
Self Assessment Form is proposed to the Shareholder



## (8) Program Pelatihan Anggota Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi, selama tahun 2015 beberapa anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Lakmi Mustikaningrat (Direktur)	1 Januari s/d 28 Desember 2015	Penerapan Manajemen Risiko Kelola Kinerja Bank	BSMR	Grand Hyatt Jakarta
2	Yoshio Hirako (Direktur)	1 Januari s/d 28 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembekalan SMR</li> <li>Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track)</li> <li>Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track) - Intensive</li> </ul>	LSPF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung IFC Jakarta</li> <li>Mandiri Tower Jakarta</li> <li>Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>
3	Ehito Tamura (Direktur)	1 Januari s/d 31 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembekalan SMR</li> <li>Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track)</li> <li>Uji SMR Level 5 Eksekutif (Fast Track) - Intensive</li> </ul>	LSPF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung IFC Jakarta</li> <li>Mandiri Tower Jakarta</li> <li>Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>

## 2.5. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk saat ini sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) terakhir Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015 dengan beberapa kali

## Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

perubahan sesuai keputusan RUPSLB akta Nomor 2 tanggal 29 September 2015 dan keputusan RUPSLB akta Nomor 54 tanggal 28 Desember 2015, maka kepemilikan saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemilik	Lembar	Nilai nominal/lembar	Persentase
1.	J Trust Co. Ltd.	892.171.975.498.230 (saham seri A)	Rp. 0,01	98,997%
2.	PT J Trust Investments Indonesia	9.012.124.501.770 (saham seri A)	Rp. 0,01	1,000%
3.	Pemegang Saham Lama	28.350.177.035 (saham seri B)	Rp. 78,00	0,003%

Berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dan hasil keputusan RUPSLB akta Nomor 2 tanggal 29 September 2015 yang memutuskan adanya perubahan pemegang saham perseroan, maka komposisi pemegang saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut :

- i. Jumlah saham sebesar 98,997% (sembilan puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) lembar saham perseroan atau sebanyak 892.171.975.498.230 (delapan ratus sembilan puluh dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) saham Seri A yang dimiliki oleh J Trust Co. Ltd.,;
- ii. Jumlah saham sebesar 1,000% (satu koma nol persen) saham perseroan atau sebanyak 9.012.124.501.770 (sembilan triliun dua belas miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham Seri A yang dimiliki oleh PT J Trust Investments Indonesia (JTII).
- iii. Jumlah saham sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) saham perseroan atau sebanyak 28.350.177.035 saham (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima) lembar saham Seri B yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik (dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi/MK).

### 2.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman Etika Korporasi perusahaan sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku pedoman Etika Korporasi perusahaan telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Selama tahun 2015 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

- 2.7. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai  $\geq 5\%$  (lima perseratus) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2015 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki saham lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lainnya.

- 2.8. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2015 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- 2.9. *Shares option* yang Dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

*Shares option* adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang harus diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pengungkapan mengenai *shares option* minimal mencakup :

- Kebijakan dalam pemberian *shares option*.
- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*.
- Jumlah *shares option* yang diberikan.
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
- Harga opsi yang diberikan.
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

Selama tahun 2015 tidak ada *shares option* dimaksud untuk huruf b), c), d), e), dan f) sebagaimana tabel berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

Keterangan /Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)				
Direksi	(nama)				
Pejabat Eksekutif	(total)				
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**2.10. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank**

*Buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi minimal mencakup :

- a. Kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2015 tidak ada *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**2.11. Remunerasi dan Fasilitas Lain**

**A. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

1) Antara lain meliputi:

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, berupa tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.
- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

2) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
- b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dimaksud, untuk tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :



Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Dalam Rupiah	Orang	Dalam Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.940.988.300	5	10.731.905.930
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **):				
a. Dapat dimiliki (purna jabatan)	3	130.000.000	5	456.000.000
b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O kendaraan)		-		646.000.000
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3.070.988.300</b>	<b>5</b>	<b>11.833.905.930</b>
<b>Keterangan:</b>				
*) Sebelum dipotong pajak				
**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah				

- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan untuk tahun 2015 sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	(satuan orang)	
	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 miliar	2	1
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	3	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1miliar	-	1
Rp.500 juta ke bawah	-	1
<b>Keterangan:</b>		
*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak		

**B. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah**

- Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :
  - Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah.
  - Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah.
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebagai berikut:

Jenis Rasio	Besarnya Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	21 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,50 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,21 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,91 x

### BAB III

## KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

#### Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris yang dipersyaratkan dalam ketentuan *Good Corporate Governance* dengan susunan komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Semua komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang ditinjau ulang secara berkala.

#### 3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

##### a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, syarat keanggotaan, kewenangan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan honorarium. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

##### b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.12.02/S-KOM/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.12.05/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) | : Ketua/Anggota      |
| 2. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen)          | : Sekretaris/Anggota |
| 3. Haryanto (Pihak Independen)                           | : Anggota            |

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.30.17/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
4. Haryanto (Pihak Independen) : Anggota

Kemudian berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.17.01/S-KOM/JTRUST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.18.08/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Audit diubah menjadi sebagai berikut:

1. Benny Luhur (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
4. Haryanto (Pihak Independen) : Anggota

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama yang telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis dan perbankan. Pengangkatan nama-nama Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

### c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Secara umum, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit. Pelaksanaan pengangkatan keanggotaan Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 1 Januari 2015 s/d. 25 Mei 2015 terdiri dari 100% Komisaris Independen dan Pihak Independen, tanggal 26 Mei 2015 s/d. 28 Desember 2015 terdiri dari 75% Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan tanggal 29 Desember 2015 s/d. 31 Desember 2015 terdiri dari 75% Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Secara lebih khusus, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk dapat diuraikan berikut ini:

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- **Sigid Maerkardjono**, sebagai Ketua Komite Audit (menjabat s/d. 28 Desember 2015)

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Memulai karir perbankan sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 di Bank dengan berbagai penugasan yaitu Credit Analyst, Branch Manager, Regional Manager (1976-1999).

Pada level atas (strategis) banyak menjalani karir di bidang compliance, audit committee, dan risk monitoring committee, yaitu sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Niaga Tbk. (1999-2000), Komisaris dan juga sebagai Ketua Komite Audit/ anggota Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk. (2000-2007), Wakil Komisaris Utama dan juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Audit/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk., Anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN (2007-2011).

- **Benny Luhur**, sebagai Ketua Komite Audit (menjabat sejak 29 Desember 2015)

Sarjana Chemical Engineering Universitas of California, Berkeley, USA. Memulai karir sebagai Vice Manager di PT Hari Terang Industrial Co. Ltd sebagai produsen batu baterai merk ABC dan mendistribusikannya ke daerah-daerah di Indonesia. Pada tahun 1989 - 1995 menjabat sebagai Direktur di PT ADEI Plantation & Industry dimana beliau merintis dan membangun kebun karet dan kelapa sawit di Riau dengan sistem land clearing tanpa bakar. Kemudian beliau melanjutkan karirnya sebagai Direktur Utama di PT Adindo Foresta Indonesia pada tahun 1990 - 1999 untuk memelihara kerjasama dengan BUMN PT Inhutani 1 untuk membangun Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Timur bagian utara. Dan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Adindo Hutani Lestari pada tahun 1995 - 2005. Bapak Benny Luhur juga menjabat sebagai Direktur di PT ADEI Crumb Rubber Industry pada tahun 1995 - 2013.

Pada tahun 1999 - 2005, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Adindo Foresta Indonesia Tbk dimana beliau bertugas untuk mensupervisi dan memberikan nasehat kepada Direksi. Begitu pula di PT ADEI Crumb Rubber Industry, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama dari tahun 2013 s/d sekarang.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak tanggal 23 Juni 2015. Beliau Lulus *Fit and Proper Test* pada tanggal 24 Agustus 2015 dan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko serta anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mulai bulan Desember 2015 sampai saat ini.

- **Nobiru Adachi**, sebagai Anggota Komite Audit

Warga Negara Jepang 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan di beberapa universitas, yaitu Universitas Tokyo, Fakultas Hukum, tahun 1980; Case Western University, Fakultas Ekonomi, tahun 1983. Pada April 1980, bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang dan menjabat berbagai jabatan strategis, yaitu Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi pada Juli 1986, Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri pada Juni 1997, Penasehat Hukum di Biro Anggaran, Direktur pada Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002, Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan pada Juni 2004, Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate pada Juni 2005. Pada April 2006, ditunjuk sebagai Officer di Jsdq Securities Exchange, Inc, lalu dipromosikan

menjadi Executive Officer pada Juni 2006 dan pada Oktober 2008, menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd.

Kemudian, menjabat Chairman dan CEO di M & A Solution Japan Co, Ltd pada Oktober 2011. Pada April 2013 masuk sebagai Advisor bagi J Trust. Lalu menjabat sebagai Managing Director J Trust pada Juni 2013. Posisi selanjutnya adalah menjadi Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggungjawab atas Corporate Management Dept. di J Trust dan terakhir pada November 2014 ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank MutiaraTbk, yang kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk pada tanggal 30 Desember 2014 yang berubah nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak 29 Mei 2015. Lulus *Fit and Proper Test* pada tanggal 14 April 2015 dan merangkap jabatan sebagai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi mulai bulan Mei 2015 sampai saat ini.

- Haryanto, sebagai Anggota Komite Audit  
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 1981. Karir perbankan dimulai tahun 1974 di Bank Niaga sampai dengan tahun 1977 dan tahun 1980 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai dengan tahun 2000, selanjutnya di Bank BTN sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Yang bersangkutan telah mengikuti berbagai pelatihan profesi dalam bidang perbankan di tingkat lokal dan internasional, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bapindo, Alpia, PDCP Manila Phillipina.
- Sudarmadji Herry Sutrisno, sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit  
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 1978 dan Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung tahun 1996. Memulai karir sebagai Staf Asisten Direktur Keuangan PT Nurtanio (sekarang PT Dirgantara Indonesia) di Bandung tahun 1979 sampai dengan tahun 1981. Berkarir pada profesi Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik berafiliasi Internasional maupun lokal dengan obyek audit beberapa Bank Pembangunan Daerah dan Lembaga Keuangan sejak tahun 1990. Sampai sekarang aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti untuk mata kuliah auditing dan sistem informasi akuntansi.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Diantara anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain meliputi :

- 1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku terpenuhi.
- 3) Menelaah dan memberi consent atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan terutama yang dipublikasikan baik secara lengkap maupun *high lights* seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,

apakah sudah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku serta apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh Anggota Komite Audit.

- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian Intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern dan mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern.
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Melakukan penelaahan atas ketaatan dan kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 8) Memberikan masukan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAJ).
- 9) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 10) Mengawasi proses *Corporate Governance* dengan memastikan bahwa semua jajaran manajemen telah membudayakan *Corporate Governance*.
- 11) Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja (*Audit Committee Charter*) yang ditelaah dan diperbaharui bilamana perlu.

f. Rapat Komite Audit

- 1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan :
  - a. Rapat/pertemuan Komite Audit dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Intern sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  - b. Rapat/pertemuan Komite Audit dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% dari jumlah anggota komite dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris yang bukan Anggota Komite Audit.
- 3) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dan apabila Ketua Komite Audit berhalangan rapat dipimpin oleh anggota Komite lainnya yang ditunjuk dan disetujui dalam rapat komite.
- 4) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 5) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 6) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

7) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat Komite Audit dengan SKAI, KAP, dan Unit Kerja lainnya.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Komite Audit	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total Hadir
		Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	Tgl 10000	
Sigid Moekardjono	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
	KAP														
	UKL														
Benny Luhur <sup>*)</sup>	SKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAP														
	UKL														
Nobiru Adachi <sup>**)</sup>	SKAI	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	7
	KAP														
	UKL														
Haryanto	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
	KAP														
	UKL														
Sudarmadji Herry Sutrisno	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	11
	KAP														
	UKL														

Keterangan:

√ : Hadir

x : Absen

- : Belum menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite

<sup>\*)</sup> baru efektif tanggal 29 Desember 2015 sebagai Ketua Komite

<sup>\*\*)</sup> baru efektif tanggal 26 Mei 2015 sebagai Anggota Komite

SKAI : Satuan Kerja Audit Intern

KAP : Kantor Akuntan Publik

UKL : Unit Kerja Lainnya

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Sigid Moekardjono (Ketua/Wakil Komisaris Utama - Independen)	01 Januari s/d 25 Desember 2015	13	13	100%
Benny Luhur (Ketua / Komisaris Independen)	29 Desember s/d 31 Desember 2015	-	-	-
Nobiru Adachi (Anggota/Komisaris Utama)	26 Mei s/d 31 Desember 2015	7	7	100%
Haryanto (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2015	13	13	100%
Sudarmadji Herry Sutrisno (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2015	13	12	92%



g. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program Kerja Komite Audit :

No.	Program Kerja
1	Rapat dengan SKAI untuk me-review Laporan Hasil Audit (LHA), memantau maupun mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit
2	Me-review rencana audit KAP tahun buku 2015
3	Me-review draft final audit report KAP tahun buku 2014
4	Me-review rencana audit SKAI tahun 2016
5	Berpartisipasi dalam rapat Direksi dan Komisaris
6	Me-review laporan tahunan
7	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal/KAP kepada Dewan Komisaris
8	Menyusun rencana kerja (Work Plan) Komite Audit tahun 2016
9	Me-review laporan keuangan publikasi <i>unaudited</i>
10	Me-review kualitas aktiva produktif dan kecukupan PPAP/CXPN termasuk AYDA
11	Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan <i>management letter</i> dari KAP

Realisasi program kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2015

Program Kerja Komite Audit tahun 2015 telah direalisasikan/dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pertemuan/rapat dengan SKAI sebanyak 13 kali, dimana dalam rapat tersebut membahas Laporan Hasil Audit bulanan, pinjaman kolektibilitas 2 di atas Rp.5 miliar yang berpotensi menjadi NPL, dan lain-lain.
2. Program Kerja mengenal pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan audit serta tindak lanjut audit, dibahas dalam rapat-rapat komite ini yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain hal-hal sebagai berikut :
  - Perlu adanya evaluasi terhadap profil SKAI sehingga dapat mengawal perkembangan bisnis bank setelah perubahan kepemilikan dan perubahan fokus bisnis.
  - Perlu diusulkan kepada Direksi agar Tim Adhoc yang membantu Divisi dan cabang untuk melakukan pembenahan SOP serta pelatihan agar kompetensi staf bisa meningkat.
  - Perlu dipikirkan pinatti bagi Divisi atau cabang yang berturut-turut masih mendekati predikat *fair*.
  - Disarankan kepada BOD agar melakukan evaluasi kondisi terkini bagi debitur di atas jumlah tertentu yang mulai menunggak kewajibannya agar tidak ada debitur yang mendadak menjadi NPL di tiap bulan.
  - Dan lain-lain.

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, syarat keanggotaan, kewenangan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan honorarium. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

## b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.12.02/S-KOM/Mutlara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.12.06/S.Kep-Dir-HCD/Mutlara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) : Ketua/Anggota
2. Haryanto (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
3. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Anggota

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.30.15/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Haryanto (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
4. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Anggota

Kemudian berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.17.01/S-KOM/JTRUST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.18.07/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko diubah menjadi sebagai berikut:

1. Denny Luhur (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Haryanto (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
4. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Anggota

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama yang telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK, dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan dan Manajemen Risiko. Pengangkatan nama-nama Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

## c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Secara umum, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan pengangkatan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 1 Januari 2015 s/d.

25 Mei 2015 terdiri dari 100% Komisaris Independen dan Pihak Independen, tanggal 26 Mei 2015 s/d. 28 Desember 2015 terdiri dari 75% Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan 29 Desember 2015 s/d. 31 Desember 2015 terdiri dari 75% Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Sedangkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- Sigid Moerkardjono, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko (menjabat s/d. 28 Desember 2015)  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Benny Luhur, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko (menjabat sejak 29 Desember 2015)  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Nobiru Adachi, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Haryanto, sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Sudarmadji Herry Sutrisno, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Diantara anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai organ yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan Pengawasan Aktif penerapan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan /atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
- 7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- 8) Mengevaluasi permohonan atau usulan yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan, sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan dalam Bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Bank dan pengendalian risiko yang sehat.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

f. Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan :
  - a. Rapat/pertemuan Komite dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  - b. Rapat/pertemuan Komite dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% dari jumlah anggota komite dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko, dan apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang ditunjuk dan disetujui dalam rapat Komite.
4. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

# Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan frekuensi tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota, sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Hadir
		18/1/15	14/2/15	18/3/15	14/4/15	10/5/15	17/6/15	14/7/15	20/8/15	14/9/15	10/10/15	14/11/15	10/12/15	
Sigid Moekardjono	SKMR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
Benny Lohur *)	SKMR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hobru Adachi **)	SKMR	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	7
Haryanto	SKMR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
Sudarnadi Herry Sutrisno	SKMR	√	√	√	√	x	√	√	x	√	√	√	√	10

Keterangan:  
 √ : Hadir  
 x : Absen  
 - : Belum menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite  
 \*) baru efektif tanggal 29 Desember 2015 sebagai Ketua Komite  
 \*\*) baru efektif tanggal 20 Mei 2015 sebagai Anggota Komite

SKMR : Satuan Kerja Manajemen Risiko

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Sigid Moekardjono (Ketua/Wakil Komisaris Utama - Independen)	01 Januari s/d 28 Desember 2015	12	12	100%
Benny Lohur (Ketua / Komisaris Independen)	29 Desember s/d 31 Desember 2015	-	-	-
Hobru Adachi (Anggota/Komisaris Utama)	20 Mei s/d 31 Desember 2015	7	7	100%
Haryanto (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2015	12	12	100%
Sudarnadi Herry Sutrisno (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2015	12	10	83%

#### g. Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2015, Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Laporan Profil Risiko dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2) Memantau dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Berpartisipasi dalam Rapat Direksi dan Komisaris.
- 4) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank Mutiara.
- 5) Mengevaluasi risiko-risiko yang timbul atas dasar 8 jenis risiko dalam kasus-kasus yang terjadi.
- 6) Menyusun Rencana Kerja (Work Plan) Komite Pemantau Risiko tahun 2016.

#### h. Realisasi Program Kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2015 telah direalisasikan/dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pertemuan/rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebanyak 12 kali. Dalam rapat tersebut diundang pula

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk membahas profil risiko bulanan sekaligus melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Disamping itu, untuk lebih menekankan pemantauan terhadap risiko kredit, pada setiap rapat bulanan juga dipresentasikan tentang Portofolio kredit dan NPL JTrust Bank.

- 2) Program kerja mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan pembahasan risiko-risiko yang timbul atas dasar 8 jenis risiko, dibahas dalam rapat-rapat Komite tersebut yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain hal-hal sebagai berikut :
  - Peningkatan Kredit konsumen, pengembangan kredit mikro, perbalkan standar kualitas pembuatan analisa, dokumentasi kredit, struktur persetujuan kredit, penetapan kolektibilitas kredit.
  - Pembakuan Struktur Organisasi baru PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Implementasi PSAK 50-55, Pengaruh kondisi ekonomi atas penurunan peringkat profil Risiko Bank.
  - Masalah komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK).
  - Keharusan melakukan *stress test*, upaya-upaya penurunan tingkat risiko dari 8 jenis risiko inheren dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko.
  - Kepatuhan pelaporan baik mengenai ketepatan penyampaian dan keakuratan isi pelaporan.
  - Dan lain-lain.
- 3) Komite Pemantau Risiko telah mengikuti dan berpartisipasi dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2015 sebanyak 12 kali.

### 3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan kebijakan nominasi dan remunerasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.

#### a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, syarat keanggotaan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan pelaporan. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

#### b. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.12.02/S-KOM/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.12.04/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi belum memenuhi kriteria sebagai berikut:



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1. \*) : Ketua/Anggota
2. Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division) : Sekretaris/Anggota
3. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) : Anggota

\*) akan diangkat setelah RUPS Tahunan.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dan diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No.30.16/5.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sejak tanggal 26 Mei 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria menjadi sebagai berikut:

1. - : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama/Independen) : Anggota
4. Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division) : Sekretaris/Anggota

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.03/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2015, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria menjadi sebagai berikut:

1. - : Ketua/Anggota
2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
3. Benny Luhur (Komisaris Independen) : Anggota
4. Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division) : Sekretaris/Anggota

Efektif sejak tanggal 20 November 2014, posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi masih 'Vacant'/kosong karena salah satu Komisaris Independen yang selama ini menjabat posisi ketua telah mengundurkan diri (sesuai hasil keputusan RUPSLB), sementara hanya tinggal 1 (satu) orang Komisaris Independen yang ada telah menjabat/merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Diharapkan pada tahun 2016 pengisian posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dipenuhi oleh Komisaris Independen yang terpilih.

## c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- Sigid Moerkardjono, sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat s/d. 22 Desember 2015)  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Nobiru Adachi, sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Pahot Gumpar Hutasoit, sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Pendidikan terakhir : STMIK BUDI LUHUR, Jurusan Manajemen Informatika. Kursus dan Seminar yang pernah diikuti yaitu PMTK (pendidikan Terpadu Manajemen Komputer), IZZI Computer Education tentang aplikasi Management Dan Oxford Course Indonesia, I & II. Pengalaman bekerja di PT. Warna-Warni Perdana, Divisi Umum. Meniti karir di PT Bank Mutiara Tbk sejak 03 November 1997 dan sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Human Capital

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Division Head PT Bank Mutiara Tbk yang berubah nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk sejak 29 Mei 2015.

## d. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Diantara anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepemimpinan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :

### 1) Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

### 2) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

### 3) Komite wajib memastikan bahwa :

- Kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan prestasi kinerja individual.
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan kewajaran "peer group".
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan pertimbangan saarasan dan strategi jangka panjang dari bank.

## f. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
- 2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- 3) Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 5) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 6) Perbedaan pendapat (*discenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dengan frekuensi tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota, sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Rapat
		Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Sgtd Moekardjono	HOMD	√	√	√	√	√								5
Nobiru Adachi (*)	HOMD	-	-	-	-	√								1
Benny Luhur **)	HOMD	-	-	-	-	-								-
Pakot Gumpar Hutasaol	HOMD	√	√	√	√	√								5

Keterangan:  
 √ : Hadir  
 - : Absen  
 - : Belum menjabat sebagai Anggota Komite  
 \*) baru efektif tanggal 28 Mei 2015 sebagai Anggota Komite  
 \*\*) baru efektif tanggal 23 Desember 2015 sebagai Anggota Komite

HOMD : Human Capital Management Division

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Sgtd Moekardjono (Anggota/Wakil Komisaris Utama - Independen)	01 Januari s/d 22 Desember 2015	5	5	100%
Nobiru Adachi (Anggota/Komisaris Utama)	28 Mei s/d 31 Desember 2015	1	1	100%
Benny Luhur (Anggota / Komisaris Independen)	23 Desember s/d 31 Desember 2015	-	-	-
Pakot Gumpar Hutasaol (Anggota/Pejabat Eksekutif)	01 Januari s/d 31 Desember 2015	5	5	100%

#### g. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki program kerja sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kebijakan remunerasi.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Melakukan *review/evaluasi* terhadap implementasi kebijakan remunerasi.
5. Melakukan *review/evaluasi* mengenai pencapaian KPI Direksi tahun 2014 dan tahun 2015 untuk selanjutnya diajukan/disampaikan kepada Pemegang Saham.

h. Realisasi Program Kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2015 telah direalisasikan/dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakan pertemuan/rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan Human Capital Management Division.
- 2) Program kerja mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi, dibahas dalam rapat-rapat Komite tersebut yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :
  - Membahas usulan remunerasi dan fasilitas Direktur Utama dan Direktur.
  - Pembahasan KPI Direksi untuk tahun 2015.
  - Evaluasi kinerja Direksi 2015 dalam bentuk KPI.
  - Review remunerasi dan apresiasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
  - Pembahasan program perbaikan Human Capital Management Division (HCMD) JTrust Bank.
  - Pembahasan program training beserta perkembangannya.
  - Pembahasan perubahan pejabat di HCMD.
  - Dan lain-lain.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Komite-Komite Dibawah Direksi

Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola seluruh jenis risiko yang dihadapi Bank selain dilakukan oleh unit kerja/Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan membentuk Komite Pemantau Risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga telah menetapkan Komite-Komite Dibawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berfungsi memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komite-Komite Dibawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk diisi oleh anggota Direksi. Komposisi keanggotaan komite disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Dibawah Direksi antara lain :

### 1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

#### Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbalikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam triwulanan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaannya, Komite Manajemen Risiko membentuk Sub Komite dengan tugas pokok masing-masing. Adapun Sub Komite yang dimaksud adalah: *Credit Risk Committee* dan *Operational Risk Committee*, yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko operasional dan risiko lainnya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.17/S.Kep-Dir-RMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

#### Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : Direktur Utama  
Wakil ketua : Direktur Compliance & Legal  
Sekretaris : Kepala Divisi Risk Management

#### 1. Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)

##### a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

- Direktur Utama
- Direktur Treasury & Institutional Banking
- Direktur Compliance & Legal
- EVP/Direktur Micro & Consumer Business

##### b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- EVP Small & Medium Business
- EVP Finance & Operation
- EVP Special Asset Management
- EVP Distribution Network
- EVP Human Capital

#### 2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Non-Voting Member)

##### a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Internal Audit Division Head
  - Compliance Division Head
  - Legal Division Head
  - Accounting Division Head
  - Operation Division Head
  - Planning Performance Management Division Head
  - Corporate Secretary Division Head
  - Risk Management Division Head
- b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
- Kepala Divisi dan Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi :

- Menyusun dan menyesuaikan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- Memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan efektif.
- Mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera dengan dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC.
- Penetapan (*Justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*).

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	21 April 2015	Pembahasan Laporan Risk Profile - Triwulan I/2015 kepada OJK
2	06 Juli 2015	Review PPK 2011 Khusus BWMK
3	18 September 2015	Presentasi Rencana <i>Launching</i> - Kredit Pengusaha Unggulan
4	25 September 2015	Justifikasi terkait <i>Irregularities</i> - Pemberian Kredit kepada PT JTRUST Investment Indonesia (JIJ)
5	20 Oktober 2015	Pembahasan Laporan Risk Profile - Triwulan III/2015 kepada OJK
6	03 Nopember 2015	Presentasi Penerapan <i>Four-Eyes Principle</i>

## 2. *Asset & Liability Committee* (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Struktur dan Keanggotaan

*Asset & Liability Committee* (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.63/S.Kep-DIR/TRD/JTRUST/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

#### Susunan Anggota ALCO :

Ketua : Direktur Utama  
Wakil ketua : Direktur/EVP Treasury & Institutional Banking  
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
    - Direktur Utama
    - Direktur/EVP Treasury & Institutional Banking
    - Direktur/EVP Micro & Consumer Business
    - EVP Distribution Network
  - b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
    - Direktur/EVP Risk Management
    - EVP Finance & Operation
2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)
    - Direktur Compliance & Human Capital
    - Direktur Information & Technology
    - Linkage Division Head
    - Retail Business Division Head
    - Retail Product & Network Division Head
    - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
    - Compliance & Legal Division Head
    - Planning Performance Management Division Head
  - b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaltan dengan agenda/topik.
    - Financial Control Division Head
    - Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

### Tugas dan Tanggung Jawab

*Asset & Liability Committee* (ALCO) memiliki tugas utama sebagai berikut :

1. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
  - Sebagai pengambilan keputusan yaitu 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).

2. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*)
  - Sebagai pengambilan keputusan yaitu 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)
3. Tugas-tugas pokok dari masing-masing Divisi (*Working Group Member*):
  - 1) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Apabila diperlukan dapat memberikan opini, kajian potensi dan mitigasi risiko dari penetapan suku bunga dana pihak ketiga yang berhubungan dengan biaya dana serta penetapan suku bunga kredit dan margin yang dikaji dari faktor kondisi pasar serta faktor internal, antara lain: membuat Analisa Repricing Gap, Risk Premium dan Laporan SKMR secara berkala.
  - 2) Divisi Planning Performance Management  
Men-support data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO.
  - 3) Divisi Treasury & Institutional Banking
    - a. Menyiapkan data-data terkait treasury seperti BI Rate, Suku Bunga antar Bank, dan lain-lain.
    - b. Menindaklanjuti hasil rapat ALCO seperti:
      - Surat Edaran Penetapan Suku Bunga Fund Transfer Pricing (FTP)
      - Surat Edaran Penetapan Suku Bunga Funding maupun Lending
      - Strategi pendanaan, target funding dan lending secara bulanan
      - Masalah lain yang diputuskan dalam rapat ALCO
      - Notulen rapat ALCO dan dokumentasinya
  - 4) Divisi Retail Product & Network
    - a. Menyiapkan data komparasi suku bunga yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu bank BUMN.
    - b. Menyiapkan proyeksi data funding minimal 1 (satu) bulan ke depan dan/atau lebih (apabila diperlukan) serta target dalam 1 bulan.
    - c. Membuat realisasi hasil ALCO periode bulan sebelumnya yang berhubungan dengan funding.
    - d. Menyiapkan data-data berkaitan dengan suku bunga CASA maupun sejenisnya, biaya provisi dan fee based income serta produk-produk baru.
  - 5) Divisi Retail Business, Divisi Linkage
    - a. Menyiapkan data komparasi suku bunga berkaitan dengan perkreditan (lending rate) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu bank BUMN.
    - b. Menyiapkan proyeksi data kredit minimal 1 (satu) bulan ke depan dan/atau lebih (apabila diperlukan) serta target dalam 1 bulan serta target dalam bulan berjalan.
    - c. Membuat usulan suku bunga lending serta realisasi ALCO periode bulan sebelumnya.
  - 6) Divisi Compliance & Legal  
Apabila diperlukan dapat memberikan opini atas keabsahan dan ruang lingkup peraturan yang berhubungan dengan penetapan serta pengelolaan suku bunga.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Memastikan bahwa aspek kepatuhan harus tetap dijaga sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

### Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	8 Januari 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 Januari 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Januari 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Januari 2015
2	12 Februari 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 16 Februari 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 Februari 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 Februari 2015
3	12 Maret 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 16 Maret 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015
4	14 April 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 17 April 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 April 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 April 2015
5	21 Mei 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 22 Mei 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 22 Mei 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 22 Mei 2015
6	11 Juni 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 15 Juni 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 15 Juni 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 15 Juni 2015
7	8 Juli 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 Juli 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Juli 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Juli 2015
8	13 Agustus 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 18 Agustus 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2015
9	11 September 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 16 September 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 September 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 September 2015
10	9 Oktober 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 13 Oktober 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2015

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

11	12 November 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 16 November 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 November 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 November 2015
12	11 Desember 2015	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 11 Desember 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 Desember 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 Desember 2015

### 3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

#### Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku karena adanya proses penyempurnaan organisasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk menyesuaikan kondisi bisnis Bank saat ini, maka dilakukan perubahan Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai Surat Keputusan Direksi No.30.61/5.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut :

#### Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi :

1. Ketua, merangkap anggota : Managing Director Information Technology
2. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Divisi Information Technology
3. Anggota-anggota :
  - Managing Director Risk & Compliance
  - Managing Director Corporate Business
  - EVP Finance & Operation
  - EVP Retail & Network
  - Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - Kepala Divisi Compliance & Legal
  - Kepala Divisi Operation
  - Kepala Divisi Financial Control
  - Kepala Divisi Corporate Secretary

#### Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan rencana strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan juga menetapkan



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- status prioritas proyek Teknologi Informasi serta bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank).
- 3) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
  - 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati, agar sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi Informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
  - 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha, dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :
    - a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
    - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
    - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
  - 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
  - 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
  - 8) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi topologi jaringan, database, komputer mikro, dan komunikasi data.
  - 9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
  - 10) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
  - 11) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
  - 12) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharannya.
  - 13) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan vendor terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar *due diligence* dengan melakukan evaluasi dan menilai informasi-informasi yang terkait dengan penyedia jasa antara lain meliputi :
    - a. Eksistensi dan sejarah perusahaan.
    - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
    - c. Perusahaan lain yang menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- d. Kondisi keuangan termasuk *review* atas laporan keuangan *audited*.
  - e. Kemampuan dan efektifitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
  - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
  - g. Lingkungan pengendalian intern, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
  - h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
  - i. Kepercayaan dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.
  - j. Jaminan asuransi.
  - k. Kemampuan untuk menyediakan *disaster recovery* dan *business continuity plan*.
  - l. Penerapan manajemen risiko.
  - m. Laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
- 14) Melakukan analisa atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi / *software* yang diajukan oleh *End User* / unit kerja.
  - 15) Analisa yang dimaksud pada angka 14) diatas sekurang-kurangnya terdiri atas :
    - Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
    - Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
    - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank.
    - Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi / *software*, perangkat keras/*hardware* dan jaringan komunikasi tersebut.
    - *Maintenance* dan *support* dari pihak *vendor*.
    - Aspek biaya dan manfaat.
    - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
  - 16) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa yang dilakukan pada angka 14) dan 15).
  - 17) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
  - 18) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
  - 19) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC), dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha (*Business Continuity Plan*).
  - 20) Menghaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
  - 21) Melakukan penilalan diri sendiri / *self assesment* untuk efektifitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	13 Maret 2015	Disaster Recovery Center (DRC) outsourcing dan Domain Name.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2	20 April 2015	Audit terhadap pengembangan sistem layanan internet banking.
3	05 Mei 2015	Pengadaan chip card, Human Resources Information System dan Hardware SKN.
4	03 Juli 2015	Pengadaan Human Resources Information System, Microsoft SAM dan MPN Gen2.
5	31 Juli 2015	Pengadaan aplikasi Fixed Asset, Internet Banking Firewall DRC, MPN Gen2, Penggantian core banking.
6	31 Agustus 2015	Pengadaan change request (CR) fitur probability of default (PD), Virtual Account dan IT Internal Risk Assesment.
7	04 Desember 2015	Pengadaan aplikasi Central Bank Reporting, Solusi Active Directory, Anti Virus, Website enhancement, IBM maintenance dan scheduler Garoon.

#### 4. Komite Human Resources (HR Committee)

##### Struktur dan Keanggotaan

Kegiatan anggota Komite Human Resources telah dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku, namun nama anggota Komite Human Resources berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.01.03/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014 akan disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

Sesuai SK Direksi dimaksud, maka susunan Anggota Komite Human Resources :

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	: Direktur Compliance & Legal Direktur Treasury & Institutional Banking Direktur Micro & Consumer Business EVP Human Capital Kepala Divisi Human Capital

##### Tugas dan Tanggung Jawab

Pada intinya, Komite Human Resources dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan rencana strategis mengenai ketenagakerjaan yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank, antara lain:

- Memastikan keselarasan Kebijakan Human Resources dengan strategi dan tujuan perusahaan.
- Menetapkan strategi untuk mempertahankan sumber dan mengembangkan Human Resources yang berkualitas.
- Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait bidang Human Resources.
- Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan Human Resources.

##### Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Komite Human Resources telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	08 Januari 2015	Usulan kenaikan COLA, usulan mutasi karyawan, dan lain-lain.
2	27 Januari 2015	Usulan kandidat untuk kepala Divisi Retail & Medium Business; Usulan kandidat EVP Distribution Network; Usulan tunjangan jabatan bagi karyawan mutasi; perubahan kebijakan dan Memo SDM; Usulan skala range gaji untuk tahun 2015.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3	12 Maret 2015	Usulan pencabutan Memo Direksi mengenai Tunjangan Pendidikan; Usulan kandidat Capem Kemang; Usulan kandidat Dept. IT Development; Usulan promosi/rotasi/mutasi pada level pimpinan dan Dept. Head.
4	14 April 2015	Usulan promosi/rotasi/mutasi pada level pimpinan dan lain-lain.
5	05 Mei 2015	Usulan penggunaan konsultan Human Capital; Usulan penerimaan karyawan Special Hire; Usulan perpanjangan asuransi rawat inap karyawan; Dan lain-lain.
6	06 Mei 2015	Tindak lanjut hasil audit khusus pelanggaran integritas Pimpinan Cabang (dari TA).
7	22 Mei 2015	Struktur Organisasi Direktorat Asset Recovery; Mutasi Pimpinan Cabang/Capem Klender, Jatinegara, Jambi, Palembang & Greenville; Dan lain-lain.
8	26 Juni 2015	Usulan Dept. Head UKPN Kantor Pusat (KYC/AML), usulan calon Dept. Head Product Development di SME Division; Usulan Division Head untuk SME Division; Usulan calon Pimpinan Cabang/Capem Puri Indah dan Greenville; Berakhir masa kontrak advisor/staff ahli bidang penyelesaian Kredit Bermasalah.
9	21 Agustus 2015	Usulan calon Pimpinan Cabang Palembang Kebumen dan perpanjangan kontrak pimpinan sebelumnya.
10	03 Desember 2015	Usulan calon Advisor Business Development.
11	10 Desember 2015	Usulan calon Wakil Pimpinan Cabang Bandung; Usulan calon Dept Senior Credit Risk Review Officer for Retail.
12	28 Desember 2015	Usulan penunjukan Pjs. Operation Division Head dan merangkap posisi sebagai Financial Control Division, SKMR Division Head, Pejabat Pemutus Kredit (PMK) setingkat Division Head, Anti Fraud Division Head dan merangkap Pjs. Human Capital Division Head.

### 5. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eye principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *business unit* atau Special Asset Management (SAM) di satu pihak, dan Credit Risk Reviewer (CRR) pada pihak lainnya.

Inisiasi kredit dan pengajuan proposal kredit dilakukan oleh *business unit*. Dalam proses *review*, unit bisnis dapat meminta unit Credit Risk Reviewer untuk melakukan kunjungan proyek (OTS), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *business unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti *Memorandum procedure* yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

Proses Persetujuan Kredit secara *four-eye* dilakukan oleh komite kredit sesuai limit kewenangannya.

Komite Kredit adalah komite yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi *business unit* dan Credit Risk Reviewer, dengan kewenangan memutus kredit yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

#### Struktur dan Keanggotaan

Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari para pejabat pemutus kredit (*voting member*), penguul, dan *non-voting member*.

Komite kredit membuat keputusan atas permohonan kredit debitur/calon debitur melalui rapat yang dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan, pengusul, dan dapat bersama dengan pejabat unit kerja/divisi lain, yaitu Divisi *Compliance & Legal*, dan Divisi *Operation* yang diminta opininya sesuai fungsi dan tugas dalam rapat tersebut sebagai *non-voting member*.

Disamping itu sesuai penetapan limit kredit, terdapat pula Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) adalah individu yang diberi kewenangan memutus kredit disisi bisnis unit dibawah Managing Director Business /EVP Business dan *Credit Risk Reviewer* dibawah Managing Director/EVP Risk Management dengan limit yang ditetapkan oleh Direksi dalam rangka proses kredit secara *four eye principle*.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2015 (Ref. SK Direksi No.17.11/5.Kep-DIR-SKMR/JTRUST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015), kewenangan Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri atas :

#### Komite Kredit Kategori A

Komite Kredit Kategori A merupakan komite tertinggi dalam struktur kewenangan memutus kredit dan atau restrukturisasi kredit, minimal terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari Direksi /EVP business unit/SAM dan Direksi/EVP Risk Management yang melakukan kajian atas rekomendasi tingkat pertama dan Komite bertanggung jawab memberikan keputusan kredit final sesuai limit kewenangannya melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK).

Anggota Komite Kredit Pemutus Kategori A, terdiri dari Komite Kredit Kategori A1, Komite Kredit Kategori A2 dan Komite Kredit Kategori A3 yang dibedakan berdasarkan kewenangan pemutusan kredit yang diberikan sebagai berikut:

Kategori A			
Chairman	A1	A2	A3
Direktur Utama	> Rp.20 miliar		
MD Risk Management		> Rp.10 miliar s/d. Rp.20 miliar	
Direktur			> Rp.2 miliar s/d. Rp.10 miliar

#### Komite Kredit Kategori B

Adalah lembaga yang memutus kredit ditingkat kedua untuk limit Division Head yang terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari business unit/SAM dan *Credit Risk Reviewer* dan memberikan rekomendasi pada usulan kredit dari tingkat pertama (minimal terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu dari business unit/SAM dan *Credit Risk Reviewer*), yang melakukan kajian dan pemutusan awal terhadap kelayakan pemberian kredit, untuk selanjutnya diajukan kepada Komite Kredit kategori A melalui mekanisme RKK.

Komite setingkat Kepala Divisi yang bertanggung jawab atas kredit yang diputus sesuai dengan kewenangan limitnya atau dalam rangka merekomendasikan kepada Komite Kredit Kategori A melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK).

Dalam hal bertindak sebagai *recommending*, maka pengusul dapat memiliki atau tidak memiliki wewenang memutus kredit.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Batas Wewenang Memutus Kredit - Kategori B			
Segmen Kredit	Corporate & Linkege Business	Retail - SME, Consumer & Micro	SAM, Treasury & Institutional
Business Linkage Division	s/d Rp.2,0 miliar	-	-
Corporate/Commercial Business Division	s/d Rp.2,0 miliar	-	-
Retail Business Division	-	s/d Rp.2,0 miliar	-
Treasury & Institutional Division	-	-	s/d Rp.2,0 miliar
Special Asset Management Desk	-	-	-
PKK CRR Setingkat Division Head	s/d Rp.2,0 miliar	s/d Rp.2,0 miliar	s/d Rp.2,0 miliar

Batas wewenang memutus kredit segmen Micro, SME dan Consumer dibagi atas kategori AA, BB dan CC dan dilakukan review secara berkala sesuai kebutuhan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai berikut:

**Kategori AA:**

Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) SME dan Consumer sampai dengan Rp.2 miliar, dan PKK segmen mikro sampai dengan Rp.300 juta. PKK dari sisi Credit Risk Reviewer dengan jumlah kewenangan yang setara dengan PKK business unit.

**Kategori BB:**

Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) SME dan Consumer sampai dengan Rp.1 miliar, dan PKK segmen mikro sampai dengan Rp.200 juta. PKK dari sisi Credit Risk Reviewer dengan jumlah kewenangan yang setara dengan PKK business unit.

**Kategori CC:**

Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) SME dan Consumer sampai dengan Rp.500 juta, dan PKK segmen mikro sampai dengan Rp.100 juta. PKK dari sisi Credit Risk Reviewer dengan jumlah kewenangan yang setara dengan PKK business unit.

Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK)	Kategori - Batas Wewenang Memutus Kredit		
	AA	BB	CC
Retail - SME & Consumer	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2 milyar	> Rp. 500 juta - s.d Rp. 1 milyar	s.d Rp. 500 juta
Retail - Micro	> Rp. 300 juta s.d Rp. 300 juta	> Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	s.d Rp. 100 juta

Sedangkan koanggotaan Komite Kredit berdasarkan limit kredit adalah sebagai berikut:

Kategori	Penyedia Kredit	Penyedia	Non-Using Member
A1	<p>Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur yaitu MD/EVP Corporate Business, Direktur/EVP Risk Management atau</p> <p>3 (tiga) Direktur salah satunya Direktur/EVP Risk + 1 (satu) EVP Baris (tidak termasuk EVP Treasury dan Direktur bukan dari Direktur Compliance &amp; Legal. Sedangkan EVP dapat dari EVP Distribusi Network</p>	<p>Kapala Divisi Corporate-Commercial Business/Kapala Divisi SME Retail, Consumer &amp; Micro Business/Kapala Divisi Linkage Business/Kapala Divisi Treasury &amp; Institutional Banking/Kapala Divisi Commercial Risk/Divisi CRR, PKK, Risk Teller dan Risk Reviewer sebagai wakil/wakil.</p> <p>Dalam hal Kapala Divisi Business Unit (pengurus) bertanggung jawab, dapat menunjuk wakil Deputy (satu) + 1 (satu) Department Head pengurus.</p>	<p>Direktur Compliance &amp; Legal atau EVP Finance &amp; Operation, diampingi oleh: Kapala Divisi Operation/Deputy Kapala Divisi Compliance &amp; Legal/Deputy</p>



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

A2	<p>Minimal bertanggung jawab 2 (dua) Direktur (MD/EVP Corporate Business/EVP Sponsor) dan Direktur/EVP Risk Management (kecuali Direktur Compliance &amp; Legal) atau</p> <p>1 (satu) Direktur/EVP Risk Management + 1 (satu) EVP Business Sponsor.</p>	<p>Kepala Divisi Corporate-Commercial Business/Kepala Divisi SME, Consumer &amp; Micro Business/Kepala Divisi Linkage/Kepala Divisi Treasury &amp; Institutional Banking/bersama Kepala Divisi Commercial Risk/Divisi CRR, PKK Risk Reviewer, Senior Staff Risk Reviewer sebagai Recommending.</p> <p>Dalam hal Kepala Divisi Business Unit pengusul bertanggung jawab, dapat diwakilkan pada Deputy (satu) + 1 (satu) Department Head pengusul.</p>	<p>Direktur Compliance &amp; Legal atau EVP Finance &amp; Operation, didampingi oleh Kepala Divisi Operation/Deputy Kepala Divisi Compliance &amp; Legal/Deputy</p>
A3	<p>Minimal 1 (satu) Direktur/EVP Sponsor + 1 (satu) Direktur/EVP Risk, Atau</p> <p>1 (satu) Direktur/EVP Risk + 1 (satu) Direktur/EVP Business atau pengusul.</p>	<p>Kepala Divisi Commercial Business/Kepala Divisi SME &amp; Micro Business/Kepala Divisi Linkage Business/Kepala Divisi Consumer Business/Kepala Divisi Treasury &amp; Institutional Banking/bersama Kepala Divisi Commercial Risk/Divisi CRR, PKK Risk Reviewer, Senior Staff Risk Reviewer sebagai Recommending. Atau</p> <p>Kepala Divisi Commercial Business/Kepala Divisi SME &amp; Micro Business/Kepala Divisi Linkage Business/Kepala Divisi Consumer Business/Kepala Divisi Treasury &amp; Institutional Banking, bersama Kepala Kantor Wilayah (kantor) - Account Officer bersama Kepala Divisi Commercial Risk/Divisi CRR, PKK Risk Reviewer, Senior Staff Risk Reviewer sebagai Recommending.</p>	<p>Kepala Divisi Operation/Deputy Kepala Divisi Compliance &amp; Legal/Deputy</p>
E	<p>Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Business dan Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Credit Risk.</p>	<p>Account Officer dan/atau Team Leader serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta Reviewer.</p>	<p>Tanpa Non Voting Member</p>
PKKAA	<p>Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Business dan Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Credit Risk.</p>	<p>Account Officer dan/atau Team Leader serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta Reviewer.</p>	<p>Tanpa Non Voting Member</p>
PKKBB	<p>Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Business dan Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Credit Risk.</p>	<p>Account Officer dan/atau Team Leader serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta Reviewer.</p>	<p>Tanpa Non Voting Member</p>
PKKCC	<p>Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Business atau Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) Credit Risk.</p>	<p>Account Officer dan atau Team Leader serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta Reviewer.</p>	<p>Tanpa Non Voting Member</p>

Rapat Komite Kredit dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh Pengusul (*Recommending*), *Voting Member*, dan *Non Voting Member*.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat, antara lain mencakup permohonan fasilitas kredit baru, penambahan fasilitas atau plafond kredit, perpanjangan fasilitas kredit, perubahan fasilitas kredit, penggantian agunan fasilitas kredit, perubahan jangka waktu fasilitas kredit/*Rescheduling*, restrukturisasi kredit bermasalah, dan sebagainya.

Keputusan kredit untuk Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dilaksanakan berdasarkan Rapat Komite Kredit (RKK) dan Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yang berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank yang berlaku.

**Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat**

Selama tahun 2015, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit (RKK) dan Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) telah sesuai dengan pedoman pada Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.



## BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### 4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum" yang berlaku sejak tanggal 01 September 2011.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menjalankan usahanya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi juga memegang peranan penting melakukan pengawasan aktif yang antara lain dilakukan dalam bentuk persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, dan permintaan penjelasan. Fungsi Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* (sebelum terjadi event yang tidak diharapkan) hendaknya dapat terlaksana secara menyeluruh (*comprehensive*), yaitu tidak hanya melalui tersedianya kebijakan/peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga pencegahan langsung oleh para pelakunya. Hal ini dapat tercipta jika telah terjadi internalisasi budaya kepatuhan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan sehingga karyawan juga diharapkan memiliki kesadaran atas risiko di masing-masing unit kerjanya.

Perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berupaya meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan, serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

#### Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan Bank yang dibampalkan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direksi berkewajiban :

- 1) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

#### Kerangka Kerja Kepatuhan (*Compliance Framework*)

Kerangka Kerja Kepatuhan menyajikan kebijakan dan pedoman/Standar Operasional Prosedur kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal dan kode etik dan pedoman tingkah laku. Kebijakan dan Pedoman disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan *best practice* yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/inisiatif strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha Bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*.

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan kedepannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat *ex-ante* serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di Bank secara keseluruhan.

#### Kunci Keberhasilan dan Tantangan Dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus berupaya meningkatkan sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis dapat terjaga dan tetap berjalan dengan baik apabila serangkaian faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) dapat dipenuhi, yaitu :

##### • *Start From The Top*

Komitmen tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

##### • *Compliance Culture*

Adanya budaya 'patuh' di semua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis sebagaimana diinginkan. Secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, maka perlu dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain dalam

ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.

• *Compliance Procedure and Policy in Place*

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan keslapan dan kesungguhan suatu organisasi untuk menerapkan fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan oleh regulator. Di dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.

• *People and Infrastructure*

Faktor kunci keberhasilan penerapan fungsi kepatuhan di suatu organisasi pada akhirnya akan bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem Informasi baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Dalam hal ini perlu dicermati kondisi sumber daya manusia, dalam artian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki *multi-talent* atau *skills* mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.

**Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Berdasarkan pada peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui Surat Edaran atau internal memo maupun internal email.
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, *Good Corporate Governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk memastikan agar Bank mematuhi semua Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memiliki seorang Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan anggota Direksi yang penunjukannya telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain yaitu :

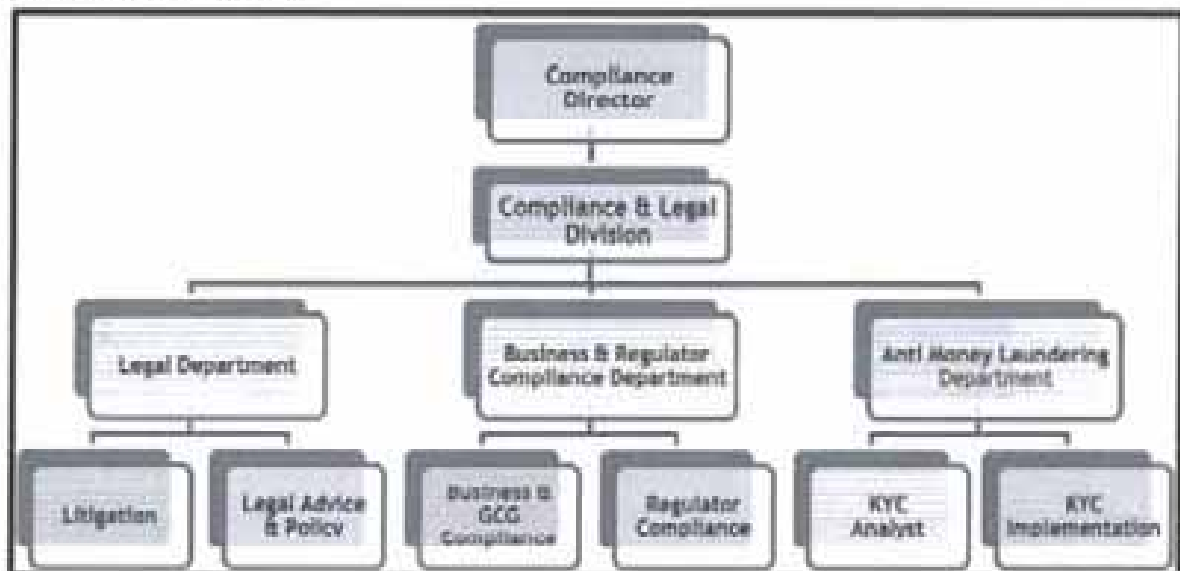
1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak ada rangkap jabatan dengan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
3. Tidak membawahkan fungsi-fungsi :
  - a. Bisnis dan operasional (kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dan kegiatan keagenan).
  - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
  - c. *Treasury*.
  - d. Keuangan dan akuntansi.
  - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa.
  - f. Teknologi informasi.
  - g. Audit Intern.
4. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi unit kerja Dibawah Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk Tahun 2015, antara lain berdasarkan :

- Surat Keputusan (SK) Direksi No.21.01/S.Kep-Dir-HRMD/Mutlaha/1/2015 tanggal 21 Januari 2015, Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance* (CPD), Divisi *Legal* (LGD), dan Divisi *Human Capital*.
- Diubah dengan SK Direksi No.13.09/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, Direktur Kepatuhan tetap membawahi Divisi *Compliance* (CPD), Divisi *Legal* (LGD), dan Divisi *Human Capital* (HCD).
- Terakhir diubah lagi dengan SK Direksi No.01.06/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dimana LGD digabung dengan CPD menjadi nama Divisi *Compliance & Legal* (CPD) sehingga Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance & Legal* (CPD), Divisi *Human Capital* (HCD), dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dengan ilustrasi gambar sebagai berikut :



Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Division*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk



**Keterangan :**

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Division*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Memo No.331/MEMO/CPD/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Kepala Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Division Head*) dengan Wakil Kepala Divisi Kepatuhan & Legal (*Compliance & Legal Deputy Division Head*) yang membawahi Unit Kerja Legal, Satuan Kerja Kepatuhan (meliputi Unit Kerja Business & GCG Compliance, dan Regulator Compliance), serta Unit Kerja Anti Money Laundering.

**Kepala Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division Head*)**

Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku maka Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi kriteria yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan independensi.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan atau tidak merangkap jabatan struktural lain.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK yang mengacu ketentuan pelaporan bagi Pejabat Eksekutif mengenai Bank Umum.

### Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen yaitu:

- a. Dibentuk secara tersendiri di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan tugasnya di seluruh jaringan kantor Bank.
- b. Bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.
- c. Mempunyai akses langsung pada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat dan staf di Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan tidak ada yang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :
  - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
  - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
  - Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- g. Melakukan *Compliance Checklist* secara *on-site* atas aktivitas yang berkaitan dengan pertizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor.

## Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Kerangka kerja pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada 3 (tiga) lini pertahanan yaitu :



- **First Line of Defense**, merupakan peran lini pertahanan pertama yang diwakili oleh Unit Bisnis dan Unit Pendukung yang berfungsi sebagai unit pengambil dan pemilik risiko (*risk taking and risk owner unit*), dimana mereka mengejar pertumbuhan usaha dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek risiko.
- **Second Line of Defense**, merupakan lini pertahanan kedua yang dilakukan oleh *Risk Management Division* dan *Compliance Division* yang berfungsi sebagai *risk control unit*, yang tugasnya antara lain: menetapkan kerangka dan regulasi Internal mengenai pengelolaan risiko, baik yang sifatnya finansial maupun nonfinansial; melakukan pemantauan terhadap bagaimana fungsi bisnis dan nonbisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko, dan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan → *ex ante* (upaya preventif / pencegahan).
- **Third Line of Defense**, merupakan lini Pertahanan Ketiga yang dilaksanakan oleh auditor internal yang berfungsi sebagai *risk assurance*. Auditor bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Peran utama auditor internal terkait manajemen risiko adalah melakukan review dan evaluasi berkala terhadap kerangka dan tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan kedua lini ini berjalan sesuai dengan perannya masing-masing → *ex post* (review setelah kejadian).

## Program Kerja yang Terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2015 Satuan Kerja Kepatuhan yang meliputi Unit Kerja Business & GCG Compliance, dan Regulator Compliance, serta Unit Kerja Anti Money Laundering telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

1. Pemantauan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

*[Handwritten signature]*

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

a) Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio		Keterangan
	Semester I Posisi Juni 2015	Semester II Posisi Desember 2015	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) (Risiko Kredit, Operasional & Pasar)	14,53%	15,49%	Patuh, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RPMM) berada diatas ketentuan Bank Indonesia
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
BMPK Kredit :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh, tidak ada pelanggaran BMPK
Pelampauan	Rp.180.227 juta	Rp.146.857 juta	Masih terdapat pelampauan BMPK, namun terus diupayakan agar di tahun 2016 dapat diselesaikan.
BMPK Surat Berharga :			
Pelanggaran	Nil	Nil	Patuh, tidak ada pelanggaran BMPK.
Pelampauan	Rp.379.187 juta	Nil	Patuh, Posisi Desember 2015 adalah "Nilai" karena penghapusbukuan Surat-Surat Berharga.
Posisi Devisa Neto (PDN)	11,64%	7,12%	Patuh, PDN sudah sesuai ketentuan Bank Indonesia batas maksimal sebesar 20% dari modal.
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/ Non Performing Loan (NPL) :			
NPL Gross	12,09%	3,71%	Patuh, NPL Gross membaik/menurun cukup signifikan sehingga sudah sesuai ketentuan Bank Indonesia (ditinjau 5%).
NPL Net	6,35%	2,19%	Patuh, NPL Net membaik/menurun



Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

			cukup signifikan sehingga sudah sesuai ketentuan Bank Indonesia (dibawah 5%).
Giro Wajib Minimum (GWM) :			
GWM Rupiah Primer	8.08%	7.82%	Patuh, sudah sesuai ketentuan BI (minimal 8% menjadi 7,5% per 1/12/2015).
GWM Rupiah Sekunder	16.80%	11.00%	Patuh, sudah sesuai ketentuan BI (minimal 4%).
GWM Rupiah LDR / LFR	Rasio LDR 77,10% dibawah ketentuan rasio LDR Target (78% - 92%).	-	Patuh, Posisi Desember 2015 Rasio LDR 85,14% berada dalam kisaran ketentuan rasio LDR Target (78% - 92%)
GWM Valas	8.45%	8.87%	Patuh, sudah sesuai ketentuan BI (minimal 8%).
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	4 (kurang sehat)	3 (cukup sehat)	
Profil Risiko Bank :			
Profil Risiko	4	2	
Risiko Inheren	Moderate To High	Low To Moderate	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Fair	Fair	

b) Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator, antara lain:

- Terlambat koreksi *offline* LBBUK Minggu ke-IV bulan Maret dan April 2015 dan koreksi *online* laporan SID bulan Desember 2014 Cabang Tomang, dan terlambat 2 hari Kerja penyampaian pemberitahuan hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- Penyampaian koreksi laporan secara *Offline* Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk kesalahan 16 item pada LBU data Maret dan April 2015.
- Surat teguran untuk evaluasi dan permintaan revisi atas isi materi Laporan Kepatuhan kepada OJK Semester II tahun 2014.
- Kekurangan dalam pemenuhan dokumen *underlying* dari transaksi pembelian valas.
- Kesalahan pelaporan LBBU akibat adanya 16 fasilitas kredit restrukturisasi.
- Kesalahan pelaporan LBU akibat adanya pelaporan kualitas kredit atas 17 fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sanksi denda administrasi atas hasil pemeriksaan OJK 31 Januari 2015.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Sanksi keterlambatan penyampaian LBBU per data Minggu keempat September 2015.
  - Sanksi keterlambatan penyampaian Online LBU data September 2015.
  - Pengenaan biaya proses DKE dan sanksi kesalahan penggunaan kode transaksi treasury single account 51-52 SKNBI periode September 2015.
  - Sanksi keterlambatan penyampaian LBBU periode Minggu 1 November 2015 (Data minggu IV Oktober 2015), seharusnya disampaikan pada tanggal 1-6 November 2015, namun baru disampaikan pada tanggal 9 November 2015.
- c) Mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih efektif, yang secara rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait pelaporan yang harus disampaikan kepada pihak eksternal/regulator, agar pelaporan dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu, sehingga terhindar dari adanya teguran, sanksi dan denda.
- d) Posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 20 November 2014 masih 'Vacant' /kosong, karena Komisaris Independen yang ada hanya tinggal 1 (satu) orang yang sudah menjabat/merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Diharapkan di tahun 2016 pengisian posisi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dipenuhi oleh Komisaris Independen yang terpilih.
- e) Proses monitoring kredit belum dilakukan dengan optimal sesuai kebijakan dan prosedur kredit (aspek kepatuhan) yang dapat berdampak pada:
- Keterlambatan proses perpanjangan Fasilitas Kredit (dapat berdampak pada pemburukan kolektibilitas).
  - Pemenuhan kelengkapan dokumen dari bisnis unit untuk kepentingan unit kerja terkait (aspek legal, risiko hukum), legalitas usaha, misal: SKDP, SIUP, TDP, UUG, dan Ijin Usaha Pembiayaan.
  - Asuransi agunan yang sudah jatuh tempo dan belum dilakukan perpanjangan masa berlakunya saat pelaksanaan RKK.
- f) Proses pemberian kredit belum sepenuhnya memenuhi kebijakan dan SOP/PPK yang bertaku, antara lain:
- Pembahasan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) masih kurang lengkap/informatif, misal : Tidak dicantumkan angka BAPK, tanggal penilaian agunan, dan nilai Hak Tanggungan, tidak dicantumkan/dilakukan *Trade Checking*, dan/atau *BI Checking* Pengurus dan atau Pemegang Saham.
  - Ketentuan kewajiban Laporan Keuangan *Audited*.
  - Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Biaya Administrasi Kredit, pemasangan nilai Hak Tanggungan, suku bunga kredit.
  - Ketidakpatuhan terhadap kelengkapan tanda tangan pemutus kredit dalam pemberian kredit yang dihindari pada Risalah Keputusan RKK.
  - Ketidakpatuhan terhadap kelengkapan tanda tangan *Non Voting Member* dalam Risalah Keputusan RKK.
- g) Aktivitas Bidang Operasional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
- Pelaksanaan *Anti Fraud Awareness Program* dan *Program Know Your Employee* belum konsisten dijalankan Capem yaitu penyampaian *sharing session* materi terkait pencegahan *fraud* belum rutin dibuat notulen dan catatan *red flag* pegawai serta penelitian *BI Checking* belum dilakukan.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Surat Penunjukkan Pembukaan Kantor diserahkan pada Security yang seharusnya oleh Pejabat Cabang yang ditunjuk, pembuatan surat penunjukkan yang tidak lengkap dan struktur organisasi yang belum mencantumkan seluruh pegawai yang ditempatkan,
  - Kecukupan terhadap kompetensi karyawan dan peningkatan kualitas sistem *Internal control* harus tetap menjadi perhatian bagi Pemimpin Cabang untuk mencegah terjadinya kerugian Bank.
  - Kelemahan monitoring dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan Operation Officer terhadap SOP yang berlaku dalam proses pembukaan rekening, kesalahan *setting* parameter pasca proses tutup rekening dan *setting* saldo minimum.
- h) Aktivitas Bidang Treasury yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
- Pelaksanaan transaksi Treasury Gallery dicantumkan bahwa Head Treasury Dealer dan Dealer Treasury Gallery menentukan kurs special untuk nasabah atau cabang yang ditunjuk berdasarkan *Tiering*, Kondisi sebenarnya untuk pemberian kurs special masih meminta persetujuan dari Treasury Sales & Banknotes Department.
  - Kewenangan Limit Transaksi bahwa Treasury Gallery diberikan kewenangan untuk mengelola *Nett Open Position* (NOP) dengan besaran dan ketentuan diatur oleh Unit Kerja Marketing Trading, tetapi seharusnya pengelolaan *Nett Open Position* (NOP) merupakan kewenangan Treasury Sales & Banknotes Department (KP).
  - Perlu peningkatan monitoring terhadap peningkatan supervisi dari Team Leader dan Departement Head mengenai :
    - Monitoring saldo dan aktivitas rekening-rekening Nostro Rupiah yang dibuka oleh Cabang/Capem.
    - Monitoring aktivitas rekening Nostro Di UOB Singapore dan Luar Negeri.
    - Monitoring kebenaran Data pada Laporan PDN 30 Menit.
    - Monitoring dalam pembuatan laporan posisi Kas di Cabang/Capem.
  - Kesalahan analisa yang dikarenakan belum optimalnya *Dual Control* dari Line Manager terhadap pekerjaan yang dibuat oleh Staff/Dealer untuk meminimalisir *Human Error* yang dapat berdampak risiko, seperti data profit/loss yang dibutuhkan untuk pemantauan internal.
  - Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Treasury Posisi 30 Juni 2015 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i) Penerapan PSAK 50/55 mengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku, yaitu implementasi Engine PSAK 50/55 untuk mendukung laporan keuangan telah dilakukan melalui tahapan SIT, UAT dan migrasi rekening pinjaman pada *Equation* ke aplikasi Bank Vision, dan Training User. Untuk konversi & verifikasi, *Parallel Run* dilakukan pada bulan September 2015, dan *Cut Off* pada bulan Oktober 2015. Sedang dilakukan *review* hasil implementasi PSAK.
- j) Masih terdapat kasus *internal fraud* oleh pegawai yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum dengan melaporkan pegawai yang terlibat *fraud* kepada pihak berwajib/POLRI.
- k) Pemenuhan komitmen dan batas waktu penyelesaian atas hasil temuan Tim Pengawas/pemeriksaan OJK yang masih belum diselesaikan sehingga sisanya diperlukan komitmen untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya yang lebih intensif dan efektif.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Melakukan pemantauan atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor yaitu melalui :
- Penyusunan *Compliance Checklist* persiapan kantor untuk memastikan kesiapan fisik gedung, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aktiva yang akan digunakan sebelum pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
  - Koordinasi dengan *project manager* (Unit Kerja terkait yang berwenang).
  - Melakukan *review* dokumen yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - Melakukan kunjungan (*on-site*) sekaligus untuk melihat dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ke lokasi kantor yang diajukan permohonannya kepada Bank Indonesia.

Sampai dengan periode Desember 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengajukan Pembukaan maupun Relokasi, Penutupan, dan Perubahan Status Jaringan Kantor yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah diklasifikasikan dengan rincian :

Keterangan	Status Januari s/d Desember 2015 Disetujui Otoritas Jasa Keuangan		Dalam Proses Persetujuan	Belum Dapat Disetujui
	Business Plan	Realisasi		
Pembukaan Kantor	3	-	-	-
Relokasi Kantor	16	10 *)	-	-
Penutupan Kantor	-	-	-	-
Peningkatan Status	-	-	-	-
Perubahan Status	4	2 *)	-	-

\*) Untuk realisasi relokasi jaringan kantor, dan perubahan status jaringan kantor sudah memperoleh Surat Ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan periode Desember 2015 jumlah jaringan kantor sebanyak 61 kantor dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kantor	Jumlah	
	Sampai dengan Juni 2015	Sampai dengan Desember 2015
Kantor Wilayah	4	4
Kantor Cabang	23	21
Kantor Cabang Pembantu	35	37
Kantor Kas	3	3
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Mengikuti proses pengambilan keputusan manajemen bank dengan mengkaji/menguji terlebih dahulu terhadap setiap rencana/rancangan peraturan intern Bank maupun kebijakan/keputusan manajemen apakah telah patuh pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, termasuk pula memberikan arahan dan saran dalam mengikuti proses Rapat Komite Kredit (RKK), Rapat Teknis, Rapat penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Rapat ALCO, Rapat Penyusunan Kebijakan dan SOP, dan rapat-rapat lainnya terkait dengan penerapan kepatuhan dalam menentukan kebijakan dan aktivitas Bank.
4. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) kegiatan operasi Bank pada setiap satuan kerja/Divisi terkait, yang memberikan "*Compliance Opinion*" atas penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan seperti permohonan masukan/opini dari Divisi/unit kerja lain dalam rangka persiapan peluncuran produk dan aktivitas baru agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan JTrust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
  - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Capem/Kas, antara lain pelatihan terkait dengan APU-PPT, GCG, Kepatuhan, dan lain-lain.
  - Rapat Budaya setiap hari Rabu oleh seluruh Divisi/unit kerja, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang/Capem/Kas yang senantiasa mengingatkan karyawan untuk melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
6. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan untuk membangun Budaya Kepatuhan di seluruh unit organisasi Bank sehingga pengelolaan Risiko Kepatuhan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan transaksi dan aktivitas operasional Bank. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank meliputi :
  - Pengukuran Profil Risiko untuk Risiko Kepatuhan
  - Risiko Kepatuhan yang dihadapi.
  - Mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.
  - Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan.

Hasil dari *Self Assessment* atas *Compliance Risk* yang menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile* Bank tahun 2015 telah disampaikan kepada OJK sebagai berikut :

No	Periode/Posisi Penilaian	Peringkat Risiko Inheren	Trend	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Trend
1	Triwulan 2/Juni 2015	Moderate (Maret 2015 = Moderate)	Tetap	Fair (Maret 2015 = Fair)	Tetap
2	Triwulan 4/Des. 2015	Moderate (September 2015 = Moderate)	Tetap	Fair (September 2015 = Fair)	Tetap

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam bentuk :

- Laporan Rencana kerja kepatuhan, yang dimuat dalam rencana bisnis Bank.
- Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2015 terkait kebijakan Direksi tidak ada Laporan Khusus yang diterbitkan, kecuali Bank telah menyampaikan Laporan realisasi rencana tindak (*Action Plan*) BDPI kepada Tim Pengawas OJK sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan November 2015, serta surat Bank No.03.02/S.Dir-SKMR/JTRUST/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Status BDPI.
- Laporan kepatuhan, yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2015 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.31.11/S-Dir-CPD/JTRUST/VII/2015	31 Juli 2015
Semester II	No.27.15/S-Dir-CPD/JTRUST/II/2016	27 Januari 2016

8. Terkait tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan melalui Unit Kerja Anti Money Laundering telah melakukan pengawasan terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan PBI No.14/27/PBI/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:

1. Bank telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa :
  - Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk Periode Januari 2015 s/d Desember 2015 sesuai target yang telah disusun oleh seluruh kantor dalam Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2014 terdahulu.
  - Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2016 PT Bank JTrust Indonesia Tbk Posisi Data Desember 2015 sesuai pencapaian target/realisasi pengkinian data tersebut yang berpedoman pada format lampiran dalam SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013.
  - Laporan Rencana Kerja (*Action Plan*) pelaksanaan program APU dan PPT Tahun 2016.
2. Memberikan Opini/Pendapat/Kajian terkait penerapan kebijakan dan prosedur APU-PPT termasuk produk dan/atau aktivitas baru.
3. Menjawab surat dan atau pemenuhan permintaan data dari KPK, PPATK dan Kantor Pajak yang terkait dengan proses hukum.
4. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan Reguler mengenai penerapan APU-PPT kepada seluruh Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait, maupun penyampaian Memo yang bersifat sosialisasi lainnya.

5. Satuan Kerja Kepatuhan melalui Unit Kerja Anti Money Laundering telah melakukan analisis terhadap transaksi yang terkait dengan kewajiban pelaporan kepada PPATK yang mencakup Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transaction Report* (LTKM/STR), Laporan Transaksi Keuangan Tunai/*Cash Transaction Report* (LTKT/CTR), Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri/*International Fund Transfer Instruction* (LTKL/IFTI), Sistem Informasi pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan Penundaan transaksi nasabah.
6. Laporan hasil monitoring kelengkapan data mandatory untuk rekening baru setiap bulan.
7. Melakukan pembinaan/teguran secara lisan maupun tertulis kepada Kantor Cabang/Capem terkait Optimalisasi penggunaan Sistem Smart-AML khususnya pelaporan LTKM/STR untuk pelaporan ke PPATK, dan/atau terkait kelengkapan data mandatory nasabah setiap bulan.
8. Distribusi/penyebaran Data Daftar Teroris dari Otoritas Jasa Keuangan/Polri kepada seluruh kantor cabang melalui mekanisme upload dan pengecekan secara otomatis ke database nasabah untuk mendeteksi kemungkinan kesamaan/kemiripan nama/profil yang dilakukan di sistem Smart AML.

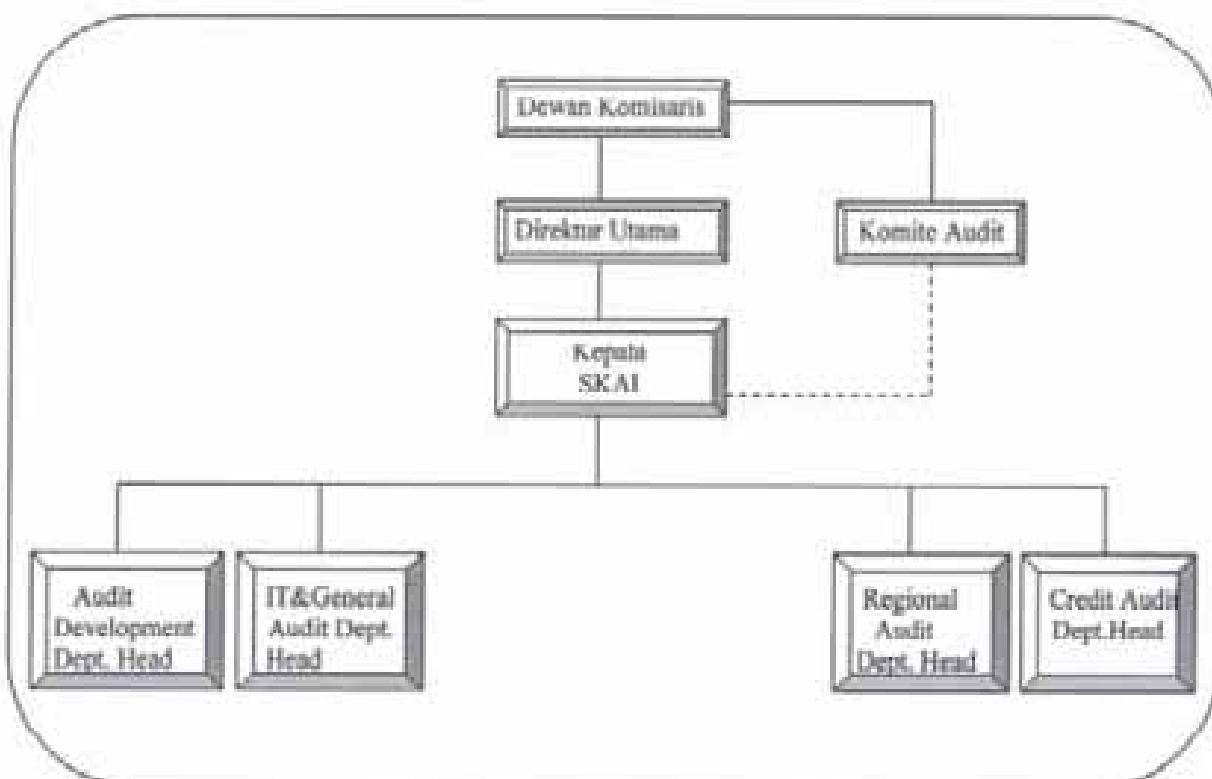
#### 4.2. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan Independen unit yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didisain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control*, *Risk Management* dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut diatas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan unit kerja telah merasakan manfaat keberadaan SKAI bagi pengamanan dan peningkatan bisnis.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, posisi SKAI berada dibawah langsung dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis koordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan sebagai mata dan telinga Direktur Utama terhadap penegakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta pengamanan kegiatan operasional Bank terkait dengan aktivitas penghimpunan dana, kredit, biaya dan *fee based income*. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2015



SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/control serta GCG. Aktivasinya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

*Audit Charter* adalah dokumen formal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis koordinatif kepada Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI kepada Direksi dan Komisaris. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kelengkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan pelaksanaannya dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*Independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of Interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen. Juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.



Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* yaitu Audit terhadap proses operasional yang berisiko tinggi dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

#### Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah :

- Semua SDM SKAI telah mempunyai Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 untuk Auditor dan Tim Leader, Level 1 dan 2 untuk Department Head, dan Level 1,2 dan 3 untuk Kepala SKAI.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, SKAI telah mempunyai 5 (lima) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.

Selring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

#### Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, maka paling kurang setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2013 untuk periode audit 2011-2013 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2016.

#### Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review (end to end process)* untuk memastikan

bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan Monitoring) telah dilakukan secara *prudent*.

- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala SKAI berdasarkan saran dari *Regional Head/General Audit Head* dan hasil pra audit.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong, Satisfactory, Fair, Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *summary report* ke Direktur Utama dan atas kelemahan SPI akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *corrective action*.

#### 4.2.1. Pelaksanaan Audit Intern

##### A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun telah digunakan metodologi *COSO Framework* (5 komponen) *Up dates 2014* yang meliputi:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information & Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

##### B. Pemeriksaan Pasif (*On Desk Audit*)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi monitoring kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

#### 4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Pada tahun 2015, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sebanyak 69 obyek pemeriksaan, yang terdiri dari 22 Kantor Cabang, 31 Kantor Cabang Pembantu, dan 16 Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat. Tidak ada penugasan/audit khusus.

Adapun pencapaian terhadap Rencana Audit dengan Realisasi Audit sebagai berikut :

Obyek Audit	2015			2014		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	22	22	100	21	21	100
Kantor Cabang Pembantu	31	31	100	37	37	100
Kantor Kas *)						
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	16	16	100	19	10	52,63
Penugasan Khusus	-	-	-	-	11	100
<b>Total Audit</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
Loan Review	40	30	75	60	60	100
Audit Tematik	-	-	-	3	3	100

Keterangan :  
 \*) Pemeriksaan Kantor Kas menjadi satu kesatuan dengan audit Kantor Cabang yang menjadi induknya.  
 \*\*) Pencapaian Loan Review sebesar 75% karena banyaknya pencairan kredit di akhir tahun 2015 sehingga file kredit baru dapat diperiksa pada Januari 2016.

#### 4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Berikut ini kesimpulan temuan penting beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

##### 1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (5 COSO Component) cukup memadai, temuan audit rata-rata ditemukan pada *Control Environment* dan *Monitoring* yaitu petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/KBO/OO) yang tidak menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap transaksi harian pada hari H+1, dengan Audit Rating 74,83 (*Fair*).

##### 2. Bidang Kredit

Dari hasil audit Divisi-Divisi Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena kurang komprehensifnya proses pengendalian kredit dan kurangnya monitoring pasca pencairan kredit dengan nilai Audit Rating 74,58 (*Fair*).

##### 3. Pemeriksaan pada seluruh Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan monitoring atas aktivitas Operasional Divisi dan pengkinian SOP dengan Audit Rating 75,06 (*Satisfactory*).

#### 4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Guna mendukung tercapainya laporan keuangan yang memadai dan kecukupan proses pelaporan keuangan, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan Internal sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pengungkapan Informasi (*disclosure*) secara transparan kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media Cetak, YLKI, LPPi, dan sebagainya serta ditampilkan pada Home Page atau Website PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dengan alamat [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).

Transparansi kondisi keuangan bank diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank".
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank", sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 perihal "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank".
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal "Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia".

Implementasi penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk disampaikan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

- 1) Informasi umum, yang meliputi :

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Kepengurusan;
  - b. Kepemilikan;
  - c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank;
  - d. Strategi dan kebijakan manajemen;
  - e. Laporan manajemen.
- 2) Laporan Keuangan tahunan, yang meliputi :
- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - d. Laporan Arus Kas;
  - e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.
- 3) Opini dari Akuntan Publik.
- 4) Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- 5) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- 6) Aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam angka (1) sampai dengan angka (5) diatas.
- 7) Informasi lainnya.

Dalam menjalankan fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu fungsi transparansi kondisi keuangan, Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*) dan tanggal 31 Desember 2014 (*Audited*).

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2015, bahwa dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Untuk Laporan Keuangan tahun buku 2015 dan 2014 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara (*An Independant Member Firm of Morison International*) dengan Partner Riani, yang berdasarkan Laporan Auditor Independen No.0131/T&T-GA/R-3/2016 tanggal 18 Maret 2016 menyatakan opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dalam segala hal yang material.

Informasi ringkas Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2015 (*Audited*) dan 31 Desember 2014 (*Audited*) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

## Laporan Keuangan

### ASET (*Audited*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2015	31-12-2014 *)
1	Giro pada Bank Indonesia	880.957	1.321.263
2	Giro pada Bank Lain - Neto	423.925	146.766
3	Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain - Neto	462.095	1.435.819

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

4	Surat-Surat Berharga - Neto	1.240.069	1.684.151
5	Tagihan Derivatif - Neto	2.839	117
6	Kredit yang Diberikan - Neto	9.176.579	7.234.672
7	Agunan yang Diambil Alih - Neto	71.932	-

**LIABILITAS dan EKUITAS**

**LIABILITAS (Audited)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2015	31-12-2014
1	Simpanan Nasabah: - Pihak Berelasi - Pihak Ketiga	121.133 10.899.646	24.736 11.002.003
2	Simpanan dari Bank lain	378.494	48.745
3	Liabilitas Derivatif	53	126

**EKUITAS (Audited)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2015	31-12-2014
1	Modal Saham yg ditempatkan & disetor penuh	11.223.155	10.223.155
2	Tambahan modal disetor	178.759	178.759
3	Uang Muka Setoran Modal	-	300.000
4	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Neto	99.269	128.907

**LABA (RUGI) (Audited)**

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2015	31-12-2014 *)
1	LABA (RUGI) BERSIH	(676.010)	(663.747)
2	LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,0008 )	(0,0006)

**Rasio-Rasio Keuangan Yang Penting (Audited)**

	Pos-Pos Tertentu	31-12-2015	31-12-2014 *)
Permodalan	- Rasio KPMM yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	15,74%	13,55%
	- Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	15,49%	13,48%
	- Aset Tetap terhadap Modal	20,81%	32,30%
Aset Produktif	- Aset Produktif bermasalah	7,82%	22,20%
	- NPL - Gross	3,71%	12,24%
	- NPL - Neto	2,19%	5,45%
	- PPAP terhadap Aset Produktif	5,69%	17,34%
	- Pemenuhan PPAP	89,06%	112,06%
Rentabilitas	- ROA	(5,37)%	(4,97)%
	- ROE	(59,03)%	(58,07)%
	- NIM	0,93%	0,24%
	- BOPO	143,68%	136,39%
Likuiditas	LDR	85,00%	71,14%
Kepatuhan	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	- GWM Primer Rupiah	7,82%	11,68%
	- GWM Sekunder Rupiah	11,00%	19,22%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	- GWM Valas	8,87%	8,77%
	PDH (Per postul Neraca terhadap Modal Akhir Tahun)	7,13%	3,22%

\*1 Sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), Bank menyesuaikan kembali (restated) laporan keuangan urut-urutan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

## BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### 5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di JTrust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di JTrust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pengawasan manajemen

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
- (4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi :

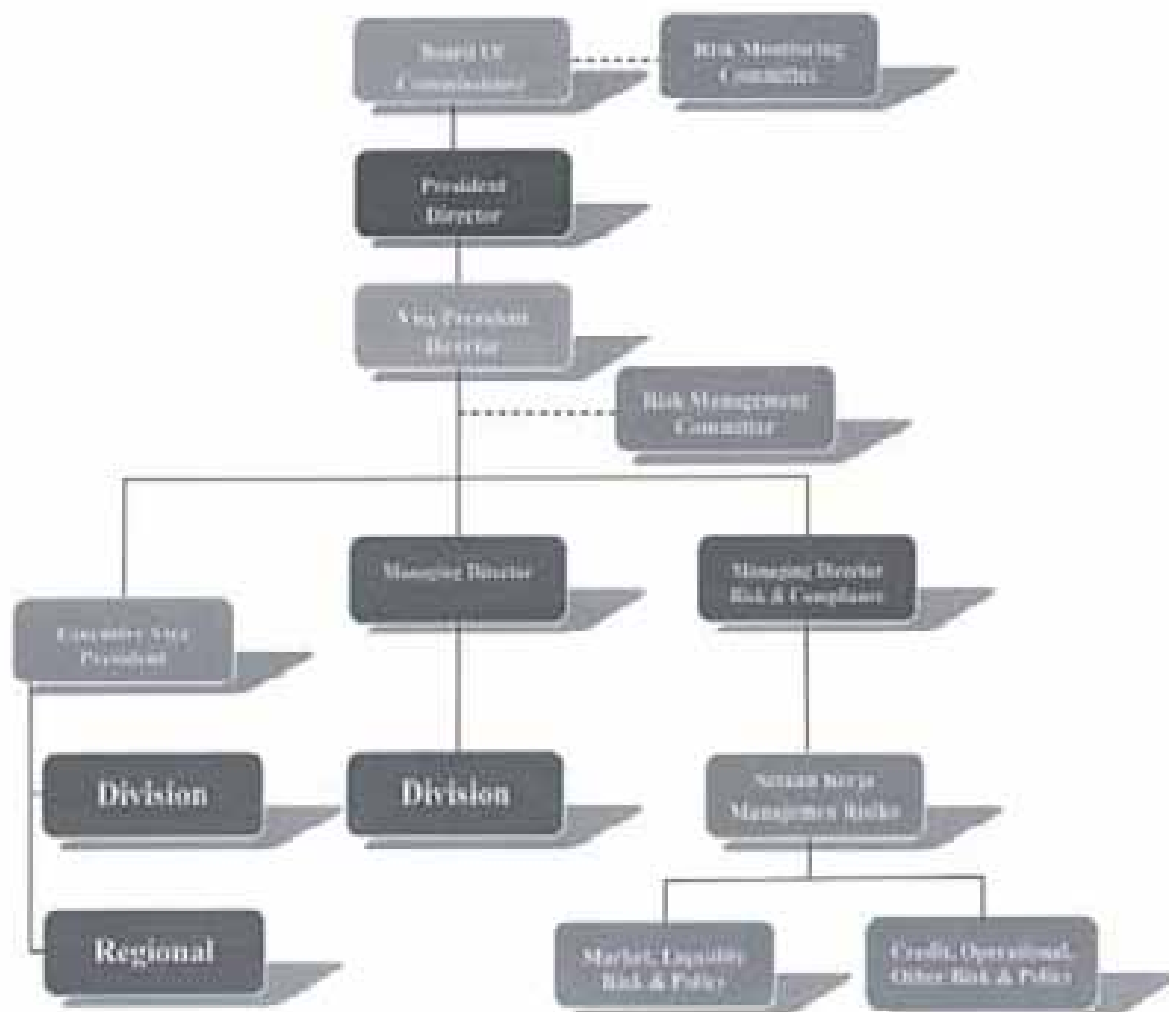


# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
- (3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
- (4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
- (5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Berikut adalah Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk :



#### Struktur Organisasi Manajemen Risiko

##### 1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

##### 2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

##### 3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

SKMR berada dibawah Direktur Risiko & Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. SKMR mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi SKMR terdiri dari 2 (dua) unit kerja yaitu unit kerja risiko pasar & likuiditas, dan unit kerja risiko kredit & operasional.

Tugas dan tanggung jawab SKMR meliputi :

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
  - b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
  - c. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
  - d. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
  - e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
  - f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
  - g. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - i. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

2) Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan *Risk Control Self Assessment / RCSA*.

3) Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi treasury serta efektivitas proses manajemen risiko.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high*.

d. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, diantaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

- a. Melakukan pengkajian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*, dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan *Good Corporate Governance*, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2016-2018.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- e. Pemenuhan CAR ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) dan melakukan perhitungan ATMR sesuai dengan Regulasi terbaru.

## Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan ketentuan/Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank, sementara Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut Profil Risiko. Sebagai panduan dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode triwulan IV Desember 2015 dibandingkan dengan periode triwulan III September 2015 :

Profil Risiko	Desember 2015			September 2015		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2	Moderate To High	Fair	4
Risiko Pasar	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Risiko Strategik	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi	Low To Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Peringkat Komposit	Low to moderate	Fair	2	Moderate To High	Fair	4

Setelah dilakukan pengukuran atas Profil Risiko periode triwulan IV Desember 2015 dihasilkan peringkat komposit risiko adalah *Low to Moderate* yang mempunyai trend

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

risiko membekuk dibandingkan peringkat komposit periode triwulan sebelumnya periode September 2015.

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi Low To Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko per Desember 2015 adalah peringkat 2 (dua).

Berdasarkan Laporan Profil Risiko Bank periode Desember 2015 (data kualitatif), dapat diuraikan 8 jenis risiko utama sebagai berikut :

## 1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

Bank telah melakukan penerapan manajemen risiko kredit diantaranya :

### a. Organisasi manajemen risiko kredit

Dalam organisasi manajemen risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eye Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit Commercial Credit Risk yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan/aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana;
- Divisi Commercial Credit Risk adalah unit yang melakukan *review proposal/Nota Analisa Kredit* dan dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak *proposal* yang diusulkan oleh Divisi Bisnis.
- Divisi Compliance & Legal, dan Divisi Operasi sebagai *Non Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan operasional dalam mekanisme komite kredit.
- Special Asset Management (SAM) berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2 agar tidak berpotensi menjadi Non Performing Loan (NPL) dan penyelesaian aset bermasalah serta restrukturisasi.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, memantau risiko kredit dengan berpegang pada *prudential banking*.
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas dan Wewenang Memutus Kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

### b. Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan

Strategi manajemen risiko kredit berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank dan prinsip kehati-hatian.

### c. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit antara lain :

- Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri yang digunakan untuk menyusun *JTrust Indonesia Industry Code & Catalogues*, dan rekomendasi

*Approved Industries* dan *Target Market* sebagai limit penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

- Penetapan *inhouse limit* dalam penyediaan pihak terkait, grup, individu (BMPK) dengan tidak mengabaikan ketentuan regulator.

d. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

- *Me-review* dan menyempurnakan Kebijakan Perkreditan JTrust Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit secara berkala, dan terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operation Procedure* bidang perkreditan sebagai pengendalian risiko kredit.
- Melakukan penetapan limit / Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang di-*review* secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat, namun tetap berpedoman terhadap asas *prudential banking*.
- Pemberian kewenangan memutus kredit oleh Direksi kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) berdasarkan kemampuan, kompetensi dan integritas yang baik.
- Melakukan penyempurnaan pedoman monitoring kredit antara lain *Early Recognition Watch List* yaitu tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit kolektibilitas 1 dan 2 sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kualitas kredit.
- Melakukan monitoring terhadap portofolio Bank, pemantauan dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, dan 25 Debitur inti serta dilakukan penyelamatan/penyelesaian kredit bagi debitur yang bermasalah.
- Meningkatkan kesadaran budaya risiko kredit melalui *JTrust Indonesia Credit Culture Enforcement Team* yang akan menghasilkan kualitas kredit lebih baik dimasa yang akan datang.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan *prudent*, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan Integritas dan Independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

## 2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari jenis risiko pasar tersebut.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*), merupakan potensi risiko yang cukup signifikan bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk karena penyaluran dana selain dalam bentuk kredit, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga khususnya surat berharga rupiah yang rata-rata berjangka waktu panjang dengan suku bunga tetap. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini adalah:

- a. Perseroan melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.

- b. Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank (*liabilities*) dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.
- c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
- d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
- e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
- f. Melakukan monitoring atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi Treasury & Institutional Banking secara harian dan melaporkannya ke Direksi.

Sementara itu, sebagai bank devisa, JTrust Bank tentunya tidak dapat terlepas dari risiko nilai tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*) atau risiko fluktuasi nilai tukar sebagai bagian dari pasar keuangan global. Kondisi ini mengharuskan Bank menjaga posisi aktiva dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Variabel pasar ini tidak hanya berupa fluktuasi nilai tukar ataupun fluktuasi suku bunga, tetapi juga meliputi fluktuasi nilai pasar dari portofolio yang dimiliki Bank, seperti diantaranya adalah portofolio surat berharga yang diperdagangkan.

Strategi Bank untuk memitigasi risiko ini adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa melakukan *monitoring* pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terjadi indikasi merugikan melalui *Market to Market*.
- b. Mengelola dan melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat aturan yang lebih jelas mengenai batas transaksi mulai dari batas pemutus, batas limit antarbank, *limit dealer*, batas per sektor ekonomi, geografi, dan lain-lain.
- c. Melakukan analisa yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed & market price*) sebelum melakukan investasi.

Secara rutin (minggu kedua setiap bulan) Bank menyelenggarakan rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah menetapkan limit kegiatan *treasury* untuk menjaga tingkat eksposur agar tetap sesuai dengan *risk appetite* Bank seperti limit transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Foreign Exchange*), *Bank Notes*, *Money Market*, dan Surat Berharga.

### 3. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counterparty* yang telah jatuh waktu. Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

- a. Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.

- b. Menurunkan konsentrasi deposito inti dan mengganti dengan dana retail sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan).
- c. Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*.
- d. Meningkatkan efektivitas pengelolaan gap likuiditas (*maturity gap*, *proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas Call Money maupun Repo Surat Berharga Intern bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan gap likuiditas (*maturity gap* dan *proyeksi arus kas*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi *stress*:

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai *Standard Operation Procedure LCP* (*Liquidity Contingency Plan*), dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Seiring dengan pertumbuhan Bank, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Bank melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
- b. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* (SOP) masing-masing unit kerja secara berkala.
- c. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
- d. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
- e. Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- f. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
- g. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu membentuk *Anti Fraud Desk* dibawah Direktur Utama langsung sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian intern.
- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.



- i. Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Operational Risk Report*.
- j. Melakukan pencatatan atas data kerugian, dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
- k. Bank telah melakukan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan identifikasi melalui RCSA tersebut akan diterapkan pada seluruh unit kerja secara bertahap.
- l. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

#### **Business Continuity Plan (BCP)**

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, yang berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah, Bank telah menerapkan Kebijakan maupun *Standard Operational Procedure Business Continuity Plan* (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (*disaster*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan *Review Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process*, dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan *scenario* yang telah ditetapkan ke seluruh cabang. selanjutnya melakukan *Review Kebijakan dan SOP, Review Prosedur Alternatif (Contingency Plan)*, dan melakukan Uji Coba BCP di Kantor Cabang tertentu dengan simulasi bencana kebakaran dengan mengaktifkan lokasi alternatif dekat dengan Kantor Cabang.

#### **5. Risiko Hukum**

Risiko Hukum adalah suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakmampuan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain :

- a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk didalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau

dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

- e. Fungsi Compliance & Legal Division yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisa / *review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

#### 6. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2016-2018 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
- b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/target yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
- c. Membentuk *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.
- d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

#### 7. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku menjadi perhatian utama. Bank telah melakukan pengetolaan risiko kepatuhan antara lain :

- a. Menyusun dan monitoring Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif / *dormant*.
- c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Compliance & Legal Division.
- d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
- e. Peningkatan fungsi kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

#### 8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sebagai tiang kepercayaan memberikan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mempengaruhi *image* Bank, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Bank relatif meningkat.

Sebagai wujud perhatian Bank terhadap risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh Corporate Secretary.
- b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui Product & Networking Management Division guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
- c. Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media, dan *gathering* dengan nasabah.
- d. Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.
- e. Meningkatkan *new corporate image JTrust Bank* melalui penyempurnaan *website Bank* dan melaksanakan *press release* dengan media.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Perseroan yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memperbaiki reputasi.

#### Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komite Pemantau Risiko secara rutin tiap bulan melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk membahas profil risiko yang meliputi *Inherent risk* dan kualitas penerapan manajemen risiko dari 8 (delapan) jenis risiko.

Dewan Komisaris mengevaluasi hasil paparan profil risiko dari Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala kepada Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

### 5.2. Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif akan membantu Bank dalam :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Untuk keperluan diatas PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Intern berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut :

#### 1. *Control Environment* (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihayati CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

#### 2. *Risk Assessment* (RA)

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

#### 3. *Information Communication* (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam level yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

#### 4. *Monitoring Activities*

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*On going Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk

memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah *Hadir* (*Present*) dan *Berfungsi* (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dihangin kedalam bisnis proses pada level berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalalan pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

### 3. Control Activities (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

1. *Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. *Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. *Reporting*, akurat dan dapat dipercaya.
4. *Compliance*, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Selama tahun 2015 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut :

No	Risk Owner	Audit Rating			Penjelasan
		2014	2015	Rating	
1	Cabang	75,52	74,83	Fair	SPI pada Cabang masih terdapat kelemahan di berbagai komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.
2	Divisi	79,62	75,06	Satisfactory	SPI sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan terbatas pada SOP dan Kepatuhan SDM dalam penyelenggaraan operasional.
3	Divisi Kredit	71,83	74,58	Fair	SPI pada semua unit Kredit masih banyak kelemahan di berbagai komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.

Penjelasan penyebab penurunan peringkat audit (*audit rating*) :

1. Penurunan kualitas kontrol dari personal Cabang akibat kurangnya *risk awareness*.
2. Implementasi SOP yang tidak dilaksanakan secara konsisten.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern antara lain :

1. Melakukan mutasi *Operation Officer*.
2. Menerapkan *reward & punishment*.
3. Melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern.
4. Pembentukan verifikator.
5. *Training* untuk *Operation Officer*.

**BAB VI**  
**PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI**  
**DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA**

**A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti per posisi tanggal 31 Desember 2015, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait *)	25	161.296
2.	Kepada Debitur Inti :	25	2.876.670
	- Individu	17	1.982.904
	- Group	8	983.766

**Keterangan:**

\*) Jumlah Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk:

- Pinjaman kepada Pejabat Eksekutif Bank yang diberikan dalam rangka Kredit Karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan total sebanyak 24 debitur, total plafond yang diberikan sebesar Rp.8.066 juta.
- Pinjaman kepada JTrust Investment Indonesia dengan plafond sebesar Rp.153.230 juta.

Kredit diberikan kepada Debitur Inti terdiri dari pemberian kredit kepada 17 (tujuh belas) debitur individu sejumlah total Rp.1.982.904 juta (termasuk debitur pihak terkait atas nama JTrust Investment Indonesia) dan 8 (delapan) group debitur sejumlah total Rp.983.766 juta.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti telah dilaporkan secara tertib termasuk Debitur yang terdapat pelampauan BMPK beserta Laporan Pelaksanaan *Action Plan / Rencana Tindakan Penyelesaiannya*.

Proses kredit telah melalui Rapat Teknis untuk memitigasi berbagai kemungkinan yang timbul sebelum pemberian penyediaan dana kepada debitur. Dalam setiap pengambilan keputusan penyediaan dana telah diputuskan bersama dalam Rapat Komite Kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit didasarkan pada rekomendasi dari Bisnis Unit terkait dan Credit Risk Reviewer yang diharapkan dapat menghasilkan kredit yang berkualitas dan dapat mencapai target yang ditentukan. Khusus ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selalu diinformasikan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) dengan berpedoman pada Memo tentang jumlah Modal Bank yang dikeluarkan setiap bulan oleh Divisi Accounting atau Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portfolio dengan pembagian pengelolaan pada masing-masing Bisnis Unit berdasarkan segmentasi kredit, yaitu segmen

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Retail Business yang terbagi menjadi SME Business, Consumer Business, Micro Business, Corporate Business, dan Linkage Business.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan berdasarkan Memorandum Prosedur No.31.12/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pengelolaan Debitur Group, yang menegaskan kembali bahwa ketentuan BMPK dan *InHouse Limit* BMPK terbagi menjadi :

1. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait ditentukan sebesar setinggi-tingginya 20% dari Modal Bank untuk 1 (satu) peminjam secara individu, dan setinggi-tingginya sebesar 25% dari Modal Bank untuk 1 (satu) kelompok peminjam.
2. BMPK kepada Pihak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari Modal Bank.
3. BMPK kepada Kelompok Peminjam (Debitur Group) ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari BMPK (*Inhouse Limit*).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dipertegas kembali melalui Memorandum Prosedur No.31.13/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

## B. Rencana Strategis Bank

JTrust Co sebagai pemegang saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan keuangan dari Jepang yang telah resmi dan lulus dalam melewati tahapan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dalam mengambil alih Bank dari kepemilikan lama. Sebagai investor baru, J Trust Co berkomitmen untuk mengembangkan Bank Mutiara yang telah berganti nama dan logo Bank menjadi "PT Bank JTrust Indonesia Tbk" atau "JTrust Bank" untuk lebih maju lagi di masa yang akan datang seperti telah dilaksanakannya RUPSLB pada tanggal 30 Desember 2014, tanggal 30 Maret 2015, dan 29 September 2015 dengan agenda penyeteroran modal baru masing-masing sebesar Rp.300 miliar, lalu Rp.300 miliar, dan Rp.400 miliar sehingga penyeteroran modal baru menjadi sebesar setara Rp.1 triliun, serta dengan tambahan modal melalui pinjaman subordinasi Rp.342 miliar, juga pengangkatan susunan manajemen untuk memperkuat pertumbuhan bisnis ke depan.

Dalam menentukan langkah strategis dan fundamental perusahaan diperlukan visi dan misi yang selaras dengan perusahaan induk agar dapat berjalan dengan baik. Adapun visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

### Visi dan Misi

Bank telah menetapkan Visi dan Misi, yang saat ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan secara menyeluruh melalui kegiatan operasional dan budaya perusahaan.

#### Visi :

**"MENJADI PARTNER FINANSIAL YANG TERPERCAYA YANG TERUS MEMBERIKAN INOVASI"**

JTrust Bank akan senantiasa berupaya menjadi bank penyedia jasa keuangan yang berkualitas dan profesional, serta berinovasi dengan hal baru yang lebih baik dalam melayani kebutuhan perbankan melalui kedekatan hubungan sebagai mitra usaha.



Misi :

1. "TERUS MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BEKERJA YANG Mendukung ORANG-ORANG BERMOTIVASI KERJA TINGGI"
2. "TERUS MEMBERIKAN PENGALAMAN PERBANKAN YANG BAIK MELALUI SOLUSI YANG DITUJUKAN UNTUK MASING-MASING NASABAH"

Berkaitan dengan Misi, JTrust Bank dengan terus menciptakan lingkungan bekerja yang mendukung orang-orang yang bermotivasi tinggi serta terus memberikan pengalaman perbankan yang baik melalui solusi yang ditujukan untuk masing-masing nasabah dengan *core values* "SPEED-CHANGE-ACTION" sebagai perwujudan dari :

**SPEED** : "Satu langkah lebih maju dibandingkan kompetitor dalam memberikan pelayanan tercepat"

**CHANGE** : "Menjadi game changer dalam industri perbankan"

**ACTION** : "Berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan memberikan performa maksimal"

Pendekatan analisis posisi dapat juga menggunakan SWOT (*S= Strengths, W= Weakness, O= Opportunity, T=Threat*) berikut sehingga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan dan strategi perusahaan, sebagai berikut:

#### S - Strengths

1. Memiliki akses yang baik terhadap jaringan bisnis UKM untuk pelaku bisnis dari etnik tertentu.
2. Memiliki keunggulan *relationship* dengan nasabah-nasabah dana.
3. Pemilik baru adalah J Trust, perusahaan keuangan dari Jepang sehingga memperkuat image perusahaan dan memiliki jaringan yang luas internasional.
4. Memiliki 61 kantor untuk pembiayaan UMKM.
5. Memiliki tenaga marketing dana yang cukup handal
6. Merupakan perusahaan publik, sehingga memungkinkan mendapatkan dana dari pasar modal untuk tujuan ekspansi di masa mendatang
7. Keunggulan produk treasury (*money changer*)

#### W- Weaknesses

1. Struktur pendanaan didominasi oleh *high cost fund* khususnya deposito.
2. Produk dana belum didukung oleh teknologi perbankan yang memadai.
3. Jumlah staff yang memiliki kemampuan analisa kredit yang memadai masih minim
4. Masih terdapat debitur yang melampaui BMPK.
5. Penerapan teknologi perbankan dan *electronic channel* yang masih kurang memadai sehingga belum mendorong pertumbuhan dana murah dan tidak adanya *product champion*.
6. Penyebaran jaringan kantor yang masih belum optimal karena lebih terkonsentrasi di Jakarta.
7. Perubahan ketentuan/regulasi permodalan [CAR sesuai ICAAP, PBI No. 14/18/PBI/2012] menyebabkan CAR JTrust Bank harus minimum diatas CAR minimum

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

14% sehingga membatasi kemampuan ekspansi aset dan jaringan kantor Bank, serta sesuai dengan PBI No.15/12/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank yang mewajibkan pemenuhan modal tambahan sebagai *Capital conservation buffer*, yang secara bertahap hingga tahun 2019 sebesar 2,5% tambahan modal.

8. Bank saat ini beroperasi di bawah skala yang memadai, dan tidak sesuai dengan profil struktur biaya tetap overhead, sehingga sulit mencapai kinerja yang setara dengan *best performer* Industri dan *peer group*.
9. Perkembangan lingkungan industri dengan CAR rata-rata 17-18% menempatkan kekuatan keuangan JTrust Bank berada pada posisi yang inferior terhadap pesaing.
10. *Corporate brand* belum mampu menjadi pendukung kemudahan akuisisi bisnis yang efisien.
11. Infrastruktur bisnis Mikro, Consumer dan Small sebagai bisnis utama belum mampu mendukung pembentukan portfolio yang mendukung percepatan penyeteraan kinerja.
12. Produktivitas belum sebanding dengan jumlah cabang dan biaya tenaga kerja.
13. Perlunya perbaikan kualitas kredit.
14. *Cost of Fund* yang masih tinggi.
15. MIS yang terintegrasi belum optimal.

## O- Opportunities

1. Adanya kesempatan optimalisasi pengembangan jaringan di Jawa dan luar Jawa.
2. Pasar *traveller valuta asing* dan *Bank Notes* masih dapat dioptimalkan ditambah dengan transaksi *Devisa Umum* yang belum optimal, disamping peluang bisnis didalam JTrust network .
3. Potensi pertumbuhan aset khususnya segmen UKM dari pelaku bisnis etnik tertentu masih dapat ditingkatkan.
4. Peluang sektor *consumer & retail* masih terbuka.
5. Peluang pembiayaan mikro yang belum terjamah bank masih sangat terbuka.
6. Bank telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi yang memiliki *customer based* dan jaringan distribusi yang luas untuk pengembangan usaha di beberapa bidang seperti *funding, kredit dan fee based income*.
7. Dengan terendah *loan-to-GDP ratio* terendah sebesar 25%, Indonesia diharapkan menghadapi perubahan struktural dalam siklus kredit.
8. Dengan adanya pemilik baru dari investor Jepang, telah memberikan kesempatan untuk memperluas *customer based* dari nasabah Jepang.
9. Segmen UMK tetap merupakan segmen kredit yang tumbuh paling cepat.

## T- Threats

1. Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana murah dengan memanfaatkan *e-banking* dan *electronic channel* lainnya.
2. Masih terdapat potensi gugatan hukum dari nasabah maupun *counterparty* terkait dengan masalah-masalah manajemen lama.
3. Kegagalan *recovery* atas aktiva produktif bermasalah dan AYDA.
4. Terjadi pemburukan portfolio aset kredit dalam jumlah material terutama dari dampak makro ekonomi yang berdampak menurunnya CAR.
5. Meningkatkan tingkat suku bunga dapat mengencangkan likuiditas bank.

6. Bank berskala kecil lebih *sensitive* pada ancaman reputasi.

a. Kebijakan Manajemen (Policy Statement)

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis, JTrust Bank telah menetapkan dan terus menjalankan 4 fokus target prioritas yang dibentuk dari tahun 2014 hingga tahun 2020 ke depan sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis, sebagai berikut :

1. Pengembangan Bisnis :

- Evaluasi dan Pengembangan bisnis *lending & funding*
- Pengembangan bisnis yang berbasis teknologi untuk memperluas nasabah ritel, meraih *fee based income* dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah
- KPI & Financial model yang terukur
- MIS yang terintegrasi
- *Early Warning System* yang kuat
- *Crossborder transaction* menambah dana dan menurunkan biaya
- *Budget Control*
- Penyelesaian NPL secara intensif.

2. *Business Process*

- *Mapping potensial customer dan competitor*
- Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien
- Program promosi yang terintegrasi
- Monitoring disiplin *sales process*
- Revitalisasi kantor cabang

3. Sumber Daya Manusia

- Pemenuhan SDM yang kompeten
- Program *Training* berkelanjutan
- Jenjang karir yang menarik
- Skema insentif
- Budaya perusahaan yang kuat
- *Review* dan perbaiki struktur organisasi yang mengakomodir dinamika bisnis yang cepat dan efisien

4. Infrastruktur

- Optimalisasi jaringan kantor
- Pengembangan IT yang mendukung bisnis dengan penggantian *core banking system*
- Membangun IT yang terintegrasi

b. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:

- Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
- Penerapan JSOX Based Komponen

2. Pengembangan dan perbaiki 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis

3. Penyempurnaan *early warning system*
4. Penerapan *four eye principles*
5. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, *training kredit & LK* oleh tenaga internal Bank)
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif
7. Peningkatan kualitas *advis / rekomendasi* manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

1. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP bank internal bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assessment*, dan lain-lain.
2. Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

**c. Strategi Pengembangan Bisnis**

Dengan adanya kebijakan yang baru dimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank untuk saat ini dimana bank sedang berupaya menguatkan permodalan. Untuk kemudian pada fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi dual control dan peningkatan kualitas bisnis kembali ditahun kedepan melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen mikro, kecil dan menengah, berupa *retail* dan *commercial*, serta berupaya memperbaiki komposisi pendanaan pada CASA yang lebih baik.

Selain itu setelah menjalin kerjasama melalui "Bancassurance" juga akan lebih banyak mengembangkan produk guna mendukung dana murah, serta lebih mengoptimalkan jaringan yang telah ada. Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "E-Banking" dan "M-Banking" untuk lebih memberikan kemudahan bagi Nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya.

**d. Strategi Pengembangan SDM**

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) yang telah dilakukan di tahun 2015, sebagai berikut :

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi :
  - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, berupa tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya.
  - b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
- b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang dimaksud.
- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam dsaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Per September 2015

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 miliar	1 orang	-
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	3 orang	1 orang
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	-	-
Rp.500 juta ke bawah	-	1 orang
*) yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak		

### 3. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

- a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- b. Rasio gaji tertinggi dan terendah per September 2015, dalam skala perbandingan sebagai berikut :
  - a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 1:21
  - b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1:1,50
  - c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1:1,21
  - d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1:2,91

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

### 1. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu.

Rencana Bisnis yang disusun harus memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan SDM, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya.

Rencana Bisnis Bank ini harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat setiap akhir Nopember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1(satu) kali, paling lambat pada akhir semester pertama tahun berjalan apabila:

- Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank, dan/atau
- Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyusun RBB secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:

- ✓ RBB telah disusun berdasarkan kepada asumsi perkembangan ekonomi makro kedepan dan kemampuan Bank sendiri disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sehingga tercipta RBB yang realistis, komprehensif dan terukur (*achievable*). Bank juga cukup responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal dengan melakukan Revisi RBB tahun 2015-2017 pada tanggal 30 Juni 2015 melalui Surat ke OJK No.30.03/S-Dir-PPD/JTRUST/VI/2015, serta Penyesuaian Revisi Rencana Bisnis PT Bank JTrust Indonesia, Tbk Tahun 2015-2017 dengan surat ke OJK No.11.01/S-DIR-PPD/JTRUST/IX/2015 tertanggal 11 September 2015 dan telah melakukan pembuatan RBB untuk tahun 2016-2018 yang telah diserahkan dengan surat No.30.03/S-DIR-PPD/JTRUST/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
- ✓ Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif. Hal ini dilakukan Direksi, antara lain dengan cara melakukan pemantauan efektifitas pelaksanaan RBB, sebagai berikut:
  - Pemantauan pencapaian realisasi RKAP/RBB kepada pemegang saham secara bulanan (*performance review*).
  - Pemantauan pencapaian realisasi RBB disampaikan ke Bank Indonesia secara rutin per Triwulanan.
  - Pemantauan pencapaian realisasi terhadap RBB dilakukan secara langsung setiap akhir bulan dengan melakukan "rapat prognosa bulanan" agar pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan.
- ✓ Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:

- Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui penyusunan laporan pengawasan rencana bisnis (rutin per semesteran) yang disampaikan kepada OJK dan rapat bulanan Direksi-Komisaris. Dalam laporan dan rapat tersebut, selain bertindak sebagai pengawas, Komisaris juga memberikan arahan dan masukan strategi kedepan Bank.

a. Rencana Bisnis Jangka Pendek

a.1. Total Aset

Realisasi total aset di bulan Desember 2015 dibandingkan periode Desember 2014 meningkat sebesar Rp.540 miliar, dari Rp.12.682,02 miliar menjadi sebesar Rp.13.221,95 miliar. Peningkatan aset ini adalah terutama dari dampak kenaikan kredit sebesar Rp.1.021,36 miliar, namun terdapat penurunan SBI/Government Bond sebesar Rp.714 miliar dan Depo Facility/Fasbi sebesar Rp.719 miliar. Pada sisi pasiva kenaikan terjadi karena adanya setoran modal dari pemegang saham dan pinjaman subordinasi.

a.2. Total Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK sampai dengan periode Desember 2015 lebih pada pertumbuhan komposisi dana yang lebih murah terutama pada perbaikan CASA dari 9,4% di periode Desember 2014 menjadi 13,2% di Desember 2015 dengan jumlah nominal di Desember 2014 sebesar Rp.11.026,74 miliar menjadi Rp.11.024,92 miliar pada periode Desember 2015. Hal ini guna menyelaraskan dengan pertumbuhan kredit yang mulai tumbuh. Walaupun pertumbuhannya masih lebih lambat dari pertumbuhan kredit, namun tidak berdampak pada likuiditas mengingat pada periode yang sama bank memperoleh dana segar dari pemegang saham berupa pinjaman subordinasi serta tambahan modal kembali.

Perbaikan komposisi DPK khususnya pada Giro dari sebesar Rp.569,77 miliar menjadi sebesar Rp.1.000,47 miliar di Desember 2015, sementara untuk tabungan sedikit menurun sebesar Rp.10,14 miliar dari semula sebesar Rp.465,47 miliar berkurang menjadi sebesar Rp.455,34 miliar. Bank akan tetap terus berupaya di periode kedepannya dalam penataan komposisi dana kearah yang lebih murah serta berupaya melepaskan keterikatan pada depositan jumbo.

a.3. Kredit Yang Diberikan

Kinerja JTrust Bank dengan adanya penambahan modal yang berdampak pada perbaikan CAR, dan JTrust Bank telah menjadi bank dalam pengawasan normal sehingga batas minimal CAR menurun, bank telah memiliki kelonggaran untuk kembali berekspansi bisnis dibidang kredit guna meningkatkan pendapatan bank dalam mengupayakan pemenuhan target yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian serta dengan tetap menjaga permodalan.

Eksansi bisnis kredit pada Desember tahun 2015 telah meningkatkan baki debit sebesar Rp.521,36 miliar atau 5,88% dari Rp.8.865,66 miliar pada bulan September 2015 menjadi Rp.9.387,03 miliar pada Triwulan IV/Desember 2015, walaupun pada periode ini terdapat penurunan kredit karena penjualan aset Rp.846 miliar.

Pencapaian kredit telah memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank sebesar Rp.9.013,77 miliar. Pertumbuhan kredit pada Triwulan IV/Desember 2015 ini terjadi pada hampir di semua sektor kredit, kecuali sektor *consumer* terlihat menurun karena terdapat *debtor* yang dialihkan pada sektor *business linked*, demikian juga pengalihan kredit bermasalah kepada PT JTI menurunkan *outstanding* kredit menjadi sebesar Rp.826,38 miliar.

Dalam mengupayakan pemenuhan target kredit yang sempat terkendala dengan keterbatasan permodalan bank di periode sebelumnya, pada awal tahun 2015 upaya untuk memenuhi pencapaian mulai ditingkatkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian bank. Demikian pula disisi lain Bank tetap akan terus berupaya memperbaiki komposit profil risiko sehingga persyaratan CAR lebih rendah, agar dapat dipergunakan untuk melakukan ekspansi bisnis lagi kedepannya lebih lanjut dan terus berkesinambungan.

#### a.4.Laba Rugi

Walaupun secara operasional bank sudah mengalami perbaikan terutama pertumbuhan kredit dan perbaikan biaya dana, namun pembebanan untuk membentuk kembali cadangan atas penurunan kualitas kredit dan kerugian penjualan aset yang telah kami singgung sebelumnya berakibat pada meningkatnya kerugian akumulasi bank tahun berjalan di Triwulan IV/Desember 2015, dari negatif Rp.440,02 miliar pada triwulan III/September 2015 menjadi negatif Rp.636,13 miliar, namun demikian masih dibawah yang telah diproyeksikan kerugian sebesar Rp.656,75 miliar.

Adapun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan telah bertumbuhnya kredit serta target *outstanding* telah terlampaui pencapaiannya pada triwulan ini namun jumlah penurunan kualitas kredit sangat signifikan sehingga pendapatan bunga tidak efektif diterima. Hal ini menyebabkan pendapatan bunga hanya maksimal sesuai dengan target pendapatan bunga yang diberikan.
2. Adanya kenaikan biaya bunga menjadi 8,04% pada Desember 2015 dari September 2015 sebesar 7,69%, hal ini dampak dari pertumbuhan dana pada suku bunga deposito guna pemenuhan penyediaan dan mendukung ekspansi pada kredit di akhir periode, walaupun masih dibawah dan tidak melampaui dari target semula sebesar 8,6%. Belum optimalnya produktivitas kredit menyebabkan NIM juga masih dibawah target.
3. Selain itu pembentukan cadangan untuk PPA di triwulan IV/Desember 2015 kembali harus dibentuk antara lain karena penurunan PL to NPL.

Adapun untuk target kedepan sebagai berikut :

Dengan adanya penambahan modal di akhir periode 2015 akan berdampak pada CAR yang membaik dan ada ruang untuk pertumbuhan kredit di tahun 2016. Dengan adanya ekspansi kredit baru tahun 2016-2018, dan kepercayaan nasabah yang sudah pulih dengan telah beralihnya kepemilikan dari investor baru, maka untuk periode di tahun 2016 penghimpunan dana lebih difokuskan pada komposisi CASA yang membaik dengan saldo yang diproyeksikan menurun dampak dari pengurangan jumbo deposit secara bertahap yang digantikan oleh transaksi MTN. Sedangkan untuk periode tahun 2016 dana pihak ketiga diproyeksikan kembali tumbuh sebesar Rp.2.117 miliar menjadi Rp.12.523 miliar di tahun 2016, untuk di tahun 2017 kembali naik sebesar Rp.1.885 miliar



menjadi Rp.14.409 miliar, serta di tahun 2018 kembali tumbuh sebesar Rp.1.841 miliar atau menjadi Rp.16.250 miliar. Peningkatan tersebut terkait dengan penyelarasan kredit yang mulai tumbuh dengan tingkat LDR yang sehat serta kondisi bisnis bank yang diharapkan kembali normal dan membaik. Selain itu dengan adanya rencana penerbitan untuk memitigasi risiko likuiditas dengan masih tingginya dominasi deposito besar/jumbo, bank berupaya dengan melakukan "cross border transaction borrowing" melalui penerbitan surat berharga *promissory notes* dengan menarik investasi dana melalui pemegang saham secara bertahap untuk tahap awal ini Rp.370 miliar hingga Maret 2016. Suku Bunga diasumsikan bervariasi sesuai tenor yakni antara 7% hingga 8%. Dengan suku bunga tersebut untuk menggantikan jumbo deposito, biaya dana diperkirakan akan turun atau membaik.

Sedangkan untuk pengembangan bisnis lebih lanjut dapat dijelaskan beberapa fokus strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**A. Rencana Pengembangan Bisnis Kredit Mikro**

1. Pengembangan bisnis kredit mikro merupakan salah satu upaya peningkatan bisnis JTrust Bank yang lebih terfokus kepada segmen bisnis UMKM, dengan mempertimbangkan Arsitektur Perbankan Indonesia serta potensi pasar segmen mikro yang masih berkembang.
2. Pengembangan pembiayaan segmen mikro sekaligus upaya 'breakthrough' percepatan pemulihan kinerja JTrust Bank pada level setara dengan *peer group* peringkat atas. Pengembangan bisnis mikro diharapkan akan mempercepat pencapaian *Return On Equity* yang *sustainable* dan bisnis mikro diharapkan menjadi salah satu bisnis inti JTrust Bank.
3. Penambahan 7 kios mikro pada tahun 2015 menjadi 25 kios akan menjadi salah satu pendorong peningkatan portofolio kredit mikro. Penambahan jaringan merupakan salah satu faktor untuk pertumbuhan segmen ini. Untuk tahun 2016 direncanakan penambahan sebanyak 5 kios menjadi 30 unit dengan target portofolio tumbuh menjadi Rp.300 miliar. Dalam operasionalnya, setiap 4 s/d 7 kios mikro akan disupervisi oleh satu *cluster* disesuaikan dengan luasan wilayah kerja dengan tetap berkoordinasi dengan kantor wilayah.
4. Target market usaha adalah dengan *plafond* maksimum sd Rp.100 juta dengan jangka maksimum tiga tahun dan *plafond* sd Rp.300 juta dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Sampai dengan tahun 2016, direncanakan *plafond* yang diberikan masih fokus sd Rp.200 juta.
5. Untuk menunjang pengembangan pembiayaan segmen terdapat faktor kritical yang telah disiapkan adalah:
  - a. Manajemen risiko  
Dukungan sistem IT yang memadai untuk menunjang proses kredit, administrasi, monitoring, dan reporting sebagaimana kredit segmen *retail* umumnya.
  - b. Pemenuhan jumlah SDM dengan kompetensi bidang mikro yang mencukupi.

**B. Rencana Pengembangan kredit Consumer**

1. Kerjasama dengan koperasi/perusahaan untuk kesejahteraan karyawan melalui program EBP baru sebanyak 20 partner hingga Desember 2015 dan ditargetkan bertambah 20 partner baru sehingga diakhir Desember 2016 menjadi total 40 partner.
2. Memaksimalkan pemasaran produk kepemilikan rumah pertama kepada nasabah baru.
3. Untuk nasabah dengan *historical* pembayaran lancar dan sudah berjalan 2-3 tahun ditawarkan fasilitas *Top Up* pinjaman.
4. Mengoptimalkan cabang pemroses kredit di tahun 2015 di cabang Bekasi, Bogor, Fatmawati, Depok, Serpong, Kelapa gading mandiri dan seluruh KC di luar Jabodetabek menjadi minimal 25 cabang pemroses kredit diakhir tahun 2016.
5. Meningkatkan produktivitas cabang pada pematangan kredit KPR & EBP minimal Rp.2 miliar per bulan.
6. Pengembangan Infrastruktur IT yaitu percepatan implementasi LOS (Loan Originated System) untuk penyederhanaan dan mempercepat proses dan pencairan kredit.
7. Menambah kemitraan pengembang sebanyak 30 pengembang diakhir Desember 2015, dan menambah 15 kemitraan baru di tahun 2016.
8. Meningkatkan kompetensi dan *skill* SDM kredit dengan mengikutsertakan dalam *training* yang berkelanjutan.

**C. Rencana Pengembangan kredit SME**

1. Penetapan *target market* yang jelas.
2. *Target mirroring* Cabang/Kanwil dan Small Business Division.
3. Desentralisasi proses kredit di cabang dengan mengembangkan cabang-cabang pemroses kredit menjadi 34 titik cabang dan 17 cabang *referral* di tahun 2016. Pemenuhan kebutuhan AO di 34 titik cabang pemroses kredit dan sekitar 90 orang pemenuhan Business Manager di cabang pemroses kredit.
4. Peningkatan kompetensi dengan *training* terhadap seluruh AO.
5. Strategi pengembangan SME adalah penetapan target KPI *mirroring* cabang, kanwil dengan RBD, dimana masing-masing target per bulan untuk AO Junior sebesar Rp.1 miliar dan Rp.2 miliar untuk AO Senior.
6. Peningkatan portofolio SME dengan melakukan antara lain :
  - a. Pemilihan calon debitur berasal dari nasabah eksisting yang telah berhubungan bank dengan JTrust Bank selama 2 (dua) tahun.
  - b. Mentargetkan komunitas-komunitas bisnis tertentu.
  - c. Melakukan *Business Model Value Chain*, dengan aliansi bersama debitur bisnis unit lainnya.

**D. Rencana Pengembangan kredit Linked**

1. Meningkatkan kerjasama dengan mitra strategis (Multifinance, Koperasi, BPR) yang sudah ada dan membangun mitra strategis yang baru melalui model *channelling*, *executing*, dan *join financing* untuk pembiayaan kendaraan, *Multiguna*, *Factoring*, *Serbaguna*, dan lain-lain.

2. Inovasi produk multifinance, koperasi, dan DPR.
3. Memanfaatkan bisnis dari beberapa mitra yang ada.

**E. Rencana Pengembangan Kredit Corporate Business Division**

1. Menyusun *account strategi* (*Growth, Maintain, Exit*) terhadap debitur-debitur *existing* dalam rangka menetapkan *Account Plan* atas debitur *existing* tersebut di tahun 2016.
2. Pengembangan bisnis (tambahan/*Top Up*) untuk Debitur *existing* hanya difokuskan pada debitur dengan *Account Strategy* "Growth". Untuk Debitur dengan *Account Strategy* "Maintain" tambahan hanya dapat dilakukan secara sangat selektif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sedangkan debitur dengan *Account Strategy* "Exit" fokus pada *collection*, pelunasan/*take over* Bank lain.
3. Pengembangan bisnis untuk Debitur baru hanya fokus pada *targetting customer* (calon debitur yang ditetapkan dan dibahas dengan Unit Risk) sebelum dilakukan proses pendekatan ke Calon Debitur. Dengan demikian, calon debitur baru sudah dilakukan seleksi dari awal dengan melibatkan unit risk (*four-eyes principle*).
4. Fokus memperkuat *transaction banking* dan menggali potensi bisnis debitur *existing* untuk meningkatkan & menghasilkan *fee based income* dan juga mengembangkan rantai nilai bisnis (*value chain business*) untuk disinergikan dengan unit bisnis yang lain (SME, Consumer, Mikro, Treasury).
5. Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengelolaan debitur-debitur yang masuk dalam kategori *watchlist* (debitur kol 2b & 2c) akan segera dialihkan pengelolannya ke *Special Asset Management Unit*.
6. Mengusulkan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis, perbaikan Proses Bisnis, Sistem & Prosedur (*end to end proses kredit*), perbaikan sistem monitoring & *controlling* serta *Quality Assurance*. Semua inisiatif ini harus didukung oleh pengembangan sumber daya manusia (*training, coaching, sharing*) untuk meningkatkan kompetensi SDM.

Untuk lebih jelasnya rencana pertumbuhan kredit masing-masing unit adalah sebagai berikut:

Tabel *Outstanding Kredit Per Unit Bisnis*

Outstanding Loan	(Juta Rp)			
	Dec'15	Des'16	Des'17	Des'18
Multifinance Loans	3.332.811	4.024.504	4.104.281	4.171.080
Credit Recovery	742.280	510.377	435.012	359.642
Corporate Loans	3.633.923	4.751.427	5.561.635	6.167.392
Small Loans	459.119	876.321	1.447.155	2.138.608
Consumer Loans	433.276	742.666	1.046.553	1.239.073
Micro Loans	141.402	310.388	583.867	869.112
<b>Total</b>	<b>8.742.810</b>	<b>11.215.734</b>	<b>13.238.504</b>	<b>14.934.888</b>

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Untuk pengembangan bisnis penanaman dana selanjutnya, selain sektor kredit bank juga berencana untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal pada perusahaan keuangan dengan prinsip kehati-hatian terutama dalam menentukan perusahaan keuangan yang layak serta mempertimbangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit melalui penyertaan maksimum 15% berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/PBI/2012 perihal Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, juga mempertimbangkan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank umum, serta PBI Nomor 15/11/PBI/2013 perihal Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Pada sisi biaya overhead, kenalkan pada tahun selanjutnya mayoritas diperuntukkan untuk menunjang bisnis dan inisiatif strategi baru seperti: biaya-biaya terkait perluasan jaringan, pemindahan kantor pusat, belanja modal dan biaya IT untuk menunjang bisnis serta kenalkan biaya personalia. Untuk selanjutnya, pada pos biaya personalia pada tahun 2015 sebesar Rp.316,79 miliar lebih besar dibandingkan tahun 2016 sehingga terlihat menurun menjadi sebesar Rp.297,77 miliar dikarenakan pada tahun 2015 terdapat cadangan biaya untuk pembayaran *laidoff* (terkait dengan karyawan non produktif) sebesar Rp.25 miliar, sedangkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.324,44 miliar, hal ini terkait dengan rencana penambahan karyawan baru untuk menunjang ekspansi kredit mikro dan consumer dan pembukaan cabang serta adanya kenalkan COLA dan bonus berdasarkan kinerja. Rencana strategis tersebut juga mempengaruhi pengeluaran biaya umum dan administrasi, sehingga peningkatan biaya terjadi di tahun 2017 terkait adanya penambahan kantor. Selain terkait dengan ekspansi bisnis, biaya umum administrasi juga telah termasuk biaya relokasi kantor pusat yang didepresiasi serta kelanjutan rencana belanja dan biaya IT untuk ekspansi bisnis serta tidak tertutup kemungkinan *upgrading*/penggantian *core banking* agar lebih mengakomodir pengembangan bisnis. Untuk biaya promosi di tahun 2015 diharapkan dapat dihemat mengingat masih diperlukannya untuk biaya penunjang bisnis bank.

Biaya PPAP dibentuk sejalan dengan pertumbuhan kredit baru dan asumsi sebagian kecil ekspansi baru (2%) menurun kolektibilitasnya, seperti terlihat dibawah ini.

Tabel Biaya Bentuk PPA Pertumbuhan Kredit baru

	Desember-15	Desember-16	Desember-17
Loan Growth	1.183.458	2.142.967	2.889.403
Provision for New NPL	1.147	2.798	2.632
Provision for New Expansion	11.751	28.433	28.955
	12.901	31.231	31.135

Note:

- 1) 1% PPA untuk kredit baru
- 2) Diasumsikan 2% dari ekspansi baru menjadi NPL dengan perincian:
  - 5% macet (100% PPAP)
  - 15% diragukan (50% PPAP)
  - 80% kurang lancar (15% PPAP)
- 3) PPAP untuk NPL dihitung setelah pengurangan nilai agunan yang diasumsikan meng-cover 80% dari *outstanding*.



# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk periode 2015 sampai dengan tahun 2017 guna mendukung perolehan laba sehingga tercipta struktur neraca dan laba rugi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan *fee based income* di tahun 2015, antara lain :
  - Peningkatan *fee based income remittance* :
    - ✓ Melakukan *marketing* yang intensif untuk mengoptimalkan transaksi *remittance* berupa meningkatkan layanan *cash encashment* kiriman uang baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
    - ✓ Meningkatkan kerjasama *remittance* seperti Mandiri D/S, BCA D/S, Fire, MoneyGram.
    - ✓ *Reward* dan Promosi berupa pemberian penghargaan kepada cabang yang berprestasi dan mendukung promosi produk *remittance*.
    - ✓ Aliansi dengan bank lainnya maupun perusahaan lainnya yang memiliki aplikasi *system remittance*.
  - Menambah dan meningkatkan kerjasama *Interbank Line*.
  - Memperluas bisnis ke dalam jaringan yang dimiliki J Trust termasuk di Jepang, Korea dan Singapura (*Expanding cross-border transaction in the region*).
  - Meningkatkan transaksi PIB di cabang-cabang.
  - Meningkatkan *fee based* dari kerjasama penerbitan Bank Garansi kepada perusahaan yang memiliki ijin *Bonding* (KGB).
  - Meningkatkan *fee based income treasury* :
    - ✓ Optimalisasi *treasury gallery* dan *treasury unit* yang ada sebagai sarana *one stop service* untuk kegiatan jual beli valas, konsultasi *market*.
    - ✓ Pemberian fasilitas *Treasury Line* seperti *tom*, *spot*, *forward*, dan *swap* untuk setiap nasabah *corporate* dan *money changer* untuk bisa menghasilkan *profit* bagi bank serta meningkatkan *volume*.
  - Kegiatan *Warehousing* berupa penempatan surat berharga dalam instrumen reksadana, dimana pengelolaannya dilakukan oleh MI (Manajer Investasi).
  - Meningkatkan *fee based* di bidang perkreditan dengan cara meningkatkan transaksi nasabah dan mengembangkan *product bundling* dan penetapan tarif khusus.
2. Sampai dengan September 2015 bermodalkan jaringan kantor yang luas (61 kantor), JTrust Bank akan terus melakukan optimalisasi jaringan yang sudah ada dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan permodalan yang juga telah ditentukan dalam ICAAP. Sedangkan untuk target pembukaan kios mikro sampai dengan Desember 2015 diharapkan secara organik 7 kios sehingga menjadi total 25 kios mikro dari 18 kios yang telah ada, dan adanya *cluster* yang mensupervisikan antara 5 sampai dengan 10 kios mikro.
3. Terus melakukan pengembangan *IT Core Banking* dan infrastrukturnya sebagai salah satu pendukung percepatan pengembangan bisnis.
4. Meningkatkan manajemen *yield* dan *investment* untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.
5. Peninjauan ulang dan melakukan pengembangan atas produk dan penetapan *pricing* yang lebih kompetitif, namun tetap memberikan keuntungan sehingga mampu bersaing dalam rangka meningkatkan *interest spread* dan *fee based income*.

a.5.Rasio Keuangan

1. Permodalan :

Ditinjau dari rasio penyediaan modal minimum, CAR (*market, credit & operational risk*) yakni sebesar 13,6% pada periode Desember 2014 dan dengan adanya setoran modal kembali naik menjadi 17,08% di Maret 2015 sehingga diproyeksikan menjadi 16,59% pada Desember 2015 sejalan dengan telah adanya pertumbuhan kredit. Penurunan rasio CAR diakhir tahun 2014 tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas terutama karena tergerusnya modal inti dengan pembukuan kerugian pada tahun berjalan menyusul beban kerugian operasional karena adanya pemburukan kolektibilitas kredit dan penurunan baki debit kredit serta pembebanan biaya-biaya signifikan khususnya terkait legal dan biaya tenaga kerja. Modal inti bank Rp.910,68 miliar pada akhir tahun 2014 dengan adanya tambahan modal disetor kembali sebesar Rp.300 miliar maka modal menjadi Rp.1.289,27 miliar pada bulan Maret 2015 CAR menjadi sebesar 17,08% diperkirakan akan terus berlanjut sampai pada bulan Agustus 2015 menjadi sebesar 12,75%. Namun bank telah merencanakan penambahan modal baru sebesar Rp.400 miliar dan *Subdebt* sebesar Rp.350 miliar sehingga diharapkan pada bulan September 2015 CAR menjadi sebesar 18,99%. Pada saat ini juga bank mulai meningkatkan baki debit kreditnya hingga CAR diperkirakan akan menjadi 16,59% di akhir Desember 2015 dan 13,56% di tahun 2016 serta 12,77% di tahun 2017. Bank berupaya tetap menjaga CAR agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta *Good Corporate Governance* dan senantiasa tetap dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Rentabilitas :

NIM terus membaik dari 0,3% pada tahun 2014 dan menjadi sekitar 1,3% pada tahun 2015, serta diproyeksikan untuk tahun 2016 menjadi sebesar 3,6% dan di tahun 2017 sebesar 4,0%, bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor yang menghambat NIM .

Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penghimpunan dana murah

Peningkatan DPK dengan memperhitungkan biaya dan suku bunga yang kompetitif serta melakukan efisiensi biaya terkait pendanaan, misalnya biaya-biaya operasional, *cash in safe*, dan lain-lain.

Upaya memperbaiki *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan program untuk giro dan tabungan serta pengembangan pelayanan terus dilakukan.

Bank berupaya untuk meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*) melalui kerjasama dengan divisi kredit dan *referral* dari nasabah *existing* serta perusahaan-perusahaan untuk *payroll* karyawannya. Melalui peningkatan jumlah rekening ini diharapkan saldo dana murah akan terus bertambah. Selain itu penambahan fitur ATM diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga leluasa dalam bertransaksi di unit ATM mana saja.

b. *Melakukan yield enhancement*

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- Meneruskan program-program seperti *crash program* untuk penyelesaian kredit bermasalah, seperti yang telah berjalan selama tahun 2014 hingga September 2015.
- Mengembangkan dan melakukan ekspansi kredit mikro, yang direncanakan tahun 2015 mulai dibuka 7 kios lagi sehingga total 25 kios dari 18 kios mikro. Pembukaan kios mikro di tahun 2014 hingga 2015 direncanakan tersebar di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
- Melaksanakan ekspansi kredit Consumer dan Small dengan cepat namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penjualan AYDA dan menempatkan di aktiva yang produktif.
- Mengontrol perkembangan deposito sebagai sumber dana mahal agar tidak terlalu cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan peningkatan kredit.
- Mengalihkan sebagian penempatan BI harian yang suku bunganya lebih rendah ke penempatan aset produktif lainnya dengan suku bunga yang lebih tinggi sepanjang dana tersebut masih belum dapat disalurkan kedalam bentuk kredit.

Rasio rentabilitas yang lain, seperti ROA dan ROE terkait laba yang dihasilkan, sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan masih negatif. ROE membaik dari negatif menjadi positif sebesar 12,1% pada tahun 2016 dan menjadi 21,1% pada tahun 2017.

ROA Pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,98% dan pada tahun 2017 1,60%. ROE dan ROA diharapkan dapat membaik terkait laba yang dihasilkan dalam periode-periode selanjutnya laba yang didapat adalah hasil secara operasional dan berkesinambungan.

3. Likuiditas :

JTrust Bank senantiasa akan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Ruptah - primer sebesar 8 % dan sekunder sebesar 4%. Termasuk pemenuhan GWM valas menjadi sebesar 5% sejak Maret 2011, dan memenuhi rasio GWM valas sampai 8% mulai Juni 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Likuiditas untuk operasional sehari-hari diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik, dimana penempatan pada SUN dan SBI meningkat dari penempatan penambahan modal bank. Rasio LDR diproyeksikan sebesar 91,9% di tahun 2015 dampak dari penurunan secara bertahap dana jumbo deposito untuk digantikan transaksi dari *crossborder* (MTN, *issues securities*, dan lain-lain) dan terus sampai dengan tahun 2017, sebagai upaya bank untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih. Walaupun risiko LDR akan berada diatas 100%.



**4. Kualitas Aset :**

a. Adanya peningkatan prosentasi untuk kolektibilitas dari tahun 2014 sebesar 5,4% Net sebagian besar karena disebabkan penurunan O/S kredit. Namun seiring adanya pertumbuhan kredit di periode-periode selanjutnya serta penjualan aset bermasalah, rasio NPL diharapkan dapat terus membaik. Rasio *Non Performing Loan* diharapkan terus dibawah 5% pada tahun 2015 sebesar 0,66% serta di proyeksikan terus membaik di tahun 2016 menjadi sebesar 0,48%, menjadi 0,47% di tahun 2017.

b. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan akan terus membaik dan senantiasa diupayakan berada dibawah batas maksimal ketentuan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya *monitoring* dan penanganan kredit bermasalah seperti penagihan, restrukturisasi dan juga ekspansi kredit baru yang diproyeksikan lancar serta tidak adanya NPL baru.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi debitur bermasalah yang kooperatif dan prospektif.
- Memaksimalkan penagihan dengan jasa pihak ketiga.
- Stratafikasi debitur yang bisa di-PKPU (Peninjauan Kembali Penyelesaian Utang) dan yang bisa dipailitkan.
- Menagih surat berharga yang dihapus buku melalui pengadilan.
- Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh AYDA dan agunan debitur hapus buku.
- Optimalisasi Balai Lelang dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
- Memonitor proses perkara L/C bermasalah.
- Melakukan litigasi ataupun gugatan hukum kepada debitur yang tidak kooperatif.
- Melakukan reorganisasi yang mengarah kepada penajaman unit kerja.
- Menunjuk *advisor* bidang akuntansi, hukum dan *appraisal*.

c. JTrust Bank senantiasa berupaya membentuk PPA sesuai Peraturan Bank Indonesia, sehingga pemenuhannya selalu diproyeksikan sekurang-kurangnya sebesar 100%.

**5. Rasio Kredit Terhadap Total Aktiva Produktif :**

Semula sebesar 67,3% di Desember 2014 dan 67,9% di tahun 2015 sejalan dengan kembali tumbuh kredit dibandingkan di tahun 2014, komposisi penyaluran kredit terhadap total aktiva produktif diproyeksikan menjadi naik dengan adanya pertumbuhan kredit tersebut yang meningkat. Sedangkan untuk periode berikutnya di tahun 2016 naik menjadi sebesar 76,1% serta sebesar 79,4% di tahun 2017 adalah dampak dari pertumbuhan kredit yang diharapkan dapat kembali tumbuh dan normal di periode berikutnya.

**6. Rasio UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Terhadap Total Kredit:**

Demikian halnya dengan target penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga diproyeksikan untuk periode kedepannya dapat kembali terus meningkat setiap tahunnya. Rasio UMKM terhadap total kredit di tahun 2014 sebesar 11,0% serta 11,1% di Maret 2015 dan diproyeksikan di tahun 2015 kembali tumbuh menjadi 13,6% di tahun 2016 menjadi sebesar 15,9% dan untuk periode selanjutnya tahun 2017 diproyeksikan tumbuh dikisaran 18,3% serta sejalan terus dengan pertumbuhan kredit yang berjalan.

**b. Rencana Bisnis Jangka Menengah**

Bank telah menetapkan beberapa target jangka menengah dengan dasar rencana jangka pendek sebagai awal atau *base figure* bisnis yang dapat disampaikan sebagai berikut :

Pengembangan bisnis 2014-2017 dilaksanakan dalam 2 Fase dengan meliputi 5 Isu Utama, sebagai berikut :

**1. Perbaiki Kinerja Keuangan**

Fase 1. Rekonsolidasi di tahun 2014

- Peningkatan Manajemen Permodalan
- Implementasi Program efisiensi
- Penyetoran Modal awal Rp.300 miliar guna meningkatkan profil risiko dan menopang Neraca JTrust Bank.

Fase 2. Ekspansi

a. tahun 2015

- Peningkatan Manajemen Permodalan
- Peningkatan Manajemen Laba/Rugi
- Restrukturisasi *Balance Sheet* untuk meningkatkan pendapatan
- Penambahan setoran Modal Rp.300 miliar

b. tahun 2016-2017

- Peningkatan Manajemen Permodalan
- Ekspansi Kredit bersuku bunga tinggi (*high yield*)
- Membersihkan aset yang non prospektif
- Penambahan setoran Modal berikutnya sesuai kebutuhan dari rencana *corporate plan* 2015-2019 guna mendukung proyeksi pertumbuhan kredit.

**2. Pengembangan Manajemen Risiko**

Fase 1. Rekonsolidasi di tahun 2014

- Peningkatan proses kredit
- Mengelola seluruh portofolio risiko Bank dan mengembangkan perangkat Manajemen risiko.

Fase 2. Ekspansi

a. tahun 2015

- Peningkatan proses kredit
- Mengelola seluruh portofolio risiko bank dan mengembangkan perangkat Manajemen Risiko.

- Mengembangkan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi.
- b. tahun 2016-2017
  - Menerapkan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi.
- 3. Pengembangan Infrastruktur dan operasional
  - Fase 1. Rekonsolidasi di tahun 2014**  
Persiapan dan desain:
    - Revitalisasi cabang dan *distribution channel*
    - Mengembangkan proses bisnis yang efektif
    - Cabang sebagai sales dan *Service Channel*
    - *Business process engineering*
  - Fase 2. Ekspansi**
    - a. tahun 2015
      - Implementasi *distribution channel* & cabang
      - Implementasi *effective business process*
      - Relokasi kantor pusat
      - Meningkatkan IT Sistem untuk mendukung bisnis MSME & ritel banking
      - Implementasi XBRL (*electronic business reporting*)
      - Implementasi *Network Security and corporate Internet Banking*
      - Mengajukan *cash management*
      - Mempersiapkan *Chip Card system* untuk memenuhi Ketentuan BI (NSICSS)
      - Implementasi *performance management system*
      - meningkatkan *Loan Origination System*
    - b. tahun 2016-2017
      - Implementasi *distribution channel* & cabang
      - Implementasi *effective business process*
      - Ekspansi kantor cabang
      - Implementasi *e-banking*
      - Implementasi *mobile banking* untuk nasabah MSME
      - Implementasi *cash management*
- 4. Fokus Utama Bisnis
  - Fase 1. Rekonsolidasi di tahun 2014**
    - Konsolidasi *loan business*
    - Membangun segmentasi strategis untuk pembiayaan Consumer & Pembiayaan UMKM
    - *Differentiate approaches to SMEs VS. Middle Market*
  - Fase 2. Ekspansi**
    - a. tahun 2015
      - Percepatan Bisnis Mikro & SME
      - Meningkatkan produktivitas cabang
      - Meningkatkan dana murah
      - *Expanding deposits customer base*
      - *Shifting core deposits*
      - Meningkatkan aliansi strategis pada jaringan/network

- *Strengthening fee based income ratios*
- *Strengthening money changer positioning*
- Memperkuat pengembangan kemampuan SDM dengan merekrut 280 *account officer and funding officer*

b. tahun 2016-2017

- Dana murah : 23%
- *Accounts* : 1 million
- *Quality network* : 71
- Penyesuaian *delivery channels*
- Manajemen Penjualan/*relationship*
- Memperkuat pengembangan kemampuan SDM dengan merekrut 615 orang

5. Peningkatan *Image* Perusahaan

Mulai dilakukan pada tahapan Fase ke 2. Ekspansi dengan melakukan sebagai berikut:

- Melakukan *rebranding*
- Meningkatkan pemasaran baru
- Program komunikasi
- Mempersiapkan Komunitas yang terintegrasi melalui program *Marketing Communication*
- Meningkatkan *brand awareness* melalui peningkatan promosi yang efektif dan terintegrasi

c. Rencana Bisnis Jangka Panjang

Untuk perkembangan bisnis jangka panjang selanjutnya dapat diuraikan dengan fokus *strategy* sebagai berikut :

Tahun 2018

Pangsa Pasar

1. Percepatan pertumbuhan *Retail Banking*
2. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan jasa pelayanan
3. Meningkatkan pangsa pasar dan jaringan bisnis
4. Memasuki era *digital banking*
5. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

Tahun 2019

Ekspansi yang terintegrasi

1. Memperkuat posisi di pasar
2. *Integrated banking Micro SME & Commercial, Retail Consumer*
3. Meningkatkan pertumbuhan bisnis
4. Meningkatkan laba serta aset

Tahun 2020

Pertumbuhan yang berkelanjutan

1. Pengembangan berbagai produk-produk yang inovatif

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Memperluas dan memperkuat jaringan domestik dan jaringan internasional
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mempunyai pelayanan *digital banking* yang lebih baik dan luas.

## C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs website [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) wajib disampaikan kepada Pemegang Saham, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia (PERBANAS), Institut Bankir Indonesia (IBI), 2 (dua) Lembaga Penelitian di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang kompeten, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yang terkenal, dan Kementerian Industri.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tatacara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank harus memiliki unit dan atau fungsi khusus di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah, dan wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI).

#### D. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

*Internal Fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Maksud mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah jika dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2015 jumlah kasus kecurangan (*Internal Fraud*) yang dilakukan oleh pegawai Bank (pegawai tetap dan pegawai tidak tetap) dan/atau pihak eksternal Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangan > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						Keterangan
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap		
	Thn sbim-nya	Thn berjin 2015	Thn sbim-nya	Thn berjin 2015	Thn sbim-nya	Thn berjin 2015	
<i>Total fraud</i>	-	-	2	2	-	1	1. Penerimaan <i>Fee/ Kickback</i> dan dokumen palsu di Kios Milen Jatinegara 2. Penggelapan Dana Promosi di Consumer

Handwritten initials and arrows.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

							Business Division/ Consumer Loan Division 3. Penerimaan Fee di Unit Kerja Retail Business Division
Telah selesai	-	-	2	1	-	-	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	1	

Terdapat 2 (dua) kasus kecurangan (*Internal Fraud*) yang terjadi tahun 2014 dan terungkap tahun 2015, pada Semester II (bulan Agustus) tahun 2015 Bank telah melakukan upaya penyelesaiannya melalui proses hukum dengan melaporkan pegawai yang terlibat *fraud* kepada pihak berwajib/Kepolisian. Sedangkan untuk 1 (satu) kasus kecurangan yang terjadi tahun 2015 Bank telah melakukan upaya penyelesaiannya dengan pelakunya dikeluarkan dari Bank.

#### E. Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPHP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, yang antara lain meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* JTrust Bank yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan & Monitoring tindak lanjut.

Manajemen JTrust Bank telah menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* dengan menetapkan *Anti Fraud Charter* dan semboyan "*No Fraud Tolerance*" pada tanggal 19 April 2012. Bank telah membentuk organisasi *Anti Fraud (Desk Anti Fraud)* dibawah Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi *anti fraud* JTrust Bank.

Pada tahun 2015 Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain :

- Sosialisasi *anti fraud* secara berkala
- Program *Know Your Employee (KYE)*
- Implementasi *Whistleblowing system*
- Program *Surprise Audit*
- Program *Surveillance Audit*
- Investigasi kasus
- Evaluasi serta monitoring tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Whistleblowing System

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan *Whistleblowing System* (WBS) yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank antara lain:

- Kotak Pos 99 Jakarta 10000
- Hotline SMS/WhatsApp dikirimkan kepada Nomor : 0813 1504 5555.
- Portal anti *fraud* dengan alamat/address [http://10.33.1.57/jtrust\\_serasi/](http://10.33.1.57/jtrust_serasi/).

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*).

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Desk Anti Fraud* yang langsung dibawah pengendalian Direktur Utama sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS Bank akan dibuka oleh pejabat anti *fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

Selama tahun 2015 terdapat 2 (dua) laporan pelanggaran yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank dan telah ditindaklanjuti oleh Bank dengan melakukan investigasi khusus.

## F. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2015 jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

### 1. Bank Sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	(satuan) Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	6	-
Dalam proses penyelesaian Bank sebagai Tergugat	25	-
Total	31	-

### 2. Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

Permasalahan Hukum	(satuan) Jumlah	
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan)		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Total	1	-
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	4	-
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	3
Total	-	3

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

- Gugatan Perdata
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Laporan Pidana

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Memastikan penanganan kasus, baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal lawyer sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal lawyer.

### G. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/Vendor TI

Berdasarkan PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, dan SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

Penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan Bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko Bank berupa risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi antara lain karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

#### a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon vendor TI (terkait dengan kerjasama sistem/program) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi :

##### a.1. Mendapatkan sumber informasi calon vendor TI dari:

- Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon vendor.
- Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
- Browsing di internet.
- Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
- Seminar atau pelatihan.

##### a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon vendor TI yang akan dipilih :

Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:

- Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
- Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
- Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon vendor TI yang akan dipilih:

- Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
- Mengumpulkan *requirement/kebutuhan* fungsional dari unit bisnis.
- Mengumpulkan *requirement/kebutuhan* teknis dari Divisi IT.
- Melihat *requirement/kebutuhan financial/Budget* dari rencana bisnis tahunan.
- Penyusunan TOR (*Term Of Reference*) berdasarkan *requirement* fungsional dan teknis.
- Mengirimkan undangan presentasi beserta TOR kepada beberapa calon vendor TI.
- Calon vendor TI melakukan presentasi.
- Calon Vendor TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan TOR.
- Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon vendor TI (jika dimungkinkan untuk POC).
- Calon vendor TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
- Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari :
  - Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai user.
  - Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.
  - Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi Corporate Secretary (membawahi Bagian Procurement).
- Penilaian calon vendor TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
- Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
- Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.
- Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi Corporate Secretary menindaklanjuti proses *engagement* vendor TI selanjutnya, yaitu : Proses *Purchase Order*/pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan Vendor TI Dalam *Vendor Management*

Bank wajib memiliki program pemantauan data vendor TI secara berkesinambungan dalam *vendor management* untuk memastikan penyedia jasa/vendor TI telah melaksanakan pekerjaan/memberikan jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama dengan melakukan :

- Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari vendor-vendor TI utama.
- Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari vendor TI utama.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Permintaan laporan keuangan tahunan (*Audited*) vendor TI utama.
- Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
- Rapat berkala dengan vendor TI utama.
- Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

Berikut adalah daftar proyek IT dan Vendor TI yang bekerjasama dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk selama Tahun 2015 :

No	Nama Vendor	Nama Proyek	Tujuan Penggunaan Proyek	Status
1	PT. Teravin Technovations	Internet Banking untuk Corporate	Nasabah korporasi dapat menggunakan layanan Internet banking	Selesai
2	PT. Misys International Financial Systems	Upgrade Core Banking System - Bank Fusion Equatlon	Menyempurnakan fungsi-fungsi core banking terbaru	Selesai
3	PT. Yala Indonesia	Project Management Office (PMO) untuk upgrade Core Banking System	Memastikan upgrade Core Banking System berjalan dengan lancar	Selesai mengikuti proyek upgrade core banking
4	PT. Multipolar Technology	Modul PSAK 50/55	Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 50/55	Selesai dan sedang <i>post implementation review</i>
5	PT. Visionet Internasional	Outsourcing DRC	Facilitas DRC yang dikelola secara profesional	Selesai
6	Aplikasi BI	RTGS Gen 2	Mengikuti ketentuan BI	Selesai
7	Aplikasi BI	SKN Gen 2	Mengikuti ketentuan BI	Selesai
8	PT. Visionet Internasional	PBX untuk Kantor Pusat yang baru	Tersedianya PBX untuk kantor pusat di Sahid Sudirman Center	Selesai
9	PT. Dymar Jaya Indonesia	New HSM untuk Aplikasi ATM	Menggantikan HSM 8000 yang sudah tidak di-support dengan HSM 9000	Selesai
10	PT. Visionet Internasional	Outsourcing Email Server	Menggantikan email Zimbra <i>freeware</i> dengan email Exchange	Selesai
11	PT. Excite Indonesia	Website Renewal	Memperbaharui website terkait <i>rebranding</i> JTrust Bank	Selesai fase 1
12	PT. EDI Indonesia	MPN Gen 2	Mengikuti ketentuan Pajak	On Progress
13	PT. Mitra Integrasi Informatika dan PT. Wahyu Kartumasindo	Chip card (NSICCS)	Mengikuti ketentuan BI	On Progress
14	PT. Aristi Jasadata	Fixed Asset	Mengadministrasi data inventaris	On Progress
15	PT. KPSG	Human Resource System	Mengintegrasikan HR Payroll, Administrasi, <i>Planning</i> dan <i>Development</i>	On Progress
16	PT. Multipolar Teknologi dan PT. Mitra Integrasi Informatika	Virtual Account	Implementasi virtual account lewat Teller dan ATM	On Progress

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

17	PT. DTEX Indonesia	IT Internal Risk Assessment	Monitoring dan mengatur IT security internal	On Progress
18	PT. Visionet Internasional	Active Directory	Sebagai syarat untuk menjalankan internal risk assessment	On Progress
19	PT. Tri Daya Asira	Interface RTGS New Generation & SKN dengan Core Banking System	Otomasi RTGS New Generation & SKN sehingga tidak perlu double input	On Progress

### H. Penetapan Status Pengawasan Bank

Memperhatikan :

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional,
- Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-233/D.03/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penetapan Bank Mutiara dalam Pengawasan Intensif,
- Surat Bank Nomor 29.04/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Penetapan Bank Mutiara dalam Status Pengawasan Intensif,
- Surat JTrust Bank Nomor 03.02/S.Dir-SKMR/JTRUST/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Status Bank Dalam Pengawasan Intensif PT Bank JTrust Indonesia Tbk,

Serta berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kinerja bank sampai dengan posisi Oktober 2015, bahwa kinerja JTrust Bank telah menunjukkan perbaikan dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku untuk keluar/lepas dari status "Pengawasan Intensif", maka sesuai Surat OJK Nomor SR-223/D.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Penetapan Bank Saudara Dalam Status Pengawasan Normal, bahwa OJK telah menetapkan status pengawasan JTrust Bank dalam "Status Pengawasan Normal".

Status Pengawasan Normal Bank agar kondisinya terjaga dengan baik, maka Manajemen JTrust Bank senantiasa berupaya optimal memperhatikan dan melakukan hal-hal antara lain :

- Perbaikan kinerja rentabilitas dan pengelolaan kualitas aset yang efektif untuk menetapkan arah dan strategi permodalan jangka panjang dalam rangka menciptakan pertumbuhan modal secara organik yang bersifat *sustainable*,
- Menjaga rasio KPMM minimal 11% dan rasio NPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan rasio rata-rata industri.
- Menjaga kestabilan likuiditas melalui pengelolaan likuiditas secara hati-hati dengan memperhatikan *early warning indicators* dan kecukupan alat likuid.
- Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko utama Bank dan penguatan kualitas *Good Corporate Governance*.
- Meningkatkan kecukupan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas, melalui identifikasi gap kompetensi, perekrutan yang efektif, pelatihan yang tepat dan memadai yang memperhatikan kewajiban pemenuhan rasio minimum biaya pendidikan terhadap keseluruhan biaya tenaga Kerja.
- Menyelesaikan tindak lanjut komitmen hasil pemeriksaan OJK.

## BAB VII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

### 7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya senantiasa berusaha menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan masyarakat disekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus diminati serta disukai oleh masyarakat. Terciptanya lingkungan dalam masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi perkembangan dan kelangsungan dunia usaha di manapun.

Dilandasi suatu pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat disekitarnya, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyadari bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui program "JTrust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

### 5 (Lima) Pilar CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Guna mewujudkan segenap perihal di atas maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan berbagai upaya dengan memperhatikan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Adapun kelima pilar dimaksud adalah sebagai berikut:

- ***Building Human Capital***  
Secara internal, Bank berupaya untuk menciptakan SDM yang andal. Sedangkan secara eksternal, Bank senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui *community development*.
- ***Strengthening Economies***  
Bank berupaya mendapatkan laba dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi komunitas khususnya di lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi.
- ***Assessing Social Tension***  
Bank senantiasa akan menjaga keharmonisan dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
- ***Encouraging Good Governance***  
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank senantiasa menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.
- ***Protecting The Environment***  
Bank senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya.

## Program CSR Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus berperan serta dalam membangun masyarakat dalam kerangka pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan rincian penyaluran dana yang fokus dalam beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

### 1. Pendidikan

Salah satu program CSR dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah program bantuan sumbangan pendidikan yang bekerja sama dengan Koperasi Karyawan Mulia Industry, Cikarang - Bekasi Jawa Barat, berupa pemberian bantuan santunan pendidikan bagi murid SD/SMP/SMA yang yatim piatu didaerah sekitar.

Penyaluran dana program CSR untuk kegiatan pendidikan yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2015 membutuhkan dana sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

### 2. Kesehatan dan Kemanusiaan

Program rutin PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam rangka kegiatan CSR di bidang kesehatan dan kemanusiaan adalah penyelenggaraan kegiatan Donor Darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung IFC lantai 3, ruang serbaguna Kantor Pusat JTrust Bank yang diadakan rutin tiap tahunnya. Dengan peserta pendonor yang berasal dari internal bank serta karyawan dari perusahaan/tenant yang berada di Gedung IFC tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Donor Darah tersebut pada tanggal 8 April 2015 membutuhkan dana sebesar Rp.12.184.500,- (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

### 3. Sosial dan Keagamaan

Bentuk kegiatan program CSR dalam bidang sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2015 adalah berupa :

a. Pelaksanaan santunan bagi anak yatim piatu didaerah sekitar beserta yayasan Yatim piatu dari daerah tersebut yang dilaksanakan di Kantor Cabang Fatmawati, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015, dalam santunan tersebut manajemen bank memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai. Seluruh kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam acara tersebut adalah sebesar Rp.41.396.700,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

b. Pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati hari Raya I'dul Adha 1436 H. dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk ikut memeriahkan kegiatan rutin keagamaan tersebut yang dilaksanakan bertepatan hari raya tersebut 24 Oktober 2015 di halaman Masjid Al-Ijtihad di daerah Setiabudi Jakarta Selatan.

Dalam acara pemotongan hewan kurban, yang disumbangkan sebanyak 1 ekor sapi dengan harga sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

### 4. Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan program CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk selanjutnya adalah kegiatan bantuan sumbangan bencana berupa adanya kebakaran di Pasar Tradisional Klewer - kota Solo Jawa Tengah. Dalam bantuan sumbangan tersebut, perusahaan membantu program

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

renovasi pasar yang diajukan oleh pemerintah daerah setempat dengan bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## Rencana Program CSR Tahun 2016

Selain tetap memperhatikan dan meningkatkan aktivitas yang sesuai dengan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun rencana program CSR di tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan yang masih merupakan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa kegiatan yang cukup besar yang rencana akan dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Berikut beberapa rencana program kegiatan CSR di tahun 2016 yang dapat disampaikan :

- Kegiatan Donor Darah
- Pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban
- Pemberian santunan anak Yatim Piatu
- Beasiswa bagi anak karyawan dasar yang berprestasi
- Bantuan bencana alam
- Lingkungan Hidup (*Go Green*)

Disamping itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk tetap akan mendukung program inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang edukasi keuangan (dalam bidang Perbankan). Dukungan terhadap bank akan menjalankan program yang bernama SIKAPI, yang pernah dijalankan pada periode sebelumnya. Program ini ditujukan bagi masyarakat disekitar Kantor Pusat dan kantor cabang JTrust Bank.

### 7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank

- Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara rutin/periodik telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan bahwa Bank melakukan penilaian sendiri secara Internal (*Internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.
- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
- Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank Tahun 2015 adalah:

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG Semester I/Posisi Juni 2015		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	3	Cukup Baik

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG Semester II/Posisi Desember 2015		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2 *)	Baik *)

\*) Berdasarkan Surat OJK No.5-53/PB.311/2016 tanggal 29 Juli 2016 Perihal Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk, terdapat perbedaan hasil penilaian Peringkat Faktor GCG oleh OJK yaitu Peringkat 3 / Cukup Baik, maka Bank harus melakukan revisi terhadap Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Individual Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Posisi Desember 2015 (Ref. SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum).

- Berikut disampaikan Revisi Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Individual Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Posisi Desember 2015 :



Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Cukup Baik
Konsolidasi	---	(jika ada subsidiary company)
Analisis		
<p>Berdasarkan <u>Kertas Kerja (KK)</u> dan data/dokumen pendukung lainnya (hasil audit internal dan eksternal, data financial / non financial), maka dapat disampaikan self assessment sebagai berikut:</p> <p><b>A. Faktor Kekuatan:</b></p> <p><b>a. Governance Structure:</b></p> <p>Governance structure adalah struktur kewenangan berikut persyaratan pejabat yang ada di Bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Terkait dengan implementasi governance structure, antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Saham telah memenuhi komitmen penambahan modal, yang telah dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.300 miliar melalui RUPSLB.</li> <li>- Tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.400 miliar melalui RUPSLB, dan juga melakukan peningkatan modal dasar dari Rp.12 Triliun menjadi Rp.15 Triliun.</li> <li>- Bulan Oktober 2015 penerbitan subdebt (pinjaman subordinasi) sebesar USD 25 juta (eqv. +/- Rp.342 miliar).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Catatan:</b></p> <p>Penambahan modal oleh Pemegang Saham yang telah dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2015 sudah mencapai tingkat yang maksimal sesuai dengan ketentuan OJK, penundaan penambahan modal hingga adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang terkait status Pemegang saham Publik. Sebagai konsekuensinya, penambahan modal oleh Pemegang Saham akan ditunda kemudian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan RUPSLB dengan agenda perubahan terhadap susunan pengurus PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</li> <li>• Komposisi jumlah Dewan Komisaris dan Direksi memenuhi ketentuan dan terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman serta mempunyai pemahaman yang baik terhadap industri keuangan perbankan, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Direksi melakukan upaya-upaya meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</li> <li>• Telah dibentuk Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta anggota komite-komite mempunyai kompetensi dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta melaksanakan pemenuhan rapat-rapat sesuai ketentuan.</li> <li>• Telah memiliki Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur/SOP tentang Benturan Kepentingan, dan senantiasa di-up date.</li> </ul>		

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

- Telah mempunyai *Infra Struktur Organisasi* bidang *Manajemen Risiko*, *bidang Kepatuhan* dan *bidang Legal*, serta *Satuan Kerja Audit Interen/ISKA* dengan kompetensi *SDM* yang memadai dan dapat bekerja secara *independen*.
- Telah menunjuk *Kantor Akuntan Publik/KAP* yang memenuhi aspek *legalitas* serta standar profesional akuntan publik untuk melakukan audit.
- *Kebijakan, Prosedur/SOP* dan *Manual Produk* senantiasa *di-update* sesuai ketentuan, dan diantaranya telah dilakukan *revisi* seiring dengan perubahan nama dari *PT Bank Mutiara Tbk* menjadi *PT Bank JTrust Indonesia Tbk*, serta terus dilengkapi sesuai kebutuhan.
- Telah memiliki *kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit/BWMK* secara *individual* ataupun *kolegal* sesuai dengan *fungsi, tugas dan tanggung jawab* masing-masing dari jajaran manajemen.
- Telah mempunyai *pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi* dan cukup *transparan* dalam *publikasi keuangan, informasi produk bank* dan *penggunaan informasi data pribadi nasabah*, cakupan pelaksanaan *GCG* telah sesuai dengan ketentuan.
- Meningkatkan pelaksanaan *GCG* dibidang *Infra struktur IT* tahun 2015 dengan menyelesaikan beberapa proyek dibidang *IT* antara lain : *Proyek Internet Banking, Upgrade Core Banking ke Bank Fusion Equation, RTGS Gen 2 dan SKN Gen 2, Modul PSAK 50/55, New HSM untuk Aplikasi ATM, Outsourcing DRC, PBX untuk Kantor Pusat, Outsourcing email server, Website Renewal, serta beberapa proyek lainnya yang dalam proses penyelesaian, antara lain : Virtual Account, MPN Gen2, Chip Card (NSICCS), HRD System, IT Internal Risk Assesment, Active Directory, dsb.*
- *Special Hire* untuk beberapa posisi pada level *middle* dan *top management* dilakukan untuk mendukung percepatan bisnis. Untuk karyawan *existing* dan baru telah dilaksanakan program *Banking Development Staff (BDS)* dan *Banking Development Officer (BDO)*, dalam rangka *pelatihan dan peningkatan skill* karyawan. Dan juga bertujuan untuk melakukan *rekrutmen* yang lebih selektif. Dilakukan pula upaya yang konsisten terkait *transformasi cabang-cabang* agar lebih meningkatkan *kuualitas dan kuantitas SDM* sesuai kebutuhan sebagai *ujung tombak penjualan dan pelayanan*.
- *Evaluasi dan penyempurnaan infra struktur organisasi* sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan *faktor efisiensi, kompetensi/kualitas kinerja yang lebih baik dan efektif*. Dalam hal ini antara lain dilakukan *pengurangan Jumlah Divisi, Kepala Divisi, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi*, namun dalam pelaksanaannya tetap dapat *meng-cover* dengan baik *aktivitas dan pekerjaan yang ada*, sebagai berikut : *Kepala Divisi* dari 21 menjadi 14, *Kepala Bagian* dari 71 menjadi 53, serta *Kepala Seksi* dari 147 menjadi 92.
- Pada bulan *Agustus - Desember 2015*, telah dilakukan *training refreshment APU-PPT* kepada seluruh *Cabang* terutama kepada *frontliners*.

**b. Governance Process:**

*Governance process* adalah *pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank* dalam menjalankan *bisnis dan operasional perbankan*.

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Terkait implementasi *governance process* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional sebagaimana sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan yang berlaku.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan / memberikan saran kepada Direksi, memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, memonitor dan mengingatkan Direksi untuk menindak-lanjuti semua temuan audit internal maupun audit eksternal, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
- Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris maupun Komite-Komite dibawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah masuk dalam ranah Benturan Kepentingan.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Direksi telah membentuk dan mengangkat Anggota Komite dan Satuan Kerja tertentu yang bertanggung jawab kepada Direksi, antara lain : Divisi Kepatuhan & Legal, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), SKAI, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite ALCO, serta Komite Kredit yang merupakan media/forum Direksi, Kepala Divisi, serta pihak terkait lainnya dalam memutus kredit.
- Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Kepatuhan sebagai *second line of defence*, serta SKAI/Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defence*) telah bekerja secara independen dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi melalui forum yang telah dibentuk yaitu "Governance Risk, Compliance & Control (GRCC)".
- Bank senantiasa berupaya menurunkan tingkat pelanggaran menjadi lebih baik dan seminimal mungkin menghindari pelanggaran dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan.
- Aktivitas operasional bank telah berjalan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari Pemegang Saham (*shareholder*) atau pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).
- Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP Terdaftar) telah memenuhi prosedur yang berlaku dan asas/prinsip GCG, melaksanakan tugasnya secara independen dan proses transparansi Laporan Keuangan Publikasi senantiasa dilakukan dan disajikan dengan baik.
- Implementasi tahapan peningkatan Kompetensi SDM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai kebijakan dan SOP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara bertahap didukung pula oleh sistem infrastruktur yang memadai dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

- Proses penerapan Manajemen Risiko telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, pengambilan keputusannya dijalankan sesuai kebijakan & prosedur yang berlaku.
- Telah berupaya memenuhi target atas rencana strategis bisnis bank melalui kebijakan-kebijakan yang senantiasa disesuaikan dengan memperhatikan faktor persaingan dan kondisi perekonomian, serta prinsip kehati-hatian.
- Penyelesaian rasio-rasio keuangan yang belum sesuai ketentuan terutama rasio NPL dan BMPK. Untuk pengurangan NPL telah dilakukan melalui penjualan asset bermasalah kepada PT. JTI (JTrust Investment Indonesia), sedangkan Pelampauan BMPK yang masih ada saat ini hanya tinggal PT. Sinar Central Sandang (PT.SCS).
- Telah dilakukan proses uji coba terhadap Kebijakan dan SOP Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) dengan disaksikan dan di-review oleh pihak independen, dan telah dilengkapi pula prosedur alternatif pada masing-masing SOP di setiap unit kerja, serta telah dibentuk Tim yang melibatkan personel dari masing-masing unit kerja.
- Implementasi Compliance Report Monitoring (CRM) sebagai upaya meminimalkan sanksi dan denda atas keterlambatan kewajiban pelaporan kepada pihak Regulator (OJK/BI).
- Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan dan memastikan terlaksananya penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Dibentuk Tim Task Force terkait "Penanganan dan pencegahan Non Performing Loan (NPL)", yang secara rutin melakukan pertemuan membahas perkembangan NPL, kualitas penanganan dan monitoring NPL, pencapaian target penyelesaian NPL yang telah dilakukan, serta membahas solusi yang akan ditindaklanjuti terkait penyelesaian dan perbaikan kredit yang bermasalah.
- Dibentuk Unit Kerja "Four Eyes" yang melakukan review terhadap kelayakan dalam pemberian kredit, antara lain terkait dengan analisis terhadap kelayakan dan kelengkapan laporan keuangan, kelengkapan data/dokumen dan legalitas usaha, kelayakan dan kecukupan agunan serta aspek legalitas, dan sebagainya.
- Meningkatkan penerapan APU dan PPT antara lain sebagai berikut:
  - Pembenhahan data mandatory pada core banking, berkoordinasi dengan IT Division.
  - Optimalisasi penggunaan sistem Smart AML oleh Cabang.
  - Pengalihan petugas UKPN dari Customer Service ke KBO/OO.
  - Monitoring secara bulanan atas kelengkapan data mandatory terhadap pembukaan CIF baru.

**c. Governance Outcomes:**

Governance Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Terkait governance outcomes antara lain dapat disampaikan

*[Handwritten signature]*

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi serta saran kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja dan values bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom dan Rapat Review Putusan RKK), Rapat Komite dibawah Komisaris dan melalui surat kepada Manajemen.
- Pemegang saham JTrust Co. telah melaksanakan komitmennya dengan melakukan penambahan modal secara bertahap.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham/PS melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, memelihara komunikasi terhadap seluruh jajaran organisasi terkait visi dan misi perusahaan.
- Komite-komite memberikan rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris terkait permasalahan pengendalian Interen, manajemen risiko dan lainnya yang bermanfaat.
- Temuan Satuan Kerja Audit Interen/SKAI maupun auditor eksternal sebagian besar telah diselesaikan, dan secara berkesinambungan terus dilakukan monitoring atas tindak lanjut penyelesaian DMTL kepada unit terkait.
- Laporan Kepatuhan, Laporan TKB secara semesteran disampaikan kepada Regulator dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Laporan Profil Risiko secara triwulanan telah disampaikan kepada pihak Regulator sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan kajian profil risiko bulanan secara internal dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan dilaporkan ke Direksi, disampaikan pula ke Komisaris dan dilakukan pembahasan pada rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).
- Upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM, serta tahapan pemenuhan kebijakan dan SOP serta sistem dan infrastruktur pendukung, berimbas terhadap berjalannya kegiatan operasional dan bisnis yang memadal sesuai ketentuan, yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan BMPK, dimana pemberian dan pencairan kredit senantiasa memperhitungkan permodalan bank.
- Informasi produk dan jasa serta informasi lainnya antara lain SBDK, Pengumuman Suku Bunga Penjaminan LPS disampaikan kepada nasabah secara transparan baik tertulis maupun lisan.
- Tim Penyelesaian Karyawan (TPK) dilakukan secara intensif dalam menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan permasalahan fraud yang dilakukan karyawan sebagai bagian dari moral enforcement, dan lebih mengintensifkan penerapan Kebijakan Anti Fraud termasuk whistleblower.
- Bank telah melaksanakan ketentuan terkait Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan Pelaporannya kepada pihak Regulator.
- Penerapan APU dan PPT didukung sistem SMART AML yang terus dikembangkan agar semakin terintegrasi dengan corebanking sistem untuk keperluan proses pemantauan transaksi, kelengkapan informasi profil nasabah (CIF), pengukuran profil nasabah berdasarkan risiko, serta Pelaporan kepada regulator sesuai dengan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Dengan adanya CRM, awareness dari setiap unit kerja terkait atas waktu penyampalan pelaporan menunjukkan peningkatan, dimana penyampalan laporan kepada OJK pada tahun 2015 pelanggarannya (denda/sanksi) menurun dibandingkan tahun 2014, baik secara kuantitas maupun jumlah/nilai dendanya, sebagai berikut :

(Dalam Ribuan)

PERIODE	TERLAMBAT/TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN	DENDA ATAS KOREKSI/KESALAHAN PELAPORAN	SURAT TEGURAN
<b>TAHUN 2014:</b>			
-JUMLAH	14	5	5
-TOTAL DENDA	Rp. 243.130	Rp. 262	-
<b>TAHUN 2015:</b>			
-JUMLAH	7	5	2
-TOTAL DENDA	Rp. 24.174	Rp. 15.096	-

\*) Data berdasarkan rekap data internal atas konfirmasi denda dari BI/OJK dan berdasarkan konfirmasi Surat OJK No.5-24/PB/311/2016 tanggal 31 Maret 2016 terkait jumlah pelanggaran dan denda periode tahun 2015.

- Ratio-ratio keuangan tahun 2014 dan 2015 yang belum memenuhi ketentuan adalah terkait dengan pelampauan BMPK dan NPL, dimana Tahun 2015 untuk NPL sudah sesuai ketentuan dan untuk BMPK progress penyelesaiannya sudah cukup signifikan, sebagai berikut :

**Pelampauan BMPK**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Nama Debitur	Jumlah Pelampauan
<b>Tahun 2014</b> (per 31 Desember)	<b>Kredit :</b> 1. PT Sinar Central Sandang <b>LC</b> 1. PT Sakti Persada Raya 2. PT Damar Kristal Max <b>Surat Berharga :</b> 1. Nomura Bank Int'l PLC London 2. JP Morgan	153.766  31.506 6.177  261.927 309.625
<b>Tahun 2015</b> (per 31 Desember)	<b>Kredit :</b> 1. PT Sinar Central Sandang 2. JTrust Investment Indonesia	137.350 9.507

**Perbandingan NPL Tahun 2014 & Tahun 2015**

	NPL-TAHUN 2014	NPL-TAHUN 2015
NPL GROSS	12,24 %	1,73 %
NPL NETT	6,35 %	2,56 %

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

- *Action Plan* pelampauan BMPK a/n. JTI dengan komitmen penyelesaian melalui angsuran pinjaman pada bulan Januari 2016 telah dipenuhi.
- Untuk mengatasi NPL telah dilakukan solusi penjualan kredit bermasalah ke JTI dan telah mendapat persetujuan dari OJK.

**B. Faktor Kelemahan:**

**a. Governance Structure**

- Komite dibawah Komisaris yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi, sementara ini Ketua komitennya masih "vacant", tetapi pada RUPS Tahunan (Juni 2016) akan ditunjuk Komisaris Independen, sehingga Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat terpenuhi.
- Kecukupan dan kompetensi Sumber Daya Manusia/SDM masih perlu terus dipenuhi dan ditingkatkan, maka Bank akan menindaklanjuti/menyelesaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Menerapkan sistem meritokrasi dengan bantuan penasihat.
  - Melakukan rekrutmen karyawan yang memiliki kompetensi yang baik.
  - Restrukturisasi karyawan atas penutupan Cabang yang kinerjanya tidak menguntungkan.

**b. Governance Process**

- Kelengkapan dan kebenaran data/dokumen kredit masih perlu diperbaiki. NPL dan AYDA telah dialihkan/dijual kepada JTI, sehingga Bank dapat lebih fokus pada performing loan. Untuk tujuan ini Bank telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - Menerapkan *four eyes principle*,
  - Merekrut karyawan baru dengan kompetensi yang baik di bidang kredit.
  - Membentuk *Task Force* yang terkait dengan penanganan dan pencegahan Non Performing Loan (NPL).

**c. Governance Outcome**

- Masih terdapat pemenuhan rasio yang belum sesuai ketentuan yaitu pelampauan BMPK. Untuk tujuan ini maka penambahan modal tidak dapat dilakukan karena keterbatasan oleh peraturan OJK, sehingga Bank akan mengatasinya dengan cara mencari solusi lain serta akan berupaya untuk meningkatkan profitabilitas dengan menaikkan suku bunga kredit PT. Sinar Central Sandang (PT. SCS).
- Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator, dimana pada semester II Tahun 2015 masih terdapat sanksi dan denda dari Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi dan denda tersebut antara lain akibat :
  - Keterlambatan Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dan Laporan Bank Umum (LBU).
  - Adanya migrasi data dari Equation ke Bank Vision.
  - Adanya kesalahan kode transaksi, serta keterlambatan mengumumkan

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG**

*keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi.*

- Masih terdapat Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Tahun 2015 atas hasil audit OJK yang belum diselesaikan. Untuk DMTL OJK hasil pemeriksaan pada bulan Januari 2015, kondisinya s/d bulan Desember 2015 sudah selesai sekitar 96%, dan sisanya dalam proses penyelesaian.
- Terdapat 2 (dua) kasus kecurangan (*Internal Fraud*) yang terjadi tahun 2014 dan terungkap tahun 2015, yaitu kejadian fraud di Unit Kerja Consumer Loan Division, dan di Kios Mikro Jatinegara, dimana hal tersebut pada Semester II (bulan Agustus) tahun 2015 Bank telah melakukan upaya penyelesaiannya melalui proses hukum dengan melaporkan pegawai yang terlibat fraud kepada pihak berwajib/Kepolisian. Sedangkan pada tahun 2015, masih terdapat 1 (satu) kasus kecurangan (*Internal Fraud*), yaitu kejadian fraud di Unit Kerja Retail Business Division. Investigasi telah dilakukan oleh Anti Fraud Division, dan tindakan terhadap pelaku yaitu dikeluarkan dari bank.

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Pelaksanaan GCG, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, serta beberapa perbaikan terkait dengan pelaksanaan penerapan GCG yang telah mengembalikan status PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam status Bank "Dalam Pengawasan Normal", maka penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG posisi Desember 2015 adalah peringkat "3 (Cukup Baik)".



**Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

**Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) GCG**

Sehubungan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk Tahun 2015 dalam Peringkat 3 (Cukup Baik), maka sesuai SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, dan untuk tercapainya perbaikan kategori peringkat penilaian pelaksanaan GCG Bank selanjutnya dengan peringkat GCG yang lebih baik, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) perbaikan GCG dari 11 faktor/pilar penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut :

No.	Permasalahan Pokok/Signifikan	Langkah Perbaikan/ Rencana Tindakan Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Kendala/Hambatan Penyelesaian (apabila ada)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	*****	*****	*****
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	*****	*****	*****
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  Sejak November 2014 hingga saat ini posisi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk sementara masih kosong/ <i>vacant</i> , karena Komisaris Independen yang efektif hanya seorang, yang sudah merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko.	Pada hasil RUPS Tahunan tanggal 30 Juni 2016 telah ditunjuk lagi 2 (dua) anggota Komisaris Independen, 1 (satu) orang telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> pada tanggal 28 September 2016, dan yang 1 (satu) orang lagi masih menunggu penjadwalan oleh OJK.	Jika seluruh Komisaris Independen sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dari OJK, maka salah satunya untuk memenuhi pengisian posisi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	*****	*****	*****

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5.	<p>Penerapan Kepatuhan Bank <u>Bidang IT :</u></p> <p>1. Penggantian Banking System</p> <p>2. Relokasi DRC</p>	<p>Fungsi Core</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Materi Request for Proposal (RFP)</li> <li>• Review RFP dalam internal meeting</li> <li>• Finalisasi RFP</li> <li>• Persetujuan Direksi atas RFP</li> <li>• Pembentukan Tim Proof of Concept (POC) Core Banking</li> <li>• Pengiriman RFP kepada para Vendor</li> <li>• Demo POC dan site visit ke Vendor</li> <li>• Ringkasan hasil POC</li> <li>• Perubahan Organisasi dan Evaluasi dari JTrust Group</li> <li>• Evaluasi Tim dari Korea</li> <li>• Rapat Komite IT</li> <li>• Keputusan Direksi mengenai Core Banking System yang akan dipakai</li> <li>• Implementasi Core Banking System yang baru</li> <li>• Perjanjian Layanan Fasilitas DRC</li> <li>• DRC Caging &amp; Rack</li> <li>• DRC Inspection by JTrust Bank Team</li> <li>• Jaringan Komunikasi Data Lintasarta, Telkom, XL, Primacom</li> <li>• Relocation Phase 1 &amp; Phase 2</li> <li>• Post Implementation Review</li> </ul>	<p>Junji 2015 - Agustus 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015/ 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015/ 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>September 2015 - Oktober 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>November 2015 / 100% (Selesai)</p> <p>Desember 2015 - Maret 2016/ 100% (Selesai)</p> <p>April 2016 - Mei 2016/ 100% (Selesai)</p> <p>Junji 2016 / 100% (Selesai)</p> <p>Agustus 2016 / 50%</p> <p>Maret 2016 / 0%</p> <p>September 2015/ 100% (Selesai)</p> <p>November 2016 / 20%</p> <p>September 2016/ 70%</p> <p>September 2016/ 50%</p> <p>November 2016 / 0%</p> <p>November - Desember 2016 / 0%</p>	
6.	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>Pembentukan Internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Organisasi dan Pedoman</li> </ul>	<p>September 2016</p>	

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	<p>control yang bertujuan untuk memitigasi risiko operasional dengan melakukan pemeriksaan secara harian dan dini terhadap transaksi, sehingga dapat dijadikan sebagai <i>early warning system</i>. Untuk tahap awal akan diadakan di seluruh Kantor Cabang terlebih dahulu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapping dan Penempatan SUM</li> <li>• Implementasi</li> </ul>	<p>NOVEMBER 2016</p> <p>Kuartal 1 tahun 2017</p>	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	-----	-----	-----
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	-----	-----	-----
9	<p>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)</p> <p><u>Pelampauan BMPK atas nama PT. SCS</u></p> <p>Bank belum selesai menindaklanjuti temuan terkait debitur PT. SCS yang pemberian kreditnya sudah melampaui BMPK pada saat pengambilalihan Bank oleh LPS (tahun 2008).</p> <p><b>a. Strategi PSP</b></p> <p>Kepemilikan Bank telah beralih sejak November 2014. Namun demikian, tindak lanjut penyelesaian pelampauan BMPK Bank masih belum optimal karena ditetapkan untuk diselesaikan melalui pertumbuhan modal secara organik, sehingga sulit untuk dapat tercapai</p>	<p>1. Upaya regulasi untuk penyelesaian pelampauan BMPK dan/atau pelunasan yang saat ini masih berjalan dengan SCS, antara lain :</p> <p>a) Kecapahan nilai haircut yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.</p> <p>b) Menawarkan kredit SCS kepada Bank lain (Bank Pembeli) antara lain dengan skema Rep &amp; Warranties.</p> <p>c) Melakukan <i>Rescheduling</i> pelunasan pokok atas pelampauan BMPK.</p> <p>2. Rencana penambahan modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan terlebih dahulu melakukan simulasi perhitungan kebutuhan modal dengan juga mempertimbangkan untuk pengembangan usaha kedepan.</p>	<p>Pelampauan BMPK SCS diharapkan dapat diselesaikan dengan salah satu rencana tindakan penyelesaian (sesuai surat PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada OJK No. 14.04/S.Dir-SAM/JTRUST/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, terlampir).</p>	

A  
↑

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



	<p>sebelum Desember 2015 (batas akhir penyelesaian permasalahan terkait status Bank dalam pengawasan intensif/BOP) dan berdampak negatif terhadap komponen penilaian Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p>Sementara itu, fasilitas kredit kepada debitur diberikan dalam valuta asing sehingga jumlah pelampauan BMPK berpotensi bertambah dan/atau bahkan tidak dapat diselesaikan dalam batasan waktu yang diajukan Bank (triwulan II-2016).</p> <p><b>h. Restrukturisasi Balloon Payment dengan Suku Bunga &lt; CoF</b></p> <p>Akibat menurunnya kemampuan membayar debitur, Bank melakukan restrukturisasi, namun hal tersebut dinilai tidak meminimatisir risiko kredit dengan optimal karena fasilitas kredit debitur direstrukturisasi dengan <i>grace period / balloon payment</i> dan tingkat suku bunga di bawah <i>cost of fund (CoF)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Restrukturisasi Berjangka (KRB) 1 dengan suku bunga</li> </ul>			
--	--	--	--	--

**Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

	<p>sebesar 7,00%, plafond sebesar Rp.57.904 juta, dengan CoF sebesar 9,94%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Restrukturisasi Berjangka (KRB) 2 dengan suku bunga sebesar 2,50%, plafond sebesar USD1,4 juta, dengan CoF sebesar 2,54%.</li> <li>• KRB 3 dengan suku bunga sebesar 2,00%, plafond sebesar USD26,5 juta, dengan CoF sebesar 2,25% dan pembayaran pokok kredit baru akan dilakukan pada Maret 2016.</li> </ul>			
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal	*****	*****	*****
11.	Rencana Strategis Bank	*****	*****	*****

Demikianlah Revisi Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2015 ini kami sampaikan, atas perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2016

 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

Hormat kami,

  
**Ahmad Fajar**  
Direktur Utama

  
**Benny Luhur**  
Komisaris Independen

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## CHAPTER I INTRODUCTION

### Commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Good Corporate Governance, simply referred as “GCG” is a method or mechanism implemented by the corporate organ and all ranks in its substructure as the key component of the “governance structure,” supported by the availability and readiness of other infrastructures to carry out the governance process in performing its functions and duties appropriately. This is the commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in implementing GCG by prioritizing moral and ethical principles as well as sound banking business practices in line with the prevailing regulations. Therefore, the appropriate delivery of governance outcome which match the GCG principles by engaging in sound and transparent banking business practices, consistent with the laws and regulations. There are two key components in GCG implementation, namely ethics and regulations. Ethics are awareness of business actors to engage in business practices which prioritize the company sustainability, interests of stakeholders, and avoiding methods of creating instant profitability. The company complies to the prevailing laws and regulations (regulatory driven).

Ethics and behaviors are critical pillars in building responsible corporate culture. Therefore standards and business behaviors as well as ethical personal behaviors have to be established in the Codes of Corporate Ethics applicable to all ranks of employees and management without exemption. There are three intertwined pillars in implementing GCG, namely the state and its apparatus as the regulator, business world as market actors, and member of the general public as the users of products and services provided by the business world. Implementation of regulations and basic principles of Good Corporate Governance on banking industries are the key requirements in conjunction with the protection of all stakeholders' interests while we also consistently pay attention to the interests and protect all parties, as well as free from conflict of interests.

The Implementation of GCG at PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to banking industry standard in general, by following on the guideline of various regulations as well as laws and regulations covering:

- The regulation of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
- The regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 on the Amendment of the Regulation of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 of 30 January 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
- Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
- Regulation of Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) on the Presentation of Issuer Annual Report of Publicly Traded Company,
- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
- Regulations on the ASEAN Corporate Governance Scorecard which are the standards and practices of Corporate Governance in ASEAN countries, as well as prevailing best practices.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

The Good Corporate Governance implementation at PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. is based on GCG principles and is crucial as part of the efforts in increasing public trust, enhancing performance, maximizing added values for shareholders, and ensuring the embodiment of sound banking system in general. The purpose is to maintain the Bank's business continuity which very much depend on public trust as reflected by the Bank's performance and professional management as well as its capacity to manage the risk in a transparent manner to the general public.

PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. is committed to prioritize a more improved service for the customer, shareholder, as well as other stakeholders, by applying GCG principles in every business activity. The purpose is to build a competitive Banking organization with qualified and dependable human resources in performing and developing a better Banking business. This is a part of endeavor to implement the "Vision and Mission" as a strategic and fundamental step of the Bank as established and routinely as well as comprehensively socialized through operational activities and corporate culture. With respect to the transfer of bank ownership as well as changes in the name and bank logo from PT Bank Mutiara, Tbk. to PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. then the following Vision and Mission have been redesigned and re-established:

**Vision :**

"Being a Dependable Financial Partner Which Consistently Delivers Innovative Solutions"

**Mision :**

- "Consistently create conducive working environment for highly motivated people."
- "Consistently provide valuable banking experience through solution specifically tailored for each individual customer."

Vision and Mision of Bank are be lived by applying corporate values as **Speed - Change - Action**, in which it is further described below:

**Speed :**

"One step ahead of the competitor in delivering timely services"

**Change :**

"Being the game changer in Banking Industry"

**Action :**

"Strive to be at the forefront in delivering maximum performance"

**CORPORATE VALUES details**

	For Customer	For Company	For Community
<b>Speed</b>	<b><u>The Fastest Service</u></b>	<b><u>Accelerate The Business</u></b>	<b><u>Leading in Community Development</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick response customer service</li> <li>• Deliver the fastest banking service</li> <li>• Always put customer first ahead of others</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliver work results on-time in any job given</li> <li>• Do your work efficiently</li> <li>• Give impact to boost company performance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Be the first in developing community</li> <li>• Plan your next activities for two steps ahead</li> <li>• Be aware of changes &amp; response the first</li> </ul>

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

<b>Change</b>	<p><b><u>Customer-Centric Innovation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innovate new &amp; better way of serving customer's banking needs</li> <li>Deliver unique banking experience like no other</li> <li>Change the paradigm in banking service</li> </ul>	<p><b><u>Think Better Way</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluate your work everyday &amp; learn from your mistake</li> <li>Eager to grow and be better</li> <li>Be creative in day-to-day problem solving</li> </ul>	<p><b><u>Create a New Banking Lifestyle</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Show a new way to do banking to the community</li> <li>Be passionate to create changes in the banking community</li> <li>Set a new banking (saving &amp; investment) mindset</li> </ul>
<b>Action</b>	<p><b><u>Provide The Best Solution and Experience</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deliver high quality service to customers</li> <li>Offer customers not only banking product, but banking solution &amp; experience</li> <li>Address customer needs the best way</li> </ul>	<p><b><u>Challenge Something New</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always develop personal capacity in banking</li> <li>Setting new higher standard in doing business periodically</li> <li>Pursue excellence in work</li> </ul>	<p><b><u>Contribute to The Community</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Give positive contribution to the Community</li> <li>Be a good citizen &amp; obey the law</li> <li>Care for the community welfare</li> </ul>

Vision, Mission, and “Speed-Change-Action” Corporate Values as the corporate culture shall bring new paradigm in banking industry. They shall be adopted as the culture and be instilled into each individual staff at PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. They should be applied in performing the duties and responsibilities.

## GCG Principles

The GCG Implementation at PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Included the implementation of 5 (five) GCG principles known in acronym as “TARIF” namely: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Independensi (Independency)*, dan *Kewajaran dan ke setaraan (Fairness)*, sebagaimana ilustrasi gambar sebagai berikut:

<b>The Principles of GCG</b>				
<b>Transparency</b>	<b>Accountability</b>	<b>Responsibility</b>	<b>Independency</b>	<b>Fairness</b>
Openness in the fringe material and relevant information as well as openness in carrying out the process of retrieval.	Clarity of function and implementation of the bank's organs so that liability implementation running effectively.	The suitability of the management of the bank with the applicable legislation and the principles of managing a healthy bank.	The management of the Bank in a professional manner with no influence/pressure from any party.	Justice and equality in fulfilling the stakeholder's rights arising under the Treaty and the regulations that apply



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



The application of GCG at PT Bank JTrust Tbk includes the implementation of five principle of fundamental GCG that known as “TARIF” is: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. As an intermediation institution, PT Bank Mutiara Tbk should ensure that all levels of the bank in every business aspect have done the basic principles of GCG that needed to achieve sustainability with prioritize shareholders, customers as well as other stakeholders. The more detailed information regarding the principles of GCG, can be delivered as follows :

## 1. *Transparency*

Has an elements of disclosure on timely information supply, sufficient, clear, accurate, and comparable manners as well as easily accessible by shareholders and stakeholders. Internally, the Bank is also committed to implement information transparency to its employees. These transparencies are represented among others through transparent decision making. Implementation of transparency is necessary in order to enable the Bank to engage the business in objective and professional manners while protecting the consumers' interests.

## 2. *Accountability*

Has an elements of clarity in functions within the organizations and methods of accountabilities. In order to ensure the accountabilities, all relevant functions, duties, and authorities of various functions within the organization as well as accountabilities have been clearly defined in line with the Procedure Guideline of each function. Therefore the performance of all departments within the organization may be transparently and measurably justifiable. In order to have such capability, the Bank shall be managed in healthy, measurably, and professional manners by taking into accounts the interests of shareholders, customers, and other stakeholders. Accountability is the necessary prerequisite to attain sustainable performance.

## 3. *Responsibility*

Has an elements of compliance toward the laws and regulations and the internal regulations of the bank as well as show responsibilities. As a form of responsibilities, the Bank is committed to consistently adhere to the laws and regulations as well as internal policies defined. The Bank is responsible to the community and the environment. Responsibility is crucial in order to ensure the preservation of business continuity in a long term while being acknowledged as good corporate citizen or identified as good corporate citizen.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 4. *Independency*

Has an elements of independency from the domination of other parties and objectivities in performing the duties and fulfilling the obligations, or in another words, the Bank perform its activities in independent and objective manners. It avoids the domination and influence from any other party whomsoever. The Bank is committed to run its business independently to enable the Bank's organs along with its entire ranks not to be dominate each other and not to be intervened by any party whomsoever which may affect the objectivity and professionalism in performing their duties and responsibilities.

## 5. *Fairness*

Has an elements of equal treatments and opportunities proportionately. The Bank consistently ensures that the rights and interests of the shareholders have been fulfilled as well as provides fair and equal treatments to the entire stakeholders.

The proper implementation of 5 ( five) basic principles of GCG will support the implementation of 4 ( four) components of main factors in rating the Bank's risks which continuously serve as the focus in the improvement as well as enhancements including Financial Enhancements ( Capital and Earnings), Improvement in Risk Profile, and improvement in GCG implementation supported by 5 ( five) basic principles of GCG in developing core business infrastructure development and enhancement of corporate image.

## 11 (Eleven) Main Factors of GCG Implementation

In accordance with Bank Indonesia's regulations that the implementation of GCG principles (TARIF) at least implemented into 11 (eleven) main factors in GCG implementation at PT JTrust Bank Indonesia Tbk, as follows:

1. Implementation of Boards of Commissioner' duties and responsible;
2. Implementation of Boards of Director' duties and responsible;
3. Auxiliary and implementation of Committee's duties;
4. Resolution of conflict of interests;
5. Implementation of compliance functions;
6. Implementation of internal audit;
7. Implementation of external audit;
8. Implementation of risk management including internal control system;
9. Fund provision to the related parties and provision of substantial amount of funds (large exposures);
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reporting, GCG implementation report and internal reporting;
11. The Bank's strategic plan.

Subsequent to the implementation of GCG principles of the specified 11 (eleven) key factors are performed through self-assessment. The implementation of self-assessment shall be completed comprehensively, structured, and based on 5 ( five) basic principles of GCG ("TARIF"). This is further grouped into governance system, which include 3 (three) aspects of governance system, namely governance structure, governance process, and governance outcome. The following paragraphs illustrate the aspects above:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## **Governance System**

To realize the principles of “TARIF”, then governance systems was built which includes three pillars, as illustration below here



As a brief explanation related to the three pillar of governance system that can be delivered as follows :

### **Governance Structure**

Governance structure is a system which arranges how PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. is directed and controlled to improve the business performance in an accountable manner and bring the values of shareholder into realities in a sustainable manner. All of these measures shall take into consideration the interests of other stakeholders. As a system, the logic consequences of GCG require a supporting tool which is known as governance structure established with the purpose of assessing the structure adequacy and governance infrastructure of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. The purpose is to allow the implementation of GCG principles to produce outcomes which match the stakeholders' expectations. What is included in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. is the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and relevant units at the Bank. Meanwhile governance infrastructure of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. include among others the policies and procedures of the Bank. These policies and procedures consistently refer and comply to the existing laws and regulations, management information system, as well as the primary duties and functions of each organization structure.

### **Governance Process**

In addition to requiring governance structure pillar, the GCG implementation of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. also requires clear procedures in the form of mechanism which is normally referred as accountable governance process. This process at the same time is required for the purpose of assessing the effectiveness of implementation process of GCG principles supported by the adequacy of structures and governance infrastructures of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Subsequently this process will produce outcome which match the expectations of the stakeholders. It is safe to say, that the governance process cover the activities performed to implement the rules, procedures, as well as clear relationship between the decision makers and the controllers on such decisions. This is implemented in order to ensure and/or supervise the process of governance system at PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. Therefore, it is expected that the company activities will operate in a sound and effective manners in line with the directions and/ or to minimize conflict of interests.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Additionally, it is expected that these activities will minimize the risks emerging from the policies made

## **Governance Outcome**

There are 2 (two) outcomes expected from the GCG implementation, namely:

- Ability to improve business performance
- Ability to reduce conflict of interests within the company.

Referring to the regulations of Bank Indonesia, the purpose of governance outcome is to assess the outcome quality in conjunction with fulfilling the expectation of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. stakeholders. This is the outcome of GCG principles implementation process supported by the quantity and quality of structure and infrastructure adequacies. Therefore, it is possible to create the proper corporate governance

## **Increasing The Value of Companies and Capital**

- In implementing all policies and strategy of the company, bank oriented to increase the company's value for shareholders through financial and non-financial performance. As an illustration, in the non-financial side, Bank seeks to strengthen the office networks and with relocation or expand, as well as the development of microfinance, strengthening vision and mission of the company, continue and enhance the implementation of GCG and capital expenditures in technology system to support the business.
- JTrust as a new shareholders have committed to develop PT Bank Mutiara Tbk, especially for the retail market, with being a capital increase started at the end of 2014 and gradually for the next few years as needed to support business expansion. Capital injection by JTrust aims to maintain the CAR capital ratio, so it remains competitive in the banking market, especially accordance with the peer group in Indonesia.
- With the capital injection substantiating the bank's capital as a based besides to credit growth in the future, it will certainly bring to the completion of the legal lending limit. Besides that, it also to make maximum efforts to improve Net Non-Performing Loan (NPL), and increase efforts to monitor the strict order of the collectability of credit quality is maintained and smoothly.

## **GCG Implementation and Health Level of Bank**

The implementation of GCG at PT Bank Indonesia Tbk always undertaken in consequent and sustainable, supported by a strong commitment from the company's organs and ranks below. The basic principle commitments for are among others:

1. Having clear and realistic definitions of the vision and missions, as the defined and socialized vision and mission of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
2. Having corporate values which illustrate the good moral attitude of the Bank in running its business.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

3. Having guideline of work procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors in performing their roles and duties.
4. Having definition of business ethics and Corporate Code of Conduct in which the development involves the company organs and all ranks below them. Business ethics and code of conducts shall be applied continuously and consistently thus shape the corporate culture which are the manifestation of corporate values.
5. In assuming the functions as an intermediary organization and as part of the business world concerned and actively involved in preserving the sustainability of natural resources and environments
6. Having company regulations or collective labor agreement which ensure the certainty of rights and obligations of multiparties thus enable the support for conducive working environments.
7. Having whistle-blowing system which enable the acquisition of reports and complaints as well as feedback and critiques by the staff and other stakeholders.
8. Having Policies and Procedures as reference in running the business, as well as consistent evaluation in line with the requirements and development of existing regulations.

The implementation of GCG principles include among other submission of GCG implementation. Report at PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. on annual basis to various parties (stakeholders) in line with the existing regulations. Additionally, Self-Assessment Report will be submitted on a periodic/biannual basis along with the worksheet enclosures. The purpose is to compile and submit the Report on the Health Level of the Bank to the Financial Services Authority. The submission of the Bank's GCG Implementation Report is required for monitoring of quality enhancement of the GCG implementation. Additionally, the implementation will also be evaluated and reviews on the follow-up plan will be performed. Corrective measures are among them when necessary in order to achieve improved results

Risk Based Bank Rating (RBBR) both performed as bank only and consolidated as stipulated by the Regulations of Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dated 5 January 2011, and the Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/24/DPNP dated 25 October 2011 on the Assessment of the Health Level of Commercial Bank, cover the following 4 (four) assessment factors:

➤ **Profil Risiko (Risk Profile)**

Self-assessment against the risk profile assessment process is the overall process of risk identification, risk analysis and evaluation of the risks faced by banks, which are illustrated as follows:

- ***Inherent Risk*** - Inherent risk is the risk that is inherent in the bank's business activity, whether or not quantified can be quantified that could potentially affect the financial position of the bank. Inherent risk can be any parameter that is ex-post as well as ex-ante parameters.
- ***Risk Control System (RCS)*** - The quality of risk management is the elaboration of the implementation of Basel II Pillar 2 Supervisory review that has been spelled out in Indonesia through the Banking Regulations of Bank Indonesia concerning the application of the Management risks. The assessment of Inherent risk and risk and RCS next generate net risk per type of risk and the conclusion of the bank's overall composite risk.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## ➤ GoodCorporate Governance (GCG)

The implementation of GCG implementation of 5 (five) GCG principles, namely: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*. Those five GCG principles portrayed in the 11 (eleven) key factors of GCG assessment which include among other:

1. Implementation of Boards of Commissioner' duties and responsible;
2. Implementation of Boards of Director' duties and responsible;
3. Auxiliary and implementation of Committee's duties;
4. Resolution of conflict of interests;
5. Implementation of compliance functions;
6. Implementation of internal audit;
7. Implementation of external audit;
8. Implementation of risk management including internal control system;
9. Fund provision to the related parties and provision of substantial amount of funds (large exposures);
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reporting, GCG implementation report and internal reporting;
11. The Bank's strategic plan.

## ➤ Capital

With the commitment to develop PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. in the future, the shareholders of J Trust continuously contribute additional paid-in capital at the end of 2014 that is Rp300 billion in the initial phase and Rp300 billion on March 2015. During September 2015, J Trust contributed additional paid-in capital at Rp400 billion. Subsequently, during October 2015, J Trust provided subordinated loans at USD25 million (eqv. Rp342 billion). During the subsequent years, J Trust will continuously contribute paid-in capital equivalent with the peer group which match the bank business growth plan or through the rights issue or without the rights issue which are planned on 2016.

On the new Regulation of Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 dated 28 November 2012 and Regulation of Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 on Capital Adequacy Ratio of Commercial Bank, the CAR calculation has taken into consideration the Bank's risk profile or simply known as Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). For Banks with risk profile rating of 4 or 5, then the CAR will be set at a minimum of 11% (eleven per cent) and up to 14% (fourteen per cent) of the Risk Weighted Average (RWA). The requirements for Capital Conservation Buffer allowance has begun to take effect in 2016, starting with additional 0.625% and gradually increase to 2.5% in 2019. The Bank will maintain the CAR above the existing regulations in line with the ICAAP and relevant addition.

The Bank shall be able to absorb all risks existing in the Bank. Capital assessment shall cover:

- Capital Adequacy :
  - Capital adequacy is capable of absorbing the risks,
  - Capital adequacy to support the business plan, and
  - Quality of the capital (tier 1 composition)
- Capital Management :
  - Effectiveness of planning and capital disbursement to generate earning.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- Amazebebt of organic capital,
- Capacity of the bank access to the source of funding.

## ➤ Earnings

As for the earning factor, the Bank is assessed based on the earning performance, sources of earning, diversification of earning, and earning sustainability. Earning is closely related to the achievement of rentability, in which the NIM of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. continuous to improve from 0.2% in 2014 to approximately 0.96% in 2015. The NIM is projected to be 3.4% in 2016 while the projection for 2017 will be 3.67% and subsequently to 3.74% in 2018. The Bank continues to continually improve various factors which may hinder NIM

### Several endeavors to improve the NIM include the following:

- a. The Bank attempts to increase the number of accounts through collaboration with relevant units to enhance the rise of low cost funds.

Increase Third Party Funds (TPF) by taking into accounts the costs and competitive interest rates as well as performing cost efficiency with respect to the funding, such as operational costs, cash in safe, and so forth. The attempt to improve mix funding by performing various innovations and technology-based product development including e-banking for demand deposit and saving products as well as continuous service developments, loans, and referrals from the existing customers as well as various companies for their staff payroll needs. By increasing the number of accounts, it is expected that the balance of low cost funds will continually increases. In addition to adding more features to the ATM, it is expected by enhancing the service to the customers will enable greater flexibility to perform the transaction in any ATM unit.

- b. Applied yieldenhancement

In addition to reducing the cost of funds, the NIM enhancement may also be performed by increasing the revenue of loan interest through the following strategies:

- Continue such programs as crash programs to resolve non-performing loans.
- Develop and expend micro credit by adding 5 more kiosks.
- Expand Consumer and Small credits quickly, while keeping to the principles of prudence.
- Perform the sales of foreclosed collaterals and place them in productive assets.
- Control the time deposit development as the high cost source of funding in order not to grow to rapidly in comparison to the loan growth
- Transfer some of the placement in Bank Indonesia with lower interest rate to the placement on other productive assets with higher interest rate as long as such funds have not been disbursed in the forms of credit/loans.
- Write-off non-productive assets which in 2016 have been prioritized on non-productive securities. A full 100% Allowance for Impaired Assets at USD73 million and part of NPL at Rp150 billion have been reserved.

Additionally, along with the implementation of prudence/prudential banking principles, then the attainment of key financial ratios remain the attention and maintained to fulfill the regulator's regulations, which include the fulfillment of financial ratios with

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

respect to Allowance for Impairment Provision, CAR, NPL, Net Open Position, Legal Lending Limit, Profit/Loss.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## The strategic measures that will be taken

To bring the corporate vision and mission into reality, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. is directed in line with the potential of existing resources of the business scale. Various strategies and programs have been prepared by management to turn PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. into one of the most reputable bank in Indonesia providing quality products, with reliable performance, timely, and the game changes in banking industry. With respect to the planning for the next 3 (three) years, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. will focus on the development of infrastructure toward retail business through micro, small, and medium credits thus enable the high yield loan. Ultimately these efforts will lead to the improvement of Net Interest Margin (NIM).

The development of banking business network remain on the optimization as well as maximizing the functions of the existing branch offices for future banking business preparations. The plan is to open 1 (one) additional branch office in 2016. The new branch office is expected to support the acceleration of customer base third party funds expansion once the banking business operation is stable.

J Trust Co. as the new shareholder is fully committed to develop PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. in the future especially toward retail market, in which one of them is to contribute with additional paid-in capital at the end of 2014 and in March 2015 at Rp300 billion and in September 2015 at Rp400 billion respectively with the total paid-in capital at Rp1 trillion. Additional paid-in capital will be adjusted with the requirement for business expansion. The purpose of paid-in capital by JTrust Co. is to maintain the CAR in order to stay competitive in banking market especially equivalent with the peer group in Indonesia.

In line with the plan to transform the core banking system in 2016, the Bank will in the upcoming years be more prepared to compete in retail market through technology-based product developments thus delivering greater service to its entire customers.

In addition, intensive credit monitoring has been consistently performed to maintain NPL at safe level and in line with the regulation through the formation of credit task force with weekly periodic meeting. Therefore, immediate measures may be taken to anticipate the emergence of non-performing loans.

## Business Development Strategy

The introduction of new policies in which at the moment the Bank strives to strengthen the capital in line with the Regulation of Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network Based on the Bank's Core Capital. In the subsequent phase, the Bank strives to strengthen the implementation of dual control and improvement of the business quality again in the upcoming years through: business development plan which focuses more on micro, small, and medium fields or segments in the forms of retail and commercial loans. The Bank also attempts to improve funding composition on a better CASA. It will also start to improve and upgrade core system in order to support and develop "E-Banking" and "M-Banking" in order to facilitate its prime customers, while also staying competitive with other bank liability products.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Along with the endeavor to achieve business target, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. has established and remains focused on 4 target priorities established in 2014 up to the end of 2020 as a fundamental for business growth, as follow:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 1. Business Development :

- Evaluation of lending and funding business development Evaluasi & Pengembangan bisnis *lending dan funding*
- Technological based business development to expand retail customers, generate fee-based income, and deliver the best service to the customers.
- Measurable Key Performance Indicator & Financial model
- Intergrated MIS
- *Strong Early Warning System*
- *Crossborder transaction* add more fund and reduce cost
- *Budget Control*
- Intensive resolution of NPL

## 2. Business Process

- *Mapping of potential customer and competitor*
- Develop effective and efficient business process
- Integrated promotional program
- *Monitoring sales process discipline*
- Revitalisasi branch offices

## 3. Human Resources

- Fulfillment of competent Human Resources
- Continuous *Training* program,
- Attractive career path
- Incentive scheme
- Strong corporate culture
- *Review and improvement organization structure* which accommodate quick and efficient business dynamics.

## 4. Infrastructure

- Optimization of office network
- IT development which support business by replacing core banking system
- Build an integrated IT

## Risk Management and Compliance Policies which cover :

1. Enhancement of *dual control* and quality improvement through :
  - Implementation of *Risk Control Self Assessment*
  - Implementation of *JSOX Based* components
2. Development and improvement of 8 types of risk management profile segregated from business management.
3. Implementation of *early warning system*.
4. Implementation of *four eye principles*.
5. Quality improvement of credit commitment implementation quality ( NAK supported by consultant, credit training, and LK by Bank Internal Staff)
6. Quality improvement over ALCO implementation to acquire the setting of competitive interest rate of bank products.
7. Improvement of Management recommendation/advise quality with respect to risk management, General Policy of Risk Management (KUMR).

## Quality enhancement of compliance sector (GCG) and corporate cultures :

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

1. Quality enhancement of management policies as well as decisions with respect to products, services, as well as company management stipulated in the decision letter, circular letter, Standard Operating Procedure both for internal and external factors by providing feedback to the divisions, socialize, perform assessment, and so forth.
2. Enhancement of corporate culture program implementation in line with the agreed standard

## **GCG implementation stages**

Application of GCG implementation in supporting business plan to enable it to proceed in line with the existing regulations. The stages of GCG implementation stages support the Bank Business Plan designated for short term, mid term, and long term as follow:

### **2014**

#### ***Consolidation, Transformation, Reorganization, Positioning, Growth***

1. Prepare divestment process.
2. Problem identification.
3. Business evaluation and infrastructure.
4. NPL Resolution ( restructuring, collection, write-off), Special Mention Collection.
5. Preparation of business expansion (MSME Businesses).
6. Improve financial performance.
7. Business consolidation.
8. Set up concentrated business strategies.
9. Sales Force Recruitment.
10. Training focused on MSME & Consumer Loans.
11. IT Infrastructure Evaluation (CBS, Reporting, MIS).
12. Restructure Remuneration System.

### **2015**

#### ***Expand, Optimization, Growth***

1. Micro SME, Trade Finance, and Treasury Business Developments.
2. Develop consumer program products.
3. Infrastructure optimization.
4. Focus on the growth of micro, small, and medium businesses.
5. Sales force recruitment.
6. Program development for Micro SME, Commercial, Trade Finance businesses.
7. CASA Optimization

### **2016**

#### ***Increase (Infrastructure, Capacity, Capability) and Growth***

1. Prepare implant infrastructure and banking agency.
2. Expand office network.
3. Build integrated core banking system.
4. Restructure remuneration system.
5. Focus on the growth of micro, small, and medium businesses.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

6. Preparation on business banking.
7. CASA development for micro, small, medium, commercial, trade finance, and consumer loans.
8. CASA growth.
9. Internet and mobile banking developments

## 2017

### *Market Share*

1. Expand market share
2. Focus on Micro, small, and medium business growth.
3. Retail banking growth
4. CASA growth

## Tahun 2018

### *Market Share*

1. Accelerate growth of Retail Banking
2. Increase fee based income through increase in services
3. Expanding market share and business network
4. Entering the digital banking era
5. Sustainable business growth

## Tahun 2019

### *Integrated Expansion*

1. Strengthening market position
2. Integrated banking Micro SME & Commercial, Retail Consumer
3. Increasing business growth
4. Increasing profits and assets

## Tahun 2020

### *Sustainable Growth*

1. Development of innovative products
2. Expanding and strengthening the domestic and international networks
3. Improving service quality
4. Offering better and more comprehensive digital banking services

**CHAPTER II  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS/RUPS), IMPLEMENTATION  
OF BOARDS OF COMMISSIONER AND DIRECTOR DUTIES AND  
RESPONSIBLE**

**2.1. General Meeting of Shareholders (RUPS/GMS)**

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest hierarchy in the company organ which has the authorities not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners subject to limitations stipulated under the Laws of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and/or Article 18 of the Articles of Association of the Company. GMS is authorized to:

- Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in relation to the Company's Annual Report or approve the Annual Report including the Financial Statements and the Monitoring Report of the Board of Commissioners of the Company and grant release and discharge (acquiescence) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company on their respective management and supervisory actions.
- Resolve matters related to organizational structure, such as amendment of the Articles of Association, merger, amalgamation, acquisition, spin off, dissolution and liquidation of the Company.
- Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
- Determine the salary or remuneration and other allowances and benefits of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
- Grant proxy and authorization to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm, which is registered in Indonesia and affiliated with an international public accounting firm and certified by the Financial Services Authority (OJK) of the capital market to audit the Financial Statements of the Company and determine their fees.

GMS consists of Annual and Extraordinary GMS which must be held in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws.

In the GMS forum, the shareholders are entitled receive information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, so long as it is related to the meeting agenda.

During 2015, PT Bank JTrust Indonesia Tbk had been held 4 (empat) times GMS, as follow:

- a. 1 (satu) times Annual Meeting on 23 June 2015
- b. 3 (tiga) times Extraordinary Meeting, held on 30 Maret 2015, 29 September 2015, and the latest on 28 Desember 2015

**(1) Annual GMS (A GMS)**

An Annual GMS and at the same time an Extraordinary GMS were held on June 23, 2015 which resolve several important resolutions, among which are as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## First Agenda:

1. To approve and receive the Company's Annual Report for fiscal year of 2014, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, and to ratify the Company's Financial Statements for fiscal year of 2014 which had been audited by the Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara (a member firm of Morison International) with an "Unqualified Opinion" as stated in their report dated March 27, 2015
2. By the approval of the Company's Annual Report for fiscal year 2014, a full release and discharge ("volledig acquit et de charge") was granted to members of the Board of Directors of the Company (including members of the Board of Directors who resigned in fiscal year 2014) on the management actions performed in fiscal year of 2014, and the Board of Commissioners (including members of the Board of Commissioners who resigned in fiscal year 2014) on the supervisory actions performed in fiscal year of 2014, so long as said actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2014

## Second Agenda:

To delegate authority of the GMS as set out in Article 19 paragraph (2) item d of the Articles of Association of the Company which states that "The GMS appoint a registered Public Accountant or grant proxy to appoint the registered Public Accountant" to the Board of Commissioners to determine the public accounting firm which will audit the financial statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2015, including determine the fee and other requirements for the public accounting firm, including appointing a substitute public accounting firm, in the event the previously appointed public accounting firm for whatever reason is not able to complete the audit of the financial statements of the Company for 2015.

## Third Agenda:

To approve the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary of members of the Board of Directors, remuneration of members of the Board of Commissioners, antiemend and the termination of other benefits for all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year of 2015 based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee (KRN).

## Fourth Agenda:

1. To approve the amendments of several provisions in the Articles of Association, to conform to the Financial Services Authority regulations.
2. To restate and reconstitute the entire Articles of Association and the verses of the Articles of Association which were not amended in this meeting in relation to the abovementioned amendments
3. To grant proxy and authorize the Board of Directors with the right of substitution, to restate resolutions regarding the amendments and the reconstitution of the articles of the Articles of Association of the Company in a notarial deed and report it to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## Fifth Agenda:

1. To approve and accepted the resignation of Ms. Adriana Muliando as Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting, and gratitude for services rendered
2. To approve the appointment of Mr. Benny Luhur as (Independent) Commissioner of the Company, with term of office which will expire on the closing of the third Annual GMS following this Meeting as of the date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time prior to the end of their term of office. The appointment will be effective after he passes the fit and proper test performed by the Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of the prevailing legislation, provided that if the requirements set by the FSA in relation to the appointment are not satisfied or the FSA does not give its approval, the appointment becomes void without the required approval from the GMS

Therefore, the company structure of Board of commissioner, as follows:

### Boards of Commissioner

- President Director : Nobiru Adachi
- Vice President Commissioner(Independent) : Sigid Moerkardjono
- Commissioner (Independent) : Koh Yong Guan \*)
- Commissioner (Independent) : Benny Luhur \*)

\*) Effective as of the date he passes the fit and proper test by Financial Services Authority (FSA)

3. Grant the power and authority to the boards of Directors to declare a change in the company's management board under a separate notary deed and convey the notifications of change of company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

## Sixth Agenda:

1. To approve the implementation of the share ownership program by the Board of Directors and Board of Commissioners (Management Stock Option Program).
2. To grant proxy and authorization to the Board of Commissioners of the Company on the implementation of share ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners (Management Stock Option Program/MSOP).

## Seventh Agenda:

1. To authorize the Board of Directors of the Company to declare the composition of the shareholders of the Company after the implementation of the transfer of shares process by the shareholders in a separate notarial deed and submit the Company's data changes to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
2. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to declare the composition of the shareholders of the Company after the implementation of the transfer of shares process by the shareholders.

## (2) Extraordinary GMS (E GMS)



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

A. On 30 March 2015 has been held Extraordinary Meeting, that resolved several important resolutions as follows:

## First Agenda:

1. To approve Capital Increase of the Company through the issuance of shares without pre-emptive rights in the amount of 30,000,000,000,000 (thirty trillion) of series A shares with a nominal value of 0,01 (one cent) or in the amount of Rp300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah).
2. To delegate authority to the board of Commissioners to declare the result of the capital increase after the completion of the capital increase without pre-emptive rights and grant proxy to the Board of Directors of the Company to declare the implementation of the capital increase without pre-emptive rights under a separate notary deed.

## Second Agenda:

1. To approve the appointment of Mr. Koh Yong Guan and Ms. Adriana Mulianto respectively as the Company's new Independent Commissioner. Appointment of Mr. Koh Yong Guan and Ms. Adriana Mulianto, will be valid for a term until the closing of the third Annual GMS as of the relevant date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss said members of the Board of Commissioners at any time prior to the expiry of their term of office.
2. As such, subject to the abovementioned resolutions, the composition of the Management Board of the Company shall be as follows:

### Boards of Commissioners

- President Commissioner : Nobiru Adachi\*)
- Vice President Commissioner/Independent : Sigid Moerkardjono
- Independent Commissioner : Koh Yong Guan \*)
- Independent Commissioner : Adriana Mulianto \*)

### Boards of Directors

- President Director : Ahmad Fajar
- Director : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Director : Laksmi Mustikaningrat
- Director : Yoshio Hirako\*)
- Director : Eihito Tamura \*)

\*) The appointment will be effective after passing the fitting and proper test by the Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of the prevailing laws. If the requirements set forth by the FSA in relation with such appointment are not satisfied or the FSA refused to give consent, then such appointment shall be void without the required further approval from the GMS/RUPS.

3. To authorize the company's Board of Directors to declare changes in management structure of the Company in a separate Notary Deed.

## Third Agenda:

1. To approve the changes of company's name to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

2. To authorize the company's board of Directors to declare an amendment of the Articles of Association in relation to the company's name in a separate notarial deed.

### Fourth Agenda:

1. To approve amendments and additions of several articles of the Articles of Association of the Company relating to the General Meeting of Shareholders (GMS) as stated in Article 19 Paragraph 4 and Paragraph 7, Article 20 Paragraph 2 and Paragraph 5 and Article 21 Paragraph 3 and the addition of Article 19 Paragraph 5 and Article 20 Paragraph 3.
  2. To authorize the Board of Directors to declare the amendments of the Articles of Association in a separate Notary Deed.
- B. On **29 September 2015** has been held Extraordinary Meeting, that resolved several important resolutions as follows:
1. To approve an increase in the Authorized Capital previously Rp12,000,000,000,000 (twelve trillion Rupiah) into Rp15,000,000,000,000 (fifteen trillion Rupiah), in the form of 300,000,000,000 (three hundred trillion) series A shares with a nominal value of Rp0.01 (one cent) per share.
  2. To approve the increase of Capital of the Company without Preemptive Rights in the amount of 40,000,000,000,000 (forty trillion) series A shares with a nominal value of Rp0.01 (one cent) per share or a total of Rp400,000,000,000 (four hundred billion Rupiah).
  3. To approve the amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company in relation to the increase of authorized capital and increase of capital of the Company without pre-emptive rights.
  4. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to declare the result of the increase of capital after the completion of the increase of capital without pre-emptive rights and authorize the Board of Directors of the Company to declare the resolution on the implementation of the capital increase without pre-emptive rights in separate a notary deed
- C. On **28 Desember 2015** has been held Extraordinary Meeting, which resolved several important resolutions as follows:

### First Agenda:

1. To accept the resignation of Mrs. Laksmi Mus tikaningrat as Director of the Company effective from the closing of the meeting accompanied by gratitude for services rendered during her tenure.
2. To accept the resignation of Mr. Yoshio Hirako as Director of the Company effective from the closing of the meeting accompanied by gratitude for services rendered during his tenure.
3. To appoint Mr. Ritsuo Ando as the new Director of the Company. Appointment of Mr. Ando Ritsuo shall be valid for a term until the closing of the third Annual GMS as of the relevant date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss said members of the Board of Directors at any time prior to the expiry of their term of office.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

4. To maintain Mr. Sigid Moerkardjono as a member of the Board of Commissioners of the Company, so he continues his tenure as Vice President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.
5. Based on the abovementioned resolutions, the composition of company's management board shall be as follows:

## Boards of Commissioners

- President Commissioner : Nobiru Adachi
- Vice President Commissioner (Independent) : Sigid Moerkardjono
- Independent Commissioner : Benny Luhur
- Independent Commissioner : Koh Yong Guan \*)

## Boards of Directors

- President Director : Ahmad Fajar
- Director : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Director : Eihito Tamura
- Direktor : Ritsuo Ando \*)

\*) The appointment will be effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of the prevailing laws. If the requirements set forth by the FSA in relation with such a appointment are not satisfied or the FSA refused to give consent, then such appointment shall be void without the required further approval from the GMS/RUPS.

6. To authorize the company's boards of Directors to declare the change in the management structure of the company in separate Notary Deed.

## Second Agenda:

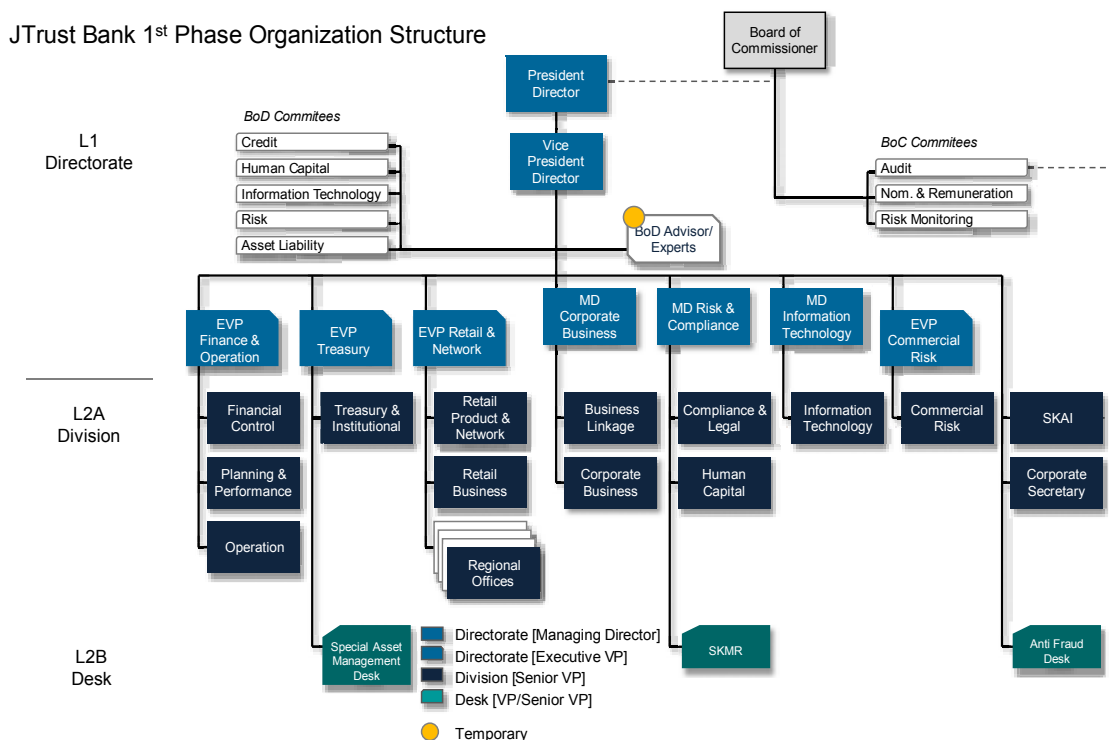
1. To approve the change of domicile and Head Office of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., previously in Municipality of Jakarta Selatan, Province of DKI Jakarta, into Municipality of Central Jakarta, Province of DKI Jakarta, therefor amending the provision of Article 1 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company.
2. To authorize and grant proxy to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution regarding the amendment to the articles of the Articles of Association of the Company in a notarial deed and report the amendments to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The latest changes to the management structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk in regards to members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors subject to the resolutions of the Extraordinary GMS held on December 28, 2015, therefore the number and composition of the Board of Commissioners as compared to members of the Board of Directors are in compliance with the prevailing regulations. In the event the total number of Independent Commissioners already passed the Fit and Proper Test of the Financial Services Authority (FSA), then one of them shall fill in the position of Chairman of the Nomination and Remuneration Committee which is currently vacant

## 2.2. The Organizational Structure of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In order to adjust the organizational structure of the Bank with the change of prevailing laws issued by the regulator and to adjust with the current business condition of the bank, therefore the latest Organizational Structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk of 2015 shall be valid subject to the Decision Letter of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 01.06/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2015 dated October 1, 2015 concerning the Organizational Structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is as follows:



The composition of Board of Commissioners and Directors member of PT Bank J trust Indonesia Tbk are as follows:

**The Board of Commissioners consists of 4 (four) members as follows :**

President Commissioner : Nobiru Adachi  
 Vice President Commissioner / Independent : Sigid Moerkardjono  
 Independent Commissioner : Koh Yong Guan \*)  
 Independent Commissioner : Benny Luhur

**The Board of Directors consists of 4 (empat) members as follows :**

President Director : Ahmad Fajar  
 Director : Felix Istyono Hartadi Tiono  
 Director : Eihito Tamura\*\*)   
 Director : Ritsuo Ando \*)

\*) Efektive after passing *Fit & Proper Test* by the FSA

\*\*) Submitted his resignation as of 4 January 2016, pending approval from the next GMS/RUPS

## 2.3. Board of Commissioners

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's roles and duties are crucial for the Good Corporate Governance (GCG) implementation, with its main duty to oversee policy and its implementation by the Board of Directors in managing the Company, carrying out other duties in accordance with resolutions of the GMS and tasks specified in the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Bank Indonesia Regulation (PBI), Regulation of the Financial Services Authority (POJK), Stock Exchange regulations and other relevant regulations.

## **(1) Board of Commissioners' duties and responsible**

The boards of Commissioners' duties and responsible, as follows:

1. The Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
2. The Board of Commissioners shall ensure the implementation of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank at all levels of the organization.
3. The Board of Commissioners shall supervise the performance of duties and responsibilities, as well as advising the Board of Directors.
4. Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
  - a. Evaluating the implementation of Bank Compliance Function at least 2 (two) times a year;
  - b. Provide suggestions in order to improve the quality of Bank Compliance Function
5. The Board of Commissioners provides suggestions in order to improve the quality of the implementation of the compliance function to the President Director with copy of the suggestions to the Director in charge of the Compliance Function.
6. When conducting supervision, the commissioner shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policy.
7. When conducting supervision, the Board of Commissioners is not allowed to be involved in the decision-making of bank operations, except for:
  - a. Provision of funds to related parties as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia on Legal Lending Limit for Commercial Banks; and
  - b. Other matters specified in the Articles of Association of the Bank or the prevailing regulations.
8. Decision-making by the board of Commissioner as abovementioned does not negate the responsibility of the board of Directors on the implementation of Bank management
9. The Boards of Commissioners must ensure that the Boards of Directors has followed up all audit and the recommendations of the internal audit unit of the bank, external auditors, monitoring reports from the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia and/ or other authorities supervisory result.
10. The boards of Commissioners must inform the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia no later than 7 (seven) days as of the discovery of the following matters:
  - a. Infringement of regulation in the field of finance and banking, and
  - b. Circumstances or estimates of circumstances that may jeopardize the business of bank

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

11. In order to support the effectiveness of the execution of its duties and responsibilities, the board of Commissioner must establish at least:
  - a. Audit Committee;
  - b. Risk Monitoring Committee;
  - c. Remuneration and Nomination Committee.
12. Appointment of committee's member is carried out by boards of Directors based on the resolutions adopted in the Board of Commissioners Meeting.
13. The Boards of Commissioners must ensure that the established Committee performs their duties effectively.
14. The Board of Commissioners is required to own work guidelines and code of conduct that are binding towards every member of the boards of commissioner which, at least governs the work ethics, work time and meeting arrangements.
15. To chair the General Meeting of Shareholders (GMS)
16. To establish a system of Remuneration and Performance Evaluation of Board of Commissioners and Directors.
17. The Boards of Commissioners must perform its duties and responsibilities independently.

## (2) The Total Number and Composition of Board of Commissioners

In reference to the provisions of Bank Indonesia:

- The number of the boards of commissioner members are at least 3 (three) persons and shall not exceed the number of members of the boards of directors.
- At least 1 (one) member of the boards of Commissioner is domiciled in Indonesia.
- At least 50% (fifty percent) of the total number of board of commissioners are independent commissioners.

In period 2015, the number and compositions of the boards of commissioners at PT Bank JTrust Indonesia Tbk is amend as follows :

- The number and composition of board of commissioner as per 01 January 2015 s/d 29 March 2015 has not yet met the criteria of Bank Indonesia, which is currently as follows:

✓The members of boards of Commissioners is 2 (two) persons, include one independent commissioner, and the number of boards of Directors member is 5 (five) persons.

While the appropriate criteria is as follows:

✓Board of Commissioners' member who is domiciled in Indonesia is 1 (one) person, and 1 (one) person is a Japanese citizen and domiciled in Japan.

✓The number of Independent Commissioners are 50% of the number of board of commissioners' member.

The number and structure of board of commissioners are:

No	Name	Position	Domiciled	Date of Appointment and Approval	
				RUPS/ GMS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	President Commissioner	Japan	- RUPSLB on. 20 Nov. 2014 - RUPSLB on 30 Dec.	14 April 2015

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

				2014	
2.	Sigid Moerkardjono	Vice President Commissioner/ Independent	Indonesia	- RUPST on 21 June 2012 - RUPSLB on. 30 Dec. 2014	8 September 2011/ 9 October 2012

- The number and structure of board of commissioner as per 30 March 2015 until 22 June 2015 same as criteria of Bank Indonesia above, as follows:
  - ✓ The board of Commissioners' member as much as 4 (four) persons, and the number of board of Director' member as much as 5 (five) persons. Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang.
  - ✓ The number of Independent Commissioner as much as 75% of number of board of commissioner' member.

The number and structure board of commissioner' members are:

No	Name	Position	Domiciled	Date of Appointment and Approval	
				RUPS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	President Commissioner	Japan	- RUPSLB on 20 Nov. 2014 - RUPSLB on. 30 Dec. 2014	14 April 2015
2.	Sigid Moerkardjono	Vice President Commissioner/ Independent	Indonesia	- RUPST on. 21 June 2012 - RUPSLB on. 30 Dec. 2014	8 September 2011/ 9 October 2012
3.	Koh Yong Guan	Independent Commissioner	Singapore	RUPSLBom. 30March 2015	*)
4.	AdrianaMulianto	Independent Commissioner	Indonesia	RUPSLBon. 30March 2015	*)

\*) The appointment will be effective after passing the fit and proper test by The Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of prevailing laws.

- The number and composition of the Board of Commissioners per June 23, 2015 until December 31, 2015 has satisfied the criteria of Bank Indonesia, as follows:
  - ✓ Total members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons, and the number of members of the Board of Directors is five (5) persons (until December 27, 2015), which then became four (4) persons (December 28 until December 31, 2015).
  - ✓ Members of the Board of Commissioners domiciled in Indonesia are 2 (two) persons.
  - ✓ The number of Independent Commissioners is 75% of the number of members of the Board of Commissioners.

The number and structure of board of Commissioner' member as follows:

No	Name	Position	Domiciled	Date of Appointment and Approval	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	- RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 - RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	14 April 2015
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	- RUPST tgl. 21 Juni 2012 - RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/9 Oktober 2012

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3.	Koh Yong Guan	Komisaris Independen	Singapura	RUPSLB tgl. 30Maret 2015	*)
4.	Benny Luhur	Komisaris Independen	Indonesia	RUPST tgl. 23Juni 2015	24 Agustus 2015

\*) The appointment will be effective after passing the fit and proper test by The Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of prevailing laws.

Every dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners must be approved by shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism and an adequate financial reputation in compliance with the fit and proper test assessment requirements as set forth by the Financial Services Authority (FSA). For the appointment of members of the Board of Commissioners, the mechanism is through GMS, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

In period 2015, the concurrent positions of board of Commissioner' members are as follow:

No	Name	Position	Other Position
1.	Nobiru Adachi	President Commissioner	<i>Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.</i>
2.	Sigid Moerkardjono	Vice President Commissioner/Independent	None
3.	Koh Yong Guan	Independent Commissioner *)	-
4.	Benny Luhur	Independent Commissioner	President Commissioner of PT ADEI Crumb Rubber Industry

\*) The appointment will be effective after passing the fit and proper test by The Financial Services Authority (FSA) and satisfaction of prevailing laws.

The summary of board of Commissioners' member profile is as follows:

### 1. President Commissioner : **NobiruAdachi**

Japan Citizen, date of birth: March 21, 1958. A graduate of University of Tokyo Faculty of Law in 1980, a graduate of the Faculty of Economics of Case Western University in 1983, as well as the a graduate of Faculty of Public Administration of the Kennedy School of Government, Harvard University. In April 1980, he joined the Ministry of Finance of Japan, in which he served as the Director of Onomichi Tax Office in July 1986. Then, he was appointed as Director Deputy of Finance Minister for International Affairs, part of the Minister Secretariat in June 1997. On June 1999, he served as a Budget Examiner in the Bureau of Budget. Later, he served as Director of the International Bureau Research Division in June 2002. And then became Director of the Policy Research Institute of the Ministry of Finance as of June 2004. Afterwards, he became the Director General of Customs in Hakodate as of June 2005. On April 2006, he was appointed as an Officer in the Jasdac Securities Exchange, Inc. and then promoted to Executive Officer in June 2006. In October 2008, he became Country Head for Japan in ETF Securities Ltd. Then, he served as Representative Director in M & A Solutions Japan Co. Ltd. in October 2011. On April 2013, he joined as Advisor for J Trust Co., Ltd., and then served as Managing Director of J Trust Co., Ltd. in June 2013. Later he became the Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. in J Trust Co, Ltd, and on 20 November 2014 he was appointed as a Commissioner of PT Bank Mutiara Tbk, and later, on 30 December 2014 he was appointed as the President Commissioner of PT Bank



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Mutiara Tbk., and now PT Bank Mutiara Tbk had already changed its name and logo into PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### 2. Vice President Commissioner/Independent : **Sigid Moerkardjono**

Indonesian citizen, place/date of birth: Surakarta/September 10, 1952. He holds a Bachelor of Economics (S1) degree of University of Gadjah Mada Yogyakarta. He began his career at PT Bank Niaga Tbk Yogyakarta Branch as a Credit Analyst (1976-1978), as Chief of Operations (1979-1981), then at PT Bank Niaga Tbk Jakarta Branch as Chief of Operations Division (1981-1983), then in PT Bank Niaga Tbk Head Office as Inspector (SPI) (1983-1988), later serving as Branch Manager of PT Bank Niaga Semarang (1988-1990), as the Branch Manager of PT Bank Niaga Tbk Medan Branch (1990-1993), PT Bank Niaga Tbk Head Office as Head of Credit and Administration (1994), as Head of Indonesia East Region of PT Bank Niaga Tbk in Surabaya (1994-1998), PT Bank Niaga Tbk Head Office as Contoller/Head of Internal Audit Unit (1999), then as Compliance Director of PT Bank Niaga Tbk (1999), and as Management Team of PT Bank Niaga Tbk Head Office (1999-2000), then as Commissioner/Head of Audit Committee/Head of the Risk Monitoring Committee & Member of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Niaga Tbk (2000-2007), as Vice President Commissioner and Member of the committees of PT Bank Niaga Tbk (2007-2008), in addition to that as a Member of the Audit Committee and Member of Risk Monitoring Committee of Bank BTPN (2007-2011) and Member of the Independent Audit Committee of Bank BNI as of December 1, 2015. Subject to the EGMS of PT Bank Mutiara Tbk dated June 21, 2011 he was appointed as Vice President Commissioner, and afterwards, subject to the GMS held on June 21, 2012, he was appointed as Vice President Commissioner Independent of PT Bank Mutiara Tbk. At the Annual GMS dated June 4, 2014, he was appointed as a President Commissioner Independent, and subject to the resolutions of the EGMS dated December 30, 2014 up to now, he now again serves as Vice President Commissioner Independent of PT Bank Mutiara Tbk. and assigned as Head of the Audit Committee of PT Bank Mutiara Tbk (among others by: Decision Letter of the Board Directors No. 03.12/S.Kep-Dir-HRD/Mutiara/X/2011 dated October 3, 2011, Decision Letter of the Board Directors No. 31.25/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 dated July 31, 2012, Decision Letter of the Board Directors No. 01.12/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 dated July 1, 2014, Decision Letter of the Board Directors No. 08.08/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 dated 8 September 2014, Decision Letter of the Board Directors No.12.05/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 dated May 12, 2015, and Decision Letter of the Board Directors No. 30.17/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 dated June 30, 2015), and as Head of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Mutiara Tbk (among others by : Decision Letter of the Board Directors No. 31.27/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 dated July 31, 2012, Decision Letter of the Board Directors No. 01.13/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 dated July 1, 2014, Decision Letter of the Board Directors No. 08.09/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 dated September 8, 2014, Decision Letter of the Board Directors No. 12.06/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 dated May 12, 2015, and Decision Letter of the Board Directors No. 30.15/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 dated June 30, 2015). He also serves as a Member of Independent Audit

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Committee of Bank BNI since 1 December 2015. Currently PT Bank Mutiara Tbk had changed its name and logo into PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### 3. Independent Commissioner : **Koh Yong Guan \*)**

Singapore citizen, aged 68 years old. Independent Commissioner of Bank Mutiara appointed in the EGMS dated 30 March 2015 which changed its name to J Trust Bank since 29 May 2015. Koh Yong Guan started his career as a civil servant in 1972 in the Ministry of Health, his career as Singapore public servant, including appointment as Permanent Secretary in the Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Health, and Ministry of National Development. Koh Yong Guan also served as Commissioner of Inland Revenue Authority of Singapore and as Managing Director of the Monetary Authority of Singapore. He also served as High Commissioner of Singapore to Canada and as Ambassador of Singapore to the Hellenic Republic (Greece). Now, in addition to serving on SMRT Corporation Ltd., he also serves as Chairman of the Singapore Deposit Insurance Corporation. He graduated in Mechanical Engineering major with a Bachelor of Applied Science degree in 1970, and then went on to earn a Master of Applied Science in Mechanical Engineering and Biomedical Engineering in 1972 at the University of Toronto, Ontario-Canada through the Colombo Plan scholarship. In 1981, he received a Master's degree in Business Administration (With Distinction) from the University of Leuven, Flanders-Belgium and conferred an Honorary Doctorate from the University of Toronto in 2011 and was appointed as Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk since March 2015.

\*) Effective after passing fit and proper test by the Financial Service Authority (FSA)

### 4. Independent Commissioner : **Benny Luhur**

Indonesian citizen, aged 55 years old. His last education is Chemical Engineering major with a Bachelor of Science degree in 1981 at the University of California, Berkeley, USA. Benny Luhur began his career as Vice Manager at PT Hari Terang Industrial Co. Ltd. in 1982-1988, then served as Director of PT ADEI Plantation & Industry in 1989-1995. In 1991-1999, he served as President Director of PT Adindo Foresta Indonesia, and later in 1999-2005, he was appointed as a President Commissioner of PT Adindo Foresta Indonesia. At the same time, he also served as President Director of PT Adindo Hutani Lestari in 1995-2005, and also served as Director of PT ADEI Crumb Rubber Industry in 1995-2013. Later, he served as President Commissioner of PT ADEI Crumb Rubber Industry in 2013 until now. Subject to the Annual GMS dated 23 June 2015, he was appointed as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## **(3) The Criteria of Bank Indonesia**

The Appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners must be approved by shareholders through GMS (General Meeting of Shareholders) with the main criteria which considers the integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in compliance with the requirements of fit and proper test assessment as set forth by the Financial Services Authority.

## **(4) Independent Status of Boards of Commissioners**

- To avoid any conflict of interest, members of the Board of Commissioners do not have financial relation and family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors' members.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- All Independent Commissioner does not have financial relation, management, shareholding and family relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank which could affect its ability to act independently

## The Independency Statement of Independent Commissioner

The Independent Commissioner, with acknowledgement of the President Director, has prepared a Statement of Independency for submission to the OJK, with the following text content:

### The Independency Statement's Letter

I Signed below :

Name :  
 Place/Date of Birth :  
 Address :  
 ID Number :  
 Company's name :

Hereby declare that I have no financial ties, management, ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholder or other relationship that could affect my ability to act independently.

I certify that the statement, that I have made in truth.

## (5) Transparency and Financial Relations, Management and Family Relations of Board of Commissioners

The board of Commissioners' members at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has issued and signed an affidavit related to the following matters:

- Members of the Board of Commissioners does not have shares that reached  $\geq 5\%$  (five percent) of the paid up capital of J Trust Bank or at other Bank and companies (domestic and overseas).
- Independent Commissioner does not have financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank which could affect its ability to act independently.

### - Transparency of Family Relations

No	Name	Board of Commissioners		Board of Directors		Other Shareholders	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√
3.	Koh Yong Guan		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√

### - Transparency of Financial Relations

No	Name	Board of Commissioners	Board of Directors	Other Shareholders
----	------	------------------------	--------------------	--------------------

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

		Yes	No	Yes	No	Yes	No
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√
3.	Koh Yong Guan		√		√		√
4.	Benny Luhur		√		√		√

-

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## - Transparency of ownerships

No	Name	Other Company	Other Bank	Non Bank Financial Institution	%
1.	Nobiru Adachi	None	None	None	-
2.	Sigid Moerkardjono	None	None	None	-
3.	Koh Yong Guan	None	None	None	-
4.	Benny Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Mega Indo Pacific Sejati</li> <li>• PT Suryayudha Investindo Cipta</li> </ul>			25,00% 47,57%

## (6) Board of Commissioner's Meeting

In period 2015, Board of Commissioners has held various meetings based on meeting type with the following details:

- Board of Director's Meeting** in 2015 were held 15 (fifteen) times, which include the number of meetings attended physically by all members of the board of Commissioners who had passed the fit and proper test by FSA based on 'serviced period' is as follows:

Name	Serving period	Attendance	% Attendance
<b>Board of Commissioners' Meeting With Director</b>			
Nobiru Adachi (President Commissioner) <sup>1)</sup>	1 January s/d 31 December 2015	12	100%
Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioner-Independent)	1 January s/d 31 December 2015	14	93%
BennyLuhur (Independent Commissioner) <sup>2)</sup>	23 June s/d 31 December 2015	6	86%
Koh Yo ng G uan (Independent Commissioner) <sup>3)</sup>	30 March s/d 31 December 2015	-	-
<small>1)Effective on 14 April 2015 after passing fit and proper test by FSA. tanggal 14 April 2015 sejak lulus <i>fit and proper test</i> by OJK. Prior to be appointed as President Commissioner, attend 3 times of BOC-BOD meetings as an observer.                  2)Effective on 24 August 2015 after passing fit and proper test by OJK                  3)On progress to fit and proper test by OJK</small>			

Meeting Attendance table for each member of board of commissioner are as follows:

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
NobiruAdachi	22/1/15	26/2/15	31/3/15	30/4/15	26/5/15	23/6/15	6/8/15	27/8/15	29/9/15	22/10/15	4/11/15	18/11/15	25/11/15
Sigid Moerkardjono	*	*	*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Benny Luhur	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√
KohYong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	X
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<small>Notes:                  √ : Present                  X : Absent                  * : Attend as observes/ has not complete the fit and proper test by FSA</small>													

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- : Has not complete the fit and proper test by FSA

Nama Komisaris	14	15	Σ
	Tgl 4/12/15	Tgl 17/12/15	
Nobiru Adachi	√	√	12
Sigid Moerkardjono	√	√	14
Benny Luhur	√	√	6
Koh Yong Guan	-	-	0

Notes:  
 √ : Present  
 X : Absent  
 \* : Attend as observes/ has not complete the fit and proper test by FSA  
 - : Has not complete the fit and proper test by FSA

2. Special Meetings of the Board of Commissioners in 2015 were held 27 (twenty seven) times, where the number of meeting attendance is mostly attended physically by all members of the Board of Commissioners who had passed the fit and proper test held by the FSA based on a 'service period 'is as follows:

Namr	Serving Period	Attendance	% Attendance
<b>Special Meetings of the Board of Commissioners</b>			
Nobiru Adachi (President Commissioner) <sup>1)</sup>	1 January s/d 31 December 2015	17	89%
Sigid Moerkardjono (Vice President C ommissioner-Independent)	1 January s/d 31 December 2015	26	96%
Benny Luhur (Independent Commissioner) <sup>2)</sup>	23 June s/d 31 December 2015	4	80%
KohYong Guan (Independent Commissioner) <sup>3)</sup>	30 March s/d 31 December 2015	-	-

1)Effective on 14 April 2015 after passing fit and proper test by FSA. tanggal 14 April 2015 sejak lulus *fit and proper test* by OJK. Prior to be appointed as President Commissioner, attend 3 times of BOC-BOD meetings as an observer.  
 2)Effective on 24 August 2015 after passing fit and proper test by OJK  
 3)On progress to fit and proper test by OJK

Meeting attendance table for each member of board of Commissioners are as follows :

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl 27/1/15	Tgl 12/2/15	Tgl 28/2/15	Tgl 26/3/15	Tgl 31/3/15	Tgl 31/3/15	Tgl 30/4/15	Tgl 30/4/15	Tgl 30/4/15	Tgl 5/5/15	Tgl 5/5/15	Tgl 5/5/15	Tgl 5/5/15
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	*	X	X	√	√	√	√	√
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Benny Luhur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koh Yong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes:  
 √ : Present  
 X : Absent  
 \* : Attend as observes/ has not complete the fit and proper test by FSA  
 - : Has not complete the fit and proper test by FSA

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Name	6/5/15	13/5/15	13/5/15	26/5/15	28/5/15	28/5/15	28/5/15	23/6/15	6/8/15	27/8/15	29/9/15	22/10/15	25/11/15
Nobiru Adachi	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√	√	√
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√
Benny Luhur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	X
Koh Yong Guan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes:  
 √ : Present  
 X : Absent  
 \* : Attend as observes/ has not complete the fit and proper test by FSA  
 - : Has not complete the fit and proper test by FSA

Name	27	Σ
	Tgl	
Nobiru Adachi	√	17
Sigid Moerkardjono	√	26
Benny Luhur	√	4
Koh Yong Guan	-	0

Notes:  
 √ : Present  
 X : Absent  
 \* : Attend as observes/ has not complete the fit and proper test by FSA  
 - : Has not complete the fit and proper test by FSA

Adoption of resolutions of Board of Commissioners meetings was carried out by deliberation to achieve consensus, and/ or a majority vote if consensus cannot be achieved. Results of Board of Commissioners meetings are recorded to minutes of meetings/minutes and are well documented, including the inclusion of dissenting opinions (if any).

As such the holding of meetings of the Board of Commissioners of PT Bank J Trust Indonesia Tbk in 2015 were carried out in compliance with the prevailing regulations.

## (7) The Assessment of Board of Commissioners' Performance

The parties who perform assessment on the Board of Commissioners' Performance are shareholders:

### - The Performance Assessment Process

Stages of process for assessing the performance of the Board of Commissioners are conducted directly by the majority shareholder, which is J Trust Co., Ltd.

### - The Criteria (Indicator) of Performance

Indicators applied to assess the performance of the Board of Directors are the Key Performance Indicator (KPI) which was composed and evaluated directly by majority shareholder, in this case is the J Trust Co., Ltd. The indicators applied are at the majority shareholder's discretion.

## (8) The Board of Commissioners' Member Training Program

To support the implementation of the Board of Commissioners duties, in 2015 the Board of Commissioners' members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, such as:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Name	Serving Perioed	Training, Workshop, Conferences, Seminars	Organizer	Venue & Time
Nobiru Adachi (President Commissioner)	1 January s/d 31 December 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Implementation of Risk Management to manage bank's performance</li> <li>• Business Continuity Management (BCM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BARA</li> <li>• BSMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC Jakarta Building</li> <li>• Grand Hyatt Tower Jakarta</li> </ul>
Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioner-Independent)	1 January s/d 31 December 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provide SMR</li> <li>• SMR Level 1 Komisararis test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPP</li> <li>• LSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC Jakarta Building</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>
Adriana Muliarto (Independent Commissioner)	30 March s/d 23 June 2015	SMR Level 2 Komisararis test	LSPP	IFC Jakarta Building

### (9) The Board of Commissioners' Recommendation

Board of Commissioners played an active role of providing inputs and recommendations through discussions at Board of Commissioners Meeting or Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussion in the Committees under the Board of Commissioners which supports in facilitating the monitoring duties of the Board of Commissioners. The following is summary of the recommendations as well as important inputs from the Board of Commissioners in 2015, such as:

1. More pro-active Retail Fund Raiser and to earn facility from the Bank in order to release the dependency of Jumbo Deposit and to restrain COF.
2. Minimize Safety Level in order not to be Over Liquidity yet with due regard to the safe Safety Level.
3. Provide Maximum Deposit Limit between 2.0% to 2.5% of total DPK to one depositors group.
4. Close monitoring of the activities of the debtor and liabilities, particularly when there are outstanding obligations especially those with level 2 collectability (special mention).
5. Improve Credit Process and Competency Processor up to the Back Office.
6. Perform Loan Restructuring so long as it complies to the regulations.
7. Potential of NPL debtor until the end of 2015 is immense, consequentially requiring a clear and realistic and aggressive strategy to prevent the debtor into becoming an NPL.
8. Collection Results in assets recovery is still very insignificant compared to the number of existing O/S NPL, and even the sale of foreclosed assets does not occur. Thus, we need to improve the quality and quantity of collection as well as a breakthrough to accelerate the settlement of the NPL which is currently supporting the Bank.
9. Increase the site visit to the debtor's business location and physical examination of non fixed assets collaterals, particularly stocks of goods if they are part of collateral and has significant value.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

10. A Frontal change in the billing system and sales of collateral in order to obtain an optimal recovery.
11. Task force to suppress the decline in credit quality from collectivity 1 (current) and collectivity 2 (special mention) into NPL, needs to increase its activities by monitoring the debtor's obligations before its maturity date.
12. Efforts to look for potential buyers of foreclosed assets and, if necessary, conduct haircut according to the applicable procedure.
13. Remind not to enter into large-scale and high risk credit if the real estate collateral is very inadequate. Past experience has shown significant losses due to Medium Loan financing.
14. Create industry mapping which has good prospects and feasible to finance.
15. Participate in a syndicated loan with Japanese banks for feasible project with due regard to the Legal Lending Limit.
16. Requirement of a role model in the implementation of the cost efficiency program and conduct business process engineering as well as streamlining organization.
17. More intensive in developing relationships with Japanese companies and banks in Indonesia in order to obtain inexpensive funds and bank loan facility to suppress the safety level so negative spread will not occur.
18. Need to be cautious and careful of the surge in liquidity demand, while the market condition is very tight.
19. If Bank Indonesia realizes the change of liquidity structure, then J Trust Bank may lower its safety level by reducing the exposure of Jumbo Deposit with high interest rate.
20. Create and perform stress test with the worst scenario, by conducting risk mitigation particularly in anticipating the rising NPLs.
21. Improve the quality of the loan provision process in particular:
  - Credit Organizational Structure
  - Improve Credit SOP
  - Increase Account Management
22. More exposure of additional capital from January until September 2015 which resulted in an increase of capital to Rp1.4 trillion and CAR into 16.27%.
23. Convince the big depositors and retailers that the shareholders are committed to turn J Trust Bank into a healthy and competitive Bank.

## 2.4. Board of Directors

Board of Directors have full responsibility in operations, business development and risk management of the Bank in a professional manner by upholding the prudential banking principles in order to increase shareholders value and always strives to comply with the prevailing laws and regulations, issued by banking regulator such as the Financial Services Authority (FSA), Bank Indonesia, the Capital Market authorities (Indonesia Stock Exchange), and/or other authorized bodies.

### (1) Board of Directors' Duties and Responsible

On period per 31 Desember 2015 The number of Board of Directors' member consist of 4 (four) persons, one of who shall be the President Director and 1 (one) person shall be Director of Compliance, who jointly carry out the duties and responsibilities to Bank as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

1. The Board of Directors shall be fully responsible in conducting their duties for the interests of the Company in achieving its goals and objectives.
2. The Board of Directors is obligated to act in good faith in accordance with its authorities and responsibilities in performing their duties as governed under the Articles of Association with due regard to the prevailing laws;
3. The Board of Directors is obligated to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all business activities of the Bank at all levels of the organization;
4. The Board of Directors is obligated to follow up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), external auditors, monitoring reports from the Financial Services Authority (FSA), Bank Indonesia, and/or other authorities monitoring results;
5. In order to implement the corporate governance principles, the Board of Directors shall establish a committee under them, such as: ALCO, Risk Management Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, and the Human Resources Committee;
6. The Board of Directors must account for the performance of its duties to the shareholders through the Annual GMS;
7. The Board of Directors shall disclose strategic policy in personnel matters to the employees of the Bank;
8. The Board of Directors is obligated to provide data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners, shareholders and regulators;
9. The Board of Directors is obligated to own work guidelines and code of conduct that binds every member of the Board of Directors, at the least governing the arrangement of work ethics, working time and meeting arrangements;
10. The Board of Directors is obligated to draw up a strategic plan in the form of corporate plan and business plans. Submission of corporate plan and preparation/presentation of a business plan shall be in compliance with the regulations of the Financial Services Authority (FSA);
11. The Board of Directors shall hold the GMS at the request of shareholders with valid voting rights;
12. The Board of Directors is obligated to create and maintain a Shareholders Register and a Special Register which contain the list of shares ownership of the Board of Directors and Board of Commissioners including their families in the Bank and in other companies (if any);
13. Establish the Vision, Mission and Working Culture Values of the Bank;
14. Create a work plan and annual budget and other plans related to the business of the Bank. The plan must be conveyed to the Commissioner and the Shareholders for ratification at the GMS and communicated to all employees of the Bank

## (2) The Number and Composition of Directors

In reference to the regulations of Bank Indonesia:

- The number of board of Directors' member at least 3 (three) persons.
- All board of Directors' members are domiciled in Indonesia

In period 2015, The number and composition of board of Directors at PT Bank JTrust Indonesia Tbk were amended as follows:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- The number and composition of the board of Directors as of January 1, 2015 until December 27, 2015 has satisfied the above requirements of Bank Indonesia as follows:
  - ✓ Members of the Board of Directors is five (5) persons, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Compliance Director, and three (3) Directors.
  - ✓ Members of the Board of Directors domiciled in Indonesia are five (5) persons out of five (5) persons.

The Number and Composition of board of Directors are as follows:

No	Name	Position	Domiciled	Date of Appointment and Approval	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	President Director	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB on. 30 Des 2014 **)	12 March 2009  3 March 2015
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Director	Indonesia	- RDK/RUPS LPS on. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Laksmi Mustikaningrat	Director	Indonesia	- RDK/RUPS LPS on. 4 Juni 2014	29 September 2014
4.	Yoshio Hirako	Director	Indonesia	- RUPSLB on. 30 Dec 2014	7 May 2015
5.	Eihito Tamura	Director	Indonesia	- RUPSLB on. 30 Dec 2014	19 June 2015
*) Board of Commissioners Meeting is regarded as GMS for the appointment as Director **)EGMS for the appointment as President Director					

- The Number and Composition as per 28 December 2015 until 31 December 2015 same as criteria of Bank Indonesia above, as follows:
  - ✓The Board of Directors' member as much as 4 (four) persons, included 1 (one) of President Director, 1 (one) of Compliance Director, 1 (one) of Director, and the latest 1 (one) of Director (effective after passing the fit and proper test held by FSA).
  - ✓The Board of Directors' members who domiciled in Indonesia as much as 4 (four) persons of 4(four) persons.

The Number and Composition of board of Directors' members are as follows:

No	Name	Position	Domiciled	Date of Appointment and Approval	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB on. 30 Des 2014 **)	12 Maret 2009  3 Maret 2015
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Eihito Tamura	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	19 Juni 2015
4.	Ritsuo Ando	Direktur	Indonesia	- RUPSLB tgl. 28 Des 2015	***)
*) Board of Commissioners Meeting is regarded as GMS for the appointment as Director **)EGMS for the appointment as President Director ***) Effective after passing <i>Fit and Proper Test</i> held by OJK. Based on letter No. SR-45/D-03/2016 on 26 February 2016					

In period 2015, there are no board of directors' members who has concurrent positions as Commissioner, Director or Executive Officer in other Banks, companies and/or financial institutions. In addition, there are no board of Directors' member of the Remuneration and Nomination Committee.

The summary of profile of Board of Directors' members are follows:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

a. **President Director: Ahmad Fajar**

Indonesian citizen, place/date of birth Surakarta, January 22, 1966. He earned a Bachelor degree from Bogor Agricultural University (IPB) in 1988, and a Master of Management degree in 2000 from the University of Padjadjaran. He began his career in banking in 1990 as the Head Office Administration, and in 2000 as Senior Manager Officer - Treasury Liquidity Management Funding at Bank Bumi Daya. In 2000-2001, he served as a Senior Officer Manager - Treasury & Capital Market Portfolio Investment in Bank Mandiri. In 2001-2003, he served as a Manager of Professional Staff - Treasury Management, Treasury Product/Sales Management at Bank Mandiri. In 2003-2004, he served as SRM: TL - Investment Portfolio Mgr - Treasury Bank Mandiri, in 2004-2008, he was Vice President: DH-Debt & Capital Markets - Treasury Debt & Capital Markets at Bank Mandiri. In November 2008 he was entrusted to be a Director of PT Bank Mutiara Tbk. and as of December 30, 2014, he was entrusted to serve as President Director of PT Bank Mutiara Tbk which currently changed its name into PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

b. **Compliance Director: Felix Istyono Hartadi Tiono**

Indonesian Citizen, place/date of birth Surakarta, 8 February 1959. Graduated from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1985 majoring in Faculty of Law, and in 2006 graduated from the Institute of Management Development Indonesia, Jakarta with an MM/MBA degree. He began his career in 1986-1990 at PT Wellwood Sejahtera Ekapratama as Legal Officer; in 1990, he served in PT Bank Rabobank International Indonesia as a Legal Officer; later in 1992, he served in PT Bank Rabobank International Indonesia as Legal Affairs Manager; in 1994, he served at PT Bank Rabobank International Indonesia as Manager of Credit Control & Support; in 1998, at PT Bank Rabobank International he served as a Manager of Credit Risk Control; afterwards, in 2000, he was still at PT Bank Rabobank International Indonesia serving as Compliance Director; in 2006, he began his career at PT Bank DBS Indonesia as Compliance Director; In 2009, he served in Bank HSBC Indonesia Compliance Director; from 2014 until now he serves at PT Bank Mutiara Tbk as Compliance Director and Legal which currently has changed its name to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

c. **Director: Eihito Tamura**

Japanese citizen, born on June 24, 1971. A graduate of University of Tokyo, Faculty of Engineering, Department of Systems Innovation in 1996, he was no stranger to the various payment solutions and network in the world. Boasting three years of experience in the field of marketing and strategy consultant, more than seven years of experience in banking and securities, and one year of setting up the Bank. He began his career at Sanwa Bank, Limited., Tokyo as an Associate in 1996 and first occupied the position of Executive as Executive Director in Cecile Co., Ltd. in 2006. He later served as CEO at Bitcash Inc., Tokyo before assuming the position of CEO and President at Wakatam Inc., Tokyo in 2011. As of December 30, 2014 he is entrusted to be a Director of PT Bank Mutiara Tbk which currently had changed its name into PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

d. **Director : Ritsuo Ando \*)**

Japanese citizen, Male, aged 59 years old. Appointed as a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk subject to the EGMS of the Company dated December 28,

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

2015. He has thirty-six (36) years experience in banking and finance industry. Starting his career in The Daiwa Bank, Limited., Osaka as Banking Officer in 1979 until he first occupied executive positions as President Director of PT Daiwa Lippo Finance in 2001. Afterwards, he served as President Director of Resona Indonesia Finance in 2003, Advisor at Resona Bank, Ltd. in 2005, General Manager at ACOM Co., Ltd. in 2007, Vice President Director of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (BNP) in 2008, and recently as President Director of BNP since 2009 prior to becoming a Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. He graduated from Osaka University of Foreign Language, Faculty of Language, Indonesia Literature in 1975.

\*) Effective after passing fit and proper test held by OJK. Based on letter No. SR-45/D-03/2016 on 26 February 2016.

### (3) The Criteria of Director

- In order to obtain objective and independent results, all appointment and/or replacement of members of the Board of Directors must be approved by the shareholders through the GMS, with the main criteria considering the integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the requirements of the Fit and Proper Test held by the Financial Services Authority (FSA). As of December 31, 2015, not all members of the Board of Directors received approval from the FSA on Fit and Proper Test assessment and the satisfaction of the prevailing laws. The appointment of a Director shall be subject to/in consideration of the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.
- The majority of Board of Directors' members have at least 5 (five) years of experience in the area of operations as Executive Officer of the Bank.

### (4) The Status of Independency Directors

- All members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is an Independent Director, which means that each one does not have any financial, management, shares ownership, and/or family relationship to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank which could affect its ability to act independently.
- Members of the Board of Directors, either individually or jointly, does not own more than 25% (twenty five percent) of the paid up capital at another company.
- Members of the Board of Directors do not give general authorization to other parties which may result in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

### (5) Transparency and Financial, Management, Family Relations of Board of Directors

The board of Directors' members have issued and signed an affidavit related to the following matters:

1. The Board of Directors' member do not own shares reaching  $\geq 5\%$  (five percent) of the paid up capital of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as well as at other banks and companies (domestic and overseas).
2. The Board of Directors' member either individually or jointly do not have more than 25% (twenty five percent) of the paid up capital of another company.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Members of the Board of Directors do not have a mutual financial and family relationship to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and the controlling shareholder.

### - Transparency of Family Relationship

No	Name	Board of Commissioner		Board of Director		Other Shareholder	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Eihito Tamura		√		√		√
4.	Ritsuo Ando		√		√		√

### - Transparency of Financial Relations

No	Name	Board of Commissioner		Board of Director		Other Shareholder	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Eihito Tamura		√		√		√
4.	Ritsuo Ando		√		√		√

### - Transparency of Share Ownership

No	Name	Othe Company	Other Bank	Financial Institution Non Bank	%
1.	Ahmad Fajar	None	None	None	
2.	Felix I. Hartadi Tiono	None	None	None	
3.	Eihito Tamura	None	None	None	
4.	Ritsuo Ando	J-Net Travel	None	None	6,00%

## (6) The Board of Directors' Meeting

During 2015, The meeting was held 36 (thirty six) times by Board of Directors, both Board of Directors meetings and meetings of the Board of Directors with the Division Head, and other work units, in discussing all matters and/or the Company's management strategy

The Attendance Level frequency of Board of Directors' meeting in 2015. Based on 'service period' is as follows:

No	Name of Director	Serving Period	Attendance	% Attendance
1	Ahmad Fajar (Direktur Utama) <sup>1)</sup>	1 January s/d 31 December 2015	35	97%
2	Felix I. Hartadi Tiono (Direktur)	1 January s/d 31 December 2015	32	89%
3	Laksmi Mustikaningrat (Direktur)	1 January s/d 28 December 2015	18	82%
4	Yoshio Hirako (Direktur) <sup>2)</sup>	1 January s/d 28 December 2015	17	47%
5	Eihito Tamura (Direktur) <sup>3)</sup>	1 January s/d 31 December 2015	18	50%
6	Ritsuo Ando	28 December s/d	-	-

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

(Direktur) <sup>4)</sup>	31 December 2015		
1) Effective on 3 March 2015 after passed Fit and Proper test by FSA. 2) Effective on 7 May 2015 after passed Fit and Proper test by FSA. 3) Effective on 19 June 2015 after passed Fit and Proper test by FSA. 4) Appointed in accordance to EGM on December 28, 2015 and effective after passed Fit and Proper Test by FSA. Have been approved by letter No. SR FSA-45 / D-03/ 2016 on February 26, 2016			

The resolutions of Board of Directors meeting were adopted by deliberation to achieve consensus, and/or majority vote if consensus cannot be achieved. Resolutions of Board of Directors meetings were reduced into minutes of meetings/minutes and are well documented, including the inclusion of dissenting opinions (if any).

## (7) The Assessment of Board of Directors' Performance

The Parties who conduct an assessment on the performance of Board of Directors is the Board of Commissioners and subsequently approved by the shareholders.

### Performance Assessment Process

The stage of process to assess the performance of Board of Directors are as follows:

- Stage 1  
Work Planning Corporate Budget (RKAP) which has been ratified by GMS.
- Stage 2  
Organize Draft of Key Performance Indicator (KPI)
- Stage 3  
KPI is reviewed by Board of Commissioners and Remuneration and Nominations Committee
- Stage 4  
KPI's draft is proposed to the Majority Shareholders (J Trust Co., Ltd.).
- Stage 5  
KPI discussions between the Technical Team of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and the Technical Team of the Shareholders.
- Stage 6  
Signed with KPI between PT Bank JTrust Indonesia Tbk with shareholders

### - The criteria of Performance Indicator

- The drafting process of Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors of PT Bank J Trust Indonesia Tbk implements the Balanced Scorecard (BSC) method. Performance measurement applies four perspectives, which are: Finance, Internal Business, Customer, Learning & Growth.
- By applying the BSC method, the measurement was not only aimed on financial targets but also on the process. PT Bank JTrust Indonesia Tbk believes that the BSC method can clarify and translate vision and strategy as well as to communicate and link various strategic objectives and measurements.
- After bank wide/directorate KPI have been signed, every month PT Bank JTrust Indonesia Tbk always monitor the performance achievement against targets set in the KPI.
- At the end of the fiscal year, KPI will be evaluated by the Shareholders to assess the performance of Board of Directors. The stages in evaluating the value of KPI at the end of the year are as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## (8) The Training Program of Board of Directors' Member

To support the implementation of Board of Directors' duties, in 2015, several members of the Board of Directors at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has attended various training programs, workshops, conferences, seminars, such as:

No.	Name	Serving Period	training programs, workshops, conferences, seminars	Organizer	Place & Times
1	Laksmi Mustikaningrat (Director)	1 January s/d 28 December 2015	Implementation of Risk Management on Bank Performance	BSMR	Grand Hyatt Jakarta
2	YoshioHirako (Director)	1 January s/d 28 December 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debriefing of SMR</li> <li>• Test SMR Level 5 Executive (Fast Track)</li> <li>• Test SMR Level 5 Executive (Fast Track) - Intensive</li> </ul>	LSPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC Jakarta Building</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>
3	EihitoTamura (Director)	1 January s/d 31 December 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debriefing SMR</li> <li>• Test SMR Level 5 Executive (Fast Track)</li> <li>• Test SMR Level 5 Executive (Fast Track) -Intensive</li> </ul>	LSPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC Jakarta Building</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> <li>• Mandiri Tower Jakarta</li> </ul>



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 2.5. Shareholding

The current shareholding of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are in accordance with the latest Articles of Association No. 59 dated June 24, 2015 as amended several times subject to resolutions of the EGMS in Deed No. 2 dated September 29, 2015 and the resolution of the EGMS in Deed No. 54 dated December 28, 2015, therefore the shareholding composition of the Company shall be as follows:

No.	Shareholder	Sheets	Nominal/sheets	Percentage
1.	J Trust Co. Ltd.	892.171.975.498.230 (Series A share)	Rp. 0,01	98,997%
2.	PT J Trust Investments Indonesia	9.012.124.501.770 (Series A share)	Rp. 0,01	1,000%
3.	Pemegang Saham Lama	28.350.177.035 (Series B share)	Rp. 78,00	0,003%

Based on Articles of Association No. 59 dated June 24, 2015 and resolutions of the EGMS in Deed No. 2 on September 29, 2015 which resolved changes in the shareholding of the Company, therefore the shareholding composition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are as follows:

- i. 98.997% (ninety eight point nine hundred ninety seven per cent) of the Company's shares or in the total amount of 892,171,975,498,230 (eight hundred and ninety-two trillion one hundred and seventy-one billion nine hundred and seventy five million four hundred and ninety eight thousand two hundred thirty) Series A shares owned by J Trust Co. Ltd.;
- ii. 1.000% (one point zero percent) of the Company's shares or in the total amount of 9,012,124,501,770 (nine trillion twelve billion one hundred twenty four million five hundred and one thousand seven hundred and seventy) series A shares owned by PT J Trust Investments Indonesia (JTII).
- iii. 0.003% (zero point zero zero three percent) of the Company's shares in the total amount of 28,350,177,035 shares (twenty-eight billion three hundred and fifty million one hundred and seventy seven thousand and thirty-five) series B shares owned by Public Shareholders (in legal proceedings at the Constitutional Court/MK).

## 2.6. Transactions Involving Conflict or Interest

Transactions which caused conflicts of interest between the Bank and personal interests of the owners, the Board of Commissioners' member, the Board of Directors' member, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then the Board of Commissioners' member, the Board of Directors' member, Executive Officers are prohibited from taking actions/decisions that may inflict damage to the Bank or reduce the profit of the Bank.

In carrying out the day-to-day duties and responsibilities in doing business relationship with customers, partners and their co-workers, as well as safeguarding the public interests, PT Bank JTrust Indonesia Tbk always strives to uphold personal integrity and excellent professionalism, which is manifested in a Corporate Ethics guidelines of the company to serve as ethical and behavioral standards which must be applied as guidelines by all members of the Bank (the Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent/Contract Employees).

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Corporate Ethics guidelines of the company governs matters which should be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity with customers, partners or among members of the Bank, including in decision-making.

During 2015 there were no transactions which contain conflict of interest, as the table below:

No	Name & Position of Parties with Conflict of Interest	Name & Position of Decision Maker	Type of Transaction	Transaction Amount (RP million)	Description *)
	None	None	None	None	None

\*) Not in compliance with applicable system and procedure

### 2.7. Shareholding of members of the Board of Commissioners and Board of Directors which reached $\geq 5\%$ (five percent) of the paid-up capital, which includes the type and number of shares in the Bank, other banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled locally or abroad.

In 2015 there is 1 (one) member of the Board of Commissioners, and 1 (one) members of the Board of Directors who own shares constituting more than 5% (five percent) of the paid-up capital at another company.

### 2.8. Financial and Family Relations of The Board of Commissioners and Directors' Members

During 2015 there was no financial and family relations of the Board of Commissioners and Directors' members with another members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank.

### 2.9. Shares option of the Commissioners, Directors, and Executive Officers

Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers through a stock offering or stock options offering in order to award compensation to members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Bank, which must be resolved in the GMS and/or Articles of Association of the Bank.

Disclosures regarding the minimum share option include:

- a) The policy of granting shares option.
- b) Number of shares owned by each member of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers prior to being granted shares option.
- c) Number of shares option granted
- d) Number of share option which has been exercised by the end of reporting period.
- e) The option price
- f) The validity of exercise period of the share option

During 2015 There was no shares option referred in letters b), c), d), e), and f) as the following table below :

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Description /Name		Total Shares (Number of Shares)	Share Option		Option Price (Rupiah)	Period
			Granted (Number of Shares)	Exercised (Number of Shares)		
The Board of Commissioners	(name)					
The Board of Director	(name)					
Executive Officers	(total)					
Total		None	None	None	None	None

## 2.10. *The Buyback of the Bank's shares and/or bonds*

Shares buyback or bonds buyback is the effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by repurchasing said shares or bonds, which payment mechanism is carried out subject to the prevailing laws.

The disclosure of shares and/or bonds buyback at least include:

- a. The shares and/or bonds buyback policy;
- b. The number of repurchased shares and/or bonds;
- c. The price of shares and/or bonds buyback;
- d. The increase profit per share and/or bond

During 2015 There was no Buy back shares and/or bonds by the Bank at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 2.11. Remuneration and Other Facilities

### A. Remuneration package/policy and other facilities for the Board of Commissioners and Directors

#### 1) Among other include:

- a. **Remuneration** in cash, including salaries and other fixed income, such as allowances (benefit), stock-based compensation, *tantiemand* and other forms of remuneration.
- b. **Other in kind/cash** facilities such as other intermittent income, including allowances for housing, transportation, health insurance and other facilities, which is discretionary.

#### 2. The Disclosure of said remuneration package/policy include as follows:

- a. Remuneration package/policy and other facilities for The Board of Commissioners and Directors' members as set forth the GMS of Bank.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Types of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, must at least include the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the Board of Directors, and the total number of remuneration packages/policy and other relevant facilities, for 2015, as per the following table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Total Received in 1 Year*)			
	Board of Commissioners		Board of Directors	
	Person	In Rupiah	Persons	In Rupiah
1. Remuneration (salary, bonus, allowances, tantiem, and other facilities in the form of non-natura)	3	2.940.988.300	5	10.731.905.930
2. Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance, etc) **)				
a. Can be possessed (Retired)	3	130.000.000	5	456.000.000
b. Can not be possessed (Vehicle D & O insurance)		-		646.000.000
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3.070.988.300</b>	<b>5</b>	<b>11.833.905.930</b>
<b>Keterangan:</b>				
*) Before Tax				
**) In equivalent Value of Rupiah				

- c. The number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who received the remuneration package in 1 (one) year are grouped according to the income levels for 2015 as follows:

Remuneration per person in 1 Year*)	(per persons)	
	Number of BOD	Number of BOC
Above Rp.2 billion	2	1
Above Rp.1 Billion s.d. Rp.2 Billion	3	-
Above Rp.500 million s.d. Rp.1Billion	-	1
Under Rp.500 million	-	1
<b>Notes:</b>		
*) Paid in Cash before tax		

### B. The Ratio of Highest and Lowest Salary

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- a. **Salary** is the right of an employee which is received and realized in the form of money as a remuneration from the company/employer to employees which are determined and paid subject to an employment agreement, contract, or prevailing laws and regulations, including allowances for employees and their families for work and/or services rendered.
- b. **The ratio of highest and lowest salaries**, in a comparative scale as follows:
- a) The ratio of highest and lowest salaries of the employees.
  - b) The ratio of highest and lowest salaries of Board of Directors.
  - c) The ratio of highest and lowest salaries of Board of Commissioners.
  - d) The ratio of highest and lowest salaries of Board of Directors and employees.

The comparable salaries in the salary ratio is the remuneration received by the Board of Commissioners' members, Board of Directors and employees per month. An employee is a permanent employee which serve an executive function.

The ratio of highest and lowest salaries in PT Bank Jtrust Indonesia Tbk in 2015 is as follows:

Type of Ratio	Ratio
The ratio of highest and lowest employee salaries	21 x
The ratio of highest and lowest Director salaries	1,50 x
The ratio of highest and lowest Commissioner salaries	1,21 x
The ratio of highest salaries of Director and Employee	2,91 x

## **CHAPTER III**

### **The Implementation and Duties of Committees at PT Bank Jtrust Indonesia Tbk**

#### **Committees Under the Board of Commissioners**

In order to execute its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has established the Committees under the Board of Commissioners in accordance with Good Corporate Governance. The committees are as follows:

- *Audit Committee*
- *Risk Monitoring Committee*
- *Nomination and Remuneration Committee*

All the committees under the Board of Commissioners are chaired by an Independent Commissioner who does not have a relationship of finance, management, share ownership, and/or related to members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or the controlling shareholders or in any other form of relationships with the Bank which could affect independence.

Implementation of duties and responsibilities of the committees under the Board of Commissioners at PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to the Committee Charter which is based on the rules that apply in Indonesia, especially Bank Indonesia Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, and best practices and are reviewed regularly.

#### **3.1. *Audit Committee***

The Audit Committee is a committee formed to support the effective duties of the Board of Commissioners. The Audit Committee monitors and evaluates the planning and execution of audit and monitor the follow-up audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process

##### **a. Charter/Guidelines and Rules of Conduct of The Audit Committee (*Audit Committee Charter*)**

The Audit Committee has a Charter/Code of Conduct of the Audit Committee which regulates matters related to the implementation of the tasks and responsibilities, organizational structure, membership requirements, the authority, implementation of meeting, working period and honorarium. The effectiveness of the Charter/Guidelines and Code of Conduct of the Audit Committee need to be assessed and evaluated periodically by the Board of Commissioners to ensure the Audit Committee function at optimal level.

##### **b. The Structure and Membership of The Audit Committee**

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Referring to the letter BOC No.12.02/S-KOM/Mutiara/V/2015 dated May 12, 2015 and was appointed by the Board of Directors through the Decree of the Board No.12.05/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 dated May 12 in 2015, the structure and member of the Audit Committee are as follows:

1. Sigid Moerkardjono ( Vice President Commissioner/Independent): Chairman/Member
2. Sudarmadji Herry Sutrisno (Independent Party) : Secretary/Member
3. Haryanto (Independent Party) : Member

Referring to the BOC Letter No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 dated June 1, 2015 and was appointed by the Board of Directors by the Board of Directors Decree No. 30.17/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 dated June 30, 2015, the structure and members of the Audit Committee are as follows:

3. Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioners/Independent) : Chairman/Member
4. Nobiru Adachi (President Commissioner) : Member
5. Sudarmadji Herry Sutrisno (Independent Party) : Secretary/Member
6. Haryanto (Independent Party) : Member

Referring to the BOC Letter No.17.01/S-KOM/JTRUST/XII/2015 dated December 17, 2015 and was appointed by the Board of Directors with the Decree of the Board No.18.08/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 dated 18 December 2015, the structure and members of the Audit Committee has been amended as follows:

- 1) Benny Luhur (Independent Commissioner) : Chairman/Member
- 2) Nobiru Adachi (President Commissioner) : Member
- 3) Sudarmadji Herry Sutrisno (Commissioner Party) : Secretary/ Member
- 4) Haryanto (Commissioner Party) : Member

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of one Commissioner who passed the fit and proper test by the FSA, one independent Party who is an expert in the field of accounting and finance, one Independent Party with expertise in business law and banking. The appointment of Chairman and Members of the Audit Committee have met the criterias according to Bank Indonesia Regulation.

### c. The Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee Members

In general, educational qualifications and work experience of the Audit Committee members are as follows:

- Independent Commissioners and Independent Party members of the Audit Committee made up at least 51% ( fifty percent) of members of the Audit Committee. Implementation of the appointment of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk on January 1, 2015 s/d. May 25, 2015 was 100% consist of Independent Commissioners and Independent Parties, dated May 26, 2015 to December 28, 2015 consisted of 75% Independent Commissioners and Independent Parties, and dated December 29, 2015 to December 31, 2015 consisted of 75% Independent Commissioners and Independent Parties.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- The Audit Committees' members have high integrity, good character, good morals, sufficient ability of banking knowledge and experience and able to communicate well.
- Have adequate knowledge to read and understand financial statements of banks.
- Have adequate knowledge of the legislation relating to the bank business.
- Have good mental attitude, ethics and professional responsibility.
- Maintain confidentiality of company information

Specifically, educational qualifications and work experience of The Audit Committees' members at PT Bank JTrust Tbk is outlined as follows:

- **Sigid Moerkardjono**, as Chairman of Audit Committee (Served since 28 December 2015)

Bachelor of Economics majoring in Accounting Gajah Mada University, Yogyakarta. Started his banking career in 1976 until 1999 at the Bank with various assignments such as Credit Analyst, Branch Manager, Regional Manager (1976-1999).

Pada *level* atas (strategis) banyak menjalani karir di bidang compliance, audit committee, dan risk monitoring committee, yaitu sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Niaga Tbk. (1999-2000), Komisaris dan juga sebagai Ketua Komite Audit/anggota Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk. (2000-2007), Wakil Komisaris Utama dan juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Audit/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk., Anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN (2007-2011).

At strategic level he is experienced in the area of compliance, audit committee, and risk monitoring committee, namely as Compliance Director of PT Bank Niaga Tbk. (1999-2000), Commissioner and as Chairman of the Audit/Risk Monitoring Committee/member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Niaga Tbk. (2000-2007), Deputy Commissioner and as Chairman of the Risk Monitoring Committee/Audit Committee member/member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Niaga Tbk., Member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Bank BTPN (2007-2011).

- **Benny Luhur**, as Chairman of Audit Committee (Served since 29 Desember 2015)

Bachelor of Chemical Engineering University of California, Berkeley, USA. Started his career as Vice Manager at PT Day Light Industrial Co. Ltd. producer of the ABC brand batteries and distributor to all areas in Indonesia. In 1989 - 1995 served as Director of PT Adei Plantation & Industry where he pioneered and established rubber plantations and palm oil in Riau with land clearing systems without burning. He continued his career as Director of PT Adindo Foresta Indonesia in 1990 - 1999 where he maintained cooperation with the state-owned PT INHUTANI 1 to build the Industrial Plantation Forest in the northern part of East Kalimantan. Served as the Director of PT Adindo Hutani Lestari in 1995 - 2005. Mr. Benny Luhur also served as Director of PT Adei Crumb Rubber Industry in 1995-2013.

In 1999 - 2005, he served as President Commissioner of PT Adindo Foresta Indonesia Tbk with the task to supervise and provide advice to the Board of



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Directors. Similarly in PT Adei Crumb Rubber Industry, where he also served as the Commissioner from 2013 s/d now.

Currently he serves as an Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk since June 23, 2015. He passed the Fit and Proper Test on August 24, 2015 and concurrently served as Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Risk Monitoring Committee and member of the Nomination and Remuneration Committee since December 2015 until today.

- **Nobiru Adachi**, as Audit Committee's member

Japanese citizen 57 years. Graduated from the University of Tokyo, Faculty of Law, 1980; Case Western University, Faculty of Economics, 1983. In April 1980, joined the Japanese Ministry of Finance where he held various strategic positions, such as Director of the Tax Office Onomichi in July 1986, Director of the Deputy Minister of Finance for International Affairs, part of the Secretariat of the Minister in June 1997, Legal Advisor in the Bureau of Budget, Director of the Research Division of the International Bureau in June 2002, Director of the Policy Research Institute of the Ministry of Finance in June 2004, Director General of Customs in Hakodate in June 2005. In April 2006, was appointed as an Officer in the Jasdac Securities Exchange, Inc., then promoted to Executive Officer in June 2006 and in October 2008, became Country Head for Japan in ETF Securities Ltd.

Served as Chairman and CEO of M & A Solutions Japan Co., Ltd. in October 2011. In April 2013 appointed as Advisor to J Trust. Then served as the Managing Director J Trust in June 2013. Later he became Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust and in November 2014 was appointed as a Commissioner of PT Bank Mutiara Tbk, who was later appointed as a Resident Commissioner of PT Bank Mutiara Tbk on December 30, 2014, which changed its name to PT Bank JTrust Indonesia Tbk in May 29, 2015. Passed Fit and Proper Test on April 14, 2015 serves as the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee since May 2015 until today.

- **Haryanto**, as The Audit Committee's Member

Banking career began in 1974 with Bank Niaga until 1977 and 1980 joined Bank Pembangunan Indonesia until 1999, then with Bank Mandiri until 2000, followed by Bank BTN from 2005 to 2013. He has attended various professional training in banking at local and international level, organized by Bank Indonesia, Bapindo, Alpia, PDCP Manilla the Philippines.

- **Sudarmadji Herry Sutrisno**, as Secretary and member of the Audit Committee

Bachelor of Economics majoring in Accounting at Gajah Mada University in 1978 and Master of Management at Bandung Institute of Technology in 1996. He started his career as a Staff Assistant to the Finance Director of PT IPTN (now PT Dirgantara Indonesia) in Bandung from 1979 to 1981. Careers in Public Accounting profession in the Office Public Accountants International and local affiliated where he audited Regional Development Banks and Financial Institutions since

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

1990. Until now is active as lecturer of the Faculty of Economics at Trisakti University on auditing and accounting information systems.

## d. The Independency of Audit Committee's member

Among members of the Audit Committee have no relationship in finance, management, share ownership, and/ or related to members of the Board of Commissioners, Board of Directors and /or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

## e. The Duties and Responsible of Audit Committee

The Audit Committee is responsible for providing independent and professional opinion to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners as well as identifying issues that require the attention of the Board of Commissioners include:

- 1) Details of the annual activity approved by the Board of Commissioners.
- 2) Conduct oversight of the financial reporting process by insisting that standards and policies applicable accounting are met.
- 3) Review and provide consent to the financial statements to be issued by the Company mainly published either in full or highlights such as financial reports, projections and other financial information, whether it is in accordance with the Guidelines of Financial Accounting Standards and other provisions in force, and whether it is consistent with other information known to the Audit Committee members.
- 4) Monitor and evaluate the planning and implementation as well as monitoring of audit follow-up results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
- 5) Monitor and Evaluate the following :
  - The Implementation of Internal Audit Unit and assess the adequacy of the Internal Audit Charter.
  - Compliance audit by Public Accountant with applicable auditing standards.
  - Implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Unit, Public Accountant and Bank Indonesia supervision result.
- 6) Provide recommendations regarding appointment of Public Accountant and Public Accountant Office to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- 7) Review the bank's adherence and compliance with regulations and legislation of capital markets and other legislation relating to the activities of banks.
- 8) Provide input on the proposed appointment and dismissal of the Head of Internal Audit Unit (SKAI).
- 9) Ensure that all risks and controls noted in the report of the Internal Audit and the External Auditors, so that management always run a healthy banking practices in accordance with the principle of prudence.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 10) Monitor the process of corporate governance by ensuring that all levels of management have civilized Corporate Governance.
- 11) The Audit Committee shall have the Employment Guidelines (Audit Committee Charter) which has been reviewed and updated

### f. The Meeting of Audit Committee

- 1) Committee meetings held in accordance with the requirements:
  - a. Conference/meeting Audit Committee with the involvement of the Internal Audit at least 1 (one) times in three (3) months.
  - b. Conference/meeting Audit Committee with the Board of Commissioners conducted as needed.
- 2) Audit Committee Meeting was attended by at least 51% of the members of the committee and may be attended by the Board of Commissioners who are not Members of the Audit Committee.
- 3) Audit Committee Meeting chaired by the Chairman of the Audit Committee, and if Audit Committee Chairman is absent then the meeting chaired by the other Committee members are appointed and approved in the committee meeting.
- 4) The decision of the Committee meeting was conducted on the basis of deliberation to reach consensus.
- 5) If there is no consensus then the decision is based on voting by the approval of 2/3 (two thirds) of members of the Committee present at the meeting.
- 6) The results of the Committee meeting shall be stated in the minutes of the meeting and documented properly.
- 7) Dissenting opinions that occurs in the meeting of the Committee shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.

During 2015, the Audit Committee has held 13 (thirteen) times meetings, which consists of the Audit Committee meeting with SKAI, KAP, and other Work Unit.

The frequency of meeting attendance rate of the Audit Committee's each member as follows:

Komite Audit	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total Hadir Σ
		Tgl. 13/1/15	Tgl. 12/2/15	Tgl. 24/2/15	Tgl. 11/3/15	Tgl. 14/4/15	Tgl. 12/5/15	Tgl. 17/6/15	Tgl. 5/8/15	Tgl. 25/8/15	Tgl. 28/9/15	Tgl. 15/10/15	Tgl. 17/11/15	Tgl. 15/12/15	
Sigid Moerkardjono	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
	KAP														
	UKL														
Benny Luhur *)	SKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAP														
	UKL														
Nobiru Adachi **)	SKAI	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	7
	KAP														
	UKL														
Haryanto	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
	KAP														
	UKL														
Sudarmadji Herry Sutrisno	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	12
	KAP														
	UKL														

Notes:

√ : Present SKAI : Internal Audit Unit  
x : AbsentKAP : Public Accounting Firm

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- : Not yet assume the position of Chairman/Member of the Committee  
 \*) Effective on 29 December 2015 serves as Chairman of the Committee  
 \*\*) Effective on 26 May 2015 as Member of the Committee

UKL : Other Work Unit

Name	Serving Period	Number of Meeting	Attendance	% Attendance
Sigid Moerkardjono (President/Vice Commissioner-Independent)	01 January s/d 28 December 2015	13	13	100%
Benny Luhur (President/Independent Commissioner)	29 December s/d 31 December 2015	-	-	-
Nobiru Adachi (President/Member Commissioner)	26 May s/d 31 December 2015	7	7	100%
Haryanto (Member/Independent Party)	01 January s/d 31 December 2015	13	13	100%
Sudarmadji Herry Sutrisno (Member/Independent Party)	01 January s/d 31 December 2015	13	12	92%

### g. The Work Program and Realization of Audit Committee

#### **The Work Program of Audit Committee :**

No.	Work Program
1	Meeting with SKAI to review the result of Audit Report, monitoring and evaluating audit plan and implementation as well as the follow up.
2	To review the audit plan from KAP for the fiscal year 2015
3	To review the final draft of audit report from KAP for the fiscal year 2014
4	To review the audit plan of SKAI in 2016
5	To participate in BOD and BOC meeting
6	To review the annual report
7	To provide recommendation regarding the appointment/maintaining of and dismissal of external auditor/KAP to BOC
8	To prepare the 2016 Audit Committee Work Plan
9	To review unaudited published financial statement
10	To review the quality of productive assets and adequacy of P P AP/CKPN including AYDA
11	To monitor the follow up of results from FSA audit and management letter from KAP

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## The Realization Work Program/Duties of Audit Committee 2015

In 2015 Audit Committee Program implemented are explained as follows:

1. In 2015, 13 meetings with SKAI were held, the meeting discussed the monthly Audit Report Monthly, loan collectibility 2 above Rp5 billion, potential NPL, and others.
2. Work Program on monitoring and evaluation planning, audit implementation, follow-up audit findings were discussed in the Committee meetings and made recommendation on the following matters:
  - Evaluation of SKAI profile to ensure of their ability to oversee the Bank's business development after the change of ownership and change of business focus.
  - Propose to the Board of Directors to enable Adhoc team to assist Divisions and branch to make corrections on the SOP and training in order to improve staff competence.
  - Consider a penalty for division or branch rated as subsequent near fair in their audit results.
  - Suggest to the BOD to evaluate the current conditions for the debtor over a certain amount who start being delinquent on their obligations so to better project NPL each month
  - And others

### 3.2. The Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is formed to assist the Board in carrying out active surveillance of risk management in accordance with the Regulation of Bank Indonesia.

#### a. The Risk Monitoring Committee Charter

Risk Monitoring Committee has a Charter/Code and rules of Conduct which regulates matters related to the implementation of the duties and responsibilities, organizational structure, membership requirements, the authority, the implementation of the meeting, the tenure and honorarium. Charter/Code and Rules of Conduct Risk Monitoring Committee periodically need to be assessed and evaluated for adequacy by the Board of Commissioners and that the Risk Monitoring Committee functions can be carried out at an optimal level.

#### b. The Structure and Member of Risk Monitoring Committee

Based on virtue of BOC No.12.02/S-KOM/Mutirara/V/2015 dated May 12, 2015 and was appointed by the Board of Directors with the Decree of Board No.12.06/S.Kep-Dir-HCD/Mutiaral/V/2015 dated May 12, 2015, structure and membership of the Risk Monitoring Committee as follows:

1. Sigid Moerkardjono ( Vice President Commissioner/Independent): Chairman/  
Member
2. Haryanto(Independent Party) : Secretary/Member

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

3. Sudarmadji Herry Sutrisno (Independent Party) : Member

Based on BOC No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 dated June 1, 2015 and was appointed by the Board of Directors with the Decree of Board No.30.15/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 dated June 30, 2015, structure and membership of the Risk Monitoring Committee is as follows:

1. Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioner/Member) : Chairman/Member
2. Nobiru Adachi (President Commissioner) : Member
3. Haryanto(Independent Party) : Secretary/Member
4. Sudarmadji Herry Sutrisno (Independent Party) : Member

Based on the BOC No.17.01/S-KOM/JTRUST/XII/2015 dated December 17, 2015 and was appointed by the Board of Directors through Decree of the Board No.18.07/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 dated December 18 in 2015, the structure and membership of the Risk Monitoring Committee shall be amended as follows:

1. Benny Luhur (Independent Commissioner) : Chairman/Member
2. Nobiru Adachi (President Commissioner) : Member
3. Haryanto (Independent Party) : Secretary/Member
4. Sudarmadji Herry Sutrisno (Independent Party) : Member

Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner and its members are one Commissioner who has passed the FSA fit and proper test, two independent party who is an expert in finance and risk management. Appointment of the Chairman and members of the Risk Monitoring Committee have met the criteria set out in the Regulation of Bank Indonesia.

### c. The Educational Qualification and Work Experience of Risk Monitoring Committee's Member

In general, educational qualifications and work experience of the Risk Monitoring Committee members are as follows:

- The Members composition of the Risk Monitoring Committee should be at least 51% ( fifty one percent) independent Commissioners and Independent party. Implementation of the appointment of Risk Monitoring Committee members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk on January 1, 2015 to May 25, 2015 consists of 100% Independent Commissioners and Independent Parties; dated May 26, 2015 to December 28, 2015 consists of 75% Independent Commissioner and Independent Parties, and December 29, 2015 to December 31, 2015 consists of 75% Independent Commissioner and Independent Party.
- Member of the Risk Monitoring Committee is required to have high integrity, good character, good morals, knowledgeable and experience, and able to communicate well.
- Have sufficient knowledge to understand financial statements of banks.
- Have adequate knowledge of the legislation relating to the bank business.
- Have a mental attitude, ethics and highly professional and responsible.
- Maintain confidential company information.

Educational qualifications and work experience of the Risk Monitoring Committee's member at PT Bank JTrust Indonesia Tbk are as follows:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- Sigid Mo erkardjono, as C hairman o f R isk M onitoring C ommittee (served s/ d. 2 8 December 2015)

Educational qualifications and work experience same as previously described.

- Benny Luhur, as Chairman of Risk Monitoring Committee (Served since 29 December 2015)

Educational qualifications and work experience same as previously described.

- Nobiru Adachi, as Member of Risk Monitoring Committee

Educational qualifications and work experience same as previously described.

- Haryanto, as Secretary and Member of Risk Monitoring Committee

Educational qualifications and work experience same as previously described.

- Sudarmadji Herry Sutrisno, as Member of Risk Monitoring Committee

Educational qualifications and work experience same as previously described.

### d. The Independency of Risk Monitoring Committee's Member

Among members of the Risk Monitoring Committee has no relationship in terms of financial, management, share ownership, and/or related to members of the Board of Commissioners, D irectors and/ or C ontrolling Shar eholders o r relationship w ith t he Bank, which could affect its ability to act independently.

### e. The duties and responsible of Risk Monitoring Committee

As an organ established to assist the Board of Commissioners in conducting active supervision o f r isk m anagement, t he R isk m onitoring C ommittee dut ies and responsibilities are as follows:

- 1) Evaluate t he r isk m anagement po licy pr oposed by t he B oard o f D irectors f or approval by the Board of Commissioners.
- 2) Evaluate the accountability to the Board of Commissioners on the implementation of risk management policies.
- 3) Monitor and e valuate the c ompatibility o f r isk m anagement po licies and t he implementation of the policy.
- 4) Monitor and e valuate the i mplementation o f t he R isk M anagement C ommittee and Risk Management Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
- 5) Review t he B ank's adh erence t o t he r ules an d l egislation i n t he f ield o f r isk management and other legislation relating to the activities of banks.
- 6) Provide input and r ecommendations to the Board of Commissioners and provide advice to the Board of Directors for information and/ or events which identified having potential or contain risks.





## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

x : Absent  
 - : Not yet assume the position of Chairman/Member of the Committee  
 \*) Effective on 29 December 2015 as Chairman Committee  
 \*\*) Effective on 26 May 2015 as Committee Member

Name	Serving Period	Numbers of Meeting	Attendance	% Attendance
Sigid Moerkardjono (President/Vice Commissioner-Independent)	01 January s/d 28 December 2015	12	12	100%
Benny Luhur (Chairman/Independent Commissioner)	29 December s/d 31 December 2015	-	-	-
Nobiru Adachi (Member/President Commissioner)	26 May s/d 31 December 2015	7	7	100%
Haryanto (Member/Independent Party)	01 January s/d 31 December 2015	12	12	100%
Sudarmadji Herry Sutrisno (Member/Independent Party)	01 January s/d 31 December 2015	12	10	83%

**g. The Work Program of Risk Monitoring Committee**

In 2015, the Risk Monitoring Committee has the following work program:

- 1) Discussion risk profile report by the Risk Management Unit.
- 2) Monitor and Evaluate the implementation of Risk Management Committee and Unit.
- 3) Participate in Meeting of The Board of Commissioners and Directors
- 4) Evaluate the Risk Management Policy Mutiara Bank
- 5) Evaluate the Risk that arise on the basis above eight types of risk in cases that occur
- 6) Prepare Work Plan Risk Monitoring Committee 2016.

**h. The Realization Work Plan / Implementation of Risk Monitoring Committee duties**

Risk Monitoring Committee's work program in 2015 has been realized/implemented with the following explanation:

- 1) In 2015 has implemented a meeting/conference with the Risk Management Unit (SKMR) 12 times. In the meeting also invited the Internal Audit Unit (SKAI) to discuss the monthly risk profile and conduct an evaluation of the suitability of the Risk Management Policy with the implementation and evaluation of the implementation of the Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (SKMR). In addition, to further emphasize the monitoring of credit risk, at each monthly meeting also presented on a credit portfolio and NPL J Trust Bank.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- 2) The work program on the evaluation of the implementation of risk management policy and a discussion of the risks that arise on the basis of eight types of risks, are discussed in Committee meetings which resulted in the conclusion and recommendation among other things the following:
  - Increased consumer loans, micro-credit development, improvement of the quality standard of analytical work, loan documentation, credit approval structure, determination of collectibility of the loans.
  - Standardization of the new Organizational Structure PT Bank JTrust Indonesia Tbk, implementation of SFAS No. 50-55, the effect of economic conditions on downgrades risk profile of the Bank.
  - Issue on the composition of Third Party Fund (DPK).
  - Required stress test to decrease the risk level of eight types of inherent risk and improvement of quality of risk management.
  - Compliance reporting both about the accuracy of the content delivery and reporting accuracy.
  - And others
- 3) Risk Monitoring Committee has followed and participated in the meeting of Board of Commissioners and Directors in 2015 as many as 12 times.

### 3.3. The Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to assist the Board of Commissioners with oversight of nomination and remuneration policy in accordance with the Regulation of Bank Indonesia and the FSA

#### a. The Charter/Guidelines of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee has a Charter/Code and Rules of Conduct of Nomination and Remuneration Committee, which regulates matters related to the implementation of tasks and responsibilities, to ensure, the implementation of meetings, tasks and reporting period. Charter/Code and Rules of Conduct of Nomination and Remuneration Committee periodically need to be assessed and evaluated for adequacy by the Board of Commissioners to ensure NRC functions can be carried out at an optimal level.

#### b. The Structure and Membership of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee's members consist of at least a n Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Officer in charge of Human Resources or an employee representative.

Based on BOC letter No. 12.02/S-KOM/Mutiara/V/2015 dated May 12, 2015 and was appointed by the Board of Directors with the Decree of the board letter No. 12.04/S.Kep-Dir-HCD/Mutiara/V/2015 dated May 12, 2015, The structure and membership of Nomination and Remuneration Committee has not met the following criteria:

1. \*) : Chairman/Member
2. Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division) : Secretary/Member
3. Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioner/Independent) : Member

\*) Will be applying after Annual GMS

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Based on BOC letter No.01.02/S-KOM/JTRUST/VI/2015 dated June 01, 2015 and was appointed by Board of Directors with the Decree of the board letter No.30.16/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2015 dated June 30, 2015 that will applicable on May 26, 2015, The structure and membership of Nomination and Remuneration Committee has met the following criteria:

1. - : Chairman/Member
2. Nobiru Adachi (President Commissioner) : Member
3. Sigid Moerkardjono (Vice President Commissioner/Independent) : Member
4. Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division) : Secretary/Member

Based on the Decree of the Board No.23.03/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/XII/2015 dated December 23, 2015 which is valid from December 23, 2015, the structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee has met the criteria to be as follows

- - :
- Chairman/Member
- Nobiru Adachi (President Commissioner)  
: Member
- Benny Luhur (Independent Commissioner)  
: Member
- Pahot Gumpar Hutasoit (Human Capital Division)  
: Secretary/Member

Since November 20, 2014, the position of Chairman of the Nomination and Remuneration has been 'Vacant'/empty because one independent commissioner who held the position of chairman resigned (as per the decision of the EGM), while only one independent Commissioner served concurrently as Chairman/Audit Committee and Risk Monitoring Committee Chairman. In 2016 the position of Chairman of the Nomination and Remuneration is expected to be filled by an Independent Commissioner selected.

### c. The Educational Qualification and Work Experience of Nomination and Remuneration Committee's Members

The Educational Qualification and Work Experience of Nomination and Remuneration Committee's Members PT Bank JTrust Indonesia Tbk is as follows:

- Sigid Moerkardjono, as Nomination and Remuneration Committee's Member (Served s/d December 22, 2015)  
Educational qualifications and work experience same as previously described.
- Nobiru Adachi, as Nomination and Remuneration Committee's Member  
Educational qualifications and work experience same as previously described.
- Pahot Gumpar Hutasoit, as Nomination and Remuneration Committee's Member  
Last Education: ST MIK B UDI L UHUR, Department of Information Management. Courses and Seminars have been followed, namely P MTK (education Integrated Computer Management), IZZI Computer Education on Management application and Oxford Course Indonesia, I & II. Experience working in PT Colorful Prime, General Division. Had a career with PT Bank Mutiara Tbk November 3, 1997 to October 1, 2013 as Human Capital Division Head of PT Bank Mutiara Tbk, which changed its name to PT Bank JTrust Indonesia Tbk since May 29, 2015.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

### d. The Independency of Nomination and Remuneration Committee's Members

The Nomination and Remuneration Committee's members have no relationship in terms of financial, management, share ownership, and/or related to members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

### e. The Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee perform their duties in order to support the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners. Duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee:

#### 1) Related with Nomination Policy:

- Develop and recommend a system and procedures and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- Provide recommendations regarding candidates for the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- Provide recommendations regarding the Independent Party will become a member of the Remuneration and Nomination Committee

#### 2) Related with Remuneration Policy:

- To evaluate the remuneration policy.
- Provide recommendations to the Board of Commissioner regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- Provide recommendations to the Board regarding the remuneration policy for Executive Officers and employees to be submitted to the Board of Directors.

#### 3) The Committee Shall Ensure that :

- The remuneration policy in accordance with the financial performance and reserve as regulated in the applicable legislation.
- The remuneration policy in accordance with the achievement of individual performance.
- The remuneration policy in accordance with equity "peer group".
- The remuneration policy in accordance with the consideration of the long term goals and strategies of the bank.

### f. The Meeting of Nomination and Remuneration Committee

- 1) Committee Meetings held according to the needs of the Bank.
- 2) The Nomination and Remuneration Committee Meetings can only be held if attended by at least 51% of the number of members including an Independent Commissioner and Executive Officers.
- 3) The decision of the committee meeting is carried out by consensus.
- 4) In the event that consensus does not occur, the decision is made by a majority vote.
- 5) The results of the Committee meeting shall be stated in the minutes of the meeting and documented properly.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 6) The dissenting opinion that occurs in the committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.

During 2015, The Nomination and Remuneration Committee was held five times of meetings, with attendance level as follows:

Komite Nominasi dan Remunerasi	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Hadir Σ
		Tgl. 6/1/15	Tgl. 11/3/15	Tgl. 31/3/15	Tgl. 14/4/15	Tgl. 26/5/15	Tgl. Juni	Tgl. Juli	Tgl. Agustus	Tgl. September	Tgl. Oktober	Tgl. November	Tgl. Desember	
Sigid Moerkardjono	HCMD	√	√	√	√	√								5
Nobiru Adachi *)	HCMD	-	-	-	-	√								1
Benny Luhur **)	HCMD	-	-	-	-	-								-
Pahot Gumpar Hutasoit	HCMD	√	√	√	√	√								5

Notes:  
 √ : Present                      HCMD : Human Capital Management Division  
 x : Absent  
 - : Not yet assume the position of Member of the Committee  
 \*) Effective on May 26, 2015 as Committee Member  
 \*\*) Effective on December 23, 2015 as Committee Member

Name	Serving Period	Number of Meeting	Attendance	% Attendance
Sigid Moerkardjono (Member/Vice President Commissioner-Independent)	01 January s/d 22 December 2015	5	5	100%
Nobiru Adachi (Member/Independent Commissioner)	26 May s/d 31 December 2015	1	1	100%
Benny Luhur (Member/Independent Commissioner)	23 December s/d 31 December 2015	-	-	-
Pahot Gumpar Hutasoit (Member/Executive Officer)	01 January s/d 31 December 2015	5	5	100%

g. The Work Program Nomination and Remuneration Committee

In 2015, The Nomination and Remuneration had work program as follows:

1. Compose remuneration plans and policy.
2. Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors, Commissioners and Executive Officers to be submitted to the AGM.
3. Compose and recommend a system and procedures and/ or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the AGM.
4. Conduct a review/evaluation of the implementation of remuneration policies.
5. Conduct a review/evaluation of KPI achievement of Directors in 2014 and 2015 to further filed/submitted to the Shareholders.

h. The Realization Work Program/implementation of Nomination and Remuneration duties

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

The Work Program of Nomination and Remuneration Committee in 2015 implemented with the explanation as follows:

- 1) The meeting with the Human Capital Management Division was held five times.
- 2) The work program of the Nomination and Remuneration Committee was discussed in Committee which covers the following matters:
  - Discussion on the proposed remuneration and facilities of Managing Director and Directors.
  - Discussion of the Board of Directors for the 2015 KPI.
  - Evaluate the performance of the Board of Directors in 2015 based on KPI.
  - Review of remuneration and appreciation of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  - Discussion of the improvement program of Human Capital Management Division (HCMD) of J Trust Bank.
  - Discussion of the training program and its development.
  - Discussion of changes in HCMD officials.
  - And others.

## **Committees under Board of Directors**

To enable the Bank to identify and manage all types of risks, in addition to the Risk Management Unit (SKMR) and the Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level, the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has also established committees under the Board of Directors in accordance with the organizational structure that serves to provide guidance/advice/recommendations on policy and oversight of the Bank's risk management. Recommendations from each committee are used as basis for the Board of decision making process.

The committees under the Board of Directors at PT Bank JTrust Indonesia Tbk are filled by members of the Board of Directors. The composition of the committees is prepared in accordance with the complexity of the tasks and responsibilities of the committee. The committees under the Board of Directors include

### **1. The Risk Management Committee**

#### **Structure and Membership**

Risk Management Committee is a committee within the Bank's Risk Management and it is non-structural, in the Head Office which formulates policies, oversee the implementation of policies, monitor progress and condition of the risk profile and provide suggestions and improvements in meeting at least held 1 (one) time per quarter. The formation of this committee is based on Bank Indonesia provisions concerning the implementation of Risk Management for Commercial Banks. In practice, the Risk Management Committee formed subcommittees each address specific area to oversee. The Sub-Committees are: Credit Risk Committee and Operational Risk Committee.

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01.17/S.Kep-Dir-RMD/Mutiara/IX/2014 dated September 1, 2014, the Structure and Membership of Risk Management Committee are as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## The membership structure of Risk Management Committee:

Chairman : President Director  
Vice President : Compliance & Legal Director  
Secretary : Head of Risk Management Division

### 1. Voting Member

#### a. Permanent Voting Member

- President Director/Direktur Utama
- Treasury & Institutional Banking Director
- Compliance & Legal Director
- EVP/ Micro & Consumer Business Director

#### b. Non-Permanent Voting Member

- EVP Small & Medium Business
- EVP Finance & Operation
- EVP Special Asset Management
- EVP Distribution Network
- EVP Human Capital

### 2. Contributing Non-Voting Member

#### a. Contributing Permanent Non-Voting Member

- Internal Audit Division Head
- Compliance Division Head
- Legal Division Head
- Accounting Division Head
- Operation Division Head
- Planning Performance Management Division Head
- Corporate Secretary Division Head
- Risk Management Division Head

#### b. Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member attending in accordance to agenda/topics.

- Head of Division and Area that related with their material is included as agenda of discussion in the committee meeting.

## Duties and Responsible

Duties and responsibilities of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director, Which at least include:

- Formulation of policies, strategies and guidelines for the implementation of Risk Management
- Ensure that implementation of Risk Management and System went effective.
- Evaluate improvement and condition of Risk Profile, as well as provides suggestions and measures improvement or refinement to discuss problems that are specific to a particular type of risk and need a verdict immediately with the RMC meetings are conducted is limited, or called sub-RMC.
- Determination (Justification) on matters related to business decisions that deviate from normal procedures (Irregularities).

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## The implementation of duties and Frequently of Meeting

During 2015, the Risk Management Committee has held 6 (six)times meetings and implemented various work programs and discussed the following agenda:

No.	Date	Agenda
1	21 April 2015	Discussion on Risk Profile Report- Quarter 1/2015 to the FSA
2	06July 2015	Review on PPK 2011 on BWMK
3	18September 2015	Presentation for Launching Plan- 'Kredit Pengusaha Unggulan'
4	25September 2015	Justification regarding irregularities- Lending PT JTrust Investment Indonesia (JTII)
5	20 October 2015	Discussion on Risk Profile Report - Quarter III/2015 to FSA
6	03November 2015	Presentation of four Eyes Principle Application

## 2. Asset & Liability Committee (ALCO)

According with the provisions of Bank Indonesia, the Bank forms its ALCO wherein the composition and size is aligned with the complexity of the Bank. ALCO Committee is a committee responsible for setting the interest rate policy and the Bank's asset and liability management strategy based on the principles of prudence and in accordance with applicable regulations.

### Structure and Membership

*Asset & Liability Committee (ALCO)* is no longer a sub-committee of the Risk Management Committee, but a separate committee responsible to the Board of Directors. In accordance with the Board of Directors Decree No. 01.63/S.Kep-DIR/TRD/JTRUST/X/2015 dated October 1, 2015, the structure and membership of ALCO is as follows

#### Members of ALCO:

Chairman : President Director  
Vice Chairman : Director/EVP Treasury & Institutional Banking  
Secretary : Head of Treasury Division

#### 1. Voting Member

##### a. Permanent Voting Member

- President Director
- Director/EVP Treasury & Institutional Banking
- Director /EVP Micro & Consumer Business
- EVP Distribution Network

##### b. Non-Permanent Voting Member

- EVP Risk Management Director
- EVP Finance & Operation

#### 2. Contributing Non-Voting Member

##### a. Contributing Permanent Non-Voting Member

- Compliance & Human Capital Director
- Information & Technology Director



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- Linkage Division Head
  - Retail Business Division Head
  - Retail Product & Network Division Head
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
  - Compliance & Legal Division Head
  - Planning Performance Management Division Head
- c. *Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member* attending in accordance to agenda/topics.
- Financial Control Division Head
  - Head of Division and Area that related with their material is included as agenda of discussion in the committee meeting.

## Duties and Responsible

*Asset & Liability Committee (ALCO)* has main duties as follows:

1. *Permanent Voting Member and Non-Permanent Voting Member*
  - As decision-making at 75% of permanent Voting Member with additional at least 1 (one) Non-Permanent Voting Member.
2. *Contributing Permanent Non-Voting Member and Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*
  - As decision-making at 50% of Contributing Permanent Non-Voting Member.
3. The main duties of each division (*Working Group Member*):
  - 1) **Risk Management Unit (SKMR)**

If necessary provide opinions, study on potential and risk mitigation on interest rate applies to third party funds which relates to the cost of funds and determining lending rates and margins assessed on market conditions and internal factors among others repricing gap analysis, Risk Premium and regular Risk Management report.
  - 2) **Planning Performance Management Division**

Performance Management Planning Division To support with the data required for ALCO presentation material for the meeting.
  - 3) **Treasury & Institutional Banking Division**
    - a. Prepare treasury-related data such as BI Rate, Interest Rate Interbank, and others
    - b. Follow up the result of ALCO meeting such as:
      - Circular letter on Interest Rates Fund Transfer Pricing (FTP)
      - Circular letter on Funding and Lending Interest Rates
      - Funding strategy, funding and lending targets on a monthly basis
      - Other issues decided in ALCO meeting
      - ALCO Minutes of meeting and documentation
  - 4) **Retail Product & Network Division**

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- a. Prepare data on interest rate comparison for Third Party Fund (DPK) of competitors bank of the same tier and state banks.
- b. Prepare funding data projection for least one month ahead to the next and/or (if necessary) and the target for the month.
- c. Report realization on the funding results of previous ALCO
- d. Prepare data on interest rates for CASA, the cost of fees and fee-based income as well as new products

### 5) Retail Business, Divisi Linkage Division

- a. Prepare comparative lending rate of competitor banks of the same tier and state banks.
- b. Prepare lending projection at least for the next one month to the next (if necessary) and target for the month.
- c. Prepare data on interest rates for lending as well as the realization of the previous ALCO.

### 6) Compliance & Legal Division

If necessary, provide an opinion on the validity and scope of the related regulations in determining and managing interest rates. Ensure that compliance must be maintained in accordance with the internal and external provisions.

### The implementation of duties and Frequency of Meetings

During 2015, *Asset & Liability Committee*(ALCO)has held 12 (twelve)times meetings and perform various work programs and discussed the following agenda

No	Date	Agenda
1	8 January 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on January 13, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Januari 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Januari 2015
2	12 February 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on February 16, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 Februari 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 Februari 2015
3	12 March 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on March 16, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015
4	14 April 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on April 17, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 April 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 April 2015
5	21 May 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on May 22, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 22 Mei 2015 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 22 Mei 2015
6	11 June 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on June 15, 2015 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 15 Juni 2015

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 15 Juni 2015
7	8 July 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on July 13, 2015 2. Change of Interest Rate effective on July 13, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective on January 13, 2015
8	13 August 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on August 18, 2015 2. Change of Interest Rate effective on August 18, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective on August 18, 2015
9	11 September 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on September 16, 2015 2. Change of Interest Rate effective on September 16, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective on September 16, 2015
10	9 October 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on October 13, 2015 2. Change of Interest Rate effective on October 13, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective Oktober 13, 2015
11	12 November 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on November 16, 2015 2. Change of Interest Rate effective on November 16, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective November 16, 2015
12	11 December 2015	1. Calculation of Funds Transfer Pricing (FTP) starting on December 11, 2015 2. Change of Interest Rate effective on December 11, 2015 3. Change of Deposit Interest Rate effective Desember 11, 2015

### 3. IT Steering Committee

Information Technology Steering Committee assists the Board of Directors in formulating and establishing strategic plans and policies of each stage of the use of information technology covering the process of planning, procurement, development, operation, maintenance up to decommissioning and deletion of information technology resources, in order to improve the effectiveness and efficiency of data processing operations of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, and provide correct result, accurate, timely, and ensure confidentiality of information.

#### Structure and Membership

Referring to the changes in the organizational structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk due to the improvement process of the organization in implementing the principles of good corporate governance and adjusting to the current conditions of the Bank's business, changes was made in structure and composition of Technology Steering Committee in accordance with Board of Directors Decree No. 30.61/S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2015 dated November 30, 2015 as follows:

### 4. Members of IT Steering Committee

1. Chairman, and as Member : Managing Director Information Technology
2. Secretary, and as Member : Head of Information Technology Division

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 3. Members :

- Managing Director Risk & Compliance
- Managing Director Corporate Business
- EVP Finance & Operation
- EVP Retail & Network
- Head of Risk Management Unit Division
- Head of Compliance & Legal Division
- Head of Operation Division
- Head of Financial Control Division
- Head of Corporate Secretary Division

## Duties and Responsible

- 1) Provide recommendations to the Board of Directors related to the Information Technology Strategic Plan in line with the strategic plans at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Provide recommendations to the Board of Directors related to the suitability of Information Technology (IT) projects approved by the Information Technology Strategic Plan formulated by PT Bank JTrust Indonesia Tbk and determine status of priority projects of Information Technology based on significance of impact on the Bank's operations,
- 3) Conduct periodic review and evaluation of the IT project implementation to ensure alignment with the original plan
- 4) Provide recommendations to the Board of Directors related to the compatibility between the implementation of IT projects with the agreed project plan, in line with the Bank's Business Plan and constantly working on IT investment that adds value to the Bank.
- 5) Provide recommendations to the Board of Directors of technologies that fit the needs of management information systems and business activities, where the recommendations made are based on efficiency and effectiveness as follows:
  - a. The implementation plan (road map) to meet the needs of information technology supporting the Bank's business strategy. The road map is composed of current state, the future state as well as measures to be undertaken to achieve the future state.
  - b. Resources needed
  - c. Advantage/benefits that will be acquired when the plans are implemented
- 6) Provide recommendations to the Board of Directors related with effectiveness of measures to minimize the investment risk on the Bank's Information Technology sector so that these investments contribute to achieving the Bank's business objectives.
- 7) Provide recommendations to the Board of Directors related to the activities of supervision and monitoring of the performance of Information Technology and improvement efforts
- 8) Assist the Board of Directors in determining the application of the principles of checks and safeguards against the use of systems and applications that contain high risk, especially regarding technology network topology, database, microcomputer, and data communications.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- 9) Provide recommendations to the Board of Directors on the efforts to resolve effectively, efficiently and timely, the various issues related to Information Technology, which are unsolved by the users and providers.
- 10) Assist the Board of Directors in setting policy in the use of Information Technology to meet the needs and financial capabilities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 11) Assist the Board of Directors in setting management control includes planning, setting policy, standards and procedures, and organizations related to the use of Information Technology at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 12) Assist the Board of Directors in setting the control system to the application system that will use information technology which includes the procurement, development, operation and maintenance.
- 13) Provide recommendations to the Board of Directors in establishing the vendor related to the implementation of Information Technology submitted to a third party, on the basis of due diligence by evaluating and assessing the information relating to service providers include:
  - a. The existence and history of the company.
  - b. Qualifications, background and reputation of the owner of the company.
  - c. Another company that uses the same service from a provider as a reference.
  - d. Financial condition, including a review of the audited financial statements.
  - e. The ability and effectiveness of services, including after-sales support.
  - f. Technology and system architecture.
  - g. Internal control environment, history of security and audit coverage.
  - h. Compliance with laws and regulations.
  - i. Confidence and success in dealing with sub-contractors.
  - j. Insurance.
  - k. The ability to provide disaster recovery and business continuity plan.
  - l. Application of risk management.
  - m. Report the results of an independent party
- 14) Conduct analysis on the proposed development and or purchase applications/software submitted by End User/work units
- 15) The analysis referred in letter 14) over at least consist of:
  - The purpose of the development and/or purchase Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
  - Level of needs and interests of the Bank to perform the development and/ or purchase
  - Compliance with the Bank's Annual Work Plan
  - Safeguards features and controls contained in the application/software, hardware, and the communication network
  - *Maintenance and support* from vendors
  - Aspects of costs and benefit
  - Adequate policies and procedures in the implementation of information technology by third parties.
- 16) Make recommendations to the Board of Directors as a result of the analysis carried out in item 14) and 15)
- 17) Coordinate and communicate to the related units of the Strategic Plan for Information Technology ( Information Technology Strategic Plan) that support the strategic activities of the Bank, which is further described in the Business Plan.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- 18) Conduct analysis of developments and changes in information technology systems, especially in banking.
- 19) Provide recommendations to the Board of Directors related to the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC), where the availability of alternate facilities during Data Center (Data Center) impaired or can not function and recommend the need for periodic testing in support of the sustainability of business activities ( Business Continuity Plan).
- 20) Assess the effectiveness of risk mitigation plan for the implementation of IT investment and ensure the contribution of investment to the Bank's business plan
- 21) Conduct a self-assessment for the effective functioning of the Information Technology Steering Committee

### The implementation of duties and Drequently of Meetings

During 2015, IT Steering Committee has held 7 (seven) times meetings and perform many work plan and discussed as follows:

No	Date	Agenda
1	13 March 2015	Disaster Recovery Center (DRC) outsourcing and Domain Name
2	20 April 2015	Audit on the development of internet banking service system.
3	05 May 2015	Procurement of chip card, Human Resources Information System and SKN Hardware.
4	03 July 2015	Procurement of Human Resources Information System, Microsoft SAM and MPN Gen
5	31 July 2015	Procurement of Fixed Asset application, Internet Banking Firewall DRC, MPN Gen2, core banking replacement.
6	31 August 2015	Procurement of change request (CR), featuring probability of default (PD), Virtual Accounts and Internal IT Risk Assessment.
7	04 December 2015	Procurement of Central Bank Reporting Application, Active Directory Solution, Anti Virus, Web site enhancement, IBM maintenance and Garoon scheduler applications.

### 5. HR Committee

#### Structure and Membership

The activities of Human Resources Committee have been implemented and aligned with the changes in the organizational structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk wherein members of the Human Resources Committee based on Decree (SK) No.01.03 BOD/DIR S.Kep HCMD/Mutiara/IX/2014 dated September 1, 2014 will be adjusted to changes in the organizational structure PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

According to Board of Directors Decree, the composition of the Human Resources Committee is as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Chairman : President Director  
 Members : Compliance & Legal Director  
           Treasury & Institutional Banking Director  
           Micro & Consumer Business Director  
           EVP Human Capital  
           Head of Human Capital Division

## Duties and Responsible

In essence, the Human Resources Committee was formed in order to provide recommendations to the Board of Directors associated with the strategic plan of the human resources employment in line with the Bank's strategic plan, among others:

- Ensure Human Resources Policy alignment with the strategy and objectives of the company.
- Establish strategy to sustain and develop the Human Resources quality.
- Discuss and enhance variety of important policies related to Human Resources.
- Establish a program to be executed with regards to Human Resources policies.

## The implementation of Duties and Frequently Meeting

During 2015, Human Resources has held 12 (twelve) times meeting and implemented work plan and discuss about agenda as follows:

No	Date	Agenda
1	08 January 2015	Proposal for increase in COLA, Proposal for transfer of employees and others
2	27 January 2015	Proposal for candidate of the head of the Division of Retail & Medium Business; Proposal for candidate of the EVP of Distribution Network; Proposal for allowances for transferred employees; policy changes and human resources memo; Proposal for scale of salary ranges in 2015
3	12 March 2015	Proposal for revoking Memo from the Board of Directors regarding Education Allowance; Proposal for candidate of Sub Branch office Kemang; Proposal for promotion /rotation/ transfer at the level of Executives and Dept. Head.
4	14 April 2015	Proposal for promotion/rotation/transfer at the level of Executives and others.
5	05 May 2015	Proposal for the use of Human Capital consultant; Proposal for Special Hire recruitment; Proposal for the extension of employee hospitalization insurance; and others.
6	06 May 2015	Follow-up the results of special audit on integrity violation of Head of Branch (Ms TA).
7	22 May 2015	Organizational Structure of the Directorate of Asset Recovery; the transfer of Head of Branch / Sub Branch of Klender, Jatinegara, Jambi, Palembang and Green Ville; and many others.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

8	26 June 2015	Proposal of Head of the Dept. of UKPN of the Head Office (KYC/AML), candidate of the Dept. Head of Product Development in the SME Division; Candidate of the Division Head of SME Division; candidate for the Branch/Sub Branch Manager of Puri Indah and Greenville; expiration of the Contract period of the advisor/expert staff for NPL settlement
9	21 August 2015	Candidate for Branch Manager of Palembang Kebumen and extension of the contract of previous managers
10	03 December 2015	Candidate for Business Development Advisor
11	10 December 2015	Candidate for Bandung Deputy Branch Manager; Proposed candidates for Senior Dept. Credit Risk Review Officer for Retail
12	28 December 2015	Proposal for the appointment of Acting Operation Division Head and concurrently hold the position of Financial Control Division, SKMR Division Head, Credit Approval Officer (PMK) at the level of Division Head, Anti-Fraud Division Head and concurrently as Acting Human Capital Division Head.

### 6. Credit Committee

The credit process based on prudent principles and application of the four eye principle is the key underlying foundation in the decision making on loans where every decision is made by two independent parties with authority, from the business unit or the Special Asset Management (SAM) in the one hand, and Credit Risk Reviewers (CRR) on the other

Credit initiation and credit proposals are originated from the business unit. In the review process, the business unit may request the Credit Risk Reviewers to conduct project visits (OTS) to assess complex credit application. Proposal or credit initiation is made by business unit in accordance with the Bank's Credit Manual bank and other provisions such as the procedure memorandum governing SOP on credit

Credit Approval Process based on the four-eye is performed by the credit committee with the appropriate authority limit.

Credit Committee is a committee of Bank's Officials who have the authority to decide on credit or loan restructuring representing business units that represent functions and Credit Risk Reviewer with loan approval authority who has the ability, competence and integrity

#### Structure and Membership

Credit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk comprises of Credit Officials (voting member), those proposed and non-voting member

In addition to the appropriate credit limit, the credit authority holders (PKK) are individuals who are given the authority to decide on credit business units under the Managing Director of Business/EVP Business and Credit Risk Reviewers under the Managing



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Director/EVP Risk Management with the limit set by the Board of Directors under the framework of the four eye principles credit process.

Therefore, the appropriate credit limit stipulated in the Credit Manual applicable from December 17, 2015 (Ref. SK Directors No. 17.11/S.Kep-DIR-SKMR/JTRUST/XII/2015 dated December 17, 2015), the authority of the Credit Committee of PT JTrust Bank Indonesia Tbk consist of:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Category A Credit Committee

Category A Credit Committee is the highest authority in the structure to decide on credit and/or debt restructuring, must be at least by two parties, i.e of Directors/EVP business unit/SAM and Directors/EVP Risk Management who first review the recommendation and the committee responsible for providing the final credit decision in line with the appropriate authority limit through the mechanism of the Credit Committee Meeting (RKK).

The Credit Committees' members of Category A approval consists of Credit Committee Category A1, Credit Committee Category A2 and Credit Committee Category A3, which differs based on the credit authority as follows:

A Category				<u>Cat</u> <u>ego</u> <u>ry</u> <u>B</u> <u>Cre</u> <u>dit</u> <u>Co</u> <u>mm</u>
Chairman	A1	A2	A3	
President Director	> Rp.20 Billion			
MD Risk Management		> Rp.10 Billions/d.Rp.20 Billion		
Director			> Rp.2 Billion s/d.Rp.10 Billion	

## ittee

An institution that decides on credit level two for Division Head limit consists of two parties, namely from the business unit/SAM and Credit Risk Reviewers that provides recommendations to the credit proposal from the first level (on the proposed credit of the first degree (minimum consist of two parties, business unit/SAM and credit reviewer), who review and make early decision on the viability of credit to be proposed to the Category A Credit Committee through the Credit Committee Meeting (RKK) mechanism

Committee at Division Head level in charge of credit decided in accordance with the limit authority or when recommending to the Credit Committee Category A through the Credit Committee Meeting mechanism

When acting as recommending, the party proposed may or may not have the authority to decide the credit.

Limit of Authority for Credit Approval - B Category			
Credit Segment	Corporate & Linkage Business	Retail - SME, Consumer & Micro	SAM, Treasury & Institutional
Business Linkage Division	s/d Rp.2,0 Billion	-	-
Corporate/Commercial Business Division	s/d Rp.2,0 Billion	-	-

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Retail Business Division	-	s/d Rp.2,0 Billion	-
Treasury & Institutional Division	-	-	s/d Rp.2,0 Billion
Special Asset Management Desk	-	-	-
PKK CRR equal level to Division Head	s/d Rp.2,0 Billion	s/d Rp.2,0 Billion	s/d Rp.2,0 Billion

The authority limit for credit decision on segment Micro, SME and Consumer is divided into categories AA, BB and CC, to be reviewed periodically as necessary at least every six months as follows:

### Category AA:

Credit authority holders (PKK) for SME and Consumer up to Rp2 billion, and the PKK for micro segment of up to 300 million. PKK of Credit Risk Reviewer with an equivalent authority of PKK business unit.

### Category BB:

Credit authority holders (PKK) for SME and Consumer up to Rp1 billion, and the PKK for micro segment of up to Rp200 million. PKK of Credit Risk Reviewer with equivalent authority of PKK business unit.

### Category CC:

Credit authority holders (PKK) for SME and Consumer up to Rp500 million, and the PKK for micro segment to Rp100 million. PKK of Credit Risk Reviewer with equivalent authority of PKK business unit.

Credit Authority Holder (PKK)	Category-Limit Authorized to Cut Off Credit		
	AA	BB	CC
Segment	AA	BB	CC
Retail-SME&Consumer	>Rp 1 billion to Rp 2 billion	>Rp 500million to Rp 1 billion	Up to 500 million
Retail-Micro	>Rp 200 million to Rp300 billion	>Rp100 billion to Rp 200 billion	Up to Rp 100 billion

While members of Credit Committee in accordance to limit are as follows:

Kategori	Voting Member	Proposed by	Non-Voting Member
A1	President Director and two (2) Directors, namely MD/EVP of Corporate Business, Director/EVP of Risk Management or two (2) Director of one of the Director/EVP of Risk + 1 (one) EVP of Business (excluding EVP of Treasury and aside of Director of Compliance & Legal. E VP can be appointed from E VP of Distribution Network	.Head of Corporate-Commercial Business Division/Head of SME/Retail, Consumer & Micro BusinessDivision/Linkage Business Division Head/Head of Treasury & Institutional Banking accompanied by Head of Commercial RiskDivision/CRR Division, PKK Risk Senior Staff Risk Reviewers as recommending. In the case of the Head of Division Business Unit (proposer) was unable to	Compliance & Legal Director or VP Finance & Operations, accompanied by: Operation Division Chief/Deputy Compliance & Legal Division Head/Deputy

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		attend, can be represented by deputy (vice) + 1 (one) Department Head proposer.	
A2	Consisting of at least two (2) Director (MD/EVP of Corporate Business/EVP of Sponsor) and Director/EVP of Risk Management (except the Director of Compliance & Legal) or 1 (one) Director/ EVP of Risk Management + 1 (one) EVP of Business Sponsor	Head of Corporate-Commercial Business Division/Head of SME/Retail, Consumer & Micro Business Division/Linkage Business Division Head/Head of Treasury & Institutional Banking accompanied by Head of Commercial Risk Division/CRR Division, PKK Risk Senior Staff Risk Reviewers as recommending. In the case of the Head of Division Business Unit (proposer) was unable to attend, can be represented by deputy (vice) + 1 (one) Department Head proposer.	<i>Compliance &amp; Legal Division or EVP Finance &amp; Operation, accompanied by: Head of Operation/Deputy Division Head of Compliance &amp; Legal/Deputy Division</i>
A3	Consisting of at least 1 (one) Director/EVP Sponsor. or 1 (one) Director/EVP of Risk + 1 (one) Director/EVP of Business who is not proposer	Head of Commercial Business Division/Head of SME & Micro Business Division/Linkage Business Division Head/Head of Treasury & Institutional Banking accompanied by Head of Commercial Risk Division/CRR Division, PKK Risk Senior Staff Risk Reviewers as recommending or Head of Commercial Business Division/Head of SME & Micro Business Division/Linkage Business Division Head/Head of Treasury & Institutional Banking, accompanied by the Head of Regional Office (Regional Offices) + Account Officer, accompanied by Head of Commercial Risk Division/CRR Division, PKK Risk Senior Staff Risk Reviewers as recommending	Head of Operation/Deputy Division Head of Compliance & Legal/Deputy Division
B	Business Credit Officer and Credit Risk Credit officer	Account Officer and/or the Team Leader and the Head of the Branch or Regional Office Head and Reviewer.	Without Non Voting Member
PKK AA	Business Credit Officer and Credit Risk Credit Officer	Account Officer and/or the Team Leader and the Head of the Branch or Regional Office Head and Reviewer	Without Non Voting Member
PKK BB	Business Credit Officer and Credit Risk Credit Officer.	Account Officer and/or the Team Leader and the Head of the Branch or Regional Office Head and Reviewer.	Without Non Voting Member
PKK CC	Business Credit Officer and Credit Risk Credit Officer	Account Officer and/or the Team Leader and the Head of the Branch or Regional Office Head and Reviewer	Without Non Voting Member

Credit Committee Meeting declared a quorum if attended by the recommending Official, Voting Member and Non-Voting Member.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## **Duties and Responsibility**

The credit Committee is responsible for reviewing and giving decision on the application/petition for credit facilities based on the limits of the authority to cut off credit (BWMK) in fulfilling the prudential principle of granting healthy credit, among others include solicitation of new credit facilities, the addition of facilities or credit plafond, the extension of credit facilities, changes in credit facilities, the replacement of collateral credit facilities, credit facility period change/Rescheduling, restructuring of troubled credits, and so on.

Credit decision to Limit authority to cut off the credit (BWMK) is implemented based on the credit Committee Meetings (RKK) and the holder of the credit decision (PKK) are based on Bank Credit Policy and Bank Credit Implementation Guide.

## **The implementation of duties and Meeting Frequently**

Throughout 2015, Credit Committee has conducted meetings according to the needs and the loan request. The next program to undertake is to ensure credit decisions in the Credit Committee Meeting (RKK) and the credit authority holders (PKK) based on limits Authority to Cut Off Credit (BWMK) had already complied with the guidelines on Bank Credit Policy and Bank Credit Implementation Guide of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**CHAPTER IV  
THE IMPLEMENTATION OF BANK COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL  
AND EXTERNAL AUDIT**

**4.1. Implementation of Bank Compliance Function**

Implementation of Bank Compliance Function guided by Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/2/PBI/2011 dated January 12, 2011 on "Implementation of Compliance Function on Commercial Bank" valid from September 1, 2011.

Compliance function is a series of actions or steps that are ex-ante (preventive) to:

- a. Embodies the implementation of compliance culture at all levels of the organization and bank business activities.
- b. Managing Compliance Risks faced by Bank.
- c. Ensure that policies, regulations, systems and procedures, as well as the business activities of the Bank in accordance with the provisions of Bank Indonesia/Financial Services Authority and the legislation in force.
- d. Ensuring compliance of the Bank over the commitments made by Bank to Bank Indonesia/Financial Services Authority and/ or other competent supervisory authority.

In running his business, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk has a strong commitment to comply with the provisions of Bank Indonesia and other prevailing laws. Permanent compliance function is an important element in minimize the risk of compliance and build a culture of compliance. In order that the supervisory function is active. Active supervision is exercised in the form of another description, approval of policies and procedures, reporting in periodic, demand an explanation. The compliance function is ex-ante should be done thoroughly, i.e. not only through the availability of the policy/regulation, but also prevention directly by the perpetrators. This can happen if you've already created celebrating the internalization of the overall compliance for all employees so that employees are also expected to have awareness of risks in each unit of work.

Development challenges and risks of the bank business is getting bigger, then needed a variety of efforts to mitigate those risks. These efforts can be ex-ante or ex-post. Efforts that are ex-ante is very necessary to reduce or minimize the potential risk of business activities of the bank, which is expected to occur, therefore PT Bank JTrust Indonesia, Tbk continually strives to enhance the roles and functions of the compliance work unit, as well as compliance in risk management compliance.

**The role of the Board of Commissioners and Board of Directors**

The board of commissioners shall conduct active supervision on the implementation of the compliance function in the Bank, with:

- a. Evaluate the implementation of Compliance Function Bank at least 2 (two) times in one year through the report of the task submitted by the Director overseeing the compliance function and report on the implementation of the Compliance Function of the Bank submitted by the Division/Work Unit Compliance. To carry out a proper evaluation and accurate can be done through meetings, whether the meeting of the

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Board of Commissioners, Board of Directors meeting or Committee meeting-committee

- b. Based on evaluation of the implementation compliance function, the Board of Commissioners deliver recommendation to improve the quality of the Bank Compliance Function to the President Director with a copy to the Director of Compliance Function.

## **Board of Directors shall :**

- 1) Implement and grow the Compliance Culture at all levels of the organization and activities of the Bank.
- 2) Ensure the implementation of Bank Compliance Function.

## **Compliance Framework**

Compliance framework presents a policy and a guideline/standard Operational procedure compliance and supervision for banks. Policies and compliance guidelines aimed to ensure adherence to laws, regulations, and legislation, internal policies and guidelines of ethics code bank behavior. Policies and guidelines are drafted in accordance with the regulations of bank Number 13/2/PBI/2011 January 12, 2011 about the implementation of compliance functions of commercial banks, and best practice in order to identify, assess, monitor and control compliance risks continuously throughout the business activities and the activities of the bank.

Bank carrying out measures/strategic initiatives as a benchmark for the implementation of the mitigation of compliance risk in line with the development, the challenges and risks of the Bank that are increasingly large and complex. Efforts being made can be ex-ante and ex-post.

The compliance function as well as the role of the compliance work unit in the future in addition to the abundance of capabilities which are monitoring ex-ante as well as do risk management Compliance sustainable in harmony with the application of risk management in the Bank as a whole.

## **Key Success and Challenges in the Implementation of Compliance Function**

JTrust Indonesia Tbk PT Bank constantly strives to improve the synergy between the compliance function and business functions to be well-maintained and continues to run, if a series of key success factors can be fully met, they are:

### **• Start From The Top**

The high commitment from the Board of Commissioners, Board of Directors, including Executive Officers of the organization. The existence of policies and compliance procedures are fully adhered at all levels of management in accordance with the duties, responsibilities and authority of each.

### **• Compliance Culture**

The existence of 'compliance' culture across the ranks of the employees and management is one of the critical success factors in maintaining synergy between the compliance function and the business function. In concrete, to ensure that compliance is embedded as one of the element of corporate culture, it is necessary to set forth in the Bank's various provisions and internal application i.e. rules in good corporate

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

governance, code of conduct, as well as other compliance policies and procedures which in turn enabling the implementation to be monitored and improved.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- **Compliance Procedure and Policy in Place**

The existence of policy and formal compliance procedures is a key success due to its ability in reflecting the readiness and sincerity of an organization to implement the compliance function as mandated by regulator. The policy and compliance procedures must clearly illustrating the job description, responsibility and compliance function authority in managing risks faced by organization, including procedures in managing main risks issue, covering identification process, measurement, evaluation and compliance risk mitigation.

- **People and Infrastructure**

In the end, the key success factors on the implementation of compliance function in an organization lies on the existence of human resources and other infrastructures such as information system technology, both for reporting purposes or data storage purpose. In this case, it is important to obtain human resources with certain conditions, such as multi-talent individual or a person with excellent skills in memorizing such a large scope of compliance issues and constantly changing dynamically.

## **Compliance Director**

PBI No: 13/2/PBI/2011 as an enhanced version of PBI No: 1/6/PBI/1999 is a policy issued by Bank of Indonesia (BI) covering enhancement/refinement in terms of banking organization, duties and responsibility of all parties who are linked to compliance function implementation, based on risk management framework, to support the creation of compliance culture. According to the regulation, mission and responsibility possessed by compliance director are:

- a) Formulate strategy to support the creation of Bank compliance culture.
- b) Review and propose compliance policy or compliance principles to be set by board of directors.
- c) Establish system and compliance procedures that will be used to arrange terms and bank internal guide.
- d) Communicate policy and procedure to the working unit/employee through an official letter or internal memo and internal email.
- e) Ensure that all the policies, terms, systems, procedures and business activities done by Bank is already in line with the provisions from Bank Indonesia according to the bank prudential principle, Good Corporate Governance, and the legislation applied.
- f) Minimizing bank compliance risk.
- g) Conducting various improvement and enhancement on internal provisions, reporting mechanism system, and internal controlling.
- h) Conducting a precautionary measure to avoid any irrelevancy policy by the Board of Directors with the provisions from Bank Indonesia and the Indonesian legislation.
- i) Execute other duties in relation to the compliance function, such as monitoring and keeping the bank compliance against the commitment established by bank to the Bank Indonesia or another authorized supervisor.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

All duties and responsibilities are not to obliterate all the rights and obligations of Compliance Director as a member of board of bank directors, as stated in constitution of limited liability companies.

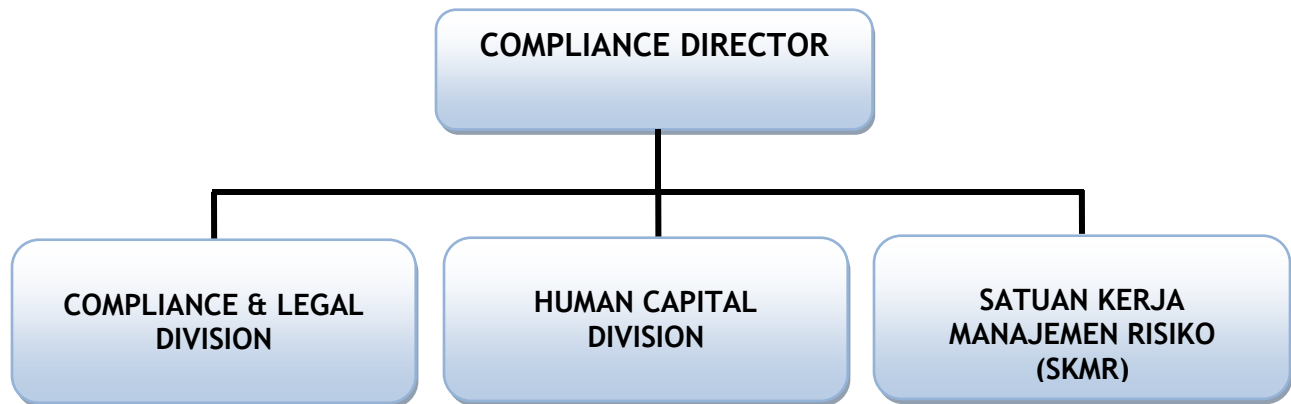
In order to uphold the implementation of prudential principles in managing bank and to ensure that bank obey all the regulations by Bank Indonesia and the law in force, PT Bank Mutiara Tbk already appointed a Compliance Director, which is a member of Board of Directors that the appointment already meet the independency requirements and other criteria as listed below:

1. Have no financial relations, management, stock ownership, and/ or family relationship up to second generation of the member of board of commissioners, directors, and/ or stockholder controller or relationship with bank that could affect his/her abilities to act independently.
2. There is no double position with Main Director and/ or Vice Main Director.
3. Not supervising functions as follows:
  - a. Business and operational (collecting activities and/ or fund distribution and agencies activity).
  - b. Risk management that plays role as decision-maker in Bank activity business.
  - c. Treasury.
  - d. Finance and accounting.
  - e. Logistics and procurement goods/services.
  - f. Technology information.
  - g. Internal audit.
4. Having integrity and adequate knowledge concerning provisions from Bank Indonesia and the constitutions.

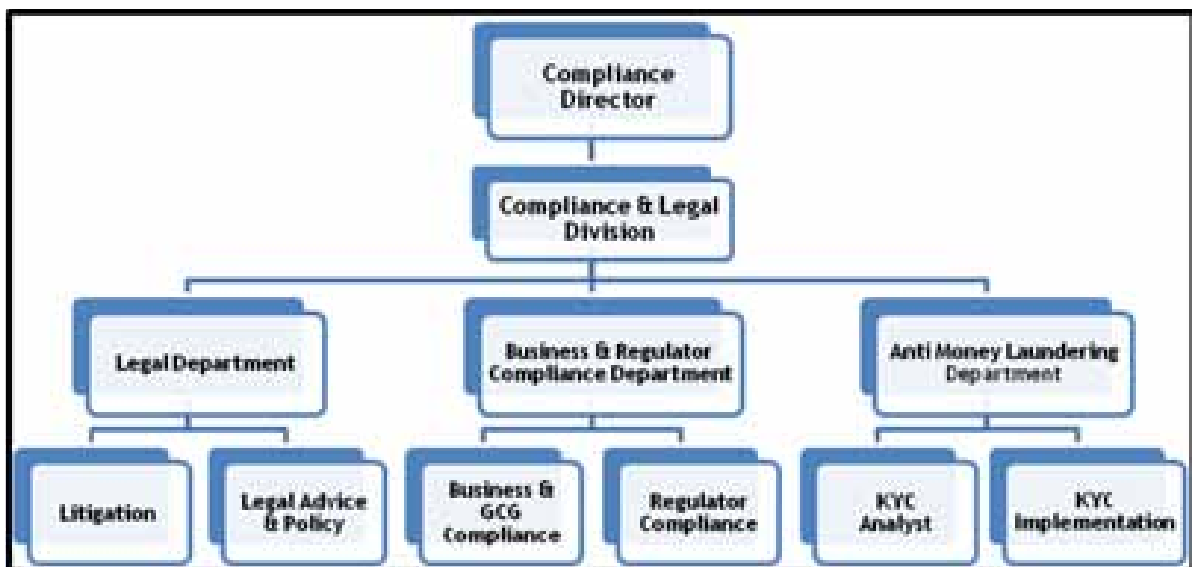
Unit organization structures under Compliance Director in 2015, are as follows:

- Decree of Directors (SK) No.21.01/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/I/ 2015 dated January 21st, 2015, Director of Compliance oversees the Compliance Division (CPD), Legal Division (LGD), and Human Capital Division.
- Amended by Decree of Directors No.13.09/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/VII/2015 dated July 13<sup>rd</sup>, 2015, the Director of Compliance Division remains in charge of Compliance Division (CPD), Legal Division (LGD), and Human Capital Division (HCD).
- Last modified with Decree of Directors (SK) No.01.06/S.Kep-DIR-HCD/JTrust/X/2015 dated October 1<sup>st</sup>, 2015, where LGD combined with CPD becoming Compliance & Legal Division (CPD), so that the Director of Compliance oversees the **Compliance & Legal Division (CPD), Human Capital Division (HCD), and the Risk Management Unit (SKMR)**, and are shown in the following illustrations as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



## Compliance & Legal Division Organization Structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk



**Note :**

Compliance & Legal Division Organization Structure of PT Bank J Trust Indonesia Tbk based on Memo No.331/MEMO/CPD/IX/2015 dated September 18<sup>th</sup> 2015.

In carrying out its duties and responsibilities, the Director of compliance assisted by the Compliance & Legal Division Head and Compliance & Legal Deputy Division Head that are in charge of the Unit of Work Legal, Compliance Unit (includes Unit of Work Business & GCG Compliance, and Regulatory Compliance), as well as the Anti-Money Laundering Unit of Work.

### Compliance Division Head

In accordance with the provisions from Bank Indonesia, Compliance Division Head of PT Bank Mutiara Tbk must already meet the criteria requirement as follows:

- a. Fulfilling independency requirements
- b. Understanding the Bank Indonesia regulations and the prevailing legislation.
- c. Does not carrying out other duties beyond compliance function or does not hold any other structural position.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

d. Have a strong commitment to implement and develop compliance culture.

The appointment, discharge, or replacement of Compliance Division Head has already reported to the Bank Indonesia/OJK, refer to reporting requirement for Executive Officers of the Commercial Bank.

## Compliance Division/Working Unit

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has established a Compliance Unit with a division-level position and is responsible to the Director of compliance function as independent units, namely:

- a. Formed independently on the headquarter, but doing its duties on all of bank networks.
- b. Free from other units influences.
- c. Have direct access to the director of compliance function.

In carrying out their compliance function responsibilities, Officers and staff of the Compliance Division/Work Unit are not assigned in position against conflict of interest.

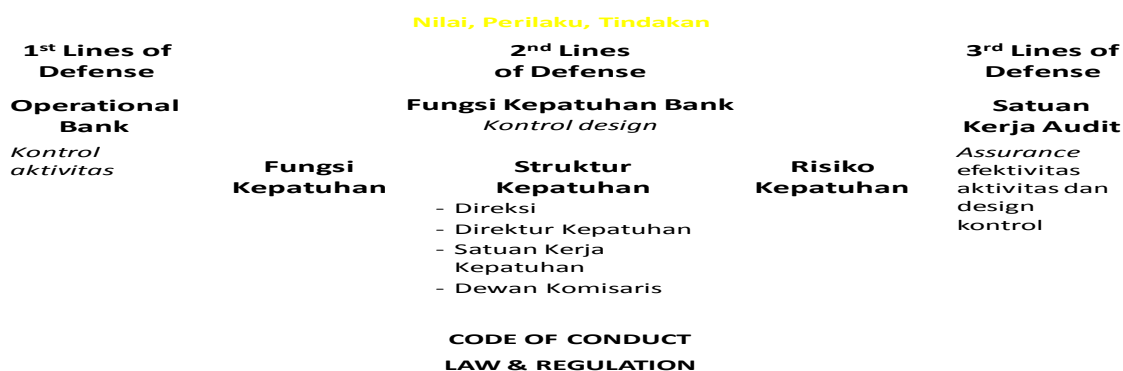
In implementing the Bank's compliance function, the duties and responsibilities of Compliance Division include:

- a. Creating steps to support the creation of compliance culture in all Bank's business activities in every level of the organization.
- b. Coordinating with Risk Management Unit to perform identification, measurement, monitoring, and control of the Compliance Risk referring to Bank Indonesia Regulation concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
- c. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, regulations, systems or procedures of the Bank with the prevailing legislation.
- d. Review and recommend an update and refinement of policies, regulations, systems and procedures to comply with Bank Indonesia regulations and the prevailing legislation.
- e. Ensuring that policies, regulations, systems and procedures, as well as the business activities of the Bank are in accordance with Bank Indonesia regulations and the prevailing legislation.
- f. Performing other tasks related to the compliance function, such as:
  - Ensure Bank commitment compliance to Bank Indonesia non supervisory authorities.
  - Socialization/training to all Bank employees concerning provision applied in relation to the compliance function.
  - Act as contact person for any Bank compliance issues both for internal and external parties.
  - Conducting Compliance checklist on-site for activities related with opening licensing /relocation/closure and enhancement network office status.

## **Compliance Risk Management Framework**

Compliance risk management framework conducted through approachment based on 3 (three) defense line they are:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



- **First Line of Defense**, a role represented by the Business Units and Support Units that serves as the operating and risk-taking and risk owner unit, where they pursue business growth and make decisions which take into account risk aspects.
- **Second Line of Defense**, carried out by the Risk Management Division and the Compliance Division, which serves as a risk control unit, whose duties include: establishing the framework and internal regulations on the management of risk, both financial and non-financial nature; monitoring on how the business and non-business functions are carried out in the corridors of risk management policies and established standard operating procedures → ex ante (preventive measures).
- **Third Line of Defense**, carried out by the internal auditor who serves as risk assurance. Auditors are independent and responsible directly to the Main Director. The main role of internal auditors related to risk management is conducting a review and periodic evaluation on the framework and the overall governance risk of the Bank, performed by the first and second line of defense to ensure these two lines are operating in accordance with their respective roles → ex post (review after the event).

## Activities Program Related to the Implementation of Bank Compliance

Based on duties and responsibilities of Compliance Director, throughout 2015 Compliance Working Unit including Business Working Unit & GCG Compliance, and Compliance Regulator, as well as Anti Money Laundering Unit have implemented Bank's Compliance Function in all working unit covering the following activities:

1. Monitoring Bank compliance level to all provision and legislation applied as shown in the following:
  - a) Bank's compliance indicators from development on each factor monitored indicate the following conditions:

Monitored Factors	Indicator/Ratio		Notes
	Semester I Position June 2015	Semester II Position December 2015	
Capital Adequacy Ratio/CAR. (Credit Risk, Market and Operational)	14,53%	15,49%	Obedient, above the Minimum capital Requirement provisions (CAR) from

**Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

			Bank Indonesia.
<b>Lending limit (BMPK)</b>			
<b>Credit BMPK:</b>			
<b>Infringement</b>	Nil	Nil	<b>Obedient,</b> no infringement on
<b>Exceedances</b>	Rp.180.227 juta	Rp.146.857 juta	<b>BMPK</b> There was as exceedances on BMPK but continue to be pursued in order to be settled in 2016.
<b>Securities BMPK:</b>			
<b>Infringement</b>	Nil	Nil	<b>Obedient,</b> no infringement on
<b>Exceedances</b>	Rp.379.187 juta	Nil	<b>BMPK.</b> <b>Obedient, position in December 2015 was "Nil" due to the write-off of Securities.</b>
<b>Net Open Position (PDN)</b>	11.64%	7.13%	<b>Obedient, PDN</b> already matched with Bank Indonesia provisions that is maximum 20% from the capital.
<b>Productive Assets Quality (KAP)/ Non Performing Loan (NPL) :</b>			
<b>NPL Gross</b>	12.09%	3.71%	<b>Obedient,</b> Gross NPL ratio improved/declined quite significantly so that it is now matched with provisions from Bank Indonesia (under 5%).
<b>NPL Net</b>	6.35%	2.19%	<b>Obedient,</b> Gross NPL ratio improved/declined quite significantly so that it is now matched with provisions from Bank Indonesia (under 5%).
<b>Minimum Statutory Reserves (GWM) :</b>			
<b>Primary GWM in rupiah</b>	8.08%	7.82%	<b>Obedient,</b> already matched with provisions from BI

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Secondary GWM in Rupiah	16.80%	11.00%	(minimum 8% become 7,5% per 1/12/2015). <b>Obedient</b> , already matched with provisions from BI (minimum 4%).
LDR / LFR GWM in Rupiah	LDR Ratio 77,10% under target LDR provisions (78% - 92%).	-	<b>Obedient</b> , Position on December 2015 LDR Ratio 85,14% was within the range of LDR required target (78% - 92%)
GWM Valas	8.45%	8.87%	<b>Obedient</b> , already matched with provisions from BI (minimum 8%).
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	4 (kurang sehat)	3 (cukup sehat)	
Bank Risk Profile:			
Risk Profile	4	2	
Inheren Risk	<i>Moderate To High</i>	<i>Low To Moderate</i>	
Quality of Risk Management Implementation	Fair	Fair	

- b) There are warning penalties/warning, administration and fines to the process and submission of Bank Routine Reports to the regulator, as stated below:
- Late correction on off-line LBBUK in 4th week of March and April 2015 and online correction on SID report for December 2014 in Tomang Branch, and two working day late in deliver notifications on implementation of the capital increase without Preemptive Rights (HMETD).
  - Offline submission on the corrections report of Commercial Bank Monthly Report (LBU) for 16 error items on LBU data in March and April a2015.
  - Letters of warning on the evaluation and request for revision on the content material to the OJK Compliance Report in Semester II of 2014.
  - Deficiencies in completing underlying documents for foreign currency purchasing.
  - Error in LBBU reporting due to restructuring on 16 credit facilities.
  - Error in LBU reporting due to credit quality reporting on 17 credit facilities which are not match with the regulations applied.
  - Administrative fine on the results of the OJK audit of January 31, 2015.
  - Penalties on late submission of the LBBU data in fourth week of September 2015.
  - Penalties on late submission of Online LBU Data for September 2015.
  - Fees charged on DKE process and sanctions on the incorrect use of transaction code for treasury single account 51-52 SKNBI for the September 2015 period.
  - Penalties on late submission of LBBU 1st week in November 2015 (Data Week IV in October 2015), it should have been submitted between 1 to 6 November 2015 but delivered in 9 November 2015.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- c) Implement Compliance Report Monitoring (CRM) more effectively, which is routinely communicated to all relevant units concerning reports to be delivered to external parties/regulators, to ensure reports are delivered accurately and on time, in order to avoid sanctions and fine.
- d) Position of Nomination and Remuneration Committee Chairman since the date of November 20th 2014 remained 'Vacant'/empty, because only one independent commissioner left who concurrently served as Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Risk Oversight Committee. In 2016, the position of Chairman of the Nomination and Remuneration is expected to be fulfilled by an Independent Commissioner.
- e) Credit monitoring process was not optimal according to the credit policies and procedures (compliance aspect) that may have impacted on:
- Delays in the process of credit facilities extension (may impact in the deterioration of collectability).
  - Fulfillment on the completeness of the documents from the business units for the benefit of related units (legal aspects, legal risks), legality of operations, e.g SKDP, SIUP, TDP, UUG, and financing business licenses.
  - The overdue insurance collateral and have not been extended in line with the period of validity of the current RKK implementation.
- f) Credit process are not fully comply with the policies and SOP/PPK, clearly as shown below:
- i. Discussion on the incompleteness in Credit Analysis Memorandum (NAK) such as BMPK not specified, no collateral valuation date, value of Encumbrance not specified, no indication of trade checking and/or BI Checking on the Boards and shareholders.
  - ii. Provision to the obligation on Audited Financial Statements.
  - iii. Non-compliance on administration charges regulation, the installation of the value Mortgage lending rates.
  - iv. Failure to complete the signature breaker credits in crediting avoided in the Minutes of Decision RKK.
  - v. Non compliance on the completeness of signatories for granting credit, avoided in the form of minutes on RKK decision.
- g) Operational Activities that need attention include:
- The Anti Fraud Awareness Program and Know Your Employee Program has not been consistently carried out by sub branch offices such as material delivery on sharing session related to fraud prevention was not routinely made in the form of notulen and records of employees red flag, review on BI Checking have not been conducted.
  - Letter of appointment for opening office was handed over to Security while it should have been to the appointed official, incompleteness in letter of appointment and organizational structures which have not included all employees placed.
  - The adequacy of the employee competency and improvement on the quality of internal control systems should remain to be the concern of the Branch Chief to prevent losses.
  - Weaknesses in monitoring and lack of understanding and knowledge of the SOP by the Operation Officer on the account opening process, error in setting parameter on post closed account and setting minimum balance.



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- h) Treasury Sector Activity that need attention include:
- Implementation of Treasury Gallery transactions stated that the Head of Treasury Dealer and Dealer Treasury Gallery determine the special exchange rate for customers or appointed branch based on Tiering, the actual conditions for granting special rate is still based on approval from Treasury Sales & Banknotes Department.
  - Transaction Limit Authority stated that Treasury Gallery are authorized to manage Nett Open Position (NOP) with amount and conditions governed by Marketing Trading unit, but wherein the management of Net Open Position (NOP) is the authority of Treasury Sales & Banknotes Department (KP).
  - Need to increase monitoring against increasing supervision from Team Leader and Head of the Department concerning:
    - Monitoring balances and activity of Rupiah Nostro accounts opened by the Branch/Sub Branch.
    - Monitoring the activity of nostro accounts in UOB Singapore and Overseas.
    - Monitoring on the accuracy of PDN 30 Minutes reports.
    - Monitoring of the report on Kas position at the Branch/Sub Branch.
  - Error analysis due to inoptimality of the Dual Control from Line Manager against the work performed by Staff/Dealer to minimize human error that may impact on risk, such as data profit/loss required for internal monitoring.
  - Follow-up reports on Market Risk Audit and Treasury Liquidity Risk position on June 30, 2015 of the Financial Services Authority (OJK).
- i) Implementation of PSAK 50/55 refer to the provisions/regulations in force, i.e: the implementation of PSAK 50/55 to support the financial statements has been done through stages of SIT, UAT, and loan account migration in Equation to the Bank Vision application, and Users Training. For the conversion and verification, Parallel Run was conducted in September 2015, and Cut Off in October 2015. Results of the implementation of SFAS still being reviewed.
- j) There are still cases of internal fraud done by employees but have been followed up by legal process and the staff involved in fraud have been reported to the authorities/police.
- k) Fulfilling the commitment and deadline for settlement on findings of the OJK Supervisory Team/examination are remain not resolved. Commitment for a more intensive and effective resolution initiatives are needed.
2. Monitoring activities related to licensing on the opening/relocation/closure and improvement of the office network status through the following activities:
- Preparation of Compliance Checklist to ensure the physical readiness of buildings, readiness of human resources and assets that will be used before the submission of license request to Bank Indonesia.
  - Coordinate with project manager (authorized Working unit related).
  - Review the documents to be submitted to Bank Indonesia.
  - On site visit to the office location to ensure the readiness of facilities and infrastructure with its application license has been submitted to Bank Indonesia.

Up to December 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk has proposed for opening or relocation, closure, and change in status of office network that has been approved by the Financial Services Authority and are classified as follows:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Notes	Status on January to December 2015 Approved by Financial Services Authority		On Approval	Not approved
	Business Plan	Realization		
Office Opening	3	-	-	-
Office Relocation	16	10 *)	-	-
Office Closure	-	-	-	-
Status Improvement	-	-	-	-
Status Decrease	4	2 *)	-	-

\*) The realization of the relocation on the office network, and status decreasing of office network has obtained permission from the Financial Services Authority.

Up to December 2015 the number of branch network are 61 offices which are shown in the following details:

Office Type	Total	
	Up to June 2015	Up to December 2015
Regional Offices	4	4
Branch Offices	23	21
Sub-Branch Offices	35	37
Kas Offices	3	3
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

3. Following the bank's management decision-making process by reviewing/testing prior to any plan/draft of internal regulations as well as the Bank's internal policy/management decisions whether it is already complied with the rules and prevailing legislation or not, guided by the prudential principle (prudential banking) in order to implement good corporate governance, which include providing direction and advice in following the Credit Committee meeting (RKK), Technical meeting, meeting to set lending Rate (prime lending rate), ALCO, Policy Formulation meeting and SOPs, and other meetings associated with the implementation of compliance in determining the policies and activities of the Bank.
4. To monitor the implementation of policies and procedures for compliance (compliance procedure) the operations of the Bank in each business unit/division concerned, which provides "Compliance Opinion" on the implementation of compliance policies and procedures such as request for input/opinions from division/other unit in preparation for the launch of new products and activities so that it will not digress the provisions in force.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5. Socialization to gain awareness of compliance to all level of employees of J Trust Bank in order to embed Compliance Culture by the following activities:
  - Implement socialization and training associated with the procedures, rules and regulations, organized by the bank's internal and external parties in a training place applied to all employees in working unit/division, Regional Office, Branch Office/sub branch/cash office, i.e: training associated with AML -TPP, GCG, compliance, and others.
  - Cultural Meeting every Wednesday followed by the entire division/unit, Regional Office, and Branch/Sub Branch/Cash offices that constantly reminding employees to carry out activities in accordance with the procedures, rules and regulations.
  
6. Compliance Risk Management conducted through identification process, measurement, monitoring and control of the Compliance Risk to build Compliance culture in the entire organization and units, so that compliance risk management becomes one of the references in implementing the Bank's transactions and operational activity. Compliance Risk Management covers:
  - Measuring Risk Profile for Compliance Risk
  - Addressing Compliance Risk
  - Implemented Compliance Risk Mitigation
  - Expected Potential Compliance risk in the future.

Results of Self Assessment on Compliance Risk as part of the Bank's Risk Profile Reports 2015 and have been submitted to the FSA as follows:

No	Period/Assessment Position	Inherent Risk Rating	Trend	Risk Management Quality Rating	Trend
1	2nd Quarter/June 2015	<b>Moderate</b> (March 2015 = <i>Moderate</i> )	Fixed	<b>Fair</b> (March 2015 = <i>Fair</i> )	Fixed
2	4th Quarter/Dec. 2015	<b>Moderate</b> (September 2015 = <i>Moderate</i> )	Fixed	<b>Fair</b> (September 2015 = <i>Fair</i> )	Fixed

7. Deliver periodic reports to the OJK on the implementation of Duties of the Compliance Director in the form of:
  - Report of compliance work plan which is contained in Bank's business plan.
  - A special report on the policies and/ or Board's decision that according to the Director of Compliance Function stated as notwithstanding with the provisions from Bank Indonesia/OJK and/ or the legislation. During 2015 there was no such special report submitted by the Board of Directors except that the Bank submitted a report on the realization of Action Plan to the OJK Supervisory Team since December 2014 until November 2015, and the Bank's letter No . 03:02/S.Dir-SKMR/JTRUST/XII/2015 dated December 3 , 2015 regarding the Reconsideration Request of BDPI status.
  - Compliance report, signed by the Director of Compliance Function and submitted semiannually (every June and December) and are presented comparatively in two (2) reporting period with a copy to the Board of Commissioners and Board of Directors. During the year 2015 Compliance Report submitted to the OJK contain the following details:

Compliance Report	Letter Number	Date
-------------------	---------------	------

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Semester I	No.31.11/S-Dir-CPD/JTRUST/VII/2015	31 July 2015
Semester II	No.27.15/S-Dir-CPD/JTRUST/I/2016	27 January 2016

8. Related to duties of the Director of Compliance assisted by the Compliance Working Unit through Anti Money Laundering Unit, has been monitored the implementation of the Anti-Money Laundering and the Prevention of Financing Terrorism (AML and PFT) in accordance with PBI No.14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 and Circular Letter No.15/21/DPNP dated June 14, 2013, as well as the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, i.e:
1. The Bank has submitted the following report to the Financial Services Authority, they are:
    - Report on 2015 realization data update of PT Bank JTrust Indonesia Tbk from January to December 2015 as planned by all offices in Compliance Reports of second half of 2014.
    - Report on 2016 data update plan of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of December 2015 in line with the target achievement/realization of data update as guided by the format on the attachment for the Circular Letter No.15/21/DPNP dated June 14, 2013.
    - Report of the Action Plan on the implementation of AML/PFT 2016.
  2. Provide Opinion/assessment related to the implementation of policies and procedures for AML-PTF including product and/or new activity.
  3. Respond to the letter and fulfilling requests for data from the KPK, PPATK and the Tax Office relating to the legal process.
  4. Socialization/Regular Training on the implementation of AML-PTF to all Branches and related working unit, as well as the memo related to socialization.
  5. Compliance Unit through Anti Money Laundering Unit has conducted an analysis on transactions related to the reporting obligations to the PPATK including Suspicious Transaction Reports (LTKM/STR), Financial Transaction Reports Cash/Cash Transaction Report (LTKT/CTR), Financial transaction Reports of Foreign Affairs/International Fund Transfer Instruction (LTKL/IFTI), Integrated Services user Information System (SIPESAT), and a delay of customer transactions.
  6. Report on the monitoring mandatory data completeness for new accounts on each month.
  7. Performing guidance/warning verbally or written to the Branch/sub branch Office related to optimizing the use of Smart Systems-AML especially LTKM/STR for the purpose of reporting to the PPATK, and/or related to the completeness of the mandatory data customer every month.
  8. Distribution/dissemination of Terrorist data List from the Financial Services Authority/Police to all branches through the automatic uploads mechanism and checking of the customer's database to detect possible similarity/similarity of name/profile conducted in Smart AML system.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

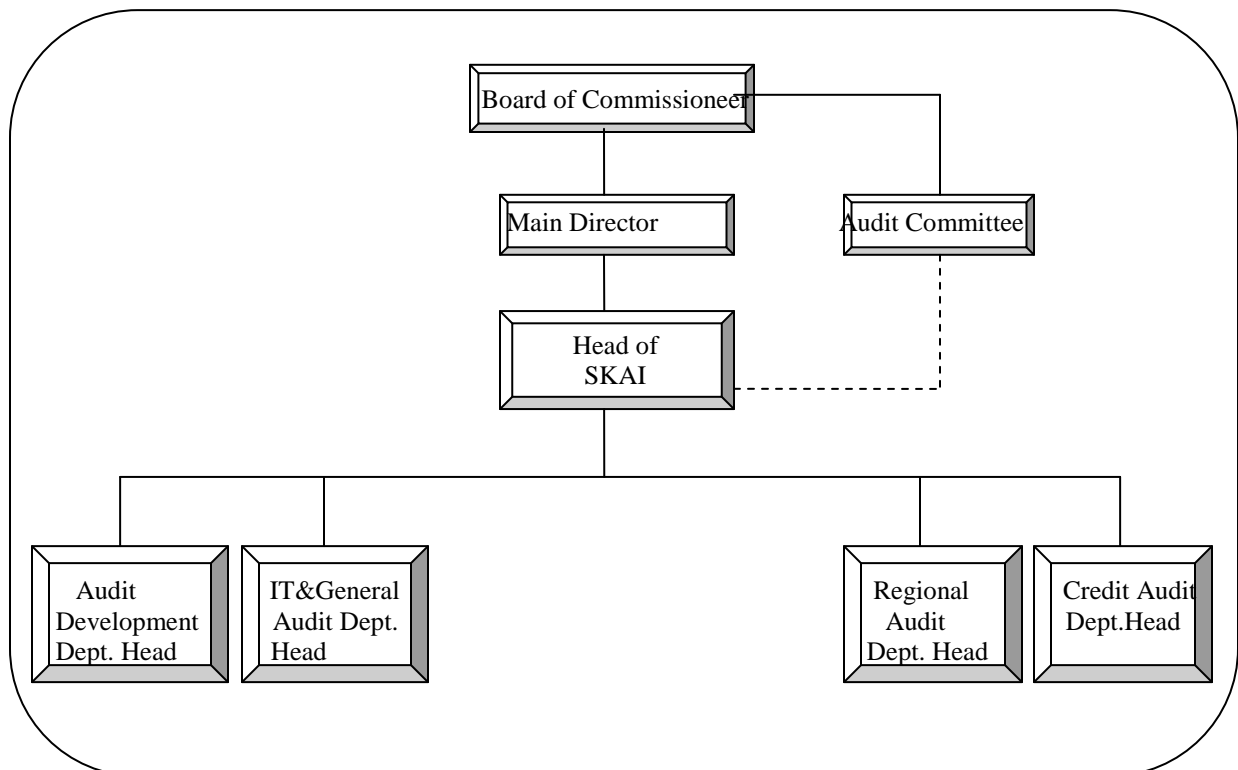
## 4.2. Internal Audit Function

Internal Audit Unit (SKAI) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is an independent unit and impartial in carrying out its duties, including the activity of Assurance and Consulting on Risk/Control which is designed to provide added value, improve operations, assist and secure Bank's Business Plan (RBB) achievement through evaluation in the effectiveness and improving the function of Control, Risk Management and Governance Process.

In order to implement the above role, the role of SKAI is to be the Strategic Business Partner for all working units and ensure these units can earn benefit from SKAI for security and business improvement purpose.

To maintain the independence of the internal audit function, the position of Internal Audit directly responsible to the Director, and has a line of co-ordination with the Board of Commissioners through the Audit Committee. SKAI act as the eyes and ears of the President Director on enforcing the Internal Control System (SPI) and securing the Bank's operational activities associated with the activity of raising funds, credit, charge and fee-based income. Position, authority, responsibility, professionalism, organization, and the scope duties of SKAI refers to the Standards Internal Audit (SPFAIB) stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 1/6/PBI/1999 dated 20 September 1999 on the Assignment of Compliance Director ( Compliance Director) and Implementation of Internal Audit Standards for Commercial Banks.

### Organizational Structure of Internal Audit Unit (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk 2015



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

SKAI assist the Bank in achieving its objectives by a systematic and disciplined approachment to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance. Its activities covering the areas of operational, credit, technology, and information systems and supporting functions from Headquarters. In performing its duties, Internal Audit authorized to access all functions, records, property and employees of the Bank in accordance of the audits duties without being restricted by any party.

Audit charter is a formal document defining: Objectives, SKAI Activities, Authority and Responsibility of SKAI within the Organization, including its relationship with the Board of Directors and Board of Commissioners. Head of Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and has a coordinating line to the Audit Committee to communicate SKAI work results to the Board of Directors and Board of Commissioners. SKAI of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners to ensure the completeness and effectiveness of the Internal Control System (SPI), prepare the Annual Audit Plan which must be approved by the President Director and its implementation is monitored by the Board of Commissioners through the Audit Committee. In setting views and thoughts, Head of Internal Audit Division is given the independence to avoid conflict of interest on the audited objects or activities.

In performing the audit, SKAI formulate analysis and research in finance, accounting, operations and other activities through on-site inspection/audit and off-site monitoring. SKAI provides suggestions for improvement and objective information on the activities that need special attention at all levels of management. In addition, SKAI also identify every possible improvement and increase efficiency on the use of resources and funds.

Audits are conducted through the Risk Based Audit methodology, referring to audit against high-risk operational processes, which aims to evaluate the completeness and reliability of assessment/effectiveness from SPI in order to minimize risk. In addition, the audit findings will be used as the basis for corrective action on weaknesses of Internal Audit and to improve the risk awareness of personnel in handling the job.

## **Qualifications/Internal Audit Professional Certification and Training**

To continue to improve the competence of auditors and able to manage the internal audit function professionally, the qualification and certification required for Internal Auditors are as follows:

- All member of SKAI possess Risk Management Certification level 1 for Auditor and Team Leader, Level 1 and 2 for the Department Head and Level 1,2 and 3 for the Head of Internal Audit.
- Other than that, to support the technical competence, SKAI already have ( 5) auditors possessing Certified Bank Internal Audit from LSPP.

In line with the company's dynamics, SKAI is required to perform continuous adjustments to be able to maintain performance standards. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk constantly engaging officers and management of SKAI in both internal and external training in order to obtain the following qualifications:

- a. Having adequate knowledge related to the tasks in relevant to the specialty, generally and technically.
- b. Behave independent, honest, objective, diligent and loyal.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- c. Able to maintain the quality of professional profession.
- d. Excellent interaction and communication skills both oral and writing.
- e. Able to increase their role as a consultant and catalyst.

## **Evaluation or Review the Implementation of Bank Internal Audit**

To perform an evaluation or review on work of SKAI and its compliance with the Standard Implementation of Bank Internal Audit function (SPFAIB) as well as improvements in accordance with the provisions in Bank Indonesia Regulation, at least once every three years, an evaluation or review by auditor/external parties have been conducted, the last one conducted was in 2013 for the audit period 2011-2013 where SKAI stated as met the requirements from SPFAIB. The evaluation/review on the work of the Bank's SKAI and compliance toward the Internal Audit Unit Internal Audit Standard Bank (SPFAIB) will be conducted in 2016.

## **Objectives and Stages of the Implementation of the Bank Internal Audit**

SKAI performs their duties to ensure the implementation of SPI is mainly aimed to:

- a) Ensuring the security of public funds, including deposits, current accounts, savings, and other third-party funds.
- b) Securing Assets include audit on the Quality of productive asset through the audit working unit of credit management and Loan Review (end to end process) to ensure that the process of credit (Initiation, Analysis, Decision, Disbursement and Monitoring) has been carried out prudently.
- c) The goals and objectives of the operational activities are achieved through the utilization of resources economically and efficiently, effective and supervise the activities of certain activities such as information technology systems (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, and others).
- d) The validity and completeness of information, including accurate, complete and timely recording of the Bank obligations and the administrative accounts.
- e) Compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations, including the assessment of those aspects that affect the Bank's health level.
- f) Assessment on awareness of management/supervision of 5 (five) level toward the SPI component.

**Pre Audit** begins with the selection of audit approachment methods such as Audit Scope based on the assessment results, Audit on related program, Mandays, the determination of sample size, testing technique, minimal evidence and ways to acquire.

**The assignment** is determined by the Head of Internal Audit based on advice from the Regional Head/General Audit Head and results of pre-audit.

**The audit assignment** begins with formulating the work order, entry meeting, field audits, exit meetings, formulating follow up list to be monitored and audit results in the form of SPI assessment as reflected in the audit qualified rating with Strong, Satisfactory, Fair, Marginal and Unsatisfactory qualifications.

**The audit results** will be followed up by creating summary reports to the President Director and the weakness of the SPI will be followed by the making corrective action.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 4.2.1. Implementation of Internal Audit

### 1) *General Audit*

Inspection based on the scope of Bank's operational activities, aimed to assess effectiveness of SPI, particularly the evaluation on prevailing systems and procedures and their implementation. These inspections are carried out in all Branches/Sub Branch and Headquarter Divisions. At the initial stage to Risk Based Audit, at the beginning of the year, COSO Framework methodology (5 parts) Updates 2014 was used which include:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information & Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

### A. *On Desk Audit*

Inspection conducted at desk which includes monitoring completion of DMTL, Intermediary Account, research and recapitulation based on reports submitted by the Branch Office/sub branch.

## 4.2.2. Realization/Achievement of Internal Audit Assignment

b.) In 2015, SKAI has conducted a general inspection (General Audit) on 69 objects, which consists of 22 branch offices, 31 sub-branches, and 16 work units/Head Office Division. No special audit was conducted.

c.) The achievement and realization of the audit plan are as follows:

Audited Objects	2015			2014		
	Audit plan	Audit Realization	Achievement (%)	Audit Plan	Audit Realization	Achievement (%)
Branch Office	22	22	100	21	21	100
Sub Branch Office	31	31	100	37	37	100
Kas Office *)						
Working unit/Division in Headquarter	16	16	100	19	10	52,63
Special Assignment	-	-	-	-	11	100
<b>Total Audit</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
Loan Review	40	30	75	90	90	100
Thematic Audit	-	-	-	3	3	100

**Notes :**  
 \*) Examination of Cash Office was performed together with audit of the parent Branch Office.  
 \*\*) Loan Review Achievement was 75% due to the large amount of credit disbursement at the end of 2015 so that the credit files was able to be examined in January 2016.

e.)

## 4.2.3. Internal Audit Investigation Findings

Below is a summary of important findings on Branch Offices, Sub Branch Offices and Work Unit/Division in the Headquarter/Credit:



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 2. Examination of the Branch/Sub Branch

The SKAI Audit results on Branch Office/Sub Branch generally indicated that the internal control system (5 COSO Component) is adequate, the audit findings most often found in Control Environment and Monitoring, concerning operational personnel and Supervisors (Kacab/KBO/OO) that do not conform to the SOPs consistently and continuously regarding the daily transactions on H+1, with an Audit Rating of 74,83 (*Fair*).

## 3. Line of Credit

From the results of audits on Credit Divisions/Loan Review, findings are mostly in the lack of comprehensive credit control processes as well as inadequate post-loan disbursement monitoring process, with an Audit Rating of 74,58 (*Fair*).

## 4. Examination of the entire Working Unit/Division at the Headquarter

The findings based on audit by SKAI on Working Units/Headquarter Division are generally due to non optimum implementation of monitoring on operational activities at the divisions as well as updating SOPs, with an Audit Rating of 75.06 (*Satisfactory*).

### 4.3. External Audit Function

The supervision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, other than performed by internal auditor, also conducted by the external auditor, including Bank Indonesia/Financial Services Authority and the Public Accounting Firm (KAP). To ensure the effectiveness on the implementation of external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers and strives to meet the terms engagement between the Bank, the Office of Public Accountant and Bank Indonesia as stipulated in Bank Indonesia regulation concerning Transparency of Financial Condition.

One of important component in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the availability of adequate financial statements and the sufficiency of financial reporting process, in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support the achievement of an adequate financial statements and sufficient in the financial reporting process, the role of the External Auditor (in this case the public accounting firm) is important.

The role and functions of the External Auditor include:

1. Ensure the congruence of financial statements with the prevailing accounting standards.
2. Ensure internal financial statements already complied with provisions from Bank Indonesia concerning transparency of the Bank's Financial Condition.

The Disclosure of information is transparent to the general public through Bank Indonesia, Print Media, YLKI, LPPI, etc., and displayed on the Home Page or PT Bank JTrust Indonesia Tbk WebSite, [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).

Transparency of the Bank's financial condition is set within:

1. Bank Indonesia Regulation No. 14/14/PBI/2012 dated October 18, 2012 on "Transparency and publication of the Bank Reports", as amended in P OJK No.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- 6/POJK.03/2015 dated March 31, 2015 on “Transparency and publication of the Bank Reports “.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 11/SEOJK.03/2015 dated April 17, 2015 on “Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports”.
  3. Bank Indonesia Regulation No. 3/22/PBI/2001 dated December 13, 2001 on “Transparency of Financial Condition Bank”, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 7/50/PBI/2005 dated November 29, 2005 concerning “Changes in the Regulation of Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 on Transparency of Financial Condition “.
  4. Bank Indonesia Circular Letter No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011 regarding the “Third Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No. 3/30/DPNP dated December 14, 2001 regarding Financial Statements Condensed Quarterly and Monthly Commercial Banks and Certain Reports submitted to Bank Indonesia”.

Implementation of the presentation and preparation of financial statements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is delivered in the form and scope as set out in the Regulation of Bank Indonesia which consists of:

- Annual report
- Quarterly Condensed Financial Statements
- Monthly Financial Reports
- Consolidated Financial Statements

The information contained in the Annual Financial Report is presented to the public through:

- a. General information, which includes:
  - a. Stewardship;
  - b. Ownership;
  - c. The development of the Bank and Group of the Bank;
  - d. Management strategy and policies;
  - e. Management reports.
- 2) Annual Financial Report, which includes:
  - a. Statement of Financial Position (Balance Sheet);
  - b. Statement of Comprehensive Income;
  - c. Statement of Changes in Equity;
  - d. Cash flow statement;
  - e. Notes to the financial statements, including information on commitments and contingencies.
- 3) Opinion from the Certified Public Accountants.
- 4) The risks and potential losses (risk exposures) faced by the Bank as well as risk management practices applied to the Bank.
- 5) All the aspects of transparency and information required for Quarterly Condensed Financial Statements.
- 6) Aspects of other disclosure as required by the Financial Accounting Standards applied in case has not been included in item (1) to the (5) above.
- 7) Other information.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In carrying out Good Corporate Governance (GCG) particularly in transparency on financial conditions, Bank has prepared and presented the Financial Statements for the years ended December 31, 2015 (Audited) and dated December 31, 2014 (Audited).

In accordance with the decision of the Annual RUPS of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which was held on June 23, 2015, that the AGM appoint a Public Accountant registered or granting power of attorney for the appointment of a registered Public Accountant to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2015.

For the financial statements of fiscal year 2015 and 2014 have been prepared and audited by Public Accounting Firm (KAP) Tjahjadi & Tamara (An Independent Member Firm of Morison International) with Partner Riani, which is based on the Independent Auditor's Report No. 0131/T & T-GA/R- 3/2016 dated March 18, 2016 expressed an opinion "CASUAL WITHOUT EXCEPTIONS" in all material respects.

Brief information of Annual Financial Report on December 31, 2015 (Audited) and December 31, 2014 (Audited) are disclosed as follows:

### Financial Report

#### ASET (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2015	31-12-2014 *)
1	Current Accounts in Bank Indonesia	880.957	1.321.263
2	Current accounts in Other Banks - Net	423.925	146.766
3	Placements in Bank Indonesia and Other banks-Net	462.095	1.435.819
4	Marketable Securities - Net	1.240.069	1.684.151
5	Derivative Receivables - Net	2.839	117
6	Loan - Net	9.176.579	7.234.672
7	Foreclosed Assets - Net	71.932	-

### LIABILITIES and EQUITY

#### LIABILITIES (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2015	31-12-2014
1	Deposits from Customers:		
	- Related Parties	121.133	24.736
	- Third Parties	10.899.646	11.002.003
2	Deposits from Other Banks	378.494	48.745
3	Derivative Payables	53	126

#### EQUITY (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2015	31-12-2014
1	Issued and Fully Paid in Capital	11.223.155	10.223.155
2	Additional Paid-in Capital	178.759	178.759
3	Deposit for Future Stock Subscription	-	300.000
4	Revaluation Surplus of Fixed Assets - Net	99.269	128.907

#### PROFIT (LOSS) (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2015	31-12-2014 *)
1	Net Profit (Loss)	(676.010)	(663.747)

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2	Basic Loss Per Share	(0,0008 )	(0,0008)
---	----------------------	-----------	----------

### Key Financial Ratios (Audited)

	Certain Pos	31-12-2015	31-12-2014 *)
Capital	- KPPM Ratio available for Credit Risk and Operational Risk.	15,74%	13,55%
	- KPPM Ratio available after considering Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk.	15,49%	13,48%
	- Fixed Asset against Capital.	20,81%	32,30%
Productive Asset	- Problematic Productive Asset.	7,82%	22,20%
	- NPL - Gross	3,71%	12,24%
	- NPL - Net	2,19%	5,45%
	- PPAP against Productive Asset	5,69%	17,34%
	- Fulfillment on PPAP	89,06%	112,06%
Rentability	- ROA	(5,37)%	(4,97)%
	- ROE	(59,03)%	(58,07)%
	- NIM	0,93%	0,24%
	- BOPO	143,68%	136,39%
Likuidity	LDR	85,00%	71,14%
Compliance	Minimum Statutory Reserves (GWM)		
	- Primary GWM Rupiah	7,82%	11,68%
	- Secondary GWM Rupiah	11,00%	19,22%
	- Foreign Currency GWM	8,87%	8,77%
	PDN (Per Balance Sheet Position to Capital at Year End)	7,13%	3,22%

\*) In connection with the adoption of PSAK 24 (Revised 2013), Bank restated the financial statements for the year ended December 31, 2014.

**BAB V  
RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION AND  
INTERNAL CONTROL SYSTEM**

**5.1. Risk Management Implementation**

JTrust Indonesia Tbk PT Bank has implemented risk management based on the provisions from Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the Application of Risk Management for Commercial Bank, and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 5/21/DPNP dated 29 September 2003 regarding Implementation on Risk Management for Banks, with the changes in the Circular Letter No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011.

In line with Bank Indonesia regulation, the implementation of proper and healthy risk management and the Bank governance (GCG) will have a role in increasing the added value and provides a comprehensive overview of the potential risks and Bank's loss in the future that are adjusted to the complexity and bank's internal conditions.

To achieve the above objectives, it is need the existence of risk cultures (risk awareness) and adequate technical competence from the entire unit in JTrust Bank, where it is becomes as the responsibility and involving all workig units in JTrust Bank.

Effectiveness on the implementation of governance and risk management framework by PT Bank JTrust Indonesia Tbk includes four (4) pillars, they are:

**a. Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors as part of the management supervision.**

The Board of Commissioners and Directors are responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the implementation of risk management are enough in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. Active supervision of the Board of Commissioners include:

- 1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance of Bank;
- 2) To evaluate the policy and implementation of risk management conducted by the Board of Directors.
- 3) Holding periodic meetings with the Board of Directors to evaluate the achievement of any follow-up work plan (action plan);
- 4) Ensure that any recommendations on each Audit Report (LHA) Internal Audit and External have been followed up.

While the Board of Directors in charge in determining the direction of policy and comprehensive risk management strategy, including implementation, and to ensure that the risks material and impacts have been followed up. Directors are also responsible to develop culture and risk awareness throughout the working unit. Active supervision of the Board of Directors, include:

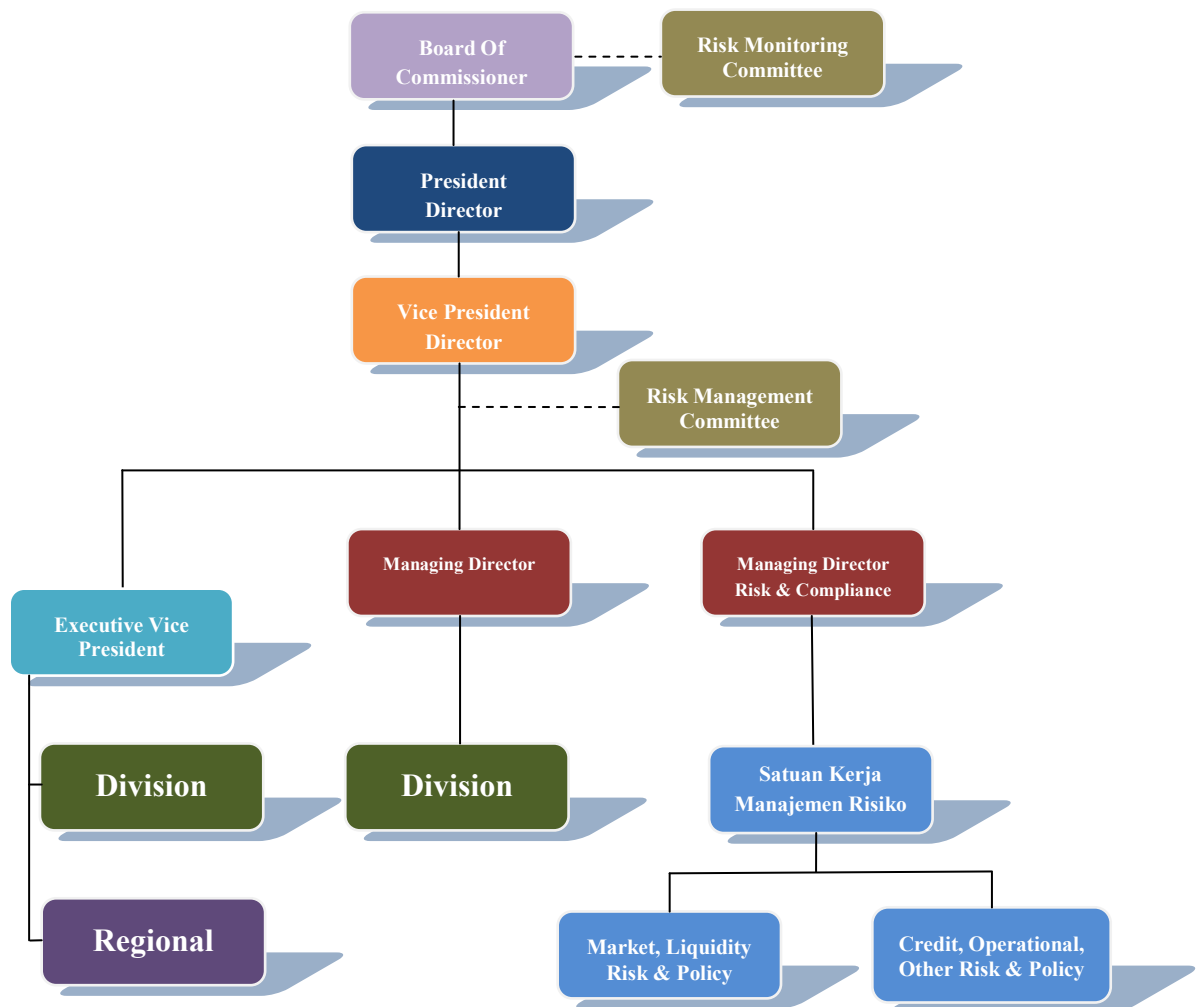
- (1) Formulate policies, strategies, and Risk Management framework by taking into account the level of risk taking (risk appetite) and risk tolerance of the Bank;

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- (2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy and action plan has been carried out according to plan through conference/periodical meeting;
- (3) Ensuring Standard Operating Procedure (SOP), Policies and Procedures have been conceived and executed;
- (4) Ensuring and implement corrective measures or recommendations from the Internal and External Audit Unit been implemented effectively;
- (5) Developing a risk management culture and raise awareness of risk at all levels of the organization.

In the supervision and risk management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioner assisted by the Risk Monitoring Committee at the Commissioner level and at the level of Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

Below is an Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk:



**Organizational Structure of Risk Management**

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 1. Risk Monitoring Committee

Description about the Risk Monitoring Committee can be found in Chapter III on Task Completion and Implementation of Duties on Committees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 2. Risk Management Committee

Description about the Risk Management Committee can be found in Chapter III on Task Completion and Implementation of Duties on Committees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 3. Risk Management Unit (SKMR)

SKMR under the Director of Risk & Compliance is a working unit which is independent against working unit business/operational. SKMR has the function to identify, measure, monitor and control risks to minimize the potential impact of different types of risks faced in their activities and business processes.

SKMR organizational structure consists of two (2) units i.e market risk unit and liquidity, and working units of credit and operational risk.

SKMR duties and responsibilities include:

- a. Provide input to the Board of Directors in the preparation, policy, strategy and risk management framework.
  - b. Develop procedures and tools for identifying, measuring, monitoring and controlling risks.
  - c. Monitoring over risk management strategy that has been approved by the Board of Directors.
  - d. Monitoring the position/overall risk exposure and risk types.
  - e. The implementation of stress testing to determine the impact on the implementation of policies and risk management strategies.
  - f. Conducting risk assessment on the proposed products and/or new activity.
  - g. Perform a review and recommendations on the risk limits and operational business proposal unit.
  - h. Prepare and submit reports to the risk profile of the Risk Management Committee on a regular basis to be submitted to the Board of Directors and the Financial Services Authority (OJK).
  - i. Prepare reports on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a regular basis to be submitted to the Board of Directors and the OJK.
- b. The adequacy of policies, procedures, and limits as guidance in the application of risk management.

The implementation of risk management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has been stored in some policies and procedures, i.e: the General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest provision in giving direction of policy in risk and control management in order to secure PT Bank JTrust Indonesia Tbk over the risks faced in their business activities. Limit setting is managed in business activities and products and the level of taken risk has adjusted (risk appetite) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## c. Adequacy on identification process, measurement, monitoring, and controlling risks, as well as information system of risk management.

The process of risk management including the identification, measurement, monitoring, management and control of the eighth risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

### 1) Identification

Risk identification is performed covering all business activities in order to analyze the source and possible risks and their consequences.

### 2) Measurement

Measurement of risk are meant in order Bank are capable to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital.

One of measurement over the risk reflected in the Quarterly Risk Profile and Risk Control Self Assessment Report/RCSA.

### 3) Monitoring

Risk monitoring conducted by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of risk management processes.

### 4) Controlling

Risk control performed by providing a follow-up over high risk criteria.

## d. Effective internal control system in the implementation of the Bank's operations

Internal controls have been carried out by the Internal Audit Unit to assess the implementation of the risk management processes and systems in functional activities that have risk exposure. Besides the clear separation of functions between operational units ( risk-taking units) with a working unit which undertakes the function of risk control (risk management unit).

Implementation of risk management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk has been stored in some policies and procedures, including Risk Management General Policy (KUMR). KUMR as the highest provision in giving direction in a policy of risk management and control in order to secure PT Bank JTrust Indonesia Tbk over the risks faced in their business activities.

Several attempts made in the management in carrying out the implementation of Risk Management, i.e:

- a. Updating policies and procedures according to the prevailing regulations.
- b. Carry out measurements of the Bank Healthy Level by using Risk Based Bank Rating (RBBR) approachment, using 4 coverage ratings, they are: Risk Profile Reports, Good Corporate Governance Report, aspects of Rentability and Capital.
- c. In a n e f f o r t t o i m p r o v e t h e c o m p e t e n c e o f B a n k e m p l o y e e s i n t e r m s o f R i s k M a n a g e m e n t, M a n a g e m e n t c o n s t a n t l y e n g a g e e m p l o y e e s i n t h e B a n k R i s k M a n a g e m e n t C e r t i f i c a t i o n, t o m e e t t h e p r o v i s i o n s a p p l i e d.
- d. Creating a Business Plan for 2016-2018.
- e. Fulfillment on CAR ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) and do the ATMR calculation in accordance with the latest regulations.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Risk Profile Assessment

Risk Profile Assessment in accordance with the provisions/Bank Indonesia Regulation Number 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 on the Assessment of Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011 concerning Amendment to Circular Letter No. 5/21/DPNP on the application of risk management for Commercial Bank, carried out against the inherent risk and the quality of risk management through a process of self-assessment in all business activities of banks that includes eight (8) types of risk are credit risk, market risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risks.

Inherent risk is a risk contained in the Bank's activities, while Risk Management Implementation Quality is the Bank's ability to control risks in such activities. Both of these assessments are needed to determine a general overview of the Bank's risk, which is often called the Risk Profile. As a guide in managing the eight types of these risks, PT Bank JTrust Indonesia Tbk possessing a Risk Management General Policy (KUMR) that are constantly updated/adjusted periodically in accordance with applicable regulations.

To be able to identify, measure, monitor and control all types of risk attached (Inherent Risk) in the Bank, it is necessary to form the organizational structure of management in accordance with the size, complexity, Bank's ability as well as the objectives and policies of PT Bank JTrust Indonesia Tbk through the preparation of Consolidated Risk Profile quarterly by the Risk Management Unit in accordance with the provisions of Bank Indonesia.

Below are the results of Risk Profile measurement of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based Risk Inherent and Risk Management Implementation Quality in the fourth quarter in December 2015 compared with the third quarter of September 2015:

Risk Profile	December 2015			September 2015		
	Inherent Risk Level	Risk Management Implementation Quality Level	Risk Level Rank	Inherent Risk Level	Risk Management Implementation Quality Level	Risk Level Rank
Credit Risk	Low to Moderate	Fair	2	Moderate To High	Fair	4
Market Risk	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Liquidity Risk	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Operational Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Legal Risk	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Strategic Risk	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Compliance Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Reputation Risk	Low To Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
Composite Level	Low to Moderate	Fair	2	Moderate To High	Fair	4

After conducting measurement over Risk Profile at the fourth quarter in December 2015 resulted in composite risk ratings are Low to Moderate with trends that have improved compared with the previous quarter period composite rating period in September 2015.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

By looking at a composite ranking of risk inherent in Low To Moderate position and Risk Management Implementation Quality in Fair position, therefore ranked for Risk Profile per December 2015 is 2 (two).

Based on the bank risk profile report period December 2015 (qualitative data), it can be described eight major risk types as follows:

## 1. Credit Risk

Risks arising as a result of the failure or potential failure of the customer (counterparty) to fully meet their obligations in accordance with the agreement, either because it is not able to or do not have good intentions or due to other causes, so that the bank suffered a loss.

Bank has performed a credit risk management implementation, include:

### a. Credit Risk Management Organization

In the organization of credit risk management, the Bank has implemented the Four Eye Principle as the main principle underlying credit decisions involving business units and Commercial Credit Risk units which are mutually independent of each other with a separation of powers and responsibilities, as follows:

- Business Division is a business unit to implement the proposal/credit activity or provision of funds;
- Commercial Credit Risk Division is a unit which conducting review over proposals/Credit Analysis Memorandum and equipped with authority within a certain limit to approve or reject the proposal proposed by the Business Division.
- Compliance & Legal Division, and Operations Division as a Non-Voting Member in giving opinions compliance, legal, and operational mechanisms of the credit committee.
- Special Asset Management (SAM) function to make the handling of credit quality debtor 2 to removes the potential to become as Non Performing Loan (NPL) and the completion of troubled assets as well as restructuring.
- Risk Management Unit (SKMR) function as an independent unit to identify, measure, monitor credit risk by adhering to prudential banking.
- Credit Committee is the mechanism of the loan approval process in accordance with the limits and Terminate Credit Authority that has been established by the Board of Directors.

### 2) Credit risk management strategies for activities that have a significant credit risk exposure.

Credit risk management strategy guided by the provisions from Bank Indonesia/Financial Services Authority, the Bank's Business Plan and the prudential principle.

### 3) Risk management policy on credit Concentration

Risk management policy on credit concentration are:

- Carry out preparation of Loan Portfolio per Sector Industry used to compile JTrust Indonesia Industry Code & catalogs, and recommendations of Approved Industries and Target Market as lending limits on certain economic sectors in accordance with the Bank's Business Plan.
- Determination of inhouse limit in the providing of related parties, groups, individuals (BMPK) without prejudice to the provisions regulator.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## b. Measurement and control credit risk mechanism

- Review and enhance JTrust Bank Credit Policy and Credit Manual regularly, and continue to complement and enhance Standard Operation Procedure over credit as credit risk control.
- Performing limits determination/Breaking the Limit Credit Authority (BWMK) which are reviewed periodically and make improvements to the process so that the credit decision process run faster, but still guided by the principles of prudential banking.
- Granting authority to decide on credit by the Board of Directors to the credit authority holders (PKK) based on ability, competence and integrity.
- Improving credit monitoring guidelines, i.e: Early Recognition Watch List which is an early monitoring actions to credit collectibility 1 and 2 in order to take preventive measures to prevent the decline in credit quality.
- Monitoring the Bank's portfolio, carried out by the segmentation of credit, credit quality, and 25 core Debtor and conducted rescue/settlement of loans for troubled debtor.
- Raising awareness of credit risk culture through JTrust Indonesia Credit Culture Enforcement Team which will result in better credit quality in the future.

By implementing a good credit risk management can result in a healthy credit management and prudent, to provide a good impact and bring a positive direction for the Bank to make the integrity and independence of the credit risk assessment process.

## 2. Market Risk

Risks arising from movements in market variables on the portfolio owned by the Bank both cash transactions and derivative transactions, which may be detrimental to the Bank. Included in market variables are interest rates, exchange rates, stock prices and commodity prices, including derivatives from the type of risk mentioned.

Interest rate risk, is quite significant potential risk for PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the distribution of funds other than in the form of credits, also in the form of portfolio investments in securities, especially rupiah securities which in average long term possessing fixed interest rate. This condition will depress net interest margin (NIM) when the funds rate is likely to increase. Some anticipation/risk mitigation strategies and the Bank in addressing this condition are:

- a. Company make improvements to the structure of the productive and non productive assets compositions to be more advantageous for Bank's position.
- b. Promoting the management structure of the bank's liabilities in enhancing the long-term funding sources, by providing attractive and competitive interest rates on deposits for three months to one year.
- c. Increases Third Party Fund (DPK) in a long-term.
- d. Applying the floating rate on certain types of loans, so that the risk of a decline in interest rates does not burden the Bank and vice versa will not burden the debtor if interest rates rise.
- e. Monitoring the development of the market price (market pricing) and a strengthened policy of pricing assets and liabilities through a meeting forum Assets Liability Committee (ALCO) by discussing some important calculations such as cost of money, the base lending rate and other calculations. Thus, any problems that

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

occur in the Bank, especially with regard to interest rate risk can be anticipated as early as possible.

- f. Monitoring on liquidity, activity and risk limit Treasury & Institutional Banking Division on a daily basis and report to the Board of Directors.

Meanwhile, as a foreign exchange bank, JTrust Bank certainly can not be separated from the exchange rate risk (Foreign Exchange Rate Risk) or the risk of exchange rate fluctuations as part of global financial markets. This condition requires the Bank to maintain the position of its currency assets and liabilities in a position in accordance with Bank Indonesia, to avoid potential losses in the event of exchange rate fluctuations.

This market variables not only in the form of fluctuations in the exchange rate or interest rate fluctuations, but also include fluctuations in the market value of the portfolio owned by the Bank, as such is a portfolio of securities traded.

The Bank's strategy to mitigate this risk are as follows:

- a. Constantly monitoring the price movements of the investment portfolio of the Bank, so that action can be taken as early as possible if there are indications of harm through Market to Market.
- b. Manage and mitigate concentration risk by making a clearer rules about the transaction limit from the boundary breakers, limit interbank, dealer limits, limits per economic sector, geography, and others.
- c. Conduct in-depth analysis (rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed and market price) before making an investment.

Routinely (the second week of each month) Bank held a meeting Asset and Liability Committee (ALCO) which is responsible for establishing strategies in managing assets and liabilities of the Bank in accordance with applicable regulations. In addition, Bank has also set a limit of treasury activities to keep exposure levels in line with the Bank's risk appetite such as the transaction limit Foreign Exchange (Foreign Exchange), Bank Notes, Money Market and Securities.

### 3. Liquidity Risk

In managing liquidity risk that is partly caused by Bank inability to meet obligations to the customers or counter-party on due date. Some of strategies taken by Bank to anticipate those things are:

- a. Conducting investment portfolios towards a more liquid investments.
- b. Lowering the concentration of core depositors and replace it with retail funds to be more sustainable.
- c. Encourages the growth of the number of investment funds or client's of low cost category funds.
- d. Improving the effectiveness of the management of liquidity gap (maturity gap, projected cash flow) in anticipating risk liquidity as early as possible.
- e. Increase cooperation with other banks in order to utilize the facility of Call Money and Securities Repo of internal bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk seeks to improve the effectiveness of the management of liquidity gap (maturity gap and cash flow projections) in anticipating liquidity risk as early as possible, and also controlling liquidity risk, especially under stress conditions.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

The Bank also has developed a Contingency Funding Plan, as well as continue to maintain its ability to make access to the money market by continuing to build relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has had LCP Standard Operating Procedure (Liquidity contingency Plan), and monitoring daily liquidity to be reported to the Board of Directors.

## 4. Operational Risk

Operational risk is the risk that is partly due to insufficient or failed internal processes, human factors, system failure, or external problems that affecting the operations of the Bank.

Along with the growth of the Bank, operational risk management is also a concern of the Bank. To prevent losses due to their operational risk, the Bank do the following:

- a. Each of products or new activities, Bank always conduct risk assessments in accordance with the provisions from the regulator.
- b. Performing review and refinement of SOP in each unit periodically.
- c. Ensuring the availability of Disaster Recovery Plan (DRP) which is tested regularly in case there is disruption in IT.
- d. Management of operational risk also done by strengthening the security and reliability of information technology, so that the system failure or human error can be suppressed.
- e. Delimitation of authority in conducting operational transactions.
- f. Increase internal oversight functions through the Internal Audit Unit (SKAI).
- g. In addition to it, shaping SKAI Anti Fraud Department in an effort to strengthen the internal control system.
- h. Improve the human resources quality by increasing both internal and external training frequency in credit, product marketing, and work motivation.
- i. To identify risk events that occur in Branch and earning a loss impact, then monitoring is done using Operational Risk Report.
- j. Increase IT Security System for the entire system in PT Bank Mutiara Tbk.
- k. Recording data loss, where the data are used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profit.
- l. Bank conducted Risk & Control Self Assessment (RCSA), which is a methodology to identify sources of risk, used to measure the level of risk, monitor risk level of trends, and to control and risk mitigation. Identification through the RCSA implementation will apply to all units gradually.
- m. Bank has a Business Continuity Plan (BCP) intended to minimize the risk, addressing the impact of disruption/disaster, as well as accelerating the recovery process so that its operations and services to customers can continue to run well.

### Business Continuity Plan (BCP)

In order to minimize the potential loss of financial or non-financial caused by external factors such as natural disasters, fires, riots, which can impact on the Bank technological capability and the Bank's business operations especially services to customers, Bank implemented policies and Business Continuity Plan Standard Operating Procedure (BCP).

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

The BCP Organization team established by Bank handling duties to coordinating the implementation of the BCP in handling the business activity in a n e m e r g e n c y (disaster) matched with the needs and conditions of Bank. In 2014 Bank has made BCP improvements by Review Business Impact Analysis (BIA) based on business process, and has conducted socialization and simulation of BCP implementation based on predetermined scenario to all branches, then conduct review on policies and SOP, alternative procedure review (contingency plan), and perform BCP trials on certain office branch using fire disaster simulation by activating alternative locations close to branch office.

## 5. Legal Risk

Legal risk is a risk due to the weakness of the judicial aspect / legal be cause transactions are not well-documented. This risks are unlimited on e m e r g e n c y r i s k s from the failure possibilities on contract/agreement, lawsuits/third party claim, incompatibility with the rules and regulations applied, weakness engagement, imperfect binding assurances, inability on court ruling implementation, court decisions that can interfere or affect the operation or Bank condition.

Legal Risk Management done by:

- a. Conduct a review on legal documents, agreements and contracts with third parties.
- b. Inventory on legal cases that occur including monitoring the progress of each case on existing law. Handling of the legal case are done based on priorities and the entire development are well-monitored and are always reported to the Management to be followed up through completion containing at least the potential legal risks.
- c. Function of Legal Division, which has an important role in providing analysis/review from legal sight related to the product or bank activities, giving suggestion from legal sight by the existence of regulation changes, review on agreements made between bank and third parties, moreover, handling legal cases related to the litigation as well.

## 6. Strategic Risk

Strategic risk, is a risk caused by an inappropriate in determination and implementation of bank strategy, inappropriate business decision-making or bank less responsive against external changes. Some steps conducted to anticipate this risk done by:

- a. Arrange bank business plan for the period 2015-2018 used as guide for management and employee.
- b. Monitoring on financial performance by comparing between realization and target to be achieved by bank based on bank business plan.
- c. Planning performance division that routinely conduct periodical monitoring (performance review) on performance achievement on every division and overall bank.
- d. Revised update on strategy to be achieved based on development both on internal and external conditions, so that it become realistic with the bank target achievement.

## 7. Compliance Risk

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Compliance risk, is a risk caused by the non compliance bank or not implement legislation and other provisions in force as major concern. Steps taken to anticipate this risk are:

- a. Arrange Compliance Policy and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
- b. Monitoring of customer data updating and implementation of CIF singles as well as handling of passive accounts/dormant.
- c. Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT) based on mandate in the Regulation of Bank Indonesia, where PT J Trust Indonesia Tbk regularly perform socialization to the relevant units through the Compliance Division.
- d. Statements of Compliance to the Internal and External.
- e. Increased compliance functions to test compliance on any regulation, both internal and external conditions.

## 8. Reputation Risk

Reputation risk as a pillar of trust giving risk due to negative publicity related to the bank business activities or negative perception against Bank that could affect the Bank image, so that the level of public confidence on Bank relatively increased.

As a reflection of the Bank's attention to the risk of reputation, then the reputation risk management is done by:

- a. Monitoring on media publications, in collaboration with third-party services by the Corporate Secretary.
- b. Monitoring customer complaints via Product & Networking Management Division to handle complaints promptly, and perform optimization on Call Center function in handling of customer complaints.
- c. In an effort to implement risk management, Bank actively running a Corporate Social Responsibility program and other social activities, public expose, build relationships with the media, and gathering with clients.
- d. The reputation and the support of the new shareholders professionally assist management in order to improve the reputation and public confidence through increased performance and better work programs and a direct implication on the management of reputation risk.
- e. Improving the new corporate image of Jtrust Bank by improving the Bank's website and carry out press releases to the media.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk believe that every aspect of the effectiveness on the implementation of the Company's good management (including risk management and internal control systems) in conjunction with Good Corporate Governance (GCG) will improve the reputation.

## Evaluation on Effectiveness of Risk Management System

Board of Commissioner constantly evaluate risk management policy and risk management strategy at least once in a year or in a greater frequency in the event of changes in the factors affecting the Bank's business activities significantly. In carrying out these functions, the Risk Monitoring Committee regularly conduct meetings with the Risk Management Unit (SKMR) every month to discuss the risk profile that includes inherent risk and quality of risk management from eight (8) types of risk.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Board of Commissioner evaluate the results of exposure to the risk profile of the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Unit (SKMR), and suggests improvements for the implementation of Risk Management policy regularly to the Board. The evaluation was done in order to ensure that the Board of Directors manage the activities and risks of the Bank effectively.

## 5.2. Internal Control System

An Internal Control System (SPI) is required to manage the Bank effectively and efficiently, and as a basis for healthy and safe operations.

Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 on Risk Management Implementation for Commercial Banks, Bank Indonesia Regulation No. 9/15/PB1/2007 dated 30 November 2007 on Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Banks, and Bank Indonesia Circular Letter No.5/22/DPNP dated 29 September 2003 on Internal Control Standard Guidelines for Commercial Banks, require the Bank to effectively implement Internal Control System to all business activities and operations in all organizational levels of the Bank.

Internal Control System is a control mechanism established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in an ongoing basis in order to achieve the company's goals.

The implementation of Internal Control System will effectively help the Bank in:

- a. Maintaining and securing Bank's assets.
- b. Ensuring the availability of a more accurate information and report.
- c. Improving the Bank's compliance to the provisions and prevailing regulations.
- d. Reducing financial impact/risk of losses, irregularities including fraud, and violation of prudential principles.
- e. Enhancing organizational effectiveness and cost efficiency.

For the above purpose, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has adopted Internal Control principles based on the COSO Model with 5 (five) components that must be controlled as follows:

### 1. *Control Environment (CE)*

CE is a set of standards, rules, processes and organizational structures that provide the basis for implementing ICS for the whole organization. BOD and Management implement Tone At The Top over the importance of ICS including the standard of behavior. CE consists of integrity values and organizational ethics, parameters that may allow BOD and Management to implement operational control of the company, the effectiveness of organizational structure, individual tasks, performance obstacle, incentives and penalties to encourage performance accountability, the results of CE will have a broad impact on ICS in overall.

### 2. *Risk Assessment (RA)*

RA involves a dynamic and repetitive process to identify and assess risks that may affect the achievement of company's objectives, so that RA form a basis for determining how risks will be managed. RA also requires the management to consider the impact of potential changes within external environment and business model that can make SPI ineffective. Risk is defined as the possibility that an event will occur and affect the achievement of corporate goals.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### 3. *Information Communication (IC)*

IC is required by companies in the SPI implementation in order to support the achievement of corporate goals. Management acquires or produces and uses a form of relevant and quality information, both internal and external resources to support the other components of SPI. Communication should be carried out continuously, by giving, sharing and obtaining the required information. Internal Communication is a medium where information is disseminated throughout the organization, communicated to all levels which allow individuals to receive a clear message from management and vice versa. External Communication consists of two activities, which are enabling to receive relevant external information, and providing information to external parties.

### 4. *Monitoring Activities*

Monitoring activities consist of Sustainable Evaluation (Ongoing Evaluation), Separated Evaluation (Separate Evaluation), or a combination of both that is used to ensure whether each of the five SPI component, is Present (Present) and Functioning (functioning). Sustainable evaluation is built into the business processes at different levels to provide information relating to errors/omissions at the earliest stage. Separate evaluations performed periodically will vary in scope and frequency depending on the results of the risk assessment, effectiveness on the Sustainable evaluation and other considerations from management. The findings from evaluation are recorded and communicated to the management.

### 5. *Control Activities (CA)*

CA is the management direction defined by policies and procedures to reduce risks against companies' objectives achievement. CA conducted at all levels of the organization, at different stages in the business process, and all of Information Technology (IT). CA can be either preventive control or detective that can be done manually and automatically such as authorization, approval, verification, reconciliation, and reporting business performance. Segregation of Duties can be used as the construction and development of CA. When Segregation of Duties failed to run, management must select and develop alternative control activities.

Each of the component are related to each other, it is need an integrated control and its implementation responsibilities are on all of units hand with the objectives are as follows:

1. **Strategic**, bank business plan are well-understood, in line and supported by all of unit.
2. **Operation**, runs effectively and efficiently in using human resources and infrastructures.
3. **Reporting**, accurate and reliable.
4. **Compliance**, activities and transaction bowed into the provisions and laws in force.

Throughout 2015 average audit rating in bank wide are as follows:

No	Risk Owner	Audit Rating			Explanation
		2014	2015	Rating	
1	Branch	75,52	74,83	Fair	SPI of Branches. Weaknesses were found in various components of SPI (5 Components) and corrective action should be made to the SOP, systems and human resources.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

2	Division	79,62	75,06	Satisfactory	SPI has been running quite well, but still need limited improvement to the SOP and human resources compliance in the administration of operations.
3	Credit Division	71,83	74,58	Fair	SPI of all units of Credit. There were many weaknesses in the various components of SPI (5 Components) and corrective action should be made to the SOP, systems and human resources.

Explanation on the causes of the decline in audit rating:

1. Declining quality of control from Branch personnel due to inadequate risk awareness.
2. Inconsistencies in the implementation of SOPs.

Efforts that have been made to improve Internal Control System include:

1. Performing mutation of Operation Officer.
2. Applying reward & punishment.
3. Disseminating socialization of Internal Control System.
4. Establishment of verifiers.
5. Training for Operation Officer.

**CHAPTER VI  
PROVIDING FUNDS, BANK STRATEGIC PLAN, TRANSPARENCY AND  
OTHER ASPECTS OF DISCLOSURE**

**A. Provision of Funds to Related Party and Provision of Large Funds ( Large Exposures)**

Provision of funds to Related Party and the debtor/core group per December 31, 2015 are shown on the following table:

No.	Funding	Total	
		Debtor	Nominal (in million rupiah)
1.	To the related parties *)	25	161.296
2.	To the core debtor :	25	2.876.670
	- Individual	17	1.982.904
	- Group	8	983.766
Notes: *) Number of provision fund to related parties are include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loan to the Bank's Executive Position which is given under employee loan PT Bank JTrust Indonesia Tbk with the total of 24 debtors, with given loan limit as much as Rp8,066 million.</li> <li>• Loans to JTrust Investment with loan limit of Rp153,230 million</li> </ul>			

The loan, which is given to the Core debtors, are consist of loans delivered to 17 (seventeen) individual debtors as much as Rp1,982,904 million (including related party on behalf of J Trust Investment Indonesia) and 8 ( eight) group of debtors as much as Rp983,766 million.

In accordance to Bank Indonesia Regulation, fund provision to the related party and core debtors/group has been reported orderly including exceedances on BMPK along with Action Plan Implementation Report/Action Plan Solution.

The loan process is already passed the Technical Meeting in order to mitigate various possibilities that may emerged before delivering fund provision to the debtors. In each decision making of fund provision is a result of joint decision in Credit Committee Meeting in line with Credit Limit Decision Authority (BWMK) and implementation of Four Eyes Principle where the credit decision is based on the recommendation from related Business Unit and Credit Risk Reviewer that hoped to produce a qualified credit and accomplish the determined target. Special for Bank Indonesia provision on Maximum Credit Disbursement Limit (BMPK), particularly, is always informed on Credit Analysis Note (NAK) based on the Memo on Bank's Capital published each month by Accounting Division or Risk Management Working Unit.

Bank already possessing internal policy on monitoring fund provision mechanism, which consider the diversification of the portfolios by dividing the management to each Business Unit according to its credit segmentation, such as Business Retail segment that divided into SME Business, Consumer Business, Micro Business, Corporate Business, and Linkage Business.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

PT Bank J Trust Indonesia Tbk determined internal policy on the fund provision limit according to Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 as well as on the amendment on Bank Indonesia Regulation No.8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 on Maximum Limit of Credit Disbursement, and according to the Memorandum of Procedure No. 31.12/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 dated August 31, 2015 on Maximum Limit of Credit Disbursement (BMPK) and the Management of Debtor Group, which re-emphasize that BMPK provision and InHouse Limit BMPK is divided into:

1. BMPK to Unrelated Parties is determine at maximum of 20% from Bank's Capital for 1 (one) individual lender, and maximum of 25% from Bank's Capital for 1 (one) group lender.
2. BMPK to Related Parties is determine at maximum of 10% from Bank's Capital.
3. BMPK to Debtor Group is determine at maximum of 80% of BMPK (inhouse Limit)

Fund provision to Related Parties is being re-emphasize through the Memorandum of Procedure No. 31.13/M.Dir-MRD/JTRUST/VIII/2015 dated August 31, 2015 on Fund Provision to Related Parties.

## B. Rencana Strategis Bank

JTrust Co as the shareholder of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is a Japanese financial company that officially passed the fit and proper test on acquiring Bank from the previous owner. As a new investor, J Trust Co is committed to develop Bank Mutiara that has change its name and logo to "PT Bank JTrust Indonesia Tbk" or "JTrust Bank" to move forward in the future as implemented on the RUPLSB on December 30, 2014, March 30, 2015, and September 29, 2015 with the agenda of new capital deposit of Rp300 billion, Rp300 billion and Rp400 billion respectively, hence in total the new capital deposit is approximately Rp1 trillion, as well as additional capital through subordinate loan as much as Rp342 billion, also the promotion of management in order to strengthen the business growth in the future.

In determining the strategic and fundamental step, it is required the company's vision and mission that are aligned with the parent company in order to run properly. The vision and mission that has been set is as follows:

### Vision and Mission

The Bank has set a vision and mission, which has been disseminated and implemented thoroughly through operational activities and corporate culture.

#### Vision :

**"BECOME A RELIABLE FINANCIAL PARTNER TO CONTINUE TO PROVIDE INNOVATION"**

JTrust Bank constantly take efforts to become a qualified and professional bank financial service providers, as well as innovating with new things to better serve the banking needs through a close relationship as business partners.

#### Mission :

1. **"CONTINUE TO CREATE A WORKING ENVIRONMENT THAT ENCOURAGING HIGH MOTIVATED PERSON"**
2. **"CONTINUE TO PROVIDE A GOOD EXPERIENCE THROUGH BANKING SOLUTION FOR EACH CUSTOMER"**

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

In connection with the Mission, JTrust Bank continue to create a work environment that supports highly motivated people and continue to provide good banking experience through solutions geared to each customer with the core values "SPEED-CHANGE-ACTION" as the embodiment of:

**SPEED** : "One step ahead of competitors in providing the fastest service"

**CHANGE** : "Be a game changer in the banking industry"

**ACTION** : "Trying to be the best to provide maximum performance"

Position analysis approachment can also use the following SWOT (S = Strengths, W = Weakness, O = Opportunity, T = Threat) so that it can be used as reference in the formulation of policy and strategy, as stated below:

## **S - Strengths**

1. Having good access to the UKM business network for businessmen from certain ethnic.
2. Having relationship advantages to the customers' funds.
3. The new owner is Jtrust, a financial company from Japan to strengthen company's image and a wide international network.
4. Possessing 61 offices to the financing of UMKM.
5. Possessing funds marketing powerful enough.
6. A public company, making it possible to get funds from the capital market for the purpose of future expansion.
7. Advantage treasury (money changer).

## **W- Weaknesses**

1. Financing structures dominated by high cost fund especially deposito.
2. Funds product not yet supported by proper banking technology.
3. Number of staff with a proper credit analyzing ability still in minimum.
4. Still remaining debitur with BMPK exceedances.
5. Implementation of banking technology and electronic channels are still inadequate that it can't encourage the growth of low-cost funds and lack of product champion.
6. Spread of the office network is still not optimal as it is more concentrated in Jakarta.
7. Changes in provisions/regulatory capital [ CAR based on ICAAP, PBI No. 14/18/PBI/2012] causing CAR JTrust Bank should be above the minimum requirement of 14% causing a limitation in the expansion capabilities of assets and branch network the Bank, and in accordance with PBI No.15/12/2013 on Bank Capital Minimum which requires fulfillment of additional capital as Capital conservation buffer, which gradually performed until 2019 amounted to 2.5% of extra capital.
8. The Bank is currently operated under an adequate scale, and does not fit the overhead fixed cost structure profile, making it difficult to achieve similar performance with the industry best performers and the peer group.
9. The development of an industrial environment with an average CAR 17-18% put the financial strength of JTrust Bank in an inferior position to competitors.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

10. Corporate brand has not been able to encourage the ease of efficient business acquisition.
11. Micro Business Infrastructure, Consumer and Small as the main business has not been able to support the establishment of a portfolio that supports equalization acceleration of the performance.
12. Productivities are not comparable to the number of branches and labor costs.
13. The need for improvements in credit quality.
14. Cost of Fund are still high.
15. The integrated MIS has not been optimal.

### **O- Opportunities**

1. Opportunity to optimize network distribution in Java and outside Java.
2. Foreign exchange transaction market and Bank Notes can still be optimized, and can be added by Common Foreign Exchange market which is still not optimal, besides business opportunities in the JTrust network.
3. Potential asset growth especially UKM segment from certain ethnic business players can still be increased.
4. Opportunities for consumer & retail sector remains open.
5. Opportunities for micro financing which have not been tapped by banks are very much open.
6. The Bank has cooperated with several institutions with customer based and wide distribution network for business development in several sectors such as funding, loans, and fee based income.
7. With the lowest loan-to-GDP ratio of 25%, Indonesia is expected to face structural change in credit cycle.
8. With new owner of Japanese investor, it allows for opportunity to expand customer base from Japanese customers.
9. SME segment is still the fastest growth loan segment.

### **T- Threats**

1. Tight competition in collecting low-cost funds by utilizing e-banking and other electronic channel.
2. There are still lawsuit potentials from customers or counterparty related with the old management problems.
3. Recovery failure on bad productive assets and AYDA.
4. Worsening credit asset portfolio in material amounts particularly due to macroeconomic impact which affects the decline in CAR.
5. Increasing interest rates can tighten bank liquidity.
6. Small-scale banks are more sensitive on reputation threats

### **a. Management Policy (Policy Statement)**

In line with business target achievements, J Trust Bank has set and implemented 4 priority target focuses set from 2014 to 2020 as foundation for business growth, as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

1. Business Development:
  - Evaluation and Business development of lending & funding
  - Technology-based business development to expand retail customers, attract fee based income and provide best service for customers
  - Measured KPI & Financial model
  - Integrated MIS
  - Strong Early Warning System
  - Crossborder transaction adds funds and reduces cost
  - Budget Control
  - NPL settlement in intensive manner.
2. *Business Process*
  - *Mapping potential customer and competitor*
  - *Designing effective and efficient business process*
  - *Integrated promotional program*
  - *Monitoring sales process discipline*
  - *Revitalizing branches*
3. Human Resources
  - Fulfilling competent HR
  - Continuous Training Program
  - Attractive career path
  - Incentive scheme
  - Strong corporate culture
  - Review and improvement of organizational structure with high accommodate fast and efficient business dynamics
4. Infrastructure
  - Optimalization of office network
  - IT development with supports business with replacement of core banking system
  - Building integrated IT

## **b. Risk Management Policy and Compliance**

1. Strengthening the implementation of dual control and quality improvement through:
  - Implementation of RCSA (Risk Control Self Assessment)
  - Implementation of JSOX Based Component
2. Development and improvement of 8 types of risk profile management that are separated from business management
3. Improvement in the early warning system
4. Implementation of four eye principles
5. Improving the quality of the credit committee implementation ( Credit Application assisted by consultants, credit and financial institutions training by the Bank's internal employees).

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

6. Improving the quality of ALCO implementation to provide competitive interest rate for the Bank's products.
7. Improving the quality of advice/management's recommendation related to the risk management, the Risk Management General Policy (KUMR).

Strengthening the quality of compliance (GCG) and corporate culture:

1. Strengthening the quality of management policies and decisions about products, services, as well as the management of the company as stipulated in a decree, circulars, SOP both internally and externally by providing input to the divisions, socialization, conduct assessment, etc.
2. Strengthening implementation of corporate culture program based on the set standard.

### c. **Business Development Strategy**

With the new policy which according to the Bank Indonesia Regulation No. 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network based on Bank's core capital for today where the bank is now trying to strengthen capital. Then, on the next phase the bank seeks to strengthen the implementation of the dual control and business quality improvement again in the next year through: business development plan that is more focused on the field or micro, small and medium enterprises segment, such as retail and commercial, as well as working to improve funding composition at a better CASA.

Besides, after forming collaboration through "Bancassurance", more products will be developed to support low cost fund as well as optimizing the existing network. Bank also will start to improve and upgrade its core system to support and develop the "E-Banking" and "M-Banking" to provide a better convenience for the prime customers, as well as to be able to compete with liability products of other banks.

### d. **Human Resources Development Strategy**

Strategy of Human Resource Development (HRD) and the Remuneration Policy (Remuneration Policies) that has been conducted in 2015, are as follows:

- a. Remuneration package/policy and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors include:
  - a. Remuneration in the form of non natura, including salaries and other fixed income, such as allowances (benefit), stock-based compensation, and other forms of remuneration.
  - b. Other facilities in the form of natura/non-natura i.e other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance and other facilities, which can be owned and can not be owned.
- b. Disclosure package/remuneration policy referred to, includes:
  - a. Remuneration package/policy and other facilities for members of the Board of Commissioners and Board of Directors set by bank RUPS.
  - b. Types of remuneration and other facilities for all members of Board of Commissioners and Board of Directors, at a minimum cover members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the total number of packages/remuneration policy and other facilities.



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- c. The members of the Board of Commissioners and Directors receive remuneration packages grouped in a single year in the range of income levels, as follows:

**Table Remuneration of Directors and Board of Commissioners as of September 2015**

(in person)

Remuneration per Individual in 1 year *)	Total Directors	Total Commissioner
Above Rp.2 billion	1 person	-
Above Rp.1 billion to Rp.2 billion	3 persons	1 person
Above Rp.500 million to Rp.1 billion	-	-
Below Rp.500	-	1 person
*) Received in cash before tax		

- c. Ratio of the highest salary and the lowest salary
- a. Salary is a right of employees which is received and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees assigned and paid by an employment agreement, contracts, or laws, including allowances for employees and their families for a job and/or services he had done.
  - b. Ratio of highest and lowest salaries per September 2015, on a comparative scale are as follows:
    1. Ratio of the highest and the lowest salaries for employee is 1:21
    2. Ratio of the highest and lowest salary for the Directors is 1:1,50
    3. Ratio of the highest and lowest salary for commissioner is 1:1,21
    4. Ratio of the highest salary of the directors and the highest salary for the employee is 1:2,91

The salary compared in the salary ratio above is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Directors and employees per month. Bank employee is a permanent employee up to the extent executor.

## 1. **Business Plan**

Is a bank business plan for the short term (1 year) and medium term (3 years) including a strategy to realize the plan, a plan to improve business performance, and plans for fulfillment on prudential requirements in line with the target and time setting.

Business plans are arranged must remark the external/internal factors, the prudential principle, the implementation of risk management and healthy banking principles. Business plans should be carefully prepared, realistic and comprehensive so that it can better reflect the complexity of the business and can be set as policy and development direction for the Bank, and can also increase the operational flexibility of the Bank in facing higher competition. Business Plan prepared by the Board of Directors and must be approved by the Board of Commissioners and communicated to the shareholders and employees at all levels of organization.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

Preparation of the Bank Business Plan refer to Regulation of Bank Indonesia No. 12121/PBI/2010 dated October 19, 2010 on Bank Business Plan and Bank Indonesia memorandum No. 12127/DPNP dated October 25, 2010 concerning Commercial Bank Business plan, which at least includes an executive summary, management policies and strategies, risk management practices and current Bank performance, projections of financial statements and underlying assumptions, projections of ratios and other certain items, funding plan, funds investment plan, capital plan, organization and human resources development plan, products publication and /or implementation of new activities plan, plans on development and /or changes in the office network, and other informations.

Bank Business Plan must be submitted to Bank Indonesia no later than the end of November before the year Business Plan begins.

Business Plan Changes can only be done in 1 (one) time, at the latest by the end of the first half of the current year if:

- There are external and internal factors that significantly affect the operations of the Bank, and/or
- There are factors that significantly affect the Bank's performance based on the consideration of Bank Indonesia.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has compiled RBB realistically, comprehensive, measurable (achievable) by observing the prudential principle and responsive to internal and external changes. Related to this matter can be described as:

- ✓ RBB has been prepared on the assumption of future macroeconomic growth and the ability of the Bank itself accompanied by the implementation of the prudential principle to create realistic RBB, comprehensive and measurable (achievable). Banks also quite responsive to the development of internal and external conditions by RBB Revised 2015-2017 dated June 30th 2015 through a letter to the OJK No.30.03/S-Dir-PPD/JTRUST/VI/2015, and Revised Adjustment on Business Plan of PT Bank JTrust Indonesia, Tbk for the year 2015-2017 with a letter to the OJK No.11.01/S-DIR-PPD/JTRUST/IX/2015 dated September 11 2015 and has been working on creating the RBB for the years 2016 to 2018 which has been submitted by letter No.30.03/S-DIR-PPD/JTRUST/XI/2015 dated November 30, 2015.
- ✓ The Board of Directors has implemented RBB effectively. It is performed by Board of Directors, by monitoring the effectiveness on the implementation of RBB, with the following act:
  - Monitoring the realization of RKAP/RBB to the shareholders on a monthly basis (performance review).
  - Monitoring the RBB realization submitted to Bank Indonesia on every Quarterly.
  - Monitoring realization achievement against RBB made directly at the end of each month by doing a "prognosis monthly meeting" so that the achievement in line with the targets set.
- ✓ Commissioners carry out supervision on the implementation of RBB. Related to this matter can be described as:
  - Commissioners already supervised the implementation of RBB through the preparation of the business plan supervise report (regularly per semester) submitted to the OJK and the monthly meeting of Directors-commissioner. In the report and the meeting, in addition to act as a supervisor, the Commissioner also provide direction and input for the future strategy to the Bank.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## a. Short-Term Business Plan

### a.1. Total Asset

Realization of total assets in December 2015 compared to December 2014 increased by Rp.540 billion, from Rp.12.682,02 billion to Rp.13.221,95 billion. The increase in assets is primarily comes from the impact of rising credit of Rp.1.021,36 billion, but there is a decrease in SBI/Government Bond amounting to Rp.714 billion and Depo Facility/Fasbi amounting Rp.719 billion. On the liabilities side the increase occurs because of the capital injection from shareholders and subordinated loans.

### a.2. Total Third Parties Funds (DPK)

DPK until the period of December 2015 growth more on composition of cheaper funds mainly on CASA improvement of 9.4% in the period of December 2014 to 13.2% in December 2015 for a nominal amount at December 2014 amounted to Rp.11.026,74 billion to Rp.11.024,92 billion in December 2015. This is mainly to align with credit growth which is began to grow. Although the growth is still slower from the credit growth, but does not impact on the liquidity considering the same period banks obtain fresh funds from shareholders in the form of subordinated loans as well as additional capital back.

Improvements on DPK composition especially on Giro from Rp.569,77 billion amounting to Rp.1.000,47 billion in December 2015, while on the other hand savings declined slightly by Rp.10,14 billion from Rp.465,47 billion reduced to \$ Rp.455,34 billion. Banks will still continue to work in the future periods in structuring the funding towards a cheaper funds and attempt to renounce from jumbo depositors.

### a.3. Loans Granted

Performance of J Trust Bank with the capital increase that impact on the improvement of CAR, and as J Trust Bank has become a bank in a normal surveillance that minimum limits of CAR declined, banks already have leeway to re-expand the business in the field of credit in order to increase bank's income in pursuing the fulfillment of the targets set, without leaving prudential banking principles or prudence as well as maintaining capital.

Credit Business expansion in December 2015 has increased the debit balance amounting Rp.521,36 billion, or 5.88% of Rp.8.865,66 billion in September 2015 to Rp.9.387,03 billion in Quarter IV/December 2015, although these periods there exist a decrease in credit for the sale of assets Rp.846 billion.

The achievement of credit has met the targets set in its business plan amounted to Rp.9.013,77 billion. Credit growth in Quarter IV/December 2015 occurred in almost all sectors of the credit, except the consumer sector that seems to decreased due to transferred debtor to the business sector linked, as well as the transfer of non-performing loans to PT JTII also lowered credit outstanding as much as Rp.826,38 billion.

In seeking the fulfillment of target credit which was constrained by the limitations of bank capital in the previous period, in early 2015 efforts to meet the achievement began to improved without abandoning the principle of

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

prudential bank. On the other hand Bank will keep trying to improve composite risk profile to lower the CAR requirements, in order to be used in business expansion in the future, and sustainable.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## a.4. Profit and loss

Although operationally bank had improved especially for credit growth and refining cost of funds, but imposition to reshape the provision over the decline in credit quality and loss on sale of assets mentioned previously resulted in the increasing bank accumulated losses in years running at the Quarter IV/December 2015, from negative Rp.440,02 billion in the third quarter/September 2015 to negative Rp.636,13 billion, however, it still below the projected losses of Rp.656,75 billion.

As can be explained as follows:

1. With the growth of credit and the outstanding target has been exceeded in this quarter, but the number of decrease is very significant in credit quality causing the interest income is not effectively received. This leads to a maximum of interest income only equal with the target of interest income given.
2. An increase in interest costs to 8.04% in December 2015 from September 2015 amounted to 7.69%, is the impact of the growth of funds on deposit interest rates in order to meet the supply and support the expansion of credit at the end of the period, though it still below and couldn't reach over from the initial target of 8.6%. Credit productivity is not optimal that it led to NIM in below the target.
3. Besides that, the establishment of reserves for PPA in the fourth quarter/December 2015 must be re-established because of a decrease in PL to NPL.

### As for targets in the future are as follows:

With the capital increase at the end of 2015 will have an impact on CAR improved and an availability of room for credit growth in 2016. With the expansion of new loans in 2016 to 2018, and the customer confidence that has been recovered by the switch of ownership to the new investor, then in 2016 fund-raising is more focused on improving the composition of better CASA with balances projected to decrease as an impact of the reduction of jumbo deposits gradually being replaced by MTN transaction. Whereas for the period 2016 third party fund is projected to grow by Rp.2.117 billion back into Rp.12.523 billion in 2016, for in 2017 raised by Rp.1.885 billion to Rp.14.409 billion, and in 2018 returned to growth of Rp. 1.841 billion, or Rp.16.250 billion. This increase is related to the alignment of credit that began to grow with a healthy level of LDR and business conditions of banks are expected to return to normal and improve. In addition to the issuance plan to mitigate liquidity risk with continuing of high dominance on large depositors/jumbo, bank seeks to do a "cross-border transaction borrowing" through the issuance of securities of promissory notes by attracting investment funds through shareholders gradually, as for this early stage is Rp. 370 billion up to March 2016. The interest rate is assumed to vary according to the tenor that is between 7% to 8%. With the interest rate to replace the jumbo depositors, the cost of funds is expected to fall or improved.

While for the further business development can be explained some of the focus strategy that will be implemented as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## **A. Microcredit Business Development Plan**

1. Development of micro-credit business is one of the Bank's efforts to increase J Trust business to a more focused on the business segment of UMKM, by considering the Indonesian Banking Architecture and the potential of micro segment market is still developing.
2. Development of micro segment financing as well as efforts 'breakthrough' to accelerate the recovery performance of JTrust Bank on a level equal with top-ranking peer group. Micro business development is expected to accelerate the achievement of a sustainable Return On Equity and micro businesses are expected to be one of the core business of JTrust Bank.
3. Additions of 7 micro kiosk in 2015 to 25 stalls will be one of the stimulant to the increase in microcredit portfolio. The addition of the network is one of the factors for the growth in this segment. For 2016, it is planned to increase of 5 kiosks to 30 units with a target portfolio grew into Rp 300 billion. In its operation, each of 4 to 7 micro kiosk will be supervised by a cluster adjusted to the extent of the work area to keep coordinating with regional offices.
4. The business target market with a maximum limit up to Rp 100 million with a maximum term of three years and a limit up to Rp 300 million with a term up to five years. Up to 2016, it is planned that the limit still focus on up to Rp 200 million.
5. To support the development of the financing segment, there are critical factors that have been prepared as mentioned below:
  - a. Risk Management  
Adequate IT systems support to encourage the credit process, administration, monitoring, and reporting as well as general retail credit segment.
  - b. Fulfilment of HR with sufficient micro competency.

## **B. Consumer Credit Development Plan**

1. Cooperation with cooperatives/companies for the welfare of employees through the new EBP program by 20 partner until December 2015 and is targeted to increase 20 new partners so that at the end of December 2016 grow to total of 40 partners.
2. Maximizing marketing for the first home ownership to new customers.
3. For customers with fluent historical payment and has been running 2-3 years, are given Top Up offer loan facilities.
4. Optimizing credit processing branch in 2015 at the branch Bekasi, Bogor, Fatmawati, Depok, Serpong, Kelapa Gading independent and entire KC outside Jabodetabek to be at least 25 branches at the end of 2016 credit processors.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

5. Increasing the productivity of the branch on the marketing of mortgage loans and EBP minimum of Rp2 billion per month.
6. Development on IT infrastructure that is accelerating the implementation of LOS (Loan Originated System) to simplify and speed up the process and disbursement of credit.
7. Adding partnerships developers as much as 30 developers at the end of December 2015, and added 15 new partnerships in 2016.
8. Improve the competence and skills of human resources in the credit by engaging on sustainable training.

## **C. Development Plan for SME loans**

1. Determination of a clear target market.
2. Target mirroring Branch/Regional Offices and Small Business Division.
3. Decentralization credit processing in branch by developing credit processing branches to 34 branches and 17 referral branch in 2016. Meeting the needs of the AO in 34 credit branch processors and about 90 people in fulfillment of Business Manager in credit processing branch.
4. Increased competence with the training to the entire AO.
5. SME development strategy by setting a target KPI mirroring branch, regional offices with RBD, in which each of the target per month for AO Junior amounting to Rp1 billion and Rp 2 billion for Senior AO.
6. Improved SME portfolio by the following acts:
  - a. Selection of a prospective borrower from existing customers who have been in contact with JTrust Bank for 2 (two) years.
  - b. Targeting specific business communities.
  - c. Doing Business Model Value Chain, with a common alliance debtor's on other business units.

## **D. Credit Linked Development Plan**

1. Increase cooperation with existing strategic partners (Multifinance, cooperatives, BPR) and build new strategic partners through a model of channeling, executing, and joint financing for vehicle financing, Multipurpose, Factoring, Versatile, and others.
2. Product innovation multifinances, cooperatives and BPR.
3. Utilizing business of some of the existing partners.

## **E. Credit Development Plan for Corporate Business Division**

1. Develop account strategies (Growth, Maintain, Exit) to the existing borrowers in order to establish Account Plan on existing debtor in 2016.
2. Business Development (extra/Top Up) for existing Debtor is only focused on borrowers with Account Strategy "Growth". For Borrower with Account Strategy "Maintain", additional can only be done very selectively by referring to the prudential principle. While borrowers with Account Strategy 'Exit' focus on the collection, settlement/take over another bank.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Business development for the new debtor only focus on targetting customer (debtor defined and discussed with the Risk Unit) before the process approach to prospective debtor. Thus, the prospective of the new borrowers already made a selection from the start by involving risk unit (four-eyes principle).
4. Focus on strengthening the banking transactions and explore the business potential on existing borrowers to improve and generate fee-based income and also develop the value chain business to synergize with other business units (SME, Consumer, Micro, Treasury).
5. To streamline and optimize the management of debtors who fall into the category of watchlist (debtor kol 2b and 2c) will immediately take over its management to the Special Asset Management Unit.
6. Propose an organizational structure adapted to the development of business, improvement Business Processes, Systems and Procedures (end to end credit process), improvement on monitoring and controlling systems as well as Quality Assurance. All of these initiatives should be supported by the human resource development (training, coaching, sharing) to increase the competence of human resources.

For more details, credit growth plan for each unit are as follows:

Table Credit Outstanding Per Unit Business

(million Rp)

Outstanding Loan	Dec'15	Des'16	Des'17	Des'18
Multifinance Loans	3.332.811	4.024.564	4.184.281	4.171.060
Credit Recovery	742.280	510.377	435.012	359.642
Corporate Loans	3.633.923	4.751.427	5.561.635	6.167.392
Small Loans	459.119	876.321	1.447.155	2.138.608
Consumer Loans	433.276	742.656	1.046.553	1.239.073
Micro Loans	141.402	310.388	563.867	859.112
<b>Total</b>	<b>8.742.810</b>	<b>11.215.734</b>	<b>13.238.504</b>	<b>14.934.888</b>

- For further fund investment business development, in addition to bank credit sector also plans to conduct placement of funds in the form of equity participation.

Plan on equity participation in financial companies with the prudential principle, especially in determining viable financial firm and to consider lending limit through the inclusion of a maximum of 15%, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/26/PBI/2012 regarding Business Activity and Office Network based on Core Capital Bank, also consider PBI No. 7/3 / PBI / 2005 regarding Legal Lending limit for Commercial banks, and PBI No. 15/11/PBI/2013 regarding to the Prudential principle in Capital Investment Activity.

**In terms of overhead cost**, rise in the next year majority intended to support the business and new strategic initiatives such as: the costs related to network expansion, transfer of headquarters, capital expenditures and the cost of IT to



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

support the business as well as higher personnel costs. For the next, in the post personnel costs in 2015 amounted to Rp.316,79 billion higher than in 2016 so it looks decline to Rp.297,77 billion due in 2015 there is a charge for payments laidoff reserves (relating to non-productive employees) Rp.25 billion, whereas in 2017 amounted Rp.324,44 billion, it is associated with the plan on addition of new employees to support expansion of microcredit and consumer and the opening of branch as well as an increase in COLA and bonuses based on performance. The strategic plan also affects the general and administrative expenses, resulting in increased costs are incurred in 2017 related to the addition of the office. Besides related to business expansion, general administrative costs also include the cost of relocating the head office as well as the continuation of a spending plan depreciated and IT costs to business expansion and there is a possibility of upgrading/replacing the core banking business in order to better accommodate development. For promotion cost in 2015, it is expected to be saved remembering the need for the cost to support the banking business.

Cost PPAP was formed in line with the growth of new loans and the assumption of new expansion fraction (2%) declined the collectability, as shown below.

Table Cost of PPA for the New Loan Growth

	December-15	December-16	December-17
Loan Growth	1.169.468	2.842.967	2.889.465
Provision for New NPL	1.147	2.786	2.832
Provision for New Ekspansi	11.701	28.430	28.895
	12.847	31.216	31.726

**Note:**

- 1) 1% PPA for the new credit
- 2) Assumed 2% from new expansion become NPL with detail:
  - 5% Loss (100% PPAP)
  - 15% doubtful (50% PPAP)
  - 80% sub-standard (15% PPAP)
- 3) PPAP for NPL calculated after reduction on collateral assumed covering 80% from outstanding.

Net NPL is expected to fall from 7.58% at the end of August 2015 to 0.7% in September 2015 and gradually increased to 0.47% at the end of 2017 due to the expansion of new credit (assumed 1% NPL for new loans) as well as the Gross NPL from 13.53% in August 2015 to 2.54% and continues to decline improved to 2.02% at the end of 2017, improving the quality of non-performing loans will take place in 2016-2017. Asset recovery is assumed as follows:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Non Performing Loan	Recovery Plan						
	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	2,017	2,018
Portfolio Category 3 - 5							
- KTA KERJASAMA PT. HOTELS LOSARI (1 USER)	1,545,000	1,214,000	1,263,000	1,314,000	1,368,000	3,925,000	
- KTA KERJASAMA PT. KOPKAR GLOBAL (1 USER)	2,155,000	1,678,000	1,734,000	1,791,000	1,849,000	8,027,000	9,135,000
- PT. MATAHARI SINAR PLASTINDO	-	-	-	-	-	-	-
- PT. ANDOYO TOFAN NU	-	-	-	500,000	-	-	-
- PT. INFRANET	35,250,000,000	-	-	-	-	-	-
- PT. TRIO IRAMA	-	-	-	-	-	-	-
- PT. CIPAGANTI	-	-	-	-	-	-	-
- ANDIANTO S	-	-	-	-	-	-	-
- MICRO LOAN	-	-	-	-	-	-	-
Downgraded in September 2015							
- Tunas Multi Anugerah							
- Kurnia Surya							
Debt moratorium/suspension of payment:							
- MULTI NIAGA (PKPU)							
- SUMBER ABADI (PKPU)		800,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	300,000,000	10,000,000,000	
- CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA (PKPU)						3,000,000,000	5,000,000,000
<b>TOTAL NPL</b>	<b>36,093,700,000</b>	<b>1,642,892,000</b>	<b>3,842,997,000</b>	<b>6,343,605,000</b>	<b>3,143,217,000</b>	<b>16,437,627,676</b>	<b>5,809,135,000</b>
<b>Foreclosed Collateral</b>							
Portfolio							
- Global Financindo, PT	-	-	-	-	-	-	-
- Pratesis, PT.	-	-	-	-	-	-	-
- Roy Indra Kusnohadi	-	-	-	-	-	-	-
- Global Financindo, PT	-	-	-	-	-	-	-
- Pratesis, PT.	-	-	-	-	-	-	-
- Roy Indra Kusnohadi	-	-	-	-	-	-	-
- Cahaya Naga	-	-	-	-	-	-	-
- Polymer	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FORECLOSED</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Written-off Loan</b>							
Portfolio							
- ELMANDA PT.	-	-	8,000,000,000	-	-	-	-
- TRANKA (PKPU)	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-
- SUHARLI MALAYA (PKPU)	-	-	-	-	-	-	-
- KOPERASI BINA (PKPU)	-	-	2,000,000,000	1,200,000,000	-	-	-
<b>TOTAL WRITTEN OFF LOAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>36,093,700,000</b>	<b>1,642,892,000</b>	<b>16,842,997,000</b>	<b>7,543,605,000</b>	<b>3,143,217,000</b>	<b>16,437,627,676</b>	<b>5,809,135,000</b>

- a. Banks will sell some troubled assets in September 2015, AYDA and written off loans transferred to PT JTrust Investment Indonesia (PT JTII), in order to better focus on business activity and healthier financial structure performance. In accordance with the Board of Directors meeting on September 9, 2015 will be transferred by Rp.2.750,3 billion with total selling price is assumed to be 42.5% of the outstanding amount, or at Rp.503,5 billion after downgrade on Tunas Multi Anugerah and Kurnia solar. So the losses predicted to Rp.235,9 billion in September 2015.
- b. Banks still having bad loans amounted to Rp.198,7 billion, and Rp.200,6 billion in AYDA as well as write off loans in major because of legal cases. The NPL ratio expected would be 0.70% Net NPL and gross 2.54% in September 2015.

Strategies will be conducted for the period 2015 through 2017 to support profitability and balance sheet structure to create a good income areas as follows:

- a. Attempt to increase fee based income in 2015 with the following:
  - Increasing fee based income remittance
    - ✓ Performing intensive marketing to optimize remittance transaction by increasing cash encashment services remittances both domestic and overseas.
    - ✓ Increasing remittance partnership such as Mandiri D/S, BCA D/S, Fire, MoneyGram.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- ✓ Reward and promotion by giving awards to the branch office and support on remittance promotions.
- ✓ Alliance with other banks or companies who are possessing system remittance.
- Adding and improve interbank line partnership.
- Expand business on network owned by Jtrust include in Japan, Korea, and Singapore (Expanding cross-border transaction in the region).
- Increase PIB transaction on branches.
- Increase fee base d f rom g uaranteed ban k publication par tnership t o companies with bonding permission (KGB).
- Increase fee based income treasury:
  - ✓ Optimalization of treasury gallery and existing unit treasury as on stop service infrastructure to forex trading, market consulting.
  - ✓ Granting treasury line facilities such as tom, spot, forward, and swap for every corporate clients and money changer to generate profit for bank and increase volume.
- Warehousing activities by placement of securities in mutual funds, where its management done by MI (Investment manager).
- Increase fee based in credit field by increasing client transactions and developing product bundling and a special rate establishment.
- b. Until September 2015, by using the wide office network (61 offices), J Trust Bank will keep on optimizing the existing network and perform development based on capital power which is also had been decide on ICAAP. For the target of opening micro kiosk up to December 2015 it is expected to organically from 7 kiosk to a total of 25 micro kiosk from 18 micro kiosk that already exist, and cluster supervising between 5 to 10 micro kiosk.
- c. Keep on developing IT Core Banking and its infrastructure as one of supporting business acceleration.
- d. Increase yield and investment management to produce optimal result.
- e. Reconsideration and development on products and pricing establishment on competitive mode, however keep on giving profit so that it can compete in order to increase interest rate and fee based income.

## a.5. Financial Ratio

### 1. Capital:

As seen from the minimum capital adequacy ratio, CAR (market, credit and operational risk) which is equal to 13.6% in December 2014 and with capital paid back rose to 17.08% in March 2015 that is projected to be 16.59% in December 2015 in line with the growth of credit. The decline in the CAR ratio at the end of 2014, as has been described above primarily due to erosion of core capital to accounting losses in the running year following the burden of the operating loss due to the worsening of the collectibility of loans and a decrease in outstanding loan as well as the imposition of costs significantly, especially related to legal and labor costs. As much as Rp.910,68 billion of bank's core capital at the end of 2014 with the additional paid-in capital amounting to Rp 300 billion, the capital return to Rp.1.289,27 billion in March 2015 and CAR becomes 17.08% is predicted to continue until August 2015 to 12.75%. But the bank has planned a new capital increase amounting to Rp.400 billion and Subdebt amounting to Rp

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

350 billion, which is expected in September 2015 CAR will become 18.99%. At this time the bank also began to increase the outstanding balance of credit so that the CAR is predicted will become 16.59% at the end of December 2015 and 13.56% in 2016 and 12.22% in 2017. Bank seeks to maintain the CAR to comply with the provisions of Bank Indonesia and Good Corporate Governance and always remains able to meet the applicable provisions.

## 2. Rentability :

NIM continues to improve from 0,3% in 2014 and become 1,3% in 2015, and projected in 2016 will raise up to 3,6% and in 2017 raise up to 4,0%, bank strive to perform improvement on some factors detaining NIM.

**Some attempt to increase NIM** are as follows:

### a. Increase low cost fund raising

Increase in DPK by considering cost and competitive interest rate as well as performing cost efficiency relate to funding, e.g operational costs, cash in safe, etc.

Attempt to repair funding mix by performing some innovation and program development for giro and savings as well as continuing services development.

Bank attempt to increase number of account by partnership with credit division and a reference from existing client and companies' by holding payroll for its employee. Through increasing in number of accounts, it is expected that low cost balance will keep on raising. Moreover, the addition on ATM feature is expected to increase services to clients so that they can transact freely in ATM unit anywhere.

### b. Performing yield enhancement

Aside from reducing cost funding, increasing NIM also can be done by increase credit interest income by the following strategies:

- Continuing programs such as cash program on NPL settlement, as it has been running from 2014 to the end of 2015.
- Developing and performing microcredit expansion, which is planned in 2015 starts to open 7 more kiosk, so that it become total 25 kiosk from 18 kiosk. Opening micro kiosk in 2014 to 2015 planned to spread in Jabodetabek, Banten, Central Java, and East Java.
- Performing consumer credit expansion and small credit expansion rapidly, but still hold on prudential principles.
- Selling AYDA and placing it on productive assets.
- Controlling deposito growth as high cost fund resources so that it will not experiencing rapid growth compared to credit increase.
- Transfer some placements on daily BI with low interest rate to the other productive assets placement with higher interest rates as long as the fund still can't be distributed in the form of credit.

Other profitability ratios, such as ROA and ROE related to profit generated, until the end of 2015 is predicted to be negative. ROE improved from negative to positive by 12.1% in 2016 and to 21.1% in 2017.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

ROA in 2016 amounted to 0.98% and 1.60% in 2017. ROE and ROA are expected to improve related to profit generated in subsequent periods, income earned is an operational and sustainable results.

### 3. Liquidity

JTrust Bank constantly fulfilling the provisions in force for Statutory Reserves (GWM) rupiah-primary by 8% and secondary by 4%. This include fulfillment of the GWM in foreign currency amounted to 5% since March 2011, and meet the foreign currency GWM requirement ratio to 8% started in June 2011 in accordance with applicable regulations. Liquidity for daily operations is expected to remain well preserved, where placement on SUN and SBI rose from the placement of the capital increase of the bank. LDR ratio is projected at 91.9% in 2015 as an impact of the gradual decline in jumbo fund deposits to be replaced to crossborder transactions (MTN, issues securities, and others) and continued until 2017, as the bank's efforts to optimize net interest income. Although the risk of LDR will be above 100%.

### 4. Assets Quality:

a. An increase in the percentage for the collectability of 2014 amounted to 5.4%. Net mostly caused by a decrease in the O/S credit. But with the growth of credit in future periods as well as the sale of troubled assets, NPL ratio is expected to continue to improve. The ratio of non-performing loans are expected to continue below 5% in 2015 amounted to 0.66% and is projected to continue to improve in 2016 amounted to 0.48%, and become 0.47% in 2017.

b. NPL ratio is projected to continue to improve and continue to be pursued under the maximum limit set by Bank Indonesia. This is done through the efforts of monitoring and handling of problem loans such as billing, restructuring and expansion of new loans that are projected as smooth without the existence new NPL.

Efforts will be made to improve the quality of productive and non productive assets are as follows:

- Conducting cooperative and prospective restructuring on problematic debtors.
- Maximize billing services by using third-parties services.
- Stratification on debtor that can be PKPU (Revision of Debt Settlement) and which can be bankrupted.
- Charging write-off securities through the courts.
- Conduct a reassessment on all AYDA and write-off collateral debtors.
- Optimization Auctioneer and KJPP (Office of Public Appraisal Service).
- Monitoring on problematic L/C cases.
- Conducting litigation or lawsuits to debtor who are not cooperative.
- Reorganization that leads to the sharpening unit.
- Appointing advisor in accounting, legal and appraisal.

c. JTrust Bank The bank strives to form PPA based on the Regulation of Bank Indonesia, so that its compliance is always projected at a minimum of 100%.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 5. Credit ratio against total productive assets:

Originally 67.3% in December 2014 and 67.9% in 2015 in line with the re-growth of credit compared to 2014, the composition of the loan portfolio to total earning assets is projected to rise with the growth of credit. For the next period in 2016, jumping by 76.1% and amounted to 79.4% in 2017 as an impact of credit growth that expected to return to normal growth in the next period.

## 6. UMKM ratio (Micro, Small and Medium Enterprises) Against Total Credit:

As well as credit disbursement target for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are also projected for future periods that may continue to increase in every year. The ratio of UMKM to total loans in 2014 amounted to 11.0% and 11.1% in March 2015 and is projected in 2015 to re-grow to 13.6% in 2016 amounted to 15.9% and for the next period in 2017 is projected to grow in range of 18.3% and in line with the running credit growth.

## f. Medium-Term Business Plan

The Bank had stipulated several medium-term targets on the basis of short-term plan as the commencement or base figure of the business which can be delivered as follows:

2014-2017 business development is carried out in two phases comprising of 5 Key Issues, as follows:

### 1. **Financial Performance Improvements**

#### **Phase 1. Reconsolidation in 2014**

- Increased Capital Management
- Implementation of the efficiency program
- Depositing initial capital of Rp300 billion in order to improve the risk profile and sustain the balance sheet of JTrust Bank.

#### **Phase 2. Expansion**

##### a. 2015

- Increased Capital Management
- Increased Profit/Loss Management
- Balance Sheet Restructuring to increase revenue
- Increase in capital injection as much as Rp.300 billion.

##### b. 2016-2017

- Increased Capital Management
- High interest Credit expansion (high yield)
- Clearing the non prospective assets

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- Increase of the following capital injection subject to the requirements set forth in the 2015-2019 corporate plan in order to support credit growth projections.

## 2. Development of Risk Management

### Phase 1. Reconsolidation in 2014

- Increase in loan process
- Managing the entire Bank risk portfolio and develop Risk management devices.

### Phase 2. Expansion

#### a. 2015

- Increase in loan process
- Managing the entire Bank risk portfolio and develop Risk management devices.

- Develop integrated risk control system.

#### b. 2016-2017

- Applying an integrated risk control system.

## 3. Infrastructure and Operations Development

### Phase 1. Reconsolidation in 2014

#### Preparation and design:

- Revitalization of the branch and channel distribution
- Develop effective business process
- Branch as a sales and Service Channel
- Business process engineering

### Phase 2. Ekspansi

#### a. 2015

- Implementation of *distribution channel* & branch
- Implementation of *effective business process*
- Relocation of Headquarter
- Improve IT System to support MSME & ritel banking business
- Implementation of XBRL (*electronic business reporting*)
- Implementation of *Network Security and corporate Internet Banking*
- Submitting *cash management*
- Preparing *Chip Card system* to fulfill BI provisions (NSICSS)
- Implementation of *performance management system*
- Increasing *Loan Origination System*

#### b. 2016-2017

- Implementation of *distribution channel* & Branch
- Implementation of *effective business process*
- Expansion of branch office
- Implementation of *e-banking*
- Implementation of *mobile banking* for MSME client
- Implementation of *cash management*

## 1. Business Main Focus

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## Phase 1. Reconsolidation in 2014

- Consolidation on *loan business*
- Build strategic segmentation for Consumer & UMKM financing.
- *Differentiate approaches to SMEs VS. Middle Market*

## Phase 2. Ekspansion

### a. 2015

- Micro & SME Business Acceleration
- Increase branch productivity
- Increase low-cost funds
- Expanding deposits customer base*
- Shifting core deposits*
- Improve strategic alliance in *network*
- Strengthening fee based income ratios*
- Strengthening money changer positioning*
- Strengthening Human Resources capabilities development by recruiting 280 *account officer* and *funding officer*

### b. 2016-2017

- Low cost funds : 23%
- Accounts* : 1 million
- Quality network* : 71
- Adjustment on *delivery channels*
- Sales/relationship Management*
- Strengthening Human Resources capabilities development by recruiting 615 candidates

## 2. **Company's Image Improvement**

Starts to implemented in Phase 2. Expansion by performing the following things:

- Perform *rebranding*
- Improving new marketing
- Communication program
- Prepare integrated community through *Marketing Communication Program*
- Increase *brand awareness* through effective and integrated promotions improvement.

## g. **Long Term Business Plan**

For further long-term business development can be described by the following focus strategy:

### **2018**

#### **Market Share**

1. Accelerate growth of *Retail Banking*
2. Increasing *fee based income* through improvement on services
3. Increase market share and business network
4. Entering the *digital banking era*



# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

## 5. Sustainable Business Growth

### 2019

#### **Integrated Expansion**

1. Strengthening market position
2. *Integrated banking* Micro SME & Commercial, *Retail Consumer*
3. Increasing business growth
4. Increasing profits and assets

### 2020

#### **Sustainable growth**

1. Development of innovative products
2. Expanding and strengthening the domestic and international networks
3. Improving service quality
4. Offering better and more comprehensive digital banking services.

## C. Transparency of Financial and Non-Financial condition unrevealed In Other Reports

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has provided disclosure information regarding financial and non-financial Bank condition to stakeholders through publication of Annual Financial Statements, Quarterly Financial Reports and Other reports submitted to regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders based on regulations applied. The Annual Financial Report published in at least two newspapers on national distribution, for the Quarterly Report published at least on one national newspaper and can be accessed through the bank's web site [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).

Aside from publishing the Financial Statements, PT Bank JTrust Indonesia Tbk also prepares and submits reports in form of Annual Report. The Annual Report is expected to explain the overall transparency of Bank, including ownership, management, operational activities, business development and performance of the Bank to the community/public in maintaining public confidence in the Bank.

Annual Report must be submitted to Shareholders, Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK), Indonesian Consumers Foundation (YLKI), Indonesian Rating Agency, Indonesian Banks Association (PERBANAS), Indonesian Banking Institute (IBI), two (2) competent Research Institutes in Economics and Finance, two (2) famous Economics and Finance Magazine, and the Ministry of Industry.

The coverage on Annual Report is quite comprehensive, covering Public Information, Annual Financial Statements, Opinion from the Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency on employment report, transparency on reporting in accordance with PSAK, Exposure and Risk Management and other Information closely related to Bank Operations.

General information including: board of Management, details of Shareholding, Bank business development, objectives, strategy and management policies, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important things that are predicted to occur in the future, the number and HR structures. While the Annual Financial Report is a year-end financial report as a result of the audit from Public Accounting Firm (KAP) and their opinions.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Transparency should also apply to information about bank products to provide clarity to the customers about the benefits and the risks inherent in Bank Products. This transparency can be information in Indonesian delivered to the customers completely and clear regarding product characteristics both oral and written. The information is at least covering the product name, product type, the benefits and risks attached, protocols in using the product, costs of products, calculation of interest or profit sharing and margin benefit, validity period of products and Bank product publishers including presence and absence of guarantee products. Changes made shall immediately notified to the customer. The information about the products should be clear, including the layout and legibility.

The Bank also continuously updates customer data, so that personal data submitted by customers to the Bank is transparent and up-to-date, this is in addition to improve the protection of customers' privacy in touch with the Bank as well as to minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank also must request written consent from the customers if the Bank will provide or disseminate personal data of Customer to another Party for commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparency should also performed in the settlement of customer complaints, which is a form of increased customer protection so that the rights of customers in making transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints should be followed up immediately to protect the Bank's reputation risk and public confidence in the banking institutions. The Bank has a period of 2(two) business days for the settlement of oral complaints and 20 (twenty) days for written complaints.

Banks should provide a special unit or function for handling customer complaints at the Headquarters which address and resolve customer complaints, and shall publish the existence of this unit to the public. The results of the handling and settlement of the complaints must be reported quarterly to the Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia (BI).

### D. Number of Internal Fraud and settlement efforts by Bank

Internal Fraud is irregularities/fraud committed by management, permanent and temporary employees (honorarium and outsourcing) related to the work process and the Bank's operations that affect the Bank's financial condition significantly. Point in affecting significantly to the Bank's financial condition is if the impact of the irrelevancy are > Rp.100.000.000, - (one hundred million rupiah).

Throughout 2015 the number of fraud cases (Internal Fraud) performed by Bank employees and/or external parties that affect the Bank's financial condition significantly or impact of deviations > Rp.100.000.000, - (one hundred million rupiah) are as the following table:

(satuan)

Internal Fraud in 1 year	Number of cases involving						Description
	Management		Permanent Employee		Non permanent Employee		
	Previous Year	Running year 2015	Previous Year	Running Year 2015	Previous Year	Running Year 2015	
<b>Total fraud</b>	-	-	2	2	-	1	1. Acceptance of Fee/Kickback and

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

							<p>forged documents at Jatinegara Micro Kiosk</p> <p>2. Misappropriation of Promotional Fund at Consumer Business Division/Consumer Loan Division</p> <p>3. Acceptance of Fee at Retail Business Division Work Unit</p>
<b>Settled</b>	-	-	2	1	-	-	
<b>On Settlement process in bank internal</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Settlement not yet commenced</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Followed up by legal proceedings</b>	-	-	-	1	-	1	

There are two (2) cases of fraud (Internal Fraud) that occurred in 2014 and was revealed in 2015, in the second half (August) of 2015 Bank has attempted settlement through legal process by reporting the employees involved in fraud to the authorities/police of Republic of Indonesia (INP). For 1 (one) case of fraud that happens in 2015, the Bank has settled it by dishonorable discharge of said employee from the Bank.

### E. Anti-Fraud Strategy Implementation

Bank has implemented Anti-Fraud Strategy based on Bank Indonesia Circular Letter No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 regarding the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of anti-fraud strategy JTrust Bank i.e: Prevention, Detection, Investigation, and Reporting & follow-up Monitoring.

Management of JTrust Bank has established a zero tolerance policy towards fraud by setting the Anti Fraud Charter and slogan "No Fraud Tolerance" on April 19<sup>th</sup> 2012. Bank has set up an Anti Fraud Desk under President Director who is in charge of coordinating the implementation of anti-fraud strategy of JTrust Bank.

In 2015, the Bank has implemented programs on each pillar of anti-fraud strategy continuously and consistently, they are:

- a. Socialization of *anti fraud* regularly
- b. *Know Your Employee* (KYE) program
- c. Implementation of *Whistleblowing system*
- d. *Surprise Audit* Program
- e. *Surveillance Audit* Program
- f. Case investigation
- g. Evaluation and follow-up monitoring for resolving cases of fraud

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Whistleblowing System

Since 2012 the Bank has implemented Whistleblowing System (WBS) which serves as a means of instrument to accept fraud indication report known by employees in working environment as well as means of receiving fraud indication report or conflict of interest known by customers/partners of the Bank. WBS Bank instrument are as follows:

- Post Office Box 99 Jakarta 10000
- Hotline SMS/WhatsApp sent to Number: 0813 1504 5555.
- Portal anti fraud by address [http://10.33.1.57/jtrust\\_serasi/](http://10.33.1.57/jtrust_serasi/).

Bank's management is committed to protect fraud reporter with a good faith and obedient to all relevant rules and regulations and best practices applied in the implementation of Whistleblowing System.

The protection afforded to the complainant includes bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion/promotion, discrimination in all its forms, and record adverse in employee personal archives (personal record file).

J Trust Bank WBS managed by the Anti Fraud Desk directly under the control of President Director so that any complaints received in the Bank's WBS will be opened by the anti-fraud authorities and forwarded to the President Director to get follow-up.

Throughout 2015 there were two (2) reports of violations went into WBS JTrust Bank and have been followed up by Bank by conducting a special investigation.

## F. Total Legal Issues and Settlement Efforts by Bank

Legal issues are civil law issues and criminal law issues faced by bank throughout the year period and a report has been filed through the legal process.

During 2015 the number of civil and criminal cases faced by PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which has been filed through legal process, as the following table:

### 1. Bank as Defendant/Reported

Legal Issues	(satuan)	
	Civil	Criminal
Settled (with binding legal force)	6	-
In settlement process with the Bank as Defendant	25	-
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>-</b>

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## 2. Bank as Plaintiff/Applicant/Reporting Party

Legal Issues	(satuan)	
	Civil	Criminal
A. Case(s) with the Bank as Plaintiff (Counter charges)		
Settled (with binding legal force)	-	-
In settlement process	1	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
B. Case(s) with the Bank as Bankruptcy Applicant		
Settled (with binding legal force)	4	-
In settlement process	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
C. Case(s) with the Bank as the Reporting Party of Allegation of Criminal Act		
Settled (with binding legal force)	-	-
In settlement process	-	3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Legal issues commonly faced by Bank are:

- Civil action
- Suspension of Payment (PKPU)
- Criminal Reports

Efforts to resolve legal issues by the Bank include:

- Ensure handling of cases, both handled by internal and external lawyers are in accordance with the provisions of applicable law.
- Monitor the progress of legal cases handled by both internal and external lawyers.

### G. The Use of Service Provider on Information technology/IT Vendor

Based on PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007, and BICircular Letter No. 9/30/DPNP dated 12 December 2007 regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, the Bank may use the services of the other party/information technology vendor to organize the activities of information technology in order to improve effectiveness and efficiency in achieving strategic objectives.

The use of IT vendors causes in Bank dependency on services provided in an ongoing basis or within a certain period that can affect the incidence of the Bank risk in form of operational risk, compliance, legal and reputational, among others, for their failure to service providers in providing services, breach of security or inability to comply with applicable laws and regulations.

- **The Selection and Determination Process of Information Technology Vendor**

In general the selection and determination process of information technology vendor (related with system/program cooperation) in PT Bank JTrust Indonesia Tbk include:

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- a.1. Getting information sources of IT vendors from:
- Previous experience in interacting with prospective vendors.
  - Network introductions fellow IT banking.
  - Browsing on the internet.
  - Input from business unit/division/branch/other internal.
  - Seminar or training.
- a.2. Criteria and basic consideration in determining the prospective IT vendor to be selected:
- Meets the highest total value/maximum 100 of the combined three aspects of assessment, i.e.:
- Functional Aspects, weights 40% with a maximum value of 40.
  - Technical Aspects, weights 30% with a maximum value of 30.
  - Financial Aspects, weights 30% with a maximum value of 30.
- a.3. Procedures of request for approval on prospective IT vendor to be selected:
- Conduct a review on the annual business plan that contains a list of projects to be executed, and set priorities for the project which will be run.
  - Gathers requirements/functional needs from the business unit.
  - Gathers requirements/technical needs from the IT Division.
  - Saw requirement/financial needs/Budget on the annual business plan.
  - Preparation of TOR (Terms of Reference) based on the functional and technical requirements.
  - Send presentation invitations and its TOR to several IT vendors.
  - Presentation from IT Vendor Candidates.
  - IT Vendor Candidates submit tender proposals based on TOR.
  - Invite POC (Proof Of Concept) of vendor TL (if it is possible for POC).
  - Candidates IT vendors perform POC (if it is possible for POC).
  - Assess all aspects (total maximum value of 100) consists of:
    - Functional Aspects (maximum value 40), assessed by the business unit as a user.
    - Technical Aspects (maximum value 30), assessed by IT Division.
    - Financial Aspects (maximum value 30), assessed by a Corporate Secretary Division (authorized Procurement Division).
  - Assessment on IT vendors discussed in the IT Committee (if the project is strategic).
  - IT Committee according to the appropriate authority provides recommendations to the Board of Directors.
  - The Board of Directors shall approve or decline the IT Committee recommendations.
  - After approved by the Board of Directors based on limits authority based applicable limit, the Procurement Division of a Fixed Asset following up engagement process of IT vendor hereinafter: Purchase Order process/Work Order manufacture, contracts and others.

- **Monitoring/Supervision of IT Vendor in Vendor Management**

Banks are required to possess a data monitoring program of IT vendor on an ongoing basis to ensure the service providers/IT vendors has been carrying out work/provide services in accordance with the contract/agreement to perform:

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- Monitoring the achievement of SLA (Service Level Agreement) from main vendors of IT.
- Routine working visit to the work location/data center of the main IT vendor.
- Requests for annual financial statements (Audited) IT major vendor.
- Request an independent audit results from the relevant institutions such as ISO.
- Meeting regularly with the main IT vendor.
- Monitoring progress on the completion of IT projects periodically according to the Project Management principles.

The following is a list of IT projects and IT Vendor in cooperation with PT Bank JTrust Indonesia Tbk throughout 2014:

No	Vendor Name	Project Name	Goals from the use of Projects	Status
1	PT. Teravin Technovations	<i>Internet Banking for Corporate</i>	Corporate customers can use internet banking services	Accomplished
2	PT. Misys International Financial Systems	<i>Upgrade Core Banking System - Bank Fusion Equation</i>	Enhance the functions of the latest core banking	Accomplished
3	PT. Vaia Indonesia	Project Management Office (PMO) for <i>upgrading Core Banking System</i>	Ensuring upgrade on Core Banking System goes smoothly	Accomplished following <i>upgrade core banking project</i>
4	PT. Multipolar Technology	PSAK 50/55 Module	Financial Statements in accordance with the provisions of PSAK 50/55	Accomplished and being reviewed on post-implementation
5	PT. Visionet Internasional	<i>Outsourcing DRC</i>	DRC facilities which are professionally managed	Accomplished
6	Aplikasi BI	RTGS Gen 2	Following BI provisions	Accomplished
7	Aplikasi BI	SKN Gen 2	Following BI provisions	Accomplished
8	PT. Visionet Internasional	PBX for the new Head Office	The availability of PBX for headquarter in Sahid Sudirman Center.	Accomplished
9	PT. Dymar Jaya Indonesia	New HSM for ATM application	Replace HSM 8000 which is not supported with HSM 9000	Accomplished
10	PT. Visionet Internasional	<i>Outsourcing Email Server</i>	Replace freeware Zimbra email with Exchange email	Accomplished
11	PT. Excite Indonesia	<i>Website Renewal</i>	Renewing website related to JTrust Bank rebranding	Selesai fase 1
12	PT. EDI Indonesia	MPN Gen 2	Following the Tax provisions	<i>On Progress</i>
13	PT. Mitra Integrasi Informatika dan PT. Wahyu Kartumasindo	<i>Chip card (NSICCS)</i>	Following BI provisions	<i>On Progress</i>
14	PT. Aristi Jasadata	<i>Fixed Asset</i>	Administer the inventory data	<i>On Progress</i>
15	PT. KPSG	<i>Human Resource System</i>	Integrating HR Payroll, Administration, Planning and Development	<i>On Progress</i>
16	PT. Multipolar Teknologi dan PT.	<i>Virtual Account</i>	Implementation Teller and virtual account through	<i>On Progress</i>

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	Mitra Integrasi Informatika		ATM	
17	PT. DTEX Indonesia	IT Internal Risk Assessment	Monitoring and regulating the internal IT security	On Progress
18	PT. Visionet Internasional	Active Directory	As a condition to run the internal risk assessment	On Progress
19	PT. Tri Daya Asira	Interface RTGS New Generation & SKN dengan Core Banking System	RTGS New Generation Automation & SKN, so no need to double input	On Progress

### H. Determination of Bank Supervision Status

By noting :

- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/2/PBI/2013 dated May 20, 2013 on the Status Determination and Follow-Up Supervision of Conventional Commercial Banks,
- Financial Services Authority (OJK) Letter No. SR-233/D.03/2014 dated December 16, 2014 regarding Determination of Bank Mutiara in Intensive Supervision,
- Bank Letter No. 29.04/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 dated December 29, 2014 regarding Determination of Bank Mutiara in Intensive Supervision Status,
- J Trust Bank Letter No. 03.02/S.Dir-SKMR/JTRUST/XII/2015 dated December 3, 2015 regarding the Request to Review the Intensive Supervision Status of PT Bank JTrust Indonesia Tbk,

Based on the supervision results of the Financial Services Authority (OJK) against bank's performance until position in October 2015, that the performance of J Trust Bank has shown improvement and met the criteria according to applicable regulations to exit/escape from the "Intensive Supervision" status, then according to the OJK Letter No. SR -223/D.03/2015 dated 10 December 2015, regarding Determination of Bank Saudara in Normal Supervision Status, that the OJK has set J Trust Bank supervision status in the "Normal Supervision Status".

To ensure the condition of Bank's Normal Supervision status is well maintained, then the Management of J Trust Bank always strives to optimally pay attention and perform the following acts:

- Improved performance of rentability and effective management on asset quality to set direction and strategy of long-term capital in order to create organic capital growth and sustainable.
- Maintain a minimum KPM ratio of 11% and the NPL ratio in accordance with the regulations applied and considering the average industry ratio.
- Maintain liquidity to a stable condition through liquidity management carefully by paying attention to early warning indicators and adequacy of liquid assets.
- Improving the quality of risk management at the Bank's main risks and strengthening the quality of Good Corporate Governance.
- Improving Human Resource adequacy, both quality and quantity, through identifying competency gaps, effective recruitment, proper training and adequate that considering obligations of minimum ratio on education cost against the overall cost of Labor.
- Completing the follow-up commitment to the OJK examination results.



## CHAPTER VII FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

### 7.1. Funding for Social Activities

Funding for Social Activities is a form of implementation on the corporate social responsibility program (Corporate Social Responsibility/CSR) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which is believed it can create conducive community conditions, and capable of responding to changes in society, which could eventually create mutually beneficial relationships between PT Bank JTrust Indonesia Tbk and the wider community.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk constantly strive to create a harmony atmosphere of activities operation to the community wide and caring environment, which is expected to be a company that continues loved by the people. The creation of a society that is safe, comfortable and dynamic believed to be ideal conditions for the survival of any business in the world.

Based on the idea that the company is part of a society, PT Bank JTrust Indonesia Tbk realize that the company has a social responsibility to develop and empower the lives of surrounding communities through the program "JTrust Peduli" focus on education, health, social religious, caring living environment and emergency response in every nature disaster.

### **5 (Five) Pillars of CSR at PT Bank JTrust Indonesia Tbk**

In order to carry out regarding all above aspects, PT Bank JTrust Indonesia Tbk perform some efforts by paying attention to the five pillars of *Corporate Social Responsibility (CSR)*, as a principle in the implementation in the field. The five pillars are as follows:

- ***Building Human Capital***  
Internally, the Bank strives to create reliable human resources. While externally, the Bank strives to empower the community, primarily through community development.
- ***Strengthening Economies***  
Bank seeks to make profit by taking into account the interests and welfare of the community in the economic environment in which it operates.
- ***Assessing Social Tension***  
Bank continues to maintain harmony with the surrounding communities in order to avoid conflict.
- ***Encouraging Good Governance***  
In conducting its business, Bank always run Good Corporate Governance well.
- ***Protecting The Environment***  
Bank strives to conserve the environment.

### **CSR Program for 2015**

Throughout 2015, PT Bank JTrust Indonesia Tbk continues to participate in building a society within the framework of the implementation of CSR programs with the details of CSR funds distribution focused in several fields of activity describe as follows:

#### 1. Education

One of the CSR program in education conducted/carried out by PT Bank JTrust Indonesia Tbk was the education donation assistance program in cooperation with Koperasi Karyawan Mulia Industry, Cikarang, Bekasi, West Java, - in the form of donations for

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

education (granting assistance cash benefit for education) for orphaned students in elementary/junior high/high school in surrounding area.

Donating the CSR programs funds to educational activities held on August 25, 2015 amounting to Rp2,550,000 (two million five hundred and fifty thousand rupiah).

## 2. Health and Humanity

A regular program of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, in the framework of CSR activities in health and humanity, is organizing a blood donation activities working (together) with Indonesia Red Cross (PMI) Jakarta branch. This activity is held regularly every year at IFC Building 3rd floor, multipurpose room of J Trust Bank Headquarters. With the participants of the donors come from internal (part) of the bank as well as employees of the company/tenant in the IFC building.

The Blood Donation Activity carried out on April 8, 2015 required funds amounting to Rp12,184,500 (twelve million one hundred eighty-four thousand five hundred rupiah).

## 3. Social and Religious Affairs

Form of CSR program activity in the field of social and religious affairs run by PT Bank JTrust Indonesia Tbk in 2015 are as follows:

a. Donation for orphans and the orphanage foundation in surrounding area were held at the Fatmawati Branch Office on July 10, 2015. In this donations, bank management provide donations in the form of nine kind of basic needs and cash. The entire needs of the funds expense in this event was Rp41,396,700 (forty-one million three hundred and ninety-six thousand seven hundred rupiah).

b. The slaughter of sacrificial animals (qurban) in order to commemorate the Idul Adha 1436 H, where PT Bank J Trust Indonesia Tbk participated to enliven/celebrating the religious activities, executed on 24 October 2015 in Masjid Al-Ijtihad, Setiabudi - South Jakarta. In this the event, the company donated 1 cow at a price of Rp22,500,000 (twenty-two million five hundred thousand rupiahs).

## 4. Disaster Emergency Response

The next CSR program activity held by PT Bank J Trust Indonesia Tbk was disaster donations support in the form of donations of fires disaster in Klerew Traditional Market - Solo, Central Java. Regarding with this matter, the company helped in renovating the market based on local government proposal with the donation worth of Rp15,000,000 (fifteen million rupiah).

## CSR Program Plan 2016

Besides maintaining consideration and improving activities based on 5 (Five) pillars of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as has been previously elaborated, CSR Program Plan includes several activities which have been done in the previous years. However, there are several big events which are planned to be carried out as far as the company's ability allows.

The following are several CSR program activities for 2016:

- Blood Donation
- Qurban

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

- Donations to orphanage
- Scholarship for employees' children with high
- Natural Disaster Donations
- Living Environment (*Go Green*)

Moreover, PT Bank JTrust Indonesia Tbk will still maintain and support for initiative programs of Financial Services Authority (OJK) in financial education (in the banking field). The bank will carry out a program called SIKAPI, which had been carried out previously. The program aimed at the people who live at the surrounding of Head Office and Branch Offices of J Trust Bank.

### 7.2. Donations for Political Activities

Just like the previous years, throughout 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk never engaged in any political activities or provide donations for political activities.

No	Political Activities	Total (Rp)
NIHIL		

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Revision on Self Assessment Report (Self Assessment/Implementation of GCG Bank)

- GCG implementation requires assessments to determine how far is the corporate governance principles development have been conducted by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The assessment is also useful to seek the quality of GCG implementation on an ongoing basis into business processes.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk periodically carry out a self-assessment in accordance with the provisions of Bank Indonesia, which requiring Bank to perform internal self-assessment on the implementation of GCG.
- Report on Self Assessment over the Implementation of GCG Bank grouped into five (5) ratings categories, i.e: Rating 1 (Very Good), Rating 2 (Good), Rating 3 (Good Enough), Rating 4 (Not Good), and Rank 5 (Not good). Smaller rank order reflects the better application of GCG.
- Results on Self Assessment over the Implementation of GCG Bank in 2015 are:

Results on <i>Self Assessment</i> over the implementation of GCG Semester I/Position June 2015		
	Rate	Rate Definition
<b>Individual</b>	3	Good Enough

Results on <i>Self Assessment</i> over the implementation of GCG Semester II/Position December 2015		
	Rate	Rate Definition
<b>Individual</b>	2 *)	Good *)

\*) Based on Letter of OJK No. S-53/PB.311/2016 dated July 29, 2016 subjected to Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk, there are differences in Factor Ratings results of GCG by OJK that is Ranked 3/Pretty Good, therefore Bank should revise the Report on Self Assessment Individual on GCG Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the position in December 2015 ( Ref. SEBI 15/15/D PNP dated 29 April 2013 regarding the implementation of GCG for Commercial Banks).

- Below are delivered Revised on Self Assessment Report on Individual GCG Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the position in December 2015:

<b>Result of <i>Self Assessment</i> report on Implementation of GCG</b>		
	Rate	Rate Definition
<b>Individual</b>	<b>3</b>	<b>Good Enough</b>
<b>Consolidation</b>	---	<i>(if subsidiary company exist)</i>
<b>Analysis</b>		

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Result of Self Assessment report on Implementation of GCG

Based on the Working Paper (KK) and data/other supporting documents (internal and external audit results, the data financial/non-financial), the self-assessment can be submitted as follows:

### A. Strengths Factors:

#### a. Governance Structure:

Governance structure is a structure of power following the requirements of officer in the Bank as required by legislation applied.

Related to the implementation of governance structure, can be delivered in the following things:

- Shareholders have fulfilled the commitment of capital increase, which was carried out as follows:
  - Date March 30, 2015 amounted to Rp 300 billion through the EGM.
  - Date September 29, 2015 amounted to Rp.400 billion through the EGM, and also increased its authorized capital from Rp.12 trillion to Rp 15 trillion.
  - October 2015 issuance of sub debt (subordinated loans) amounted to USD 25 million (eqv. +/- Rp.342 billion).

#### Notes:

Capital increase by shareholders conducted up to the date of December 31, 2015 has reached the maximum level in accordance with the provisions of the OJK, delay on capital increase until the decision of the Constitutional Court regarding the status of public shareholders. As a consequence, the capital increase by the shareholders will be postponed later.

- Date of December 28, 2015 have been carried out RUPSLB with agenda changes to the management structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- The composition of the Board of Commissioners and Directors meet and consist of skilled individual and experienced with a good understanding on banking financial industry, integrity, competence and a adequate reputation. Directors undertake efforts to foster a culture of compliance and implementation of good corporate governance, as well as the Board of Commissioners to supervise the implementation of GCG and compliance functions.
- Committees have been established under the Board of Commissioners and under the Board of Directors in accordance with applicable regulations, as well as members of committees have the competence and have been carrying out their duties and responsibilities, as well as carry out compliance in accordance with the meetings.
- Already have policies and Standard Operating Procedure/SOP on Conflict of Interest, and always be up to date.
- Already have infra Organization Structure of Risk Management, Compliance and fields Legal fields, as well as the Internal Audit Unit/Internal Audit with adequate human resource competencies and can work independently.

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## Result of Self Assessment report on Implementation of GCG

- Has appointed Public Accountant Office/KAP that meet the legal aspects and professional standards of public accountants to audit.
- Policies, Procedures/SOP and Product Manual constantly updated according to the provisions, which have been revised in line with the change of name from PT Bank Mutiara Tbk to PT Bank JTrust Indonesia Tbk, and continue to be equipped as needed.
- The authority has a policy on limit to Terminate Credit/BWMK individually or collegially in accordance with the functions, duties and responsibilities on each of the board of management.
- Already have guidelines to create Publication Financial Statements and transparent enough in financial publications, product information and usage information on bank customers' personal data, coverage on GCG implementation in accordance with the provisions.
- Improving the GCG implementation in IT infrastructure by 2015 by completing several projects in IT, i.e.: Project Internet Banking, Core Banking Upgrade to Bank Fusion Equation, RTGS SKN Gen 2 and Gen 2, Module PSAK 50/55, New HSM for ATM applications, Outsourcing DRC, PBX for the Head Office, Outsourcing email server, Website Renewal, as well as several other projects which are in the process of settlement, i.e. : Virtual account, MPN Gen2, Chip Card (NSICCS), HR System, IT Internal Risk Assessment, Active Directory, etc.
- Special Hire for some positions in middle and top management level to support business acceleration. For existing and new employees have implemented programs Banking Development Staff (BDS) and Banking Development Officer (BDO), in the context of employee training and skill enhancement. And also aims to a more selective recruitment. Also conducted consistent efforts related to the transformation of the branches in order to further improve the quality and quantity of human resources as needed as the spearhead of sales and service.
- Evaluation and improvement of infrastructure on organization as needed, by considering factors such as efficiency, competence/quality better performance and effective. In this case, conducted by the reduction on number of Division, Head of Division, Head of Section, but in practice can still cover both activity and jobs that exist, as follows: Head of Division from 21 to 14, Head of Section from 71 to 53, as well as Head of Section of 147 to 92.
- In August to December 2015, there has been done refreshment of APU-PPT to all branches mainly to the frontliners.

### **b. Governance Process:**

Governance process is the setting of duties, powers and responsibilities of units and bank officials in running the business and banking operations. Related to the implementation of governance process, can be delivered as the following things:

- Board of Commissioners and Board of Directors running duties, functions and responsibilities in a professional manner as it has been clearly stipulated in the Articles of Association of the Bank and the applicable regulations.

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### Result of Self Assessment report on Implementation of GCG

- *BOC monitoring/advising the Board of Directors, directing, monitoring and evaluating the implementation of the strategic policy, monitor and remind the Board of Directors to follow up all the findings from internal audit and external audit, and are not involved in decisions relating to operational activities.*
- *Committees under the Board of Commissioners and Committees under the Board of Directors already carried out duties and responsibilities optimally.*
- *In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors have never entered the realm of Conflict of Interest.*
- *Member of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers on bank, company and/or other institutions.*
- *In order to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) Board of Directors has been formed and appoint Members of the Committee and certain Working Unit who are responsible to the Board of Directors, i.e.: Division Compliance & Legal, Risk Management Unit (SKMR), Internal Audit, Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee, A LCO Committee and credit Committee which is a media/forums for Directors, Head of Division, as well as other concerned parties in the loan approval.*
- *Risk Management and Compliance unit as a second line of defense, as well as the SKAI/Internal Audit as the third line of defense has been working independently and guided by the provisions in force, which in practice is coordinated through a forum that has been established, namely "Governance risk, Compliance & Control (GRCC)".*
- *Bank constantly trying to reduce the offense to be better and as much as it is possible to avoid violations in an effort to build a Culture of Compliance.*
- *Operational activities of bank has been run independently according to applicable regulations, without the intervention of Shareholders or other interested parties (stakeholders).*
- *The appointment process of Public Accounting Firm (KAP Registered) in compliance with the applicable procedures and principles/GCG, perform their duties independently and transparency process in Publication Financial Report constantly accomplished and well presented.*
- *Implementation stages on HRC competency improvement in carrying out the functions and duties according to the policies and SOPs and statutory provisions in force, which gradually supported by adequate infrastructure system and continually improved as needed.*
- *The process of implementation on Risk Management has aligned with risk management policies and procedures, as well as the provision of funds to related parties and large exposures, the decision to run the appropriate policies and procedures.*
- *Seek to meet the target over bank's business strategic plan through policies that constantly adjusted by considering the competitive and economic conditions, as well as the prudential principle.*

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## **Result of Self Assessment report on Implementation of GCG**

- Completion of the financial ratios does not comply with provisions especially NPL ratio and B MPK. For the reduction of NPL has been done through the sale of troubled assets to PT. JTI (JTrust Investment Indonesia), while the Excess on BMPK which still exist today only left PT. Sinar Central Sandang (PT.SCS).
- Already conducted testing against the policy and SOP Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP), witnessed and reviewed by an independent party, and has equipped an alternative procedure for each SOP in each unit, and team formed, involving personnel from each working unit.
- Implementation of Compliance Monitoring Report (CRM) as an effort to minimize the sanctions and penalties on late reporting obligations to the regulator (OJK/BI).
- The Board of Commissioners and Board of Directors supervise and enforce the successful implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT).
- Task Force Team related "Treatment and prevention of Non Performing Loan (NPL)", which began to conduct meeting regularly to discuss the development of NPL, quality management and monitoring of NPL, the completion target of NPL that has been done, and discuss solutions that will be followed related to the completion and improvement of credit problems.
- Formed a "Four Eyes" working unit to review the feasibility of granting credit, i.e. related to the analysis of the feasibility and completeness of the financial statements, the completeness of the data/documents and business legality, appropriateness and adequacy of collateral as well as the legality, and so on.
- Improving the implementation of APU and PPT, as follows:
  - Settling mandatory data in core banking, coordinating with the IT Division.
  - Optimizing the use of AML Smart system by Branch.
  - Transfer of officers UKPN from Customer Service to the KBO / OO.
  - Monitoring on the completeness of data on a monthly basis against the mandatory on opening of a new CIF.

### **c. Governance Outcomes:**

Governance Outcomes are the result of the implementation of GCG both from the aspect of performance results and the ways/practices used to achieve these performance results. Related to governance outcomes can be delivered on the following:

- The Board of Commissioners supervise and provide recommendations and advice to the Board of Directors in an effort to improve the performance and values of banks by underlining the prudential principle, through the meeting of the Board of Directors and Commissioners (Radirkom and Meetings Review Decision R KK), Meeting of the Committee under the Board of Commissioners and by mail to the Management.
- Shareholders JTrust Co. has been pursuing its commitment to carry out the capital increase gradually.
- Directors have been responsible for their performance in carried out duties to the



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

### Result of Self Assessment report on Implementation of GCG

Shareholders/PS through the General Meeting of Shareholders / RUPS, maintain communication throughout the organization related to the vision and mission of the company.

- The committees provide recommendations and advice to the Board of Commissioners related to problems in internal control, risk management and other beneficial things.
- The findings from Internal Audit Unit/SKAI and the external auditors have largely been resolved, and the continued to monitored on an ongoing basis on the follow-up to the completion DMTL to the related units.
- Compliance Report, TKB Report biannually submitted to the Regulator with coverage according to applicable regulations, and submitted quarterly risk profile report to the Regulator according to applicable regulations, whereas monthly risk profile studies internally performed by Risk Management Unit (SKMR) and reported to the Board of Directors, and also presented to the Commissioner and be discussed at the meeting of the Risk Monitoring Committee (KPR).
- Efforts to comply with the quantity and quality/competence of human resources, as well as phase in in fulfilling policies and SOP, also systems and supporting infrastructure, impact on the ongoing activities of the operational and adequate business in accordance with provisions, which is run by the prudential principle.
- Provision of funds to related parties and large exposures have been carried out based on BMPK, where the administration and disbursement of loans take into account the bank's capital.
- Information products and services as well as other information, i.e: the prime lending rate, Guarantee Interest Rate Announcement LPS delivered to customers in a transparent manner both written and oral.
- Completion Employees Team (TPK) is done intensively in following-up investigations and inquiries of fraud issues conducted by employee as part of a moral enforcement, and intensify the implementation of the Anti Fraud Policy includes whistleblower.
- Bank has implemented the relevant provisions of Customer Complaints Management and its reporting to the Regulator.
- Implementation of APU and PPT supported by AML SMART system are constantly being developed to be more integrated with core banking system for the purposes of monitoring process transactions, completeness of information over customer's profile (CIF), measurement of customer profiles based on risk, as well as reporting to the regulator in accordance with the provisions and legislation in force,
- With the existence of CRM, awareness of each unit related to the submission of the report showed an increase, where the submission of the report to the OJK in 2015 offense ( fines/penalties) decreased compared to 2014, both in quantity and number/value of the fine, as follows:

(in thousands)

**PERIOD**

**LATE/DID NOT  
SUBMIT REPORT**

**FINES OVER  
CORRECTION/MISS IN**

**WARNING LETTER**

**Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

**Result of Self Assessment report on Implementation of GCG**

<b>REPORTING</b>			
<u>2014:</u>			
-NUMBER OF CASES	14	5	5
-TOTAL FINES	Rp.343.130	Rp.262	-
<u>2015:</u>			
-NUMBER OF CASES	7	5	2
-TOTAL FINES	Rp. 24.174	Rp.15.096	-

\*) Data based on internal data recap on confirmation fines from BI/OJK and based on the confirmation letter from OJK No. S-24/PB/311/2016 dated March 31, 2016 related to the number of violations and fines in 2015.

- Financial ratios in 2014 and 2015 which are have not meet the requirement related to the overrun on BMPK and NPL, where in 2015 for the NPL is appropriate according to the provision and for BMPK, progress and completion is quite significant, as stated clearly below:

**BMPK Exceedances**

*(in million Rupiah)*

<b>Period</b>	<b>Debtor's Name</b>	<b>Total Exceedances</b>
<u>2014</u> <i>(per 31 December)</i>	<u>Credit :</u> 1. PT Sinar Central Sandang	153.766
	<u>L/C</u> 1. PT Sakti Persada Raya	31.506
	2. PT Damar Kristal Mas	6.177
	<u>Securities :</u> 1. Nomura Bank Int'l PLC London	261.927
	2. JP Morgan	309.625
<u>2015</u> <i>(per 31 December)</i>	<u>Credit :</u> 1. PT Sinar Central Sandang	137.350
	2. JTrust Investment Indonesia	9.507

**NPL Comparison for 2014 & 2015**

	<b>NPL- 2014</b>	<b>NPL- 2015</b>
<b>NPL GROSS</b>	12,24 %	3,73 %
<b>NPL NETT</b>	6,35 %	2,56 %

- Action Plan on BMPK exceedances on behalf of JTII with settlement commitment through the loan installments in January 2016 have been met.
- To resolve NPL, the solutions is to sell the problematic loans to JTII and has received approval from the OJK.

**B. Weaknesses Factors:**

**a. Governance Structure**

- Committee under the Commissioner are: Nomination and Remuneration Committee, while currently the Chairman of the committee remain "vacant", but

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## **Result of Self Assessment report on Implementation of GCG**

at the Annual General Meeting (RUPS) (June 2016) will be appointed an Independent Commissioner, so that the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee can be fulfilled.

- Adequacy and competence of Human Resources/HR still needs to be fulfilled and improved, therefore Bank will follow up/finish things as follows:
  - Applying meritocracy system with the help of advisors.
  - Hiring employees with a good competence.
  - Restructuring employees over the closure of unprofitable branches.

### **b. Governance Process**

- Completeness and correctness of the data/credit documents still need to be improved. NPL and AYDA have been transferred/sold to JTII, so that the Bank can focus more on performing loans. For this purpose the Bank has performed actions as follows:
  - Implementing four eyes principle,
  - Recruiting new employees with a good competence in credit.
  - Forming Task Force related to the handling and prevention of non-performing loans (NPL).

### **c. Governance Outcome**

- There are compliance ratios that do not comply with BMPK exceedances.
- For this purpose, the additional capital can not be done because of the limitation by the OJK regulations, so that the Bank will deal with it to find another solution, and will strive to improve profitability by increasing interest rates of PT. Sinar Central Sandang (PT. SCS).
- There are sanctions over warning/reprimand, administrative and fines to the process and submission of Bank Routine Reports to the Regulator, where in the second half of 2015 there are penalties and fines from the Financial Services Authority. Sanctions and fines, are caused by:
  - Delays on submitting Commercial Bank Periodic Reports (LBBU) and Commercial Bank Report (LBU).
  - Data migration from Equation to Vision Bank.
  - Error on code transactions, as well as the delay in announcing the disclosure of information related to affiliate transactions.
- The existence of Monitoring Follow-Up List (DMTL) in 2015 over the audit results from OJK still unresolved. For DMTL OJK test results in January 2015, the condition up to December 2015 had completed about 96%, and the rest remain in process of completion.
- There are two (2) cases of fraud (Internal Fraud) that occurred in 2014 and was revealed in 2015, the incidence of fraud in the Working Unit of Consumer Loan Division, and in Micro Kiosks in Jatinegara, where in the second semester (August) 2015 Bank had performed settlement through the legal process by reporting the employees involved in fraud to authorities/police. While in 2015, there is still one (1) case of fraud (Internal Fraud), the incidence of fraud in Working Unit of Retail

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## **Result of Self Assessment report on Implementation of GCG**

*Business Division. Investigations have been carried out by the Anti-Fraud Division, and action against the perpetrators is excluded from the bank.*

### **Conclusion**

*Based on analysis from Strengths and Weaknesses on 11 Factors of Self Assessment in GCG implementation, and regarding to evaluation on the quality of risk management implementation in risk profile bank, as well as some improvements related to the implementation of GCG implementation which had restores the status of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as "Under Normal Supervision", then the self-assessment on Implementation of GCG position in December 2015 ranked as "3 (Good)".*

## **Report on the GCG Implementation Action Plan**

In respect of its Self Assessment Implementation of GCG results, PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the Year 2015 in a rating 3 (Good), in compliance to Circular Letter No.15 / 15 / DPNP dated April 29 2013 regarding the implementation of GCG for Commercial Banks, and to improve the GCG ratings categories with better ranked GCG, we disclose the GCG implementation Action Plan for improvement of 11 factors / pillars on GCG implementation assessment as follows:

No.	Significant/Main Issue	Improvement Steps / Action Plan	Due Date Target	Obstacle/Challenge (if any)

## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

1.	Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	****	****	****
2.	Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors	****	****	****
3.	Completeness and Implementation of Committee's tasks. From November 2014 to present the position of Chairman of the Remuneration and Nomination Committee is temporarily vacant, because only one Independent Commissioner effective, which already serves as the Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Risk Oversight Committee.	On the results of the Annual General Meeting dated June 30, 2016 has been designated another two (2) members of the Independent Commissioner, 1 (one) person has passed the Fit and Proper Test on September 28, 2016 and the 1 (one) is still in wait for scheduling by the FSA.	If all the Independent Commissioner has already passed the Fit and Proper Test of the FSA, then either of them is to hold position of Chairman of the Remuneration and Nomination Committee.	****
4.	Conflict of Interest Handling	****	****	****



## Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

	<p>Is to be resolved by organic capital growth, which is hard to be accomplished before December 2015 ( Deadline for issue resolvment for Bank in Intensive Supervision) and had negative impact on Bank Soundness assessment.</p> <p>Meanwhile, loan facility given to debtor is in foreign exchange that leads to potentially higher Legal Lending Limit exceedance and/or inability to be resolved within Bank's proposed time limit. (2<sup>nd</sup> Quarter 2016).</p> <p>B. Balloon Payment restructurization with interests &lt; COF.</p> <p>Due to decreasing debtor payment ability, Bank undergo restructurization which has been reviewed as not optimal to minimize loan risk due to debtor's loan facility is restructured with grace period/ balloon payment beneath Cost of Fund (COF).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restructured Time Loan 1 with 7,00% interest, loan limit Rp. 57.904 Million and 9,94% COF.</li> <li>• Restructured Time Loan 2 with 2,50% interest, loan limit USD. 1,4 Million and 2,54% COF.</li> <li>• Restructured Time Loan 3 with 2,00% interest, loan limit USD. 26.5 Million and 2,25% COF with main installment start on March 2018.</li> </ul>	<p>2.Plans for additional capital from Controlling Shareholder, weighing simulated capital needs for current and future business.</p>		
10.	Bank Financial and non financial transparency, GCG Implementation Report, and Internal Report.	****	****	****

# Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

---

11.	Bank Strategic Plan	****	****	****
-----	---------------------	------	------	------

Thus we submit this Revision of Report on Implementation of Good Corporate Governance 2015, we are thankful for the attention given by Indonesia Financial Services Authority.

Jakarta, October 20 2016.  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Signed

Ahmad Fajar  
President Director

Benny Luhur  
Independent Commissioner